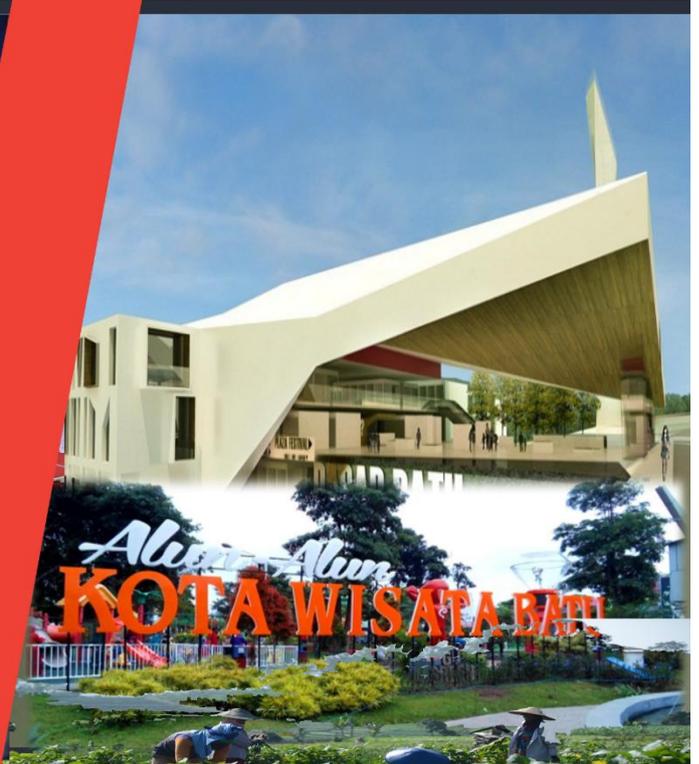




PEMERINTAH KOTA BATU



Dra. Hj. Dewanti Rumpoko, M.Si
Wali Kota Batu

H. Punjul Santoso, M.M.
Wakil Wali Kota Batu

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) Kota Batu Tahun 2017 - 2022

DAFTAR ISI

Judul	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1 PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-7
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-12
1.4. Maksud dan Tujuan	I-14
1.5. Sistematika Penulisan	I-15
BAB 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1. Kondisi Umum Geografis	II-1
2.1.2. Kondisi Umum Demografi	II-15
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-25
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-25
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat	II-39
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga	II-43
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II-47
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib	II-48
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan	II-118
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-145
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-145
2.4.2. Fokus Wilayah/Infrastruktur	II-148
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi	II-154
BAB 3 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2013-2017	III-19
3.3. Kerangka Pendanaan	III-28
BAB 4 ISU-ISU STRATEGIS	IV-1
4.1. Permasalahan Pembangunan	IV-4
4.2. Isu Strategis	IV-41
4.2.1. Menjaga stabilitas kondisi sosial politik, kerukunan antar umat beragama, pelestarian budaya dan nilai kearifan lokal	IV-42
4.2.2. Peningkatan kualitas daya saing SDM daerah, pengendalian kuantitas penduduk dan perluasan	IV-44

Judul	Halaman
lapangan kerja	
4.2.3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah berwawasan lingkungan berbasis ciri khas dan potensi unggulan daerah	IV-46
4.2.4. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berorientasi pada konsep hijau	IV-47
4.2.5. Pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik	IV-49
BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1. Visi Pembangunan Daerah	V-1
5.2. Misi Pembangunan Daerah	V-5
5.3. Tujuan dan Sasaran	V-10
BAB 6 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	
6.1. Strategi	VI-1
6.2 Arah Kebijakan	VI-8
BAB 7 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
BAB 8 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VIII-1
BAB 9 PENUTUP	XI-1

DAFTAR TABEL

Judul	Halaman
Tabel 2.1. Luas Kecamatan berdasar Jenis Tanah (dalam Ha)	II-9
Tabel 2.2. Rata- rata Suhu Udara dan Curah Hujan Kota Batu, 2016	II-11
Tabel 2.3. Kondisi dan penggunaan lahan di Kota Batu Tahun 2017	II-13
Tabel 2.4. Kejadian Bencana Alam menurut Jenis Kejadian di Kota Batu, 2016	II-14
Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Kota Batu dari Tahun 2012-2017	II-15
Tabel 2.6. Sebaran Penduduk Kota Batu Berdasarkan Wilayah Kecamatan pada Tahun 2016	II-17
Tabel 2.7. Sebaran Penduduk Kota Batu Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2012-2016	II-18
Tabel 2.8. Angka Beban Ketergantungan Penduduk Kota Batu Berdasarkan Kelompok Usia Produktif dan Non Produktif Tahun 2012-2016	II-19
Tabel 2.9. Penduduk Kota Batu Berdasarkan Kepesertaan KB dan Pasangan Usia Subur Tahun 2012 - 2016	II-19
Tabel 2.10. Penduduk Kota Batu Usia 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Kegiatan Tahun 2012 - 2016	II-22
Tabel 2.11. Penduduk Kota Batu yang Bekerja Berdasarkan Status Pekerjaan Utama Tahun 2012-2016	II-24
Tabel 2.12. Data Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-26
Tabel 2.13. Prosentase Penduduk Miskin Terhadap Jumlah Penduduk di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2012 – 2015	II-28
Tabel 2.14. Perkembangan PDRB Tahun Dasar 2010 Kota Batu Periode Tahun 2012 – 2016	II-31
Tabel 2.15. Distribusi Presentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Batu 2012-2016	II-33
Tabel 2.16. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Kota Batu Tahun 2013-2016 (Persen)	II-35
Tabel 2.17. Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2012-2016	II-37
Tabel 2.18. Inflasi Kota Batu 2012-2016 dibandingkan dengan Jawa Timur dan Nasional	II-39
Tabel 2.19. Indeks Pembangunan Manusia Kota Batu dan Komponen Indikatornya Selama Tahun 2013-2017	II-40
Tabel 2.20. Indeks Pembangunan Manusia Kota Batu, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2013-2017	II-40
Tabel 2.21. Indikator layanan Pendidikan Kota Batu Tahun 2012-2016	II-48
Tabel 2.22. Indikator Layanan Pendidikan Kota Batu Tahun 2012-2017	II-51

Tabel 2.23. Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kota Batu Tahun 2012-2016	II-54
Tabel 2.24. Angka Kematian Bayi & Ibu Melahirkan Tahun 2012-2017	II-55
Tabel 2.25. Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2012-2017	II-59
Tabel 2.26. Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2012-2017	II-74
Tabel 2.27. Data Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (KK, KTP, dan Akta Catatan Sipil)	II-89
Tabel 2.28. Penduduk Kota Batu Berdasarkan Kepesertaan KB dan Pasangan Usia Subur Tahun 2012 – 2016	II-95
Tabel 2.29. Indikator Perhubungan Tahun 2012-2016	II-98
Tabel 2.30. Kondisi Koperasi di Kota Batu Per-Tahun 2016	II-102
Tabel 2.31. Data Perkembangan Pertanian Organik di Kota Batu Tahun 2012-2016	II-118
Tabel. 2.32 Indikator Pertanian Tahun 2012-2017	II-123
Tabel 2.33. Penanaman Pohon dan Penghijauan Tahun 2016	II-125
Tabel 2.34. Produksi Hasil Ternak dan Unggas Tahun 2012-2017	II-136
Tabel 2.35. Perkembangan Produksi Perikanan dan Peternakan di Kota Batu	II-136
Tabel 2.36. Data Perikanan Tahun 2012-2016	II-138
Tabel 2.37. Statistik Industri Besar dan Sedang Tahun 2012-2016	II-145
Tabel 2.38. Kondisi Sarana Transpotasi di Kota Batu Tahun 2012-2015	II-149
Tabel 2.39. Jalan Berdasarkan Jenis Permukaannya Tahun 2012- 2015	II-152
Tabel 2.40. Jalan Berdasarkan Kondisi Fisiknya Tahun 2012-2015	II-152
Tabel 2.41. Capaian Indikator Cakupan Irigasi Tahun 2012- 2015	II-153
Tabel 3.1. Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2013 s/d Tahun 2017 Kota Batu	III-4
Tabel 3.2. Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Batu Tahun 2013 sampai 2017	III-13
Tabel 3.3. Perbandingan Belanja Pegawai dengan Total Belanja Kota Batu	III-21
Tabel 3.4. Defisit Riil Anggaran Kota Batu	III-24
Tabel 3.5. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Batu	III-25
Tabel 3.6. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Batu	III-27
Tabel 3.7. Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018 s/d Tahun 2022 Kota Batu	III-30
Tabel 3.8. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Batu	III-39
Tabel 3.8. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Batu	III-35
Tabel 4.1. Telaah Isu Internasional, Nasional, Provinsi dan Daerah	IV-2
Tabel 4.2. Persentase Penduduk Menurut Pendidikan Tertinggi yang	IV-6

Ditamatkan Tahun 2016

Tabel 4.3. Keadaan Pemukiman Kota Batu	IV-11
Tabel 4.4. Jalan Berdasarkan Kondisi Fisiknya di Kota Batu	IV-13
Tabel 4.5. Jenis Kriminalitas Kota Batu Tahun 2016	IV-15
Tabel 4.6. Penduduk Kota Batu Usia 15 Tahun ke Atas	IV-19
Tabel 4.7. Banyaknya Kecelakaan dan Korban Lalu Lintas di Kota Batu	IV-32
Tabel 4.8. Produksi Tanaman Pangan Utama	IV-36
Tabel 4.9. Produksi Tanaman Hortikultura Kota Batu	IV-37
Tabel 4.10. Jumlah Tamu Hotel dan Kunjungan Wisata Kota Batu	IV-40
Tabel 5.1. Perumusan Penjelasan Visi Kota Batu 2018-2022	V-2
Tabel 5.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Batu	V-16
Tabel 6.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi	VI-5
Tabel 6.2. Arah Kebijakan Pembangunan	VI-10
Tabel 6.3. Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kota Batu	VI-11
Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2022 Kota Batu	VII-2
Tabel 7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2018-2022 Kota Batu	VII-3
Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Batu	VIII-2
Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Batu	VIII-5

DAFTAR GAMBAR

Judul	Halaman
Gambar 1.1. Tahapan RPJPD Kota Batu	I-4
Gambar 1.2. Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah, RTRW Privinsi/Kota.	I-14
Gambar 2.1. Wilayah Administratif Kota Batu	II-4
Gambar 2.2. Nilai dan Laju Investasi Daerah Tahun 2012-2016	II-36
Gambar 2.3. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Batu, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2012-2016	II-38
Gambar 2.4. Grafik Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kota Batu, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2013-2017	II-40
Gambar 2.5. Angka Kematian Bayi dan Ibu Melahirkan Tahun 2012- 2016	II-56
Gambar 2.6. Nilai dan Laju Investasi Daerah Tahun 2012-2016	II-104
Gambar 2.7. Grafik Jumlah Hotel, Kamar dan Tempat Tidur Tahun 2012-2016	II-134
Gambar 2.8. Persentase Penduduk Kota Batu menurut pengeluaran per kapita 2013-2014	II-146
Gambar 2.9. Persentase Penduduk Kota Batu menurut pengeluaran per kapita 2013-2014	II-147
Gambar 2.10. Persentase pengeluaran rata-rata untuk makanan dan non makanan di Kota Batu 2014	II-148
Gambar 4.1. Angka Partisipasi Murni di Kota Batu	IV-5
Gambar 4.2. Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kota Batu	IV-8
Gambar 4.3. Jumlah Kasus Penyakit di Kota Batu 2016	IV-10
Gambar 4.4. Jumlah Bencana di Kota Batu tahun 2016	IV-18
Gambar 4.5. Persentase Realisasi Pemberdayaan Perempuan	IV-23
Gambar 4.6 Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Lingkungan	IV-26
Gambar 4.7. Jumlah Penduduk Miskin di Kota Batu	IV-30
Gambar 4.8. Jumlah Koperasi di Kota Batu	IV-33
Gambar 4.9. Produksi Tanaman Pangan Utama Kota Batu	IV-36
Gambar 6.1. Formulasi Strategi	VI-3



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Batu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu. Atas dasar tersebut maka lahirlah Kota Batu menjadi daerah otonomi baru di Provinsi Jawa Timur, sebagai kota yang terbilang masih muda, dimana saat ini baru memasuki usia ke 16 tahun. Kendati demikian telah banyak capaian kemajuan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini. Terutama dalam lima tahun terakhir (2012-2016) dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Batu meningkat secara signifikan mencapai 73,57 point, angka ini di atas Nilai IPM Provinsi Jawa Timur maupun Nasional, ditopang dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita berada pada angka rata-rata mencapai 6,95 persen, angka PDRB juga meningkat, Hal ini didukung dengan nilai investasi terus meningkat pada tahun 2016 saja mencapai hampir Rp. 1,885 Triliun atau meningkat 13,8% dibanding tahun sebelumnya. Begitu juga kondisi PDRB per kapita per tahun mencapai 5,3 Juta per bulan di tahun 2016.

Meskipun demikian, angka kemiskinan, pengangguran dan rasio gini di Kota Batu terjadi fluktuasi. Fenomena ini menjadi pekerjaan rumah bagi Kota Batu kedepannya. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Batu membutuhkan perencanaan yang baik agar dapat mewujudkan cita-cita serta tujuan, agar terjadi perubahan bagi masyarakat Kota Batu dari kondisi saat ini menjadi kondisi yang dicita-citakan tersebut.

Untuk mewujudkan pembangunan yang baik Kota Batu menggunakan konsep SMART-C (*Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time-bounded, and Continuously Improve*).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat (12) telah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Pasal 260 ayat (1 & 2) Undang-Undang tersebut juga menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional dengan tujuan agar dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Gubernur Jawa Timur Bapak Dr. H. Soekarwo, SH., M.Hum. telah melantik pasangan Walikota dan Wakil Walikota Batu terpilih masa bakti periode 2017-2022, atas nama Dra. Hj. Dewanti Rumpoko, M.Si selaku Walikota Batu dan H. Punjul Santoso, SH.,MM selaku Wakil Walikota Batu pada tanggal 27 Desember Tahun 2017.

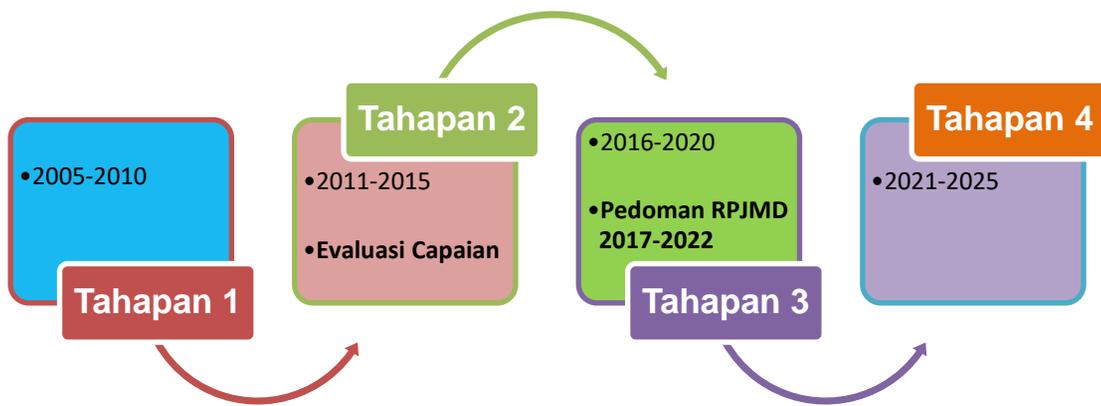
Sehingga Pemerintah Daerah Kota Batu berkewajiban untuk membuat dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2), menyatakan bahwa yang dimaksud RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah (PD), lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dokumen RPJMD merupakan pengejawantahan dari janji-janji politik yang tertuang dalam Visi Misi Kepala Daerah Terpilih, karena Visi Misi tersebut didasarkan penjaringan secara intensif dari aspirasi masyarakat sebagai sasaran utama pembangunan, sebagai wujud penggambaran keinginan dan harapan masyarakat, maka penyusunan pembangunan menjadi lebih terarah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat (Sjafrizal: 2016). Kemudian hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, isu-isu strategis serta potensi-potensi unggulan Kota Batu yang harus diakomodir dalam RPJMD Kota Batu. Keseluruhan hal tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Penyusunan RPJMD Kota Batu Tahun 2017-2022 disusun dengan berdasarkan posisi RPJMD dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batu Tahun 2005-2025.



Gambar 1.1
Tahapan RPJPD Kota Batu

Didasarkan hal tersebut, posisi RPJMD Kota Batu Tahun 2017-2022 masuk dalam tahap III (ketiga) RPJPD Kota Batu dengan penekanan dan prioritas pembangunan yaitu penguatan dan pendayagunaan kapasitas prasarana dan sarana, pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi unggulan, serta meningkatkan daya saing keunggulan daerah. Selain itu, RPJMD disusun harus memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Propinsi Jawa Timur, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah, kondisi lingkungan strategis daerah, potensi daerah, isu-isu strategis baik internasional, nasional maupun lokal, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, bahwa dalam menyusun RPJMD menggunakan 4 (empat) pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan politis. Dimaksud dengan pendekatan politis adalah bagaimana menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah pada dasarnya merupakan bagian terpenting di dalam proses penyusunan rencana program. Hal ini terjadi karena rakyat pemilih menentukan pilihannya didasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah saat kampanye ke dalam RPJMD;
2. Pendekatan teknokratik. Pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan, dengan tujuan untuk mendapatkan aspirasi, dan menciptakan rasa memiliki;
4. Pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi,

hingga nasional.

Pendekatan-pendekatan perencanaan pembangunan tersebut telah dilaksanakan secara sistematis dan konsisten. Dimana pendekatan teknokratis dilaksanakan berdasarkan kajian ilmiah dan bukti fisik, data dan informasi yang akurat kondisi *existing* Kota Batu. Pendekatan partisipatif dilakukan melalui forum konsultasi publik sehingga dengan mempertimbangkan relevansi, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, keterwakilan seluruh segmen masyarakat, serta terciptanya konsensus. Pendekatan *top down* dan *bottom up* telah dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD dan melalui forum konsultasi publik. Terakhir, Pendekatan politis dilakukan melalui pembahasan di DPRD Kota Batu, yang mengacu pada ketentuan Pasal 69 ayat (1,) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017, yaitu: Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik. Sedangkan penetapan RPJMD menurut Pasal 70 ayat (2) Permen tersebut, ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati/Walikota dilantik.

Selain itu, agar RPJMD memiliki kekuatan yang baik maka proses penyusunannya harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel. Untuk itu, sebelum dilakukan pengkajian terhadap indikator-indikator perkembangan di daerah, di antaranya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks gini,

indeks kebahagiaan, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan berbagai indikator lainnya.

Sedangkan keterkaitan RPJMD dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan RPJMD Kota Batu ini, terdapat sejumlah peraturan yang berskala Nasional maupun lokal yang secara langsung terkait dengan penyusunan RPJMD dan digunakan sebagai rujukan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Anti Diskriminasi terhadap Perempuan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Penataan Ruang;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
23. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pengurusutamaan Gender di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Pendagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unis Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;

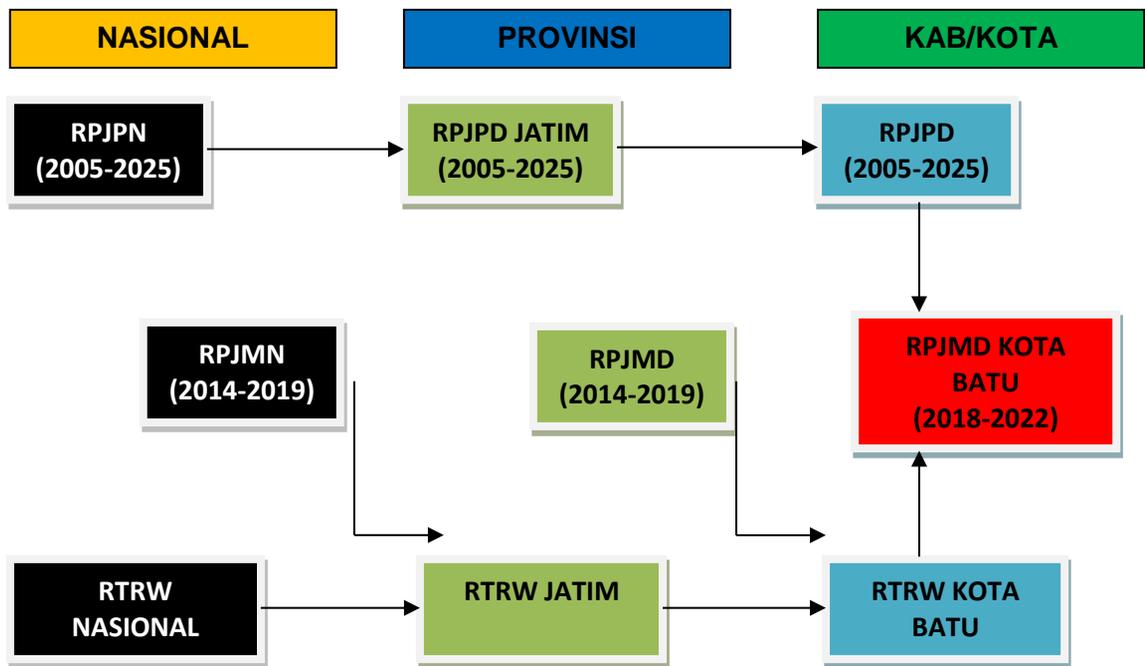
34. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
35. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030;
36. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batu Tahun 2005-2025;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang 2016-2021;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto 2016-2021;
40. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batu.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun 2017-2022 merupakan bagian yang terintegrasi dengan

perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur. Penyusunan RPJMD Kota Batu Tahun 2017-2022 berpedoman pada RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Timur, RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kota Batu serta mempertimbangkan dokumen perencanaan daerah sekitar Kota Batu seperti Kabupaten Malang dan Kabupaten Mojokerto terkait kebijakan kewilayahan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan daerah untuk menyelaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Di samping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain.

Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antardaerah, antarwaktu, antarruang, dan antarfungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat di lihat dari gambar dibawah ini.



Gambar 1.2.
Hubungan RPJMD Dengan Dokumen
Perencanaan Lain

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

RPJMD Kota Batu Tahun 2017-2022 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Batu sesuai dengan dengan visi, misi, dan program pembangunan Kepala Daerah terpilih masa bakti 2017-2022, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak, dengan mengacu kepada RPJMD Kota Batu 2017-2022.

1.4.2. Tujuan

Tujuan disusunnya dokumen RPJMD Kota Batu ini antara lain:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima tahun) kedepan. Sehingga dokumen ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2017-2022;
2. Merumuskan pedoman pengelolaan terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan pembangunan daerah tahun 2017-2022;
3. Merumuskan dan menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2017-2022.
4. Menetapkan indikator kinerja sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja tahunan di lingkungan Pemerintah Kota Batu

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan;
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen;
- 1.4. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.5. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi;
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum; dan
- 2.4. Aspek Daya Saing.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
 - 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD;
 - 3.1.2. Neraca Daerah.
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
 - 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran;
 - 3.2.2. Analisis Pembiayaan.
- 3.3. Kerangka Pendanaan
 - 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja;
 - 3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan.

BAB VI PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

- 4.1. Permasalahan Pembangunan;
- 4.2. Isu strategis;

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

- 5.1. Visi;
- 5.1. Misi;
- 5.2. Tujuan dan Sasaran.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

- 6.1. Strategi;
- 6.2. Arah Kebijakan.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKA DAERAH

- 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah;
- 7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

- 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

BAB IX PENUTUP



BAB 2

Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini memberikan gambaran umum kondisi daerah Kota Batu berdasarkan capaian hingga tahun 2017, meliputi: 1) aspek geografi dan demografi; 2) aspek kesejahteraan masyarakat; 3) aspek pelayanan umum; dan 4) aspek daya saing daerah; untuk memberikan gambaran tentang potensi dasar yang dimiliki oleh Kota Batu guna menjadi sumber daya pokok bagi pengembangan di masa depan, berikut kelemahan-kelemahan yang harus diatasi. Dengan demikian, apa yang dibahas di bab ini merupakan fondasi tentang perencanaan pembangunan di Kota Batu lima tahun ke depan.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Kondisi Umum Geografis

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah administrasi Kota Batu adalah 199,09 Km² atau 19.908,72 hektar. Kurang lebih 0,42 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Wilayah seluas ini terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Batu

- a. Luas wilayah Kecamatan Batu: 45,46 Km² (22,83% dari total wilayah Kota Batu)
- b. Jumlah Desa/Kelurahan: 4 kelurahan dan 4 desa
- c. Jumlah RW/RT: 96 RW dan 453 RT.

2. Kecamatan Junrejo

- a. Luas wilayah Kecamatan Batu: 25,65 Km² (12,88% dari total wilayah Kota Batu)
- b. Jumlah Desa/Kelurahan: 1 kelurahan dan 6 desa
- c. Jumlah RW/RT: 59 RW dan 240 RT.

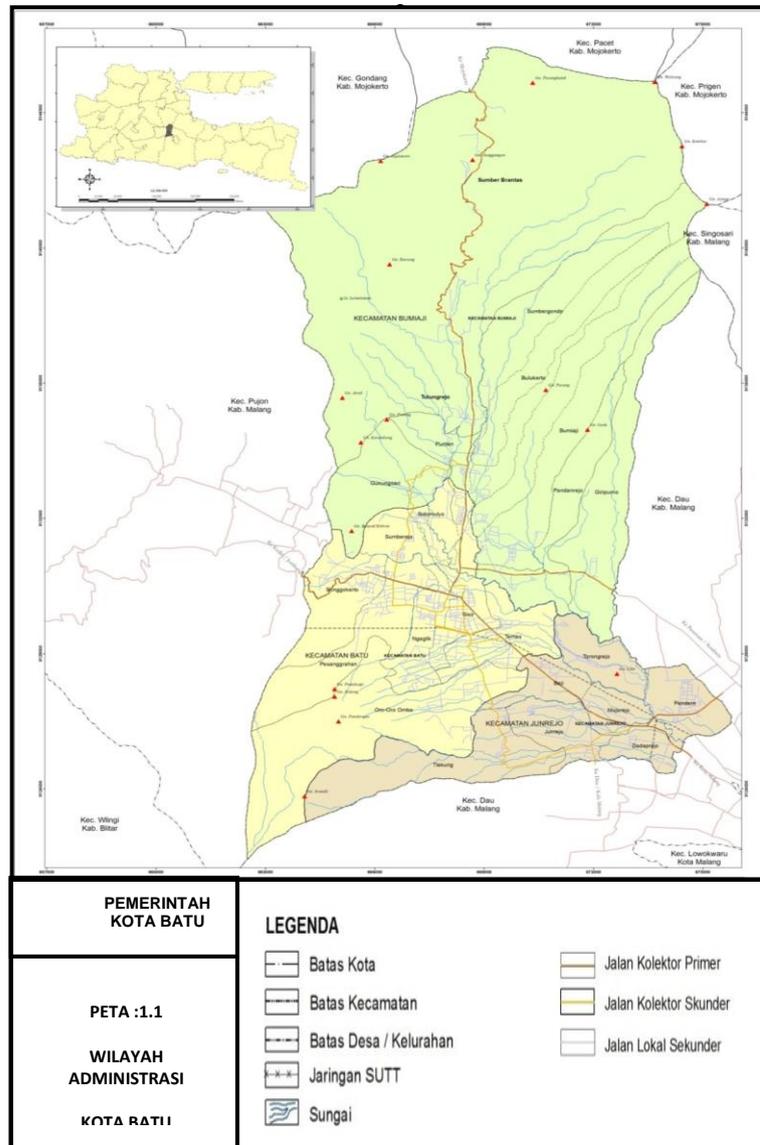
3. Kecamatan Bumiaji

- a. Luas wilayah Kecamatan Batu: 127,09 Km² (64,28% dari total wilayah Kota Batu)
- b. Jumlah Desa/Kelurahan: 9 desa
- c. Jumlah RW/RT: 82 RW dan 429 RT

Adapun batas wilayah administrasi Kota Batu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, dan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan

- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
- c. Sebelah Barat: Kecamatan Pujon Kabupaten Malang
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang.



Gambar 2.1. Wilayah Administratif Kota Batu
 Sumber : Peta RTRW Kota Batu 2010-2030

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Ditinjau dari letak astronomi, wilayah Kota Batu berdasarkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2012 tentang Batas Daerah

Kabupaten Malang dengan Kota Batu Provinsi Jawa Timur terletak diantara 112° 35'22.31152” Bujur Timur (BT) dan 7°45'51.61362” Lintang Selatan (LS). Secara Geostrategis, Kota Batu memiliki posisi yang cukup strategis bagi pengembangan potensi daerah. Kota Batu berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, terletak sekitar 101 km di sebelah timur Kota Surabaya, dan sekitar 15 km di sebelah barat Kota Malang, berada di jalur Malang-Kediri atau Malang-Jombang. Wilayah administratif Kota Batu dikelilingi oleh Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Pasuruan. Kota Batu mempunyai peran yang sangat penting untuk menggerakkan roda perekonomian, khususnya dalam skala wilayah Malang Raya, dan umumnya dalam skala wilayah Provinsi Jawa Timur, yaitu sebagai sentra pariwisata Jawa Timur.

2.1.1.3. Topografi

Wilayah Kota Batu merupakan kawasan pegunungan dan perbukitan dengan iklim yang sejuk, dengan Kondisi topografi Kota Batu dalam konteks kemiringan lahan berada pada kemiringan 0%->40%. Namun demikian, sehubungan dengan kontur Kota Batu yang merupakan perbukitan dan pegunungan, maka lebih banyak wilayah berada pada kemiringan 25%-40% dan > 40%. Rincian mengenai kemiringan ini adalah:

- a. 0 – 8 % seluas 2.207,21 Ha.
- b. 8 – 15 % seluas 2.223,73 Ha.
- c. 15-25 % seluas 1.799,37 Ha.
- d. 25 – 40 % seluas 4.529,85 Ha.
- e. > 40 % seluas 4.493, 33 Ha.

Kondisi topografi Kota Batu dalam konteks ketinggian lahan berada pada ketinggian 600 DPL- >3.000 DPL. Secara umum wilayah Kota Batu merupakan daerah perbukitan dan pegunungan. Tiga gunung yang terdapat dalam wilayah Kota Batu, yaitu Gunung Panderman (2.010 meter), Gunung Welirang (3.156 meter), dan Gunung Arjuno (3.339 meter). Berdasarkan ketinggiannya, Kota Batu diklasifikasikan ke dalam 6 (enam) kelas, yaitu:

1. 600-1.000 MDPL seluas 6.019,21 Ha, meliputi Kecamatan Batu (terutama Desa Sidomulyo secara keseluruhan, sebagian besar Kelurahan Temas, Kelurahan Sisir, Kelurahan Ngaglik dan Desa Sumberejo serta sebagian kecil Desa Oro-oro Ombo, Desa Pesanggrahan dan Kelurahan Songgokerto), Kecamatan Junrejo (terutama Desa Junrejo, Torongrejo, Pendem, Beji, Mojorejo, Dadaprejo dan sebagian Desa Tlekung), dan Kecamatan Bumiaji (terutama pada

sebagian kecil desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Bumiaji).

2. 1.000-1.500 MDPL seluas 6.493,64 Ha, meliputi sebagian besar desa-desa yang ada di Kecamatan Bumiaji dan sebagian dari desa-desa yang ada di Kecamatan Batu (terutama wilayah Kelurahan Songgokerto, Desa Oro-oro Ombo dan Desa Pesanggrahan) serta di sebagian kecil Desa Tlekung yang berada di wilayah Kecamatan Junrejo.
3. 1.500-2.000 MDPL seluas 4.820,40 Ha meliputi sebagian kecil Desa Tlekung Kecamatan Junrejo. Selain itu juga terdapat di sebagian kecil Desa Oro-oro Ombo dan Desa Pesanggrahan, terutama di sekitar kawasan Gunung Panderman, Gunung Bokong serta Gunung Punuksari. Sedangkan di wilayah Kecamatan Bumiaji, seluruh bagian desa mempunyai ketinggian ini, terutama kawasan-kawasan di sekitar Gunung Rawung, Gunung Tunggangan, Gunung Pusungkutuk.
4. 2.000-2.500 MDPL seluas 1.789,91 Ha. Wilayah yang termasuk dalam ketinggian ini relatif sedikit, yaitu di sekitar Gunung Srandil serta diujung Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu yang berbatasan dengan Kecamatan Wagir. Untuk Kecamatan Bumiaji, ketinggian ini berada di sekitar

Gunung Anjasmoro dan pada sebagian kecil di wilayah Desa Giripurno, Desa Bumiaji, Desa sumbergondo dan Desa Torongrejo.

5. 2.500-3.000 MDPL seluas 707,32 Ha. Wilayah yang termasuk dalam ketinggian ini adalah sebagian kecil desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Bumiaji, terutama pada wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Kecamatan Prigen.

6. >3.000 MDPL seluas 78,29 Ha. Wilayah yang termasuk dalam ketinggian ini adalah pada beberapa desa di Kecamatan Bumiaji, khususnya di sekitar Gunung Arjuno (Desa sumbergondo), Gunung Kembar dan Gunung Wlirang (Desa Tulungrejo).

2.1.1.4. Geologi

Kondisi geologi Kota Batu terkait dengan struktur dan karakteristik tanah, serta potensinya sangat dipengaruhi oleh jenis batuan pembentuknya. Sebagian besar tanah di wilayah Kota Batu dibentuk oleh jenis batuan yang berkarakteristik subur. Kurang lebih seluas 6.231,12 Ha terbentuk dari batuan andosol yang memiliki karakteristik paling subur, dan 3.026,37 Ha terbentuk dari batuan kambisol yang memiliki karakteristik cukup

subur. Adapun selebihnya terbentuk dari jenis batuan alluvial dan laktosol yang memiliki karakteristik kurang subur dan berkapur. Hal ini berarti 84,4 persen luas tanah di Kota Batu berkarakteristik subur. Oleh karenanya, kesuburan tanah ini cukup berpotensi mendukung pengembangan sektor pertanian dan perkebunan.

Tabel 2.1. Luas Kecamatan berdasar Jenis Tanah (dalam Ha)

Kecamatan	Andosol	Kambisol	Aluvial	Latosol
1. Batu	1.831,04	889,31	239,86	260,34
2. Junrejo	1.526,19	741,25	199,93	217,00
3. Bumiaji	2.873,89	1.395,81	376,48	408,61
Kota Batu	6.231,12	3.026,37	816,27	885,95

Sumber: Bappelitbangda Kota Batu, 2017.

Dilihat dari formasi geologi di atas menunjukkan bahwa Kota Batu merupakan wilayah yang subur untuk pertanian karena jenis tanahnya merupakan endapan dari sederetan gunung yang mengelilingi Kota Batu, ada tiga gunung yang berada di wilayah Kota Batu yaitu Gunung Panderman (2.010 meter), Gunung Welirang (3.156 meter), dan Gunung Arjuno (3.339 meter), sehingga di Kota Batu mata pencaharian penduduknya didominasi oleh sektor pertanian.

2.1.1.5. Hidrologi

Kondisi hidrologi Kota Batu divariasikan oleh keberadaan sumber mata air, daerah aliran sungai, dan sungai. Sumber mata air yang berada di wilayah Kota Batu berjumlah sekitar 111 (seratus sebelas) sumber mata air, 83 (delapan puluh tiga) diantaranya berstatus produktif dan diberdayakan oleh PDAM unit Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang untuk memenuhi kebutuhan air dari masyarakat. Sumber mata air itu mengalir melalui 17 (tujuh belas) jaringan sungai yaitu Kali Brantas, Kali Gringsing, Kali Ampo, Kali Lanang, Kali Jurangsusuh, Kali Junggo, Kali Braholo, Kali Brugan, Kali Ngujung, Kali Clumprit, Kali Sumpil, Kali Sumbergunung, Kali Kasinan, Kali Krikil, Kali Krecek, Kali Jurangjero, dan Kali Mranak.

Kota Batu memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Brantas. Hulu DAS Brantas terletak di Desa Sumberbrantas. Panjang DAS Brantas dari hulu hingga hilir sekitar 12.000 km² melewati 485 (empat ratus delapan puluh lima) sungai. DAS Brantas mengalir melewati 9 (sembilan) kabupaten dan 6 (enam) Kota di Jawa Timur.

2.1.1.6. Klimatologi

Kota Batu terletak di selatan equator yang dikelilingi oleh Laut Jawa, Selat Bali dan Samudera Indonesia dengan iklim tropis yang terbagi menjadi 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Kondisi iklim di Kota Batu cenderung merupakan iklim pegunungan yang berudara sejuk dan curah hujan yang tinggi.

Tabel 2.2. Rata- rata Suhu Udara dan Curah Hujan Kota Batu, 2016

No	Bulan	Suhu Udara (Derajat Celcius)	Curah Hujan (mm3)
1	Januari	23	217
2	Februari	22.4	447
3	Maret	22.9	176
4	April	23.4	34
5	Mei	23.2	164
6	Juni	23.1	168
7	Juli	22.3	52
8	Agustus	21.1	70
9	September	22.7	72
10	Oktober	22.5	133
11	November	22.8	517
12	Desember	22.8	219

Sumber: BPS, 2017

Curah hujan sepanjang tahun 2016 termasuk cukup tinggi. Hanya pada bulan Juli, Agustus, September, dan Oktober berada pada kisaran 0 mm-81,8 mm. Rata-rata curah hujan selama tahun 2016 adalah 193,89 mm. Curah hujan terendah pada bulan

September, sedangkan tertinggi pada bulan Desember. Rata-Rata suhu udara sepanjang tahun 2016 termasuk cukup dingin yaitu pada suhu rata-rata 23,5°C. Rata-rata suhu udara terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu 21,9°C, sedangkan tertinggi pada bulan Oktober yaitu 24,4°C. Rata-rata kelembaban udara sepanjang tahun 2016 termasuk cukup tinggi yaitu pada 79,75 persen. Rata-rata kelembaban terendah terjadi pada bulan September sebesar 70 persen, sedangkan tertinggi pada bulan Desember sebesar 86 persen.

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan Kota Batu dengan luas total 19,908.70 Ha sampai dengan akhir tahun 2017 masih didominasi untuk kawasan hijau, terdiri dari hutan lindung sebesar 3.563,30 Ha (17,9%), kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo 5.342,50 Ha (26,84%), Ruang Terbuka Hijau 1.777,70 Ha (8,93%), kawasan hutan produksi 2.521,70 Ha (12,67%), dan kawasan pertanian 4.018 Ha (20,19%). Sementara penggunaan lahan untuk kawasan perumahan seluas 2.104 Ha (10,57%).

Tabel 2.3. Kondisi dan penggunaan lahan di Kota Batu Tahun 2017

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas	
		Ha	%
1.	Hutan Lindung	3,563,30	17,90
2.	Taman Hutan Rakyat R. Suryo	5.342,50	26,84
3.	Hutan Produksi	2.521,70	12,67
4.	Ruang Terbuka Hijau	1.777,70	8,93
5.	Kawasan Pertanian	4.018,50	20,18
6.	Kawasan Perumahan	2.104,50	10,57
7.	Kawasan Perdagangan & Jasa	172,70	0,87
8.	Kawasan Perkantoran	12,70	0,06
9.	Kaw. Industri &Pergudangan	26,70	0,13
10.	Kawasan Pariwisata	206,00	1,03
11.	Kaw. Pertahanan & Keamanan	45,90	0,23
12.	Pelayanan Umum	117,00	0,59
	Total	19,908.70	100

Sumber: RTRW Kota Batu 2010-2030

2.1.1.8. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana yang ada di Kota Batu cenderung pada wilayah-wilayah dengan kemiringan sebesar 25%-> 40% yang tersebar di Kota Batu bagian utara, selatan, barat, dan timur. Wilayah rawan bencana di Kota Batu bagian utara adalah wilayah Gunung Pusungkutuk, Gunung Welirang, Gunung Kembar, Gunung Anjasmoro, Gunung Rawung, dan Sumber Brantar di Desa Tulungrejo. Wilayah-wilayah tersebut memiliki klasifikasi kelerengan > 40%. Di bagian selatan adalah wilayah Gunung

Panderman, Gunung Bokong, Gunung Punuksapi, Gunung Srandil di Desa Oro – oro ombo, Kawasan Gunung Wukir di Desa Torongrejo, sebagian kecil Desa Mojorejo, Desa Pendem, sebagian kecil Desa Beji, sebagian kecil Kelurahan Temas, sebagian kecil Desa Giripurno, dan sebagian kecil Desa Pandanrejo. Wilayah-wilayah tersebut memiliki klasifikasi kelerengan 25%-40%. Di bagian barat adalah wilayah Gunung Banyak di Desa Gununugsari, Gunung Jeruk dan Gunung Kerumbang di Desa Tulungrejo, Gunung Preteng di Desa Gunungsari. Wilayah-wilayah tersebut memiliki klasifikasi kelerengan 25%-40%. Di bagian timur adalah wilayah Gunung Pucung di Desa Bulukerto dan Gunung Gede di Desa Bumiaji. Wilayah-wilayah tersebut memiliki klasifikasi kelerengan > 40%. Adapun bencana alam yang rawan terjadi adalah tanah longsor, banjir bandang, dan banjir lumpur. Berikut data kejadian bencana alam di Kota Batu tahun 2016:

Tabel 2.4. Kejadian Bencana Alam menurut Jenis Kejadian di Kota Batu, 2016

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Kerugian Material
1	Tanah Longsor	9	Rp. 2.400.000.000.-
2	Angin Kencang	2	-
3	Banjiir	3	Rp.890.000.000,-

Sumber: BPS, 2017

2.1.2. Kondisi Umum Demografi

2.1.2.1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kota Batu berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu pada tahun 2016 tercatat sejumlah 218.806 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 110.374 jiwa dan perempuan sebanyak 108.432 jiwa dengan jumlah rumah tangga 65.153 KK. Jumlah penduduk ini meningkat dari tahun 2015 yang tercatat 214.969 jiwa. Angka ini meningkat sekitar 1,78 persen atau bertambah sebanyak 3.837 jiwa. Jumlah penduduk tersebut mendiami wilayah seluas 199,09 Km² sehingga rata-rata kepadatan penduduk pada tahun 2016 adalah 1.099 jiwa per Km².

Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Kota Batu dari Tahun 2012-2017

Uraian	Satuan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Penduduk	Jiwa	206.395	209.825	211.298	214.969	218.806
Laki-laki	Jiwa	104.160	105.872	106.586	108.473	110.374
Perempuan	Jiwa	102.235	103.953	104.712	106.496	108.432
Rumah Tangga	KK	57.468	58.636	59.987	62.497	65.135
Pertumbuhan Penduduk	%	1.56	1.66	0.70	1.74	1.78
Kepadatan Penduduk	Jiwa /km ²	1.04	1.05	1.06	1.08	1.10

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2017

Dilihat dari sebaran penduduknya untuk masing-masing kecamatan terlihat belum merata. Kecamatan Batu memiliki jumlah

penduduk 101.151 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 2.225 jiwa /Km², Kecamatan Junrejo jumlah penduduk 54.704 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 2.132 jiwa/Km², dan pada Kecamatan Bumiaji jumlah penduduk 62.951 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 495 jiwa/Km².

Dilihat dari kelompok umur, jumlah Penduduk Kota Batu didominasi oleh usia produktif. Dari struktur penduduk menurut kelompok umur dapat diketahui sejauh mana tingkat ketergantungan usia tidak produktif terhadap usia produktif. Usia produktif adalah kelompok umur 15 sampai dengan 64 tahun, sedangkan usia tidak produktif pada kelompok umur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas. Gambaran tersebut yang dinamakan Angka Beban Ketergantungan.

Pada tahun 2016 angka kergantungan secara keseluruhan adalah 41.88 persen menurun dari Tahun 2015 dengan angka ketergantungan secara keseluruhan adalah 41,93 persen. Angka ini berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan menanggung sekitar 42 orang bukan usia produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Secara keseluruhan jumlah penduduk usia produktif yaitu 15 - 64 tahun pada Tahun 2016 mencapai

154.214 jiwa atau sebesar 70,48 persen meningkat dari kondisi Tahun 2015 yang mencapai 151.455 jiwa atau 70,45 persen.

Tabel 2.6. Sebaran Penduduk Kota Batu Berdasarkan Wilayah Kecamatan pada Tahun 2016

Kecamatan/Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Kecamatan Batu	50.984	50.167	101.151
[1] ORO-ORO OMBO	5.316	5.159	10.475
[2] TEMAS	9.086	8.918	18.004
[3] SISIR	11.007	10.896	21.903
[4] NGAGLIK	6.498	6.526	13.024
[5] PESANGGRAHAN	7.030	6.643	13.673
[6] SONGGOKERTO	3.767	3.907	7.674
[7] SUMBEREJO	3.960	3.834	7.794
[8] SIDOMULYO	4.320	4.284	8.604
Kecamatan Junrejo	27.629	27.075	54.704
[1] TLEKUNG	2.453	2.415	4.868
[2] JUNREJO	5.438	5.155	10.503
[3] MOJOREJO	2.758	2.669	5.427
[4] TORONGREJO	3.148	3.086	6.234
[5] BEJI	4.250	4.313	8.563
[6] PENDEM	6.416	6.120	12.536
[7] DADAPREJO	3.256	3.317	6.573
Kecamatan Bumiaji	31.761	31.190	62.951
[1] PANDANREJO	3.135	3.101	6.236
[2] BUMIAJI	3.652	3.524	7.176
[3] BULUKERTO	3.392	3.280	6.672
[4] GUNUNGSARI	3.737	3.670	7.407
[5] PUNTEN	2.767	2.720	5.487

Kecamatan/Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
[6] TULUNGREJO	4.994	4.919	9.913
[7] SUMBERGONDO	2.132	2.131	4.263
[8] GIRIPURNO	5.470	5.451	10.921
[9] SUMBERBRANTAS	2.482	2.394	4.876
JUMLAH	110.374	108.432	218.806

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2017

Tabel 2.7. Sebaran Penduduk Kota Batu Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2012-2016

Kelompok Umur	Satuan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
0-4 tahun	Jiwa	13,943	14,098	14,072	13,882	14,148
5-9 tahun	Jiwa	15,756	15,802	15,867	16,242	16,621
10-14 tahun	Jiwa	17,459	17,913	17,748	17,340	17,110
15-19 tahun	Jiwa	15,801	16,121	16,011	16,552	17,011
20-24 tahun	Jiwa	15,094	15,636	15,560	15,935	16,270
25-29 tahun	Jiwa	16,733	16,157	16,297	16,106	16,022
30-34 tahun	Jiwa	19,073	19,096	19,168	18,744	18,462
35-39 tahun	Jiwa	16,467	19,600	17,086	17,859	18,542
40-44 tahun	Jiwa	16,781	16,838	16,530	16,441	16,534
45-49 tahun	Jiwa	15,149	15,353	15,937	15,845	16,353
50-54 tahun	Jiwa	13,236	13,526	13,141	14,123	14,487
55-59 tahun	Jiwa	10,127	10,513	11,053	11,748	11,986
60-64 tahun	Jiwa	7,023	7,630	7,743	8,102	8,547
65-69 tahun	Jiwa	4,671	4,352	5,057	5,239	5,697
70-74 tahun	Jiwa	4,252	4,532	4,374	4,431	4,509
> 75 tahun	Jiwa	4,830	4,658	5,654	6,377	6,507

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2016

Tabel 2.8. Angka Beban Ketergantungan Penduduk Kota Batu Berdasarkan Kelompok Usia Produktif dan Non Produktif Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Non Produktif	60.911	61.355	62.772	63.511	64.592
Produktif	145.484	150.470	148.526	151.455	154.214
Angka Ketergantungan	41.87 %	40.78%	42.26 %	41.93 %	41.88%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2017

Pada tahun 2016 secara keseluruhan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif di Kota Batu banyak menggunakan alat kontrasepsi IUD yaitu sebanyak 7.901 pasangan atau sekitar 53,29 persen lebih dari PUS yang aktif.

Alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan setelah IUD adalah Pil / tablet. Selama tahun 2016, penggunaan Pil / tablet mencapai 3.898 pasangan. Setelah Pil alat kontrasepsi yang banyak digunakan adalah kondom sebanyak 1.975 pasangan.

Tabel 2.9. Penduduk Kota Batu Berdasarkan Kepesertaan KB dan Pasangan Usia Subur Tahun 2012 - 2016

URAIAN	Satuan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
Peserta KB Aktif / Lestari	orang	16.502	16.854	14.907	15.092	14.827
IUD	orang	8.367	8.757	8.521	8.686	7.901
Pil	orang	5.596	5.577	4.280	4.340	3.898
Kondom	orang	2.539	2.520	2.106	2.066	1.975

URAIAN	Satuan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
Peserta KB Baru	orang	2.418	1.648	1.286	915	1.053
IUD	orang	581	611	762	570	846
Pil	orang	1.116	789	414	248	165
Kondom	orang	721	248	110	97	42
Pasangan Usia Subur (PUS)	Pasangan	30.988	40.588	39.199	40.501	40.186
Presentase KB dengan PUS	%	80,54	81,52	80,08	81,50	75,89
Peserta KB Mandiri	orang	17.326	17.664	17.235	18.146	16.295
Peserta KB Mandiri/Swasta	%	17,25	21,97	21,52	22,26	22,54

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KB, 2016.

Pasangan Usia Subur (PUS) di Kota Batu pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,78 persen dari 40.501 pasangan pada tahun 2015 menjadi 40.186 pasangan pada tahun 2016. Dari 40.186 pasangan tersebut yang tercatat sebagai peserta KB aktif hanya 14.827 pasangan. Pada tahun 2016 tercatat 1.053 pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif baru, angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan angka pada tahun 2015 yang mencapai 915 pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif baru. Dari pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif baru pada tahun 2016 tersebut yang menggunakan alat kontrasepsi IUD sebanyak 846 pasangan kemudian pil/tablet sebanyak 165 pasangan, dan kondom sebanyak 42 pasangan.

2.1.2.2. Ketenagakerjaan

Pada tahun 2016 dari total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) sekitar 68,60 persen penduduk Kota Batu termasuk angkatan kerja, angka ini menurun dibanding angka angkatan kerja tahun 2015 yang mencapai 70,38 persen. Beberapa indikator yang bisa digunakan untuk memantau perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Kota Batu antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan.

TPAK Kota Batu tahun 2015 dan 2014 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2013. TPAK Kota Batu tahun 2013 sebesar 70,74 persen sedangkan tahun 2014 hanya 70,38 persen dan turun lagi pada tahun 2015 sebesar 68,60 persen. TPAK 68,60 mempunyai arti bahwa dari 100 penduduk yang berumur 15 tahun ke atas, 68 orang diantaranya termasuk angkatan kerja.

Tabel 2.10. Penduduk Kota Batu Usia 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Kegiatan Tahun 2012 - 2016

JENIS KEGIATAN	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016*
Penduduk Kota Batu berumur 15 Tahun Ke Atas	143.150	142.902	145.14	153.794	156.458
Angkatan Kerja	101.733	103.743	106.777	105.496	107.554
Penduduk yang bekerja	98.261	101.339	104.177	100.97	103.254
Pengangguran Terbuka	3.472	2.404	2.600	4.526	4.300
TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)	70,9%	71,74%	70,38%	68,60%	68,74
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	3,41%	2,32%	2,18%	4,29%	3,7%
TKK (Tingkat Kesempatan Kerja)	96.59%	97.68%	97.57%	95.71%	96%

Sumber : BPS Kota Batu, dan Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Batu, 2016. * angka berdasarkan susenas pada bulan Agustus

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kota Batu pada tahun 2015 sebesar 95,71 persen, menurun dibanding tahun 2014 sebesar 97,57 persen. Angka TKK 95,71 persen artinya bahwa setiap 100 penduduk angkatan kerja 95 diantaranya sudah bekerja. Dari hasil Sakernas diketahui bahwa jumlah angkatan kerja penduduk Kota Batu yang terserap dalam kegiatan ekonomi (bekerja) pada tahun 2015 sebesar 105.496 atau sebanyak 95,71 persen turun dibanding angka tahun 2014 sebanyak 104.177 atau 97,56 persen terhadap jumlah angkatan kerja.

Selanjutnya indikator makro yang digunakan untuk melihat perkembangan pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Penduduk usia 15 tahun ke atas yang mencari pekerjaan pada tahun 2015 tercatat sebesar 4,29 persen dibandingkan dengan tahun 2014 yang tercatat 2,18 persen angka ini mengalami kenaikan. Beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan angka TPT ini antara lain :

1. Daya saing tenaga kerja yang masih relatif lemah dan adanya kebijakan standarisasi penerimaan tenaga kerja yang dikeluarkan perusahaan belum disertai dengan peningkatan kualitas SDM daerah yang ada.
2. Adanya kebijakan rasionalisasi karyawan perusahaan;
3. Kecenderungan para lulusan sekolah maupun perguruan tinggi yang mulai berorientasi pada pekerjaan perkantoran daripada berwirausaha khususnya di sektor agraris.
4. Penyampaian informasi ketersediaan lapangan pekerjaan belum sampai menyentuh wilayah perdesaan.

Berdasarkan perbandingan menurut tiga sektor utama, pilihan bekerja di sektor pertanian pada tahun 2015 mencapai 29,83 persen. Sedangkan sektor industri 16,22 persen dan paling banyak penduduk Kota Batu bekerja di Sektor Jasa-jasa yaitu 53,94 persen.

Sektor perdagangan dan pertanian mendominasi jenis lapangan usaha yang banyak dikerjakan oleh tenaga kerja di Kota Batu. Penduduk yang bekerja di sektor perdagangan dan pertanian pada tahun 2015 sebesar 59,90 persen. Sektor perdagangan dan pertanian masih mendominasi lapangan usaha yang dikerjakan tenaga kerja di Kota Batu. Hal ini terjadi seiring dengan dicanangkannya Kota Batu sebagai Kota Wisata yang berbasis agropolitan sehingga memberikan kesempatan kerja bagi penduduk Kota Batu di sektor perdagangan dan pertanian.

Tabel 2.11. Penduduk Kota Batu yang Bekerja Berdasarkan Status Pekerjaan Utama Tahun 2012-2016

Status Pekerjaan Utama	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Berusaha Sendiri	13.732	16.289	16.337	17.639	18.442
Berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap	11.466	11.685	12.419	12.895	8.922
Berusaha dengan buruh tetap	4.760	5.580	5.175	5.672	5.937
Buruh/karyawan/pegawai	39.367	37.777	36.911	35.879	44.012
Pekerja bebas pertanian	7.442	5.669	9.383	8.644	6.590
Pekerja bebas non pertanian	7.988	10.616	10.858	11.288	8.174
Pekerja tidak dibayar	13.506	13.723	13.094	13.108	11.178

Sumber : BPS Kota Batu, 2016.

Pada tahun 2016 penduduk Kota Batu yang bekerja, sebanyak 44.012 berstatus sebagai buruh atau karyawan, kemudian 18.442

berusaha sendiri. Diantara status pekerjaan tersebut yang paling kecil adalah berusaha dengan buruh tetap hanya sebesar 5.937. Sisanya 41,15 persen berstatus berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas pertanian, pekerja bebas non pertanian dan pekerja tidak dibayar.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan pembangunan merupakan cermin dari keberhasilan pencapaian indikator pembangunan yaitu terwujudnya pemerataan ekonomi dan terpenuhinya kesejahteraan masyarakat di segala bidang terutama di bidang pendidikan, kesehatan, serta terpenuhinya kebutuhan fasilitas publik. Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olah raga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan ekonomi diantaranya adalah jumlah penduduk miskin dan pendapatan perkapita. Jumlah Penduduk Miskin menggambarkan jumlah penduduk yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan. Sementara itu Pendekatan Perkapita merupakan besarnya pendapatan rata-rata penduduk. Semakin tinggi nilai pendekatan

perkapita, dapat dikatakan semakin makmur penduduk wilayah tersebut. Namun demikian indikator-indikator tersebut perlu dikonfirmasi dengan penilaian sejauh mana kegiatan perekonomian daerah dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk.

Tabel 2.12 Data Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

NO	INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	PDRB ADHK (milyar)	Milyar	7,473.6	8,018.0	8,573.4	9,148.718	9,768,568
2	PDRB ADHB (milyar)	Milyar	8,079.6	9,078.4	10,250.3	11,536.386	12,640,204
	Rerata Laju Pertumbuhan PDRB	%	7.26	7.28	6.93	6.71	6.81
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	3,82	1,58	3,47	3,44	3,42
	Pertambangan dan Penggalian	%	2,85	2,92	3,22	2,58	2,52
	Industri Pengolahan	%	6,66	7,43	6,95	7,14	7,14
	Pengadaan Listrik, Gas	%	11,98	6,57	4,92	4,16	3,96
	Pengadaan Air	%	7,27	6,48	4,73	5,60	5,12
	Konstruksi	%	11,29	11,20	11,31	9,84	9,84
	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	9,11	9,12	6,41	6,85	7,85
	Transportasi dan Pergudangan	%	8,32	8,77	9,04	8,18	7,17
	Penyediaan Akomodasi Makan Minum	%	7,09	7,63	10,02	9,53	12,53
	Informasi dan Komunikasi	%	9,71	10,05	7,70	7,85	7,85
	Jasa Keuangan	%	9,08	10,46	6,86	6,46	6,22
	Real Estate	%	9,42	9,68	7,75	5,04	5,32
	Jasa Perusahaan	%	5,25	7,13	8,61	6,26	6,56
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib	%	3,16	2,46	1,04	4,44	4,14
	Jasa Pendidikan	%	8,72	9,36	7,10	4,15	4,19
	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	%	9,10	8,58	7,42	6,01	6,71
	Jasa lainnya	%	5,37	6,40	6,69	6,62	6,67
3	Laju inflasi	%	4.5	6.72	7.7	3.9	2,76
4	PDRB per kapita	Juta		46.3	51.7	57.4	63.8
5	PDRB per kapita ADHK	Ribu	38,385	40,866	43,169	45,675	45,675

NO	INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN				
			2012	2013	2014	2015	2016
6	PDRB per kapita ADHB	Ribu	41,497	46,271	51,612	57,538	57,769
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	7.26	7.28	6.93	6.69	6.81

2.2.1.1. Kemiskinan

Penduduk miskin di Kota Batu selama kurun waktu empat tahun terakhir ini terus menerus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan capaian positif para pelaku pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat. Kondisi ini harus tetap dipertahankan atau ditingkatkan kineja para pelaku pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat sehingga kondisi sosial ekonomi di Kota Batu semakin mantap.

Pada tahun 2016 penduduk miskin di Kota Batu tercatat 7.880 jiwa (sumber: BPS Jatim, 2017). Jumlah ini cenderung mengalami penurunan, dari tahun 2015 sejumlah 9.430 jiwa. Demikian pula prosentase penduduk miskin pada tahun 2016 sebesar 4,48 persen turun dari tahun 2015 sebesar 4,71 persen. Hal ini lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Timur yang mencapai 12,05 persen maupun tingkat nasional yang mencapai 10,70 persen pada tahun 2016. Dengan demikian hal tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah Kota Batu dalam upaya untuk selalu mengurangi dan

menanggulangi kemiskinan menuju target *Millenium Development Goal's* (MDG's) tahun 2015.

Tabel 2.13. Prosentase Penduduk Miskin Terhadap Jumlah Penduduk di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2012 – 2015

Uraian	Tahun dalam %				
	2012	2013	2014	2015	2016
Kota Batu	5,10	4,77	4,59	4,71	4,48
Jawa Timur	13,08	12,73	12,28	12,28	12,05
Nasional	11,66	11,46	10,96	11,18	10,70

Sumber: BPS Jatim, 2017

Namun demikian, upaya pengentasan kemiskinan masih perlu terus ditingkatkan, terutama dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah. Oleh karena itu, program-program untuk masyarakat miskin perlu diupayakan agar dapat dirasakan di seluruh masyarakat Kota Batu hingga ke desa-desa di daerah pegunungan. Perbaikan distribusi pendapatan, program pemberdayaan masyarakat, perluasan kesempatan ekonomi pada masyarakat berpenghasilan rendah serta memperluas akses perlindungan sosial perlu terus diupayakan.

2.2.1.2. Kondisi Ekonomi Daerah

Kondisi ekonomi suatu daerah dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu daerah. Adanya pertumbuhan ekonomi

menunjukkan adanya peningkatan produksi di suatu daerah pada periode waktu tertentu. Dalam perekonomian terbuka, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian di wilayah tersebut namun juga dipengaruhi oleh perekonomian global. Demikian halnya dengan perekonomian di Kota Batu, tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi penduduk Kota Batu namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti kondisi ekonomi nasional dan bahkan ekonomi global.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Batu mengalami fluktuasi sebagai berikut. Pada tahun 2013 dengan laju pertumbuhan 7.26%, pada tahun 2014 meningkat dengan laju pertumbuhan 7.28%, pada tahun 2014 menurun dengan laju pertumbuhan 6.93%, pada tahun 2015 turun dengan laju pertumbuhan 6.69%, dan pada tahun 2016 kembali naik dengan laju pertumbuhan 6.81%. Penurunan yang drastis pada laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 dan 2015 merupakan implikasi dari perekonomian nasional dan regional yang mengalami perlambatan.

2.2.1.2.1. Potensi Unggulan Daerah

Potensi-potensi yang ada dalam suatu wilayah dapat dilihat dari berbagai macam perspektif dan pendekatan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui potensi

unggulan suatu daerah adalah komposisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Berkembang pesatnya pariwisata di Kota Batu mendorong tumbuhnya ekonomi di sektor-sektor pendukungnya. Sektor Tersier masih menjadi sektor andalan yang menggenjot PDRB Kota Batu, hal ini dapat dilihat dari kontribusinya yang besar terhadap PDRB. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Penyediaan jasa dan akomodasi merupakan sektor yang tumbuh signifikan dan menyerap tenaga kerja yang banyak di Kota Batu. Sementara sektor pertanian, kehutanan dan perikanan relatif stabil pertumbuhan kontribusinya terhadap PDRB Kota Batu.

Tabel 2.14. Perkembangan PDRB Tahun Dasar 2010 Kota Batu Periode Tahun 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Nilai PDRB (juta Rp.)					
- ADHB	8.079.640	9.078.617	10.259.709	11.510.377	12.901.976
- ADHK 2010	7.473.627	8.018.625	8.572.129	9.149.943	9.750.908
PDRB Perkapita (juta Rp.)					
- ADHB	41,5	46,3	51,7	57,4	63,8
- ADHK 2010	38,4	40,9	43,2	45,6	48,2
Pertumbuhan PDRB ADHK 2010	7,26	7,29	6,90	6,69	6,61

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(%)					
Jumlah Penduduk (jiwa)	194.700	196.200	198.600	200.485	202.319
Pertumbuhan Penduduk (%)	0,97	0,76	1,2	0,94	0,90

Sumber: BPS Kota Batu, 2017

Tabel di atas juga menunjukkan peningkatan PDRB perkapita Kota Batu dari tahun ke tahun yang selaras dengan kenaikan jumlah penduduk.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam penyusunan RPJMD ini, tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 yang mencerminkan struktur ekonomi terkini. Total PDRB atas dasar harga berlaku berdasarkan lapangan usaha tahun 2012 sebesar Rp. 8,07 triliun, dan pada tahun 2016 tercatat

mencapai Rp. 12,90 trilyun atau naik hampir 15 persen dibanding tahun 2012.

Perkembangan ekonomi Kota Batu atas dasar harga konstan tidak berbeda jika dibandingkan dengan harga berlaku. PDRB ADHK pada tahun 2016 mencapai 9,75 trilyun naik sekitar 6,5 % dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor-sektor ekonomi lokal yang mempunyai potensi diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi masyarakat setempat dan bahkan menjadi sektor unggulan.

Sejalan dengan paradigma pembangunan yang partisipatif dan sensitif terhadap nilai-nilai lokal, sistem ekonomi yang dijalankan diharapkan dapat memberikan peran kepada usaha di tingkat komunitas dengan skala mikro, kecil dan menengah. Dalam hal ini peran UKM sebagai pelaku usaha lokal secara optimal dan menggunakan teknologi yang sesuai agar produk yang dihasilkan dapat lebih bersaing baik di pasar nasional maupun internasional.

Berdasarkan distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah. Penentuan sektor unggulan di Kota Batu didasarkan pada kontribusi sektor terhadap perekonomian Kota Batu. Ukuran

yang digunakan adalah besarnya kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB Kota Batu. Dikatakan sektor unggulan apabila kontribusinya terhadap nilai PDRB Kota Batu dari waktu ke waktu secara konsisten relatif besar.

Kemajuan ekonomi Kota Batu, tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Kota Batu yang selalu mendorong investor dan pelaku ekonomi yang bersifat UMKM untuk tetap berpartisipasi dalam membangun Kota Batu sebagai Kota Wisata.

Tabel 2.15. Distribusi Presentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Batu 2012-2016

Lapangan Usaha	Kontribusi terhadap total PDRB (dalam persen)					
	2012	2013	2014	2015	2016	Urutan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17.14	16.46	16.41	16.30	16.20	2
Pertambangan dan Penggalian	0.20	0.19	0.20	0.19	0.18	11
Industri Pengolahan	4.52	4.50	4.56	4.66	4.65	6
Pengadaan Listrik dan Gas	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	13
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.19	0.19	0.18	0.18	0.17	12
Konstruksi	9.81	10.19	10.82	11.28	11.54	4
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18.87	19.17	18.39	18.02	18.08	1
Transportasi dan Pergudangan	1.25	1.25	1.31	1.31	1.28	9
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10.14	10.63	11.38	11.64	12.06	3
Informasi dan Komunikasi	6.87	6.76	6.48	6.35	6.19	5
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.74	3.88	3.97	4.06	3.99	7

Real Estate	2.89	3.03	2.92	2.93	2.83	8
Jasa Perusahaan	0.50	0.50	0.49	0.48	0.46	10

Sumber: BPS Kota Batu, 2017

Pada tahun 2012-2016 ada empat sektor yang mendominasi perekonomian Kota Batu yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa, sektor pertanian dan sektor industri konstruksi dan real estate. Berkembang pesatnya pariwisata di Kota Batu mendorong tumbuhnya ekonomi di sektor-sektor pendukungnya.

Hal ini dapat dilihat dari kontribusinya yang besar terhadap PDRB. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Penyediaan jasa dan akomodasi merupakan sektor yang tumbuh signifikan dan menyerap tenaga kerja yang banyak di Kota Batu, sampai dengan Tahun 2015 tercatat 329 unit usaha dengan menyerap tenaga kerja 1817 orang. Sementara sektor pertanian, kehutanan dan perikanan relatif stabil pertumbuhan kontribusinya terhadap PDRB Kota Batu.

Tabel 2.16. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Kota Batu Tahun 2013-2016 (Persen)

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB			
		2013	2014	2015	2016

1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,59	3,52	3,25	4,86
2	Pertambangan dan Penggalian	2,92	3,22	2,58	2,80
3	Industri Pengolahan	7,43	6,95	6,19	6,09
4	Pengadaan Listrik, Gas	6,57	4,92	4,46	5,46
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6,48	4,73	5,68	3,46
6	Konstruksi	11,20	11,31	10,01	8,90
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,12	6,51	7,17	6,80
8	Transportasi dan Pergudangan	8,77	9,04	8,18	6,50
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,63	8,75	9,62	8,98
10	Informasi dan Komunikasi	10,05	7,70	7,85	5,97
11	Jasa Keuangan	10,46	6,86	6,46	4,95
12	Real Estate	9,68	7,75	5,04	4,76
13	Jasa Perusahaan	7,13	8,61	6,26	5,08
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib	2,46	3,07	2,38	3,91
15	Jasa Pendidikan	9,36	7,10	4,14	6,24
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	9,33	9,38	3,39	4,81
17	Jasa lainnya	6,40	6,69	6,91	6,92
	Rerata Laju Pertumbuhan PDRB	7,29	6,90	6,69	6.61

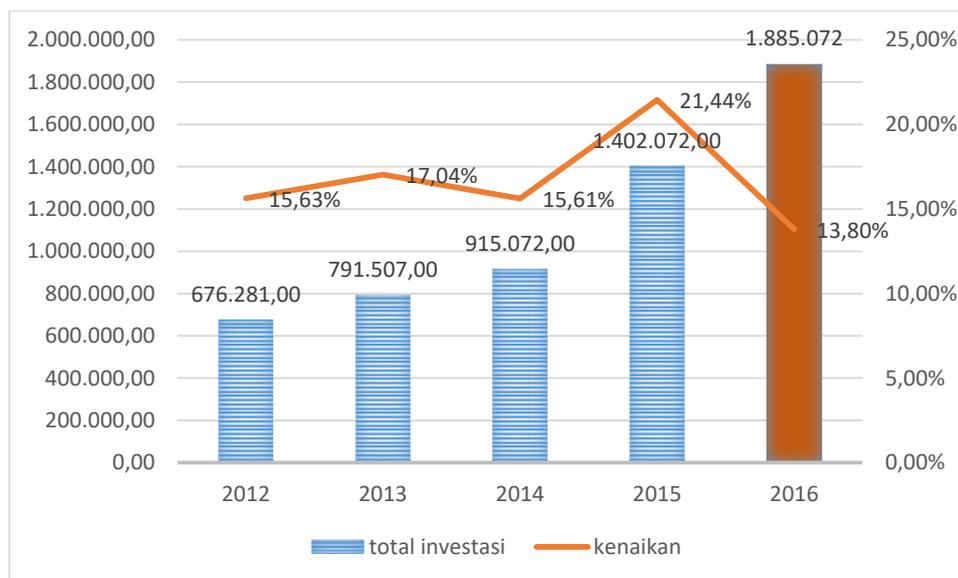
Sumber : BPS Kota Batu, 2017

2.2.1.2.2. Investasi Daerah

Laju pertumbuhan investasi daerah di Kota Batu pada tahun 2015 mencapai 21,44 persen, naik dibanding tahun 2014 sebesar 15,61 persen, dengan akumulasi realisasi investasi daerah sebesar Rp.1.402.072.000.000,- (angka diluar aset tanah dan bangunan). Secara keseluruhan, capaian kinerja pertumbuhan investasi kota

Batu tahun 2012-2015 rata-rata telah mencapai nilai varian target yang ditetapkan pada tahun yang berkenaan.

Gambar 2.2. Nilai dan Laju Investasi Daerah Tahun 2012-2016



Sumber : BPM Kota Batu, 2017

Jumlah perusahaan industri besar sedang di Kota Batu pada tahun 2014 berjumlah 22 perusahaan. Industri besar sedang adalah perusahaan disektor industri yang mempunyai tenaga kerja lebih dari 20 orang. Dari 22 industri besar sedang yang ada di kota Batu 13 diantaranya merupakan industri makanan dan minuman.

2.2.1.2.3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan salah satu indikator untuk mengevaluasi perkembangan/kemajuan kinerja pembangunan ekonomi di suatu daerah pada periode

tertentu. Agar diperoleh gambaran tentang pertumbuhan ekonomi secara riil, maka digunakan angka PDRB atas dasar harga konstan.

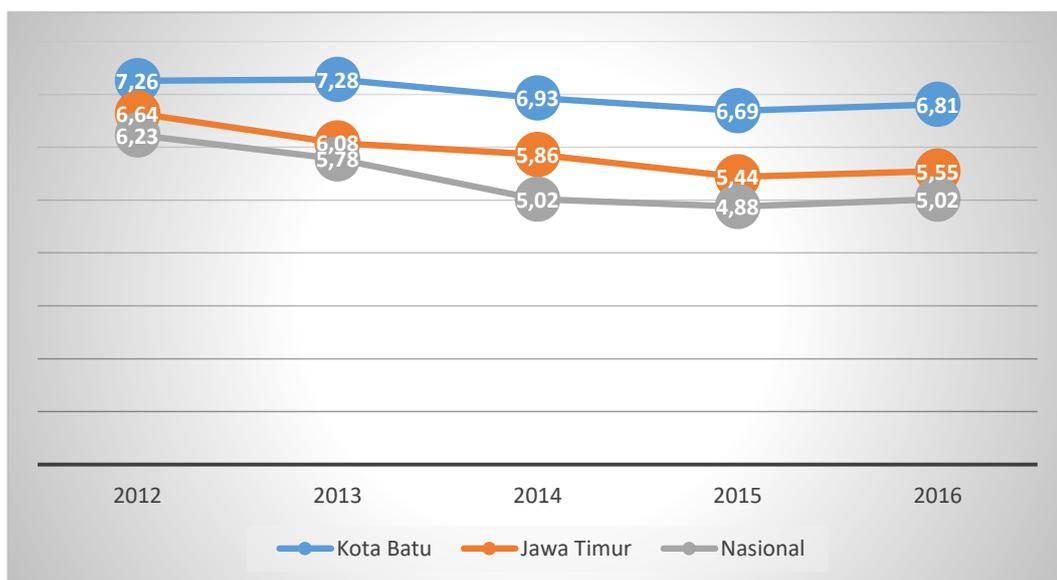
Tabel 2.17. Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2012-2016

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB				
	2012	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,82	1,58	3,47	3,44	3,42
Pertambangan dan Penggalian	2,85	2,92	3,22	2,58	2,52
Industri Pengolahan	6,66	7,43	6,95	7,14	7,14
Pengadaan Listrik, Gas	11,98	6,57	4,92	4,16	3,96
Pengadaan Air	7,27	6,48	4,73	5,60	5,12
Konstruksi	11,29	11,20	11,31	9,84	9,84
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,11	9,12	6,41	6,85	7,85
Transportasi dan Pergudangan	8,32	8,77	9,04	8,18	7,17
Penyediaan Akomodasi Makan Minum	7,09	7,63	10,02	9,53	12,53
Informasi dan Komunikasi	9,71	10,05	7,70	7,85	7,85
Jasa Keuangan	9,08	10,46	6,86	6,46	6,22
Real Estate	9,42	9,68	7,75	5,04	5,32
Jasa Perusahaan	5,25	7,13	8,61	6,26	6,56
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib	3,16	2,46	1,04	4,44	4,14
Jasa Pendidikan	8,72	9,36	7,10	4,15	4,19
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	9,10	8,58	7,42	6,01	6,71
Jasa lainnya	5,37	6,40	6,69	6,62	6,67
Rerata Laju Pertumbuhan PDRB	7,26	7,28	6,93	6,71	6,81

Sumber : Tahun 2012-2015 BPS Kota Batu, 2016; angka tahun 2016 masih angka proyeksi bappelitbangda tahun 2017

Setelah mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) dari tahun 2013-2015, perlahan pertumbuhan ekonomi Kota Batu Tahun 2016 mulai menunjukkan tren pertumbuhan positif.

Gambar 2.3. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Batu, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2012-2016



Sumber : BP4D Kota Batu, 2017

2.2.1.2.4. Inflasi

Inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya.

Tabel 2.18. Inflasi Kota Batu 2012-2016 dibandingkan dengan Jawa Timur dan Nasional

Uraian	Tingkat Inflasi %				
	2012	2013	2014	2015	2016
Kota Batu	4,5	6,72	7,70	2,62	2,82
Jawa Timur	4,59	7,60	7,70	2,74	2,76
Nasional	4,81	8,38	8,36	3,35	3,02

Sumber : BPS Jatim, 2017

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Secara umum kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator angka melek huruf. IPM adalah suatu indeks komposit yang mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia yang dapat dibandingkan antar wilayah atau bahkan antar waktu. Indeks ini mencakup tiga aspek, yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Menurut UNDP, indeks ini dapat menunjukkan tingkat pembangunan manusia suatu wilayah melalui pengukuran keadaan penduduk yang sehat dan berumur panjang, berpendidikan dan berketrampilan, serta mempunyai pendapatan yang memungkinkan untuk dapat hidup layak.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Mulai tahun 2014 penghitungan Indeks Pembangunan Manusia menggunakan metode penghitungan baru yaitu mengganti tahun dasar Produk Nasional Bruto per Kapita dari

2005 menjadi 2011 dan merubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik.

Tabel 2.19. Indeks Pembangunan Manusia Kota Batu dan Komponen Indikatornya Selama Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
IPM	71.55	71.89	72.62	73.57	74.26
Angka Harapan Hidup	72.05	72.06	72.16	72.20	72.25
Harapan Lama Sekolah	12.71	12.90	13.16	13.62	14.03
Rata-rata-Lama Sekolah	8.34	8.41	8.44	8.45	8.46
Pengeluaran Perkapita	10 803	10 853	11 274	11 772	12 057

Sumber : BPS Kota Batu, 2017

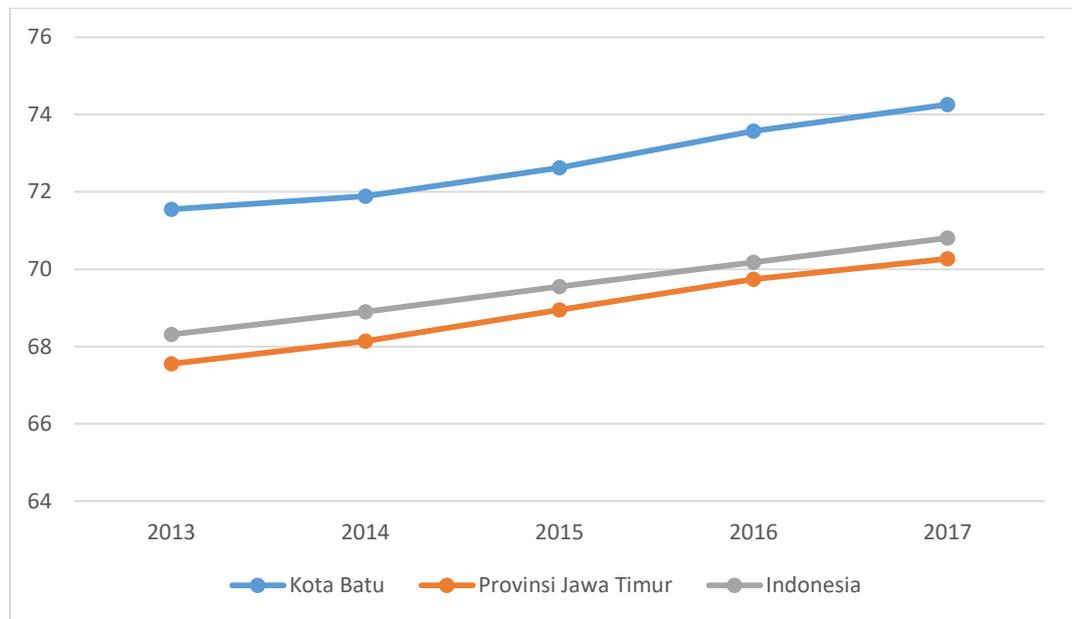
Tabel 2.20. Indeks Pembangunan Manusia Kota Batu, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2013-2017

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Kota Batu	71.55	71.89	72.62	73.57	74.26
Provinsi Jawa Timur	67.55	68.14	68.95	69.74	70.27
Nasional	68.31	68.9	69.55	70.18	70.81

Sumber : BPS Jawa Timur, 2017

Trend dari tahun 2013 sampai dengan 2016 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) baik di Kota Batu, tingkat Jawa Timur maupun nasional cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 IPM Kota Batu tercatat sebesar 72,62 di atas rata-rata Jawa Timur yang sebesar 68,95 maupun nasional yang sebesar 69,55. Tahun 2016 mengalami kenaikan

menjadi 73,57 dan masih di atas rata-rata Jawa Timur dan nasional yang sebesar 69,74 dan 70,18.



Gambar 2.4. Grafik Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kota Batu, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2013-2017

Sumber : BPS Jawa Timur, 2017

Angka IPM sebesar 73,57 menunjukkan kondisi status pembangunan manusia Kota Batu termasuk kategori menengah ke atas. Besarnya angka IPM menunjukkan bahwa pencapaian status pembangunan manusia secara umum selama periode 2013 - 2016 mengalami perubahan yang cukup berarti walaupun masih pada tingkatan menengah ke atas. Pembangunan yang dilakukan selama 4 tahun terakhir telah dapat menunjukkan kinerja yang baik dalam

hal pembangunan manusia untuk lebih berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan pencapaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Kenaikan angka IPM disebabkan karena adanya perbaikan atau peningkatan program di bidang pendidikan dan kesehatan selain itu naiknya daya beli masyarakat juga ikut berpengaruh terhadap angka IPM Kota Batu.

Berbagai program pemerintah telah diupayakan untuk meningkatkan angka IPM, seperti program di bidang kesehatan, pendidikan maupun ekonomi dan peningkatan kualitas sarana prasarana masyarakat lainnya. Selain itu keberhasilan program tersebut ditentukan oleh pola pikir masyarakat Kota Batu dalam memanfaatkan sarana yang ada. Pembangunan manusia yang dipotret melalui angka IPM hasilnya tidak langsung berdampak pada tahun berikutnya melainkan beberapa tahun kemudian.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Kepemudaan saat ini masih memperlihatkan perlunya peningkatan semangat kepeloporan pemuda dalam proses pembangunan daerah baik dalam pengembangan jati diri maupun

berorganisasi yang telah terjalin kondusif dan sinergi. Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan Pemuda memegang peranan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional maupun Kota Batu.

Peranan pemuda sebagai aset untuk percepatan pembangunan, sangat tergantung pada kualitas sumber daya pemuda. Generasi muda yang memiliki kualitas, dedikasi, kapabilitas dan kredibilitas merupakan faktor dominan bagi pembangunan di Kota Batu, sebaliknya kualitas yang rendah dan tidak memiliki kreativitas, dan daya saing akan menjadi beban bagi pembangunan.

Dengan dasar pemikiran tersebut maka diperlukan usaha-usaha dari berbagai pihak dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya generasi muda, termasuk di dalamnya kebijakan dan program pemerintah yang mengarah pada pemberdayaan generasi muda dan organisasi kepemudaan.

Kepeloporan di bidang kepemudaan adalah suatu karya nyata bagi unsur pemuda untuk mengatasi permasalahan kualitas

sumber daya manusia, termasuk di dalamnya adalah pengembangan teknologi, metodologi, dan manajerial yang bermanfaat bagi masyarakat. Kepeloporan pemuda dituntut untuk dapat melakukan terobosan-terobosan yang dapat memberikan kontribusi sebagai upaya mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pemuda itu sendiri dan negaranya.

Sementara itu, olahraga memiliki peran untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat persatuan dan kesatuan. Kota Batu dalam bidang olahraga mulai mengalami peningkatan dalam pembinaan, pembangunan kelengkapan sarana prasarana, kemajuan prestasi dan penghargaan. Untuk itu revitalisasi kelembagaan/organisasi kepemudaan haruslah ditingkatkan untuk melaksanakan peran dan fungsinya dalam rangka mewujudkan Kepemudaan dan Keolahragaan yang Profesional dengan tujuan adalah untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan daya saing kepemudaan dan keolahragaan di tingkat nasional dan internasional.

Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga tahun 2015 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kecamatan dan Kelurahan. Untuk mencapai indikator utama sebagai acuan kondisi kemajuan

urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Batu pada tahun 2015 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan.

Pemuda Kota Batu memiliki potensi dan peluang yang cukup besar, sekaligus kelemahan dan tantangan yang tidak ringan. Potensi dalam hal ini adalah jumlah yang cukup besar, pola pikir dan semangat yang tinggi. Kelemahannya adalah kondisi perkembangan psikologis pemuda yang belum stabil, masih pada tahap pencarian identitas diri dan lemahnya sandaran nilai serta norma. Tantangan yang muncul di kalangan pemuda adalah masa depan yang penuh kompetisi baik keterampilan, idealisme maupun nilai budaya. Sementara peluang yang dimiliki oleh pemuda Kota Batu adalah ruang gerak atau ekspresi idealisme yang terbuka, baik dalam konteks sistem nilai, sistem pendidikan, sistem ekonomi maupun sistem politik.

Selain itu, ada dua kecenderungan yang saling bertentangan yang menjadi tantangan kepemudaan yakni persaingan dan kerja sama. Untuk menang dalam persaingan, selain perlu efisiensi, juga butuh keunggulan kompetitif dari sumber daya lokal. Salah satu faktor produksi yang penting dari sumberdaya lokal adalah SDM. Tanpa SDM yang baik yang bernilai tambah, sulit bagi suatu daerah memenangkan persaingan global sekalipun memiliki sumber daya

alam yang banyak. SDM yang baik akan dapat dihasilkan jika pola pembinaan generasi muda diciptakan melalui suasana sehat, dinamis, dan demokratis sehingga generasi muda bisa berkembang tanpa perlu direkayasa.

Pemerintah Kota Batu melakukan pengembangan olah raga, pengaktifan even olah raga di tingkat regional maupun nasional, meningkatkan sarana dan prasarana olah raga, pemberian bantuan untuk atlit yang berprestasi, Fasilitas gedung olah raga di Kota Batu seperti Gedung Ganesha dan Stadion Sepakbola Brantas memerlukan perbaikan (renovasi), dan gedung kesenian yaitu Galeri Seni (Pondok Seni), dimana setelah dilakukan renovasi Galeri Seni mulai dimanfaatkan oleh para seniman untuk berbagai kegiatan pameran yang meliputi inventarisasi dan pengkayaan obyek-obyek pariwisata baik yang seni lukis. Telah dilakukan pengembangan olah raga, pengaktifan even olah raga di tingkat regional maupun nasional meningkatkan sarana dan prasarana olah raga, pemberian bantuan untuk atlit yang berprestasi, mengembangkan kebebasan berkreasi dalam seni budaya daerah, pengembangan seni budaya daerah sebagai daya tarik wisata, pengembangan sarana dan prasarana seni budaya, serta pengembangan even wisata budaya.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Gambaran kondisi Kota Batu pada aspek pelayanan umum dijabarkan dalam Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib dan Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pemerintah sebagai aparat pelayanan masyarakat wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam wujud pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan pelayanan umum dalam segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan yang baik dicerminkan dari tercapainya indikator-indikator pada urusan wajib dan urusan pilihan sebagai bentuk profesionalisme.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Pasal 409 UU No. 23 Tahun 2014). Hal

ini berdampak pada perubahan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

2.3.1.1. Urusan Pendidikan

Kota Batu memiliki indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian urusan pendidikan tersebut. Pada Urusan Pendidikan, terdapat beberapa indikator meliputi Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah (APS) dan Angka Melek Huruf (AMH). Adapun capaian kinerja indikator perkembangan kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2012-2017 adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.21. Indikator Layanan Pendidikan Kota Batu Tahun 2012-2016

NO	INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	95.3	95.9	95.98	90.8	102.5
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	81	81.1	83.4	79.96	113
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	62.65	54.1	62.5	63.85	96.6
3	Angka partisipasi sekolah	%					
4	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	97.6	99.7	98.7	98.9	98.8
5	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	89.9	97.6	99.0	99.9	99.9
6	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	%	83.5	66.9	73.34	73.64	73.65

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batu, 2017

Dari data tersebut tingkat SD/MI dan SMP/MTS memiliki nilai APK bisa lebih dari 100% hal ini disebabkan karena jumlah murid yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh 15 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SMP atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 12 tahun tetapi telah masuk SMP. Adapun capaian kinerja indikator perkembangan kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2012-2017 pada jenjang SD/MI capaian APK pada tahun 2012-2015 mengalami kondisi penurunan, dimana pada tahun 2012 mencapai 107% menurun menjadi 103% di tahun 2013, menurun kembali di tahun 2014 menjadi 101.4% dan di tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 100%.

Pada jenjang pendidikan SMP/MTs capaian APK pada tahun 2012-2015 mengalami kondisi yang fluktuatif, dimana pada tahun 2012 mencapai 117%, meningkat 197.2 pada tahun 2013, namun mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 112%, kemudian kembali meningkat menjadi 197.39% pada tahun 2015. Sedangkan pada jenjang SMA/SMK/MA capaian APK pada tahun 2012-2015 juga mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2012 mencapai 78.15% naik menjadi 83.9% pada tahun 2013, selanjutnya

meningkat lagi pada tahun 2014 menjadi 90.8% dan mengalami penurunan menjadi 88.89% pada tahun 2015.

Capaian APM pada tahun 2012-2015 pada jenjang pendidikan SD/MI mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2012 mencapai 95.3% naik menjadi 95.9% pada tahun 2013, selanjutnya meningkat lagi pada tahun 2014 menjadi 95.98% dan mengalami penurunan menjadi 90.8% pada tahun 2015. selanjutnya pada jenjang pendidikan SMP/MTs juga mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2012 mencapai 81% naik menjadi 81.1% pada tahun 2013, selanjutnya meningkat lagi pada tahun 2014 menjadi 83.4% dan mengalami penurunan menjadi 79.96% pada tahun 2015. Pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA juga mengalami kondisi fluktuatif, dimana pada tahun 2012 mencapai 62.65% menurun menjadi 54.1% pada tahun 2013, selanjutnya meningkat lagi pada tahun 2014 menjadi 62.5% dan mengalami kenaikan kembali menjadi 63.85% pada tahun 2015.

Realisasi capaian indikator Angka Putus Sekolah (APS) pada jenjang pendidikan SD/MI menunjukkan tren yang kurang begitu baik seperti pada tahun 2012 mencapai 97.6% naik menjadi 99.7% pada tahun 2013, pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 98.7% dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi

98.9%. Pada jenjang pendidikan SMP/MTS juga menunjukkan tren kurang baik pada tahun 2012 mencapai 89.9% naik menjadi 97.6% pada tahun 2013. Selanjutnya mengalami kenaikan kembali pada tahun 2014 mencapai 99.0% dan mengalami kenaikan mencapai 99.9% pada tahun 2015. Pada jenjang SMA/SMK/MA mengalami fluktuatif pada tahun 2012 mencapai 83.5% menurun menjadi 66.9% pada tahun 2013. Selanjutnya meningkat kembali pada tahun 2014 mencapai 73.34% dan mengalami kenaikan kembali menjadi 73.64% pada tahun 2015. Pada paparan capaian APS tersebut telah menggambarkan upaya Pemerintah Kota Batu dalam menekan jumlah anak yang putus sekolah sebagai wujud dari tanggung jawab terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak.

Tabel 2.22. Indikator Layanan Pendidikan Kota Batu Tahun 2012-2017

Bidang urusan/ indikator	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	8,52	8,54	8,81	9,18	9,19
Sekolah Dasar (SD/MI)					
Angka partisipasi sekolah	97.6	99.7	98.7	98.9	98.8
Rasio murid persekolah	221.94	219.4	219	216	214
Rasio guru terhadap murid	16.9	12.82	12	13	16
Rasio murid perkelas	27.55	28.65	28	26	25
Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)					
Angka Partisipasi Sekolah	89.9	97.6	99	99.9	99.9
Rasio murid persekolah	328.31	303.4	303	333	330
Rasio guru terhadap murid	13.19	8.47	8	13	13
Rasio murid perkelas	27.67	30.4	30	45	44
Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)					

Bidang urusan/ indikator	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Partisipasi Sekolah	83.5	66.9	73.34	73.64	73.65
Rasio murid persekolah	289.29	251.7	251	348	340
Rasio guru terhadap murid	83.94	8.84	8	10	10
Rasio murid perkelas	26.3	25.7	25	45	43
Fasilitas Pendidikan					
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	88	88	88	88	88
Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	31	31	30	30	30
Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	25	28	27	27	27
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	196	196	190	198	199

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batu, 2017

Penyelenggaraan urusan pendidikan dapat dibagi menjadi beberapa aspek tujuan diadakannya indikator kinerja urusan. Diantaranya adalah indikator yang digunakan untuk melihat tingkatan partisipasi pendidikan, melihat sejauh mana tingkat buta huruf masyarakat, melihat ketersediaan dan pemerataan tenaga pendidik dan melihat ketersediaan sarana prasarana penunjang pendidikan. Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas, dengan asumsi usia penduduk 25 tahun sudah menyelesaikan semua pendidikan formal.

2.3.1.2. Urusan Kesehatan

Kesehatan masyarakat merupakan hal mutlak untuk diperhatikan oleh pemerintah Kota Batu. Penyelenggaraan urusan

kesehatan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Sehat selain sebagai salah satu hak dasar manusia, juga merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), yang bersama faktor pendidikan dan ekonomi menjadi ukuran untuk menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di lain pihak, sehat mulai dari janin dalam kandungan, anak balita, remaja, dewasa dan usia lanjut juga perlu diupayakan dan diperjuangkan. Upaya pencapaian tujuan tersebut ditempuh melalui berbagai kebijakan diantaranya dengan peningkatan upaya Promosi Kesehatan, Budaya hidup bersih dan sehat, penyehatan lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau, penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan penyandang masalah sosial lainnya serta peningkatan SDM bidang kesehatan yang terampil dan profesional di bidangnya.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: perilaku, lingkungan, sosial budaya, dan fasilitas kesehatan serta peran serta masyarakat. Untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan pelayanan urusan kesehatan pada masyarakat, Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Kesehatan terus berupaya meningkatkan capaian derajat kesehatan

masyarakat melalui pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai tugas fungsi dan kewenangannya.

Tabel 2.23. Indikator Layanan Kesehatan Kota Batu Tahun 2012-2016

NO	INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	angka	25.50	25.00	24.50	24.00	23.60
2	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	angka	107.33	30.2	31	35	95
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	persentase	81.29	95.53	95.4	95.38	95.06
4	Cakupan puskesmas	unit	5	5	5	5	5
5	Cakupan pembantu puskesmas	unit	5	5	5	5	5
6	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	persentase	74.87	90.21	93.5	93.53	92.85
7	Cakupan pelayanan nifas	persentase	80.4	91.45	95.1	95.06	91.58
8	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	persentase	2847	3119	3252	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batu 2018

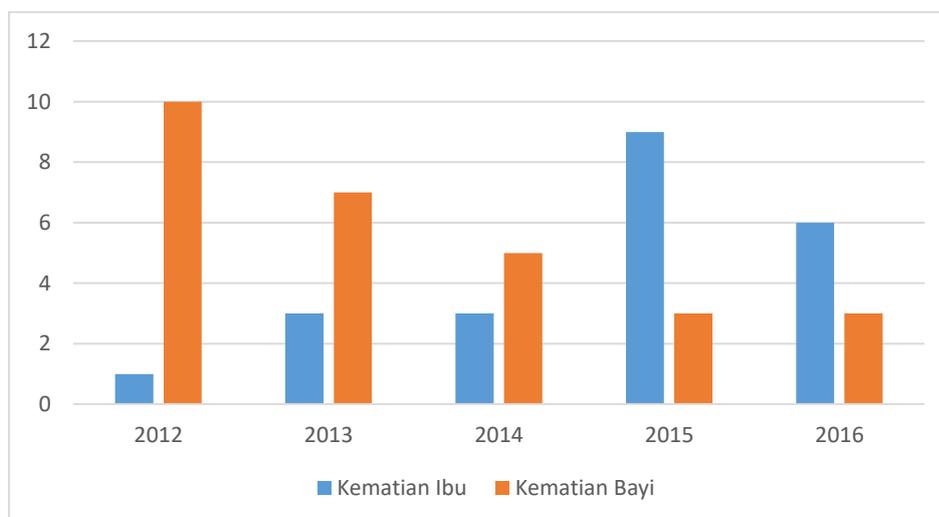
Cara lain untuk melihat tingkat kesehatan masyarakat adalah melalui Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI). Angka kematian bayi di Kota Batu dari tahun 2012-2017 memiliki nilai seperti tabel berikut:

Tabel 2.24. Angka Kematian Bayi & Ibu Melahirkan Tahun 2012-2017

Uraian	Satuan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
Angka Kematian Ibu	kasus	1	3	3	9	6
Angka Kematian Bayi	kasus	10	7	5	3	3

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Batu, 2017

Angka Kematian Bayi di Kota Batu terus mengalami penurunan, pada tahun 2014 AKB sebesar 5 kasus, dan Tahun 2015 dan 2016 menurun menjadi 3 kasus. Penyebab terbesar kematian bayi adalah BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah), disusul kasus Akfisia (sesak napas), Pneumonia. Sedangkan Angka Kematian Ibu di Kota Batu mengalami fluktuatif, terjadi kenaikan dari tahun 2014 ke tahun 2015, dari 3 kasus menjadi 9 kasus, dan mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 6 kasus. Penyebab terbesar kematian Ibu hamil diantaranya disebabkan keracunan kehamilan, pendarahan, dan sisanya karena penyakit penyerta lainnya.



Gambar 2.5. Angka Kematian Bayi dan Ibu Melahirkan Tahun 2012- 2016

2.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Pada dasarnya Urusan Pekerjaan Umum dengan tolok ukur dukungan infrastruktur berupa sarana dan prasarana fasilitas jalan/jembatan turut berperan dalam keberhasilan pembangunan bidang ekonomi di suatu daerah. Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, prasarana dan sarana dasar permukiman merupakan modal penting masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonominya. Sedangkan pengembangan prasarana irigasi ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan dan penyediaan air untuk kepentingan persawahan.

Sebagai pendukung pelaksanaan pembangunan di semua sektor, urusan pekerjaan umum mengampu beberapa layanan yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah, yaitu:

- 1) bidang Sumber Daya Air yang mengampu pengelolaan sungai dan infrastruktur irigasi yang menjadi kewenangan Kota/Kabupaten,
- 2) bidang Keciaptakaryaan yang mengampu pelaksanaan penugasan penyediaan infrastruktur dasar untuk peningkatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat,

peningkatan layanan masyarakat, dan kelestarian lingkungan di perkotaan dan perdesaan, meliputi: permukiman, air minum, air limbah, persampahan, drainase, dan penataan bangunan dan lingkungan,

- 3) bidang Kebinamargaan mengampu pelaksanaan pengelolaan jalan dan jembatan berstatus jalan kabupaten/kota, baik yang terkait pemeliharaan rutin, rehabilitasi, peningkatan maupun pembangunan dari jaringan jalan yang ada di Wilayah Kota Batu, serta;
- 4) bidang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang meliputi fungsi pengembangan, pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.

Indikator sasaran Urusan Pekerjaan Umum tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan yang mendukungnya dalam tahun 2016. Kinerja Urusan Pekerjaan Umum yang dicapai hingga tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan jenis permukaannya, di Kota Batu terdapat sepanjang 379 km jalan aspal, sepanjang 8,75 km jalan beton, dan sepanjang 14,74 km jalan tanah.

- 2) Pada tahun 2016, dari 441,99 km jalan di Kota Batu, berdasarkan Kondisi Fisiknya, di Kota Batu terdapat sepanjang 338,50 km jalan dalam kondisi mantap, sepanjang 299 km jalan baik, dan sepanjang 80 km jalan rusak serta sepanjang 24,49 km jalan rusak berat.
- 3) Jembatan dalam kondisi baik mencapai target 100,00%. Pada tahun 2016, prasarana jembatan di Kota Batu sejumlah 312 buah, berdasarkan jenis konstruksinya terdapat 44 buah jembatan komposit, 3 buah jembatan busur, 246 buah jembatan beton, 13 buah jembatan plat dan 5 buah jembatan rangka baja, serta 1 buah jembatan gantung.
- 4) Rasio jaringan irigasi di Kota Batu pada tahun 2016 mencapai 0,017% dan luas irigasi dalam kondisi baik mencapai 22.219,41 m²/ha.

Tabel 2.25. Indikator Layanan Pekerjaan Umum
Tahun 2012-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun			
			2012	2013	2014	2015
1	Jalan Berdasarkan Jenis Permukaannya					
	a) Jalan Aspal	km	186.02	239.43	348.46	379
	b) Jalan Batu/kerikil	km	71.27	62.8	30.2	-
	c) Jalan Beton	km	0.15	-	6.29	8.75
	d) Jalan tanah	km	85.2	70	17.54	14.74
	e) Jalan paving	km	20.5	20.5	-	-
2	Jalan Berdasarkan Kondisi Fisiknya					
	a) Jalan Provinsi	km	39.5	39.5	39.5	39.5

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun			
			2012	2013	2014	2015
	- Mantap	km	29.5	32.9	33	37
	- Baik	km	29.5	32.9	33	37
	- Sedang	km	-	-	-	-
	- Tidak Mantap	km	-	-	-	-
	- Rusak Ringan	km	7.5	5.6	6.5	2.5
	- Rusak Berat	km	2.5	1		
	b) Jalan Kota	km	362.99	392.73	402.49	402.49
	- Mantap	km	186.02	239.43	247.92	299
	- Baik	km	186.02	239.43	247.92	299
	- Sedang	km	-	-	-	-
	- Tidak Mantap	km	-	-	-	-
	- Rusak Ringan	km	105.8	96.42	100.54	80
	- Rusak Berat	km	71.17	56.88	54.03	23.49
3	Jembatan					
	- Mantap	Buah	-	-	-	-
	- Baik	Buah	28	28	35	35
	- Sedang	Buah	-	-	-	-
	- Tidak Mantap	Buah	-	-	-	-
	- Rusak Ringan	Buah	-	-	3	2
	- Rusak Berat	Buah	-	-	-	-
4	Cakupan Irigasi					
	a) Prosentase Luasan Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi	%	47.32	-	59	62
	b) Rasio Jaringan Irigasi	%	21.1	38.11	45.82	51.42
	c) Luas irigasi dalam kondisi baik	ha	-	-	995.46	1,079.16

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu Tahun 2018

2.3.1.4. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Tempat tinggal/perumahan merupakan salah satu kebutuhan yang cukup penting dalam kehidupan manusia di samping kebutuhan makanan, pakaian maupun kesehatan. Tempat tinggal bukan hanya diperlukan sebagai tempat berlindung, tetapi juga sebagai tempat untuk istirahat, beribadah, berkomunikasi dengan

keluarga, sosialisasi dengan lingkungan, serta tempat untuk mendidik anak-anak.

Untuk itu kondisi rumah yang ideal adalah rumah yang dalam kondisi baik, cukup luas untuk suatu keluarga, dan terbuat dari bahan bangunan yang baik dan memiliki fasilitas tempat tinggal yang memadai, sehingga akan mendukung keadaan rumah yang nyaman, aman, serta berada dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Karena keadaan perumahan akan mempengaruhi derajat kesehatan penduduk.

Rumah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator bagi kesejahteraan pemiliknya. Semakin baik fasilitas yang dimiliki, dapat diasumsikan semakin sejahtera rumah tangga yang menempati rumah tangga tersebut. Berbagai fasilitas yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan tersebut antara lain dapat dilihat dari luas lantai rumah, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar rumah tangga dan juga tempat penampungan kotoran akhir. Indikator perumahan adalah salah satu ukuran yang dapat diamati untuk melihat sejauh mana target pembangunan di bidang perumahan tercapai.

Rumah yang sehat adalah rumah yang berada dalam lingkungan yang bersih dan sehat, serta mempunyai kualitas

bangunan yang baik dengan penataan ventilasi yang baik. Kualitas bangunan tempat tinggal dapat dilihat dari kondisi perumahan tersebut, terutama dari jenis atap, dinding, lantai dan juga fasilitas di dalamnya. Kondisi perumahan yang baik akan memberikan kenyamanan hidup bagi seluruh anggota rumah tangga.

Selain itu kualitas tempat tinggal juga dilihat dari luas lantai hunian rumah tangga. Luas lantai dapat digunakan sebagai ukuran seberapa luas ruang gerak anggota rumah tangga, luas lantai harus proporsional antara luas dan jumlah penghuninya. Luas ruangan rumah juga sangat berperan untuk menambah estetika dalam pengaturan ruang.

Luas lantai rumah tinggal selain digunakan sebagai indikator untuk menilai kemampuan sosial masyarakat, secara tidak langsung juga dikaitkan dengan system kesehatan lingkungan keluarga atau tempat tinggal (perumahan). Luas lantai erat kaitannya dengan tingkat kepadatan hunian atau rata-rata ruang gerak untuk setiap anggota keluarga. Data Susenas BP menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang mempunyai rumah dengan luas lantai 50-99 m² mempunyai prosentase paling besar yaitu 54,04 persen, sedangkan rumah tangga yang

menempati rumah dengan luas lantai < 20 m² hanya mencapai 0,30 persen.

Jenis lantai juga dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kualitas perumahan, semakin baik kualitas lantai perumahan dapat diasumsikan semakin membaik tingkat kesejahteraan penduduknya. Rumah tangga dengan jenis lantai keramik atau marmer mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik dari pada rumah tangga yang menggunakan jenis lantai semen, ubin atau tanah. Selain itu, jenis lantai juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Semakin banyak rumah tangga yang mendiami rumah dengan lantai tanah akan berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Karena lantai tanah dapat menjadi media yang subur bagi timbulnya kuman penyakit dan media penularan bagi jenis penyakit tertentu. Di Kota Batu, rata-rata persentase jenis lantai bukan tanah sebesar 96,99 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi rumah atau tempat tinggal di Kota Batu semakin baik karena persentase jenis lantainya sebagian besar bukan tanah.

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah tangga akan menentukan nyaman atau tidaknya suatu rumah tinggal, yang juga menentukan kualitas suatu rumah tinggal. Fasilitas pokok yang

penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya sarana penerangan listrik, air bersih serta jamban dengan tangki septik.

Rumah tangga dengan sumber penerangan listrik PLN maupun non PLN terus mengalami kenaikan persentase. Sejak tahun 2013 jumlah rumah tangga yang sudah menikmati penerangan listrik PLN sudah mencapai 100 persen. Hal tersebut dikarenakan bahwa kebutuhan penerangan listrik sudah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Kota Batu.

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Pada tahun 2014 rumah tangga di Kota Batu yang menggunakan air bersih mencapai 99,81 persen meningkat menjadi 99,9 persen pada tahun 2015. Yang termasuk air bersih adalah air leding dan air kemasan.

Masalah kondisi lingkungan tempat pembuangan kotoran manusia tidak terlepas dari aspek kepemilikan terhadap sarana yang digunakan terutama dikaitkan dengan tanggung jawab dalam

pemeliharaan dan kebersihan sarana. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik. Pada tahun 2014 rumah tangga yang memiliki jamban sendiri dengan tangki septik mencapai 93,82 persen meningkat menjadi 94,69 persen pada tahun 2015.

Pencemaran dari sanitasi rumah juga bisa bersumber dari kondisi rumah yang terlalu padat ataupun kumuh. Dengan tingkat kepadatan rumah yang tinggi, ada kecenderungan sistem pembuangan limbah rumah tangga akan sulit terjaga. Jarak antara tempat penampungan akhir tinja/kotoran terhadap sumber air minum seharusnya minimal 10 meter, batasan ini untuk menghindari terkontaminasinya air dari penyakit yang bersumber dari limbah rumah tangga.

2.3.1.5. Urusan Sosial

Permasalahan sosial dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan baik dalam kuantitas maupun kompleksitas masalahnya. Kompleksitas masalah menuntut adanya profesionalisme dalam pemberian pelayanan kesejahteraan sosial dan peran serta dari seluruh pihak dalam penanganan permasalahan sosial. Peran serta dari seluruh pihak menjadi kata

kunci untuk menangani berbagai permasalahan sosial yang ada. Permasalahan sosial tidak akan mampu ditangani oleh pemerintah saja tetapi harus melibatkan masyarakat sebagai subyek perubahan, dunia usaha dengan *Corporate Sosial Responcibility* (CSR) serta peran perguruan tinggi sebagai kaum intelektual untuk bersama-sama menangani permasalahan sosial.

Permasalahan kemiskinan di Kota Batu menjadi prioritas utama untuk ditangani bersama. Permasalahan ini tidak mungkin dapat ditangani oleh pemerintah daerah sendiri atau pemerintah pusat saja tetapi harus menjadi tugas dan prioritas bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta melibatkan seluruh elemen masyarakat lainnya seperti penduduk miskin itu sendiri sebagai subyek perubahan, dunia usaha, dan perguruan tinggi.

Sasaran utama penanganan permasalahan sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Kesulitan, hambatan atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitas, ketunaan sosial,

keterbelakangan atau kondisi perubahan lingkungan yang kurang mendukung.

Dalam penanganan permasalahan sosial, pemerintah daerah tidak hanya menangani langsung terhadap penyandang masalahnya tetapi juga mendorong tumbuh berkembangnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pembangunan urusan sosial diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan, pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga diharapkan masyarakat mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara wajar, baik jasmani, rohani maupun sosial dengan mengoptimalkan fungsi dan peran serta dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dunia usaha dan masyarakat dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). Dengan bekerja seoptimal mungkin agar pelayanan kepada PMKS ini dapat memberikan manfaat dan kemajuan hidup bagi masyarakat yang seharusnya memperoleh pelayanan.

Selain itu pembangunan urusan sosial juga diarahkan untuk menyikapi bencana yang kemungkinan terjadi sehingga dapat dilakukan tindakan preventif dan penanganan selama bencana serta pasca bencana yang terjadi.

Urusan sosial diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker). Untuk mencapai indikator utama sebagai acuan kondisi kemajuan sosial di Kota Batu pada tahun 2015 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan. Jumlah program urusan sosial sebanyak 5 program dengan 21 kegiatan.

Dalam kerangka kesejahteraan sosial, pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan, pelayanan terhadap Penyandang Masyarakat Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga diharapkan masyarakat mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara wajar, baik jasmani, rohani maupun sosial dengan mengoptimalkan fungsi dan peran serta dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dunia usaha dan masyarakat dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). Dengan bekerja seoptimal mungkin agar pelayanan kepada PMKS ini dapat memberikan manfaat dan kemajuan hidup bagi masyarakat yang seharusnya memperoleh pelayanan.

Dari jumlah penduduk yang ada di Kota Batu, terdapat 7.880 jiwa (3,67%). Pada tahun 2015 sejumlah tersebut di atas sudah tertangani/terlayani sebanyak 2.727 orang melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), yang mendapat bantuan sosial sejumlah 4.206 orang.

2.3.1.6. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan kewenangan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar. Upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi prasyarat bagi terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah.

Kebijakan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, menekankan pada peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, terjaganya ketenteraman umum dan terbinanya ketertiban umum sebagai antisipasi terjadinya konflik yang berbasis SARA, anarkis, separatisme atau lainnya. Untuk itu dari tahun ke tahun telah

dilaksanakan penertiban PKL, operasi gelandangan, pengemis dan tuna susila.

Dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan daerah dan kehidupan demokrasi harus diciptakan lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatif terhadap munculnya kerawanan-kerawanan sosial, politik, ekonomi, dan bencana yang meresahkan masyarakat serta meningkatkan iklim politik yang kondusif dan stabilitas politik daerah guna mendukung terselenggaranya pembangunan daerah di Kota Batu yang dinamis.

Kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Batu dapat dikatakan cukup kondusif, selama tahun 2015 tidak ada kejadian-kejadian yang menonjol yang berkaitan atau menjurus ke arah SARA, anarkhisme, separatisme, akan tetapi untuk kasus unjuk rasa/demo masih terjadi di Kota Batu namun masih bisa diselesaikan dan ditangani. Pada dasarnya kegiatan ini sifatnya koordinasi antar anggota Muspida Kota Batu untuk mengambil kebijakan terkait masalah/gangguan/kerawanan konflik yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas daerah.

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan program-program antara lain:

- 1) Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
- 2) Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- 3) Pengamanan Acara Pemda, Hari-hari Besar Keagamaan dan Nasional Daerah
- 4) Program Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
- 5) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- 6) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- 7) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
- 8) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan

Masyarakat diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk mencapai indikator

utama sebagai acuan kondisi kemajuan sosial di Kota Batu pada tahun 2015 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan.

Penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah Kota Batu dilakukan dengan pendekatan *preemptif*, preventif, persuasif, dan represif. Pendekatan *preemptif*, preventif, dan persuasif lebih diutamakan dari pada pendekatan represif. Penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, serta peraturan perundang-undangan lainnya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu dengan sosialisasi, pemantauan, operasi non yustisi, dan operasi yustisi. Peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi target, disosialisasikan kepada masyarakat, selanjutnya dipantau apakah masyarakat sudah memahami dan menaati peraturan daerah, peraturan kepala daerah, serta peraturan perundang-undangan tersebut. Dari hasil pemantauan dapat diketahui tingkat kesadaran masyarakat. Bagi masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan dikenakan operasi non yustisi, yaitu diberikan pembinaan dan teguran disertai berita acara dan pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya perlakuan terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan ditingkatkan

menjadi operasi yustisi, yaitu bagi masyarakat yang melanggar peraturan perundang-undangan diproses secara hukum.

2.3.1.7. Urusan Ketenagakerjaan

Urusan ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang diamanatkan oleh UU 23 Tahun 2014. Kewenangan pemerintah daerah terkait dengan ketenagakerjaan antara lain terkait dengan pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan tenaga kerja dan pengawasan industrial.

Pada urusan ketenagakerjaan, penduduk sebagai pelaksana dan sasaran pembangunan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk itu perkembangan penduduk perlu diarahkan agar mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang menguntungkan untuk pembangunan seperti terkendalinya pertumbuhan penduduk dan terarahnya mobilitas penduduk.

Salah satu aspek kependudukan yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia adalah ketenagakerjaan, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Bagi individu-individu, dimensi ekonomi berkaitan dengan pemenuhan hidup sehari-hari sedangkan dimensi sosial berkaitan dengan pengakuan masyarakat

terhadap kemampuan individu. Setiap upaya pembangunan bidang ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pencari kerja sehingga nantinya mampu bersaing di dunia pasar kerja dan dunia usaha sebagai tenaga kerja yang siap pakai. Dalam hal ini penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dengan mengadakan pendidikan pelatihan, keterampilan bagi para pencari kerja yang belum bekerja, dan juga memberikan pelayanan informasi penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri.

Selain itu juga pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, antara pekerja dan pengusaha dan juga antara pengusaha dengan serikat pekerja. Oleh karena itu diperlukan pengawasan ketenagakerjaan yang mencakup pengawasan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pengawasan perlindungan atas hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja sehingga mencegah adanya kasus-kasus perselisihan antara pekerja, dan serikat pekerja dengan pengusaha.

Tabel 2.26. Indikator Layanan Ketenagakerjaan Tahun 2012-2016

NO	INDIKATOR	Satuan	CAPAIAN				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Angkatan Kerja	Jiwa	143,150	142,902	145,140	153,794	156,456

2	Penduduk Kota Batu berumur 15 Tahun Ke Atas	Jiwa	101,733	103,743	106,777	106,777	107,559
3	Penduduk yang bekerja	Jiwa	98,261	101,339	104,177	100,970	103,254

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu 2018

Pada tahun 2016 dari total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) sekitar 68,60 persen penduduk Kota Batu termasuk angkatan kerja, angka ini menurun dibanding angka angkatan kerja tahun 2014 yang mencapai 70,38 persen. Beberapa indikator yang bisa digunakan untuk memantau perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Kota Batu antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan.

TPAK Kota Batu tahun 2016 dan 2014 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2013. TPAK Kota Batu tahun 2013 sebesar 70,74 persen sedangkan tahun 2014 hanya 70,38 persen dan turun lagi pada tahun 2016 sebesar 68,60 persen. TPAK 68,60 mempunyai arti bahwa dari 100 penduduk yang berumur 15 tahun ke atas, 68 orang diantaranya termasuk angkatan kerja.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kota Batu pada tahun 2015 sebesar 95,71 persen, menurun dibanding tahun 2014 sebesar 97,57 persen. Angka TKK 95,71 persen artinya bahwa setiap 100

penduduk angkatan kerja 95 diantaranya sudah bekerja. Dari hasil Sakernas diketahui bahwa jumlah angkatan kerja penduduk Kota Batu yang terserap dalam kegiatan ekonomi (bekerja) pada tahun 2015 sebesar 105.496 atau sebanyak 95,71 persen turun dibanding angka tahun 2014 sebanyak 104.177 atau 97,56 persen terhadap jumlah angkatan kerja.

Selanjutnya indikator makro yang digunakan untuk melihat perkembangan pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Penduduk usia 15 tahun ke atas yang mencari pekerjaan pada tahun 2015 tercatat sebesar 4,29 persen dibandingkan dengan tahun 2014 yang tercatat 2,18 persen angka ini mengalami kenaikan. Beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan angka TPT ini antara lain:

- 1) Daya saing tenaga kerja yang masih relatif lemah dan adanya kebijakan standarisasi penerimaan tenaga kerja yang dikeluarkan perusahaan belum disertai dengan peningkatan kualitas SDM daerah yang ada.
- 2) Adanya kebijakan rasionalisasi karyawan perusahaan.
- 3) Kecenderungan para lulusan sekolah maupun perguruan tinggi yang mulai berorientasi pada pekerjaan perkantoran dari pada berwirausaha khususnya di sektor agraris.

- 4) Penyampaian informasi ketersediaan lapangan pekerjaan belum sampai menyentuh wilayah perdesaan.

Berdasarkan perbandingan menurut tiga sektor utama, pilihan bekerja di sektor pertanian pada tahun 2015 mencapai 29,83 persen. Sedangkan sektor industri 16,22 persen dan paling banyak penduduk Kota Batu bekerja di Sektor Jasa-jasa yaitu 53,94 persen. Sektor perdagangan dan pertanian mendominasi jenis lapangan usaha yang banyak dikerjakan oleh tenaga kerja di Kota Batu. Penduduk yang bekerja di sektor perdagangan dan pertanian pada tahun 2015 sebesar 59,90 persen. Sektor perdagangan dan pertanian masih mendominasi lapangan usaha yang dikerjakan tenaga kerja di Kota Batu. Hal ini terjadi seiring dengan dicanangkannya Kota Batu sebagai Kota Wisata yang berbasis agropolitan sehingga memberikan kesempatan kerja bagi penduduk Kota Batu di sektor perdagangan dan pertanian.

Pada tahun 2016 penduduk Kota Batu yang bekerja, sebanyak 35,879 persen berstatus sebagai buruh atau karyawan, kemudian 17,639 persen berusaha sendiri. Diantara status pekerjaan tersebut yang paling kecil adalah berusaha dengan buruh tetap hanya sebesar 5,672 persen. Sisanya 41,15 persen berstatus berusaha

sendiri dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas pertanian, pekerja bebas non pertanian dan pekerja tidak dibayar.

Pada tahun 2016 berdasarkan data yang dilaporkan, jumlah pemutusan hubungan kerja yang terjadi sejumlah 184 orang, dimana pemutusan hubungan kerja terjadi karena pegawai yang bersangkutan mengundurkan diri, dan pension dini dari tempat mereka bekerja.

2.3.1.8. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan

Anak

Pembangunan menuntut suatu negara untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki, sehingga mendatangkan kesejahteraan bagi warga negaranya. Agar pembangunan yang berkelanjutan terwujud dibutuhkan langkah-langkah konkret. Salah satunya melalui program pemberdayaan masyarakat.

Dalam praktiknya program pemberdayaan sering kali mengalami permasalahan, salah satunya adalah tidak meratanya program pemberdayaan yang diterima oleh masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu perbedaan jenis kelamin yang sering kali menghambat masyarakat dengan jenis kelamin tertentu (misal perempuan) untuk berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan.

Pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah proses sekaligus tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah kegiatan memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat menjadi berdaya.

Urusan pemberdayaan perempuan diarahkan pada upaya meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan urusan Perlindungan anak dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, keamanan dan kenyamanan kepada anak (mulai dari masih dalam kandungan hingga usia 18 tahun) sehingga proses tumbuh kembang anak berjalan dengan baik. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah upaya terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan untuk meningkatkan

wawasan, kepedulian, perhatian, kapasitas perempuan, dan perlindungan anak.

Program dan kegiatan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh 2 Perangkat Daerah, yaitu Dinas Pendidikan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB) Kota Batu. Untuk mencapai indikator utama sebagai acuan kondisi kemajuan sosial di Kota Batu pada tahun 2015 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan. Pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, laki-laki, perempuan, anak-anak maupun orangtua secara adil, efektif dan akuntabel.

Partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2016 sebesar 45%, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 35%.

2.3.1.9. Urusan Pangan

Amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 terkait urusan pangan kepada pemerintah kabupaten adalah: 1) menyediakan sarpras dan infrastruktur pendukung ketahanan pangan; 2)

pengelolaan cadangan pangan; 3) stabilisasi pasokan dan harga pangan utama; 4) penyusunan kerentanan dan ketahanan pangan utama; 5) pengawasan terhadap pangan segar; 6) penanganan terhadap daerah rawan pangan. Adapun lingkup pembangunan pangan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan meliputi: 1) perencanaan Pangan; 2) Ketersediaan Pangan; 3) keterjangkauan Pangan; 4) konsumsi Pangan dan Gizi; 5) Keamanan Pangan; 6) label dan iklan Pangan; 7) pengawasan; 8) sistem informasi Pangan; 9) penelitian dan pengembangan Pangan; 10) kelembagaan Pangan; 11) peran serta masyarakat; dan 12) penyidikan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menjelaskan bahwa ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. WHO mengklasifikasikan komponen yang mendukung terhadap ketahanan pangan menjadi tiga, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan meliputi distribusi dan harga serta pemanfaatan pangan. Perwujudan ketahanan pangan yang mantap

perlu didukung oleh semua sektor yang terkait untuk menciptakan kondisi ketersediaan pangan yang cukup, keterjangkauan pangan oleh masyarakat dan pemanfaatan/konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

Pembangunan ketahanan pangan di Kota Batu merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, oleh karena itu arah dan kebijakan pembangunan ketahanan pangan di daerah dirumuskan dalam kerangka dan mengacu pada arah dan kebijakan pemerintah pusat serta sinergitas program dan kegiatan lintas sektoral. Untuk mendukung upaya-upaya koordinasi tersebut, di Kota Batu telah dibentuk dewan ketahanan pangan.

Pembangunan ketahanan pangan di Kota Batu merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, oleh karena itu arah dan kebijakan pembangunan ketahanan pangan di daerah dirumuskan dalam kerangka dan mengacu pada arah dan kebijakan pemerintah pusat serta sinergitas program dan kegiatan lintas sektoral. Untuk mendukung upaya-upaya koordinasi tersebut, di Kota Batu telah dibentuk dewan ketahanan pangan. Urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Kehutanan serta Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Batu. Capaian

indikator sasaran Urusan Ketahanan Pangan tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan sebagai berikut:

2.3.1.10. Urusan Pertanahan

Kewenangan urusan pertanahan kabupaten/kota sesuai dengan amanat Keputusan Presiden No. 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan yang meliputi 9 sub bidang yaitu 1) pemberian izin lokasi; 2) penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; 3) penyelesaian sengketa tanah garapan; 4). penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; 5) penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; 6) penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; 7) pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; 8) pemberian izin membuka tanah dan 9) perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan Urusan Pertanahan ditujukan untuk peningkatan tertib administrasi pertanahan di Kota Batu, baik menyangkut fasilitasi alih fungsi lahan, penetapan lokasi, tukar menukar tanah Pemerintah Daerah, penyelesaian permasalahan tanah lainnya, fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan

umum dan kepentingan instansi pemerintah serta pensertifikatan tanah milik Pemda.

Capaian indikator sasaran urusan pertanahan tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa *outcome* yang menunjukkan keberhasilan sebagai berikut:

Indikator Penyelesaian Konflik pertanahan ditargetkan 60% terealisasi sebesar 40% (capaian 66%). Kendala/hambatan dalam pencapaian sasaran adalah kurangnya peran bagian administrasi pemerintahan dalam urusannya dengan pertanahan karena hanya sebagai fasilitator untuk Badan Pertanahan. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan peran bagian administrasi pemerintahan dalam urusannya dengan pertanahan.

2.3.1.11. Urusan Lingkungan Hidup

Air, udara dan tanah/lahan merupakan sumberdaya yang diperlukan oleh manusia untuk melangsungkan hidupnya. Namun disisi lain ketiga sumberdaya ini cenderung terus mengalami pencemaran/kerusakan akibat dampak negatif dari aktifitas pembangunan yang dilakukan oleh manusia. Status kualitas air, udara dan lahan mempengaruhi derajat kesehatan dan kesejahteraan kehidupan manusia baik secara langsung maupun

tidak langsung. Kualitas air terutama air sungai terpengaruh oleh aktifitas manusia diantaranya:

1. Pembuangan limbah cair dan sampah ke sungai secara ilegal baik yang berasal dari rumah tangga maupun peternakan dan UMKM.
2. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang tidak ramah lingkungan pada sektor pertanian masih tinggi.
3. Konversi lahan pertanian, perkebunan dan hutan menjadi daerah permukiman, kawasan perdagangan dan pusat produksi barang atau jasa mengakibatkan peningkatan volume limbah dan sampah yang masuk ke sungai.
4. Degradasi fungsi lahan pada daerah resapan air akibat adanya penurunan kerapatan vegetasi dan menyebabkan air hujan kurang efektif terserap tanah sehingga berpotensi menurunkan debit air sungai. Berkurangnya debit air sungai mengakibatkan konsentrasi zat pencemar meningkat meskipun volume zat pencemar relatif tetap.

Dari hasil pemantauan 12 titik pantau sungai Brantas di mulai dari Arboretum sampai dengan Kelurahan Dadaprejo Kota Batu tahun 2016 terutama parameter bakteri koli tinja, total koli, BOD dan COD ada kecenderungannya dari waktu ke waktu termasuk dalam kategori cemar sedang. Kualitas udara ambien tergantung

konsentrasi zat-pencemar baik berupa gas maupun partikel debu di udara. Secara umum kualitas udara di Kota Batu masih dalam kategori sehat, namun untuk parameter CO, HC dan kebisingan perlu mendapat perhatian, karena cenderung mengalami peningkatan dan mengindikasikan penurunan kualitas udara ambien, khususnya pada jalan padat lalu-lintas. Sumber pencemar udara di Kota Batu didominasi dari sumber pencemar yang bergerak (aktifitas transportasi) kurang lebih sekitar 75 persen, sedangkan 25 persen merupakan akumulasi dari sumber yang tidak bergerak, pembakaran sampah dan aktifitas rumah tangga dan sumber pencemar alami.

Jumlah kendaraan di Kota Batu terus meningkat cukup signifikan dari waktu ke waktu. Disamping itu, Kota Batu sebagai daerah tujuan wisata terutama pada hari-hari libur dikunjungi banyak wisatawan yang menggunakan kendaraan bus maupun kendaraan pribadi. Kondisi ini menyebabkan pencemaran udara di Kota Batu cenderung terus mengalami peningkatan.

Lahan atau tanah sebagai tempat kehidupan bagi manusia serta berbagai flora dan fauna mempunyai kapasitas daya dukung dan daya tampung tertentu. Apabila daya dukung dan daya tampungnya terlampaui akan menyebabkan penurunan derajat

kesehatan dan kesejahteraan manusia. Hasil dari uji petik dari 9 sampel tanah untuk produksi biomassa (khususnya persawahan) di Kecamatan Bumiaji dapat disimpulkan bahwa pada area/lokasi pengambilan sampel tersebut telah terjadi kerusakan tanah. Mempertahankan daya dukung dan daya tampung lahan merupakan hal yang penting dilaksanakan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan.

Prosentase peningkatan kualitas lingkungan pada tahun 2016 dihitung berdasarkan peningkatan kumulatif status mutu air, yang dihitung dari data kualitas air sungai (parameter kunci COD dan BOD) dan kualitas udara ambien (parameter kunci CO dan HC). Kualitas air sungai dianalisa dari hasil uji pada 12 titik pantau sungai Brantas di mulai dari Arboretrum sampai dengan Kelurahan Dadaprejo Kota Batu, sedangkan untuk kualitas udara ambien berdasarkan hasil uji lokasi tepi jalan protokol (roadside), kawasan permukiman dan sekitar kawasan industri. Upaya memperbaiki kualitas air sungai kegiatan yang dilaksanakan melalui pembinaan dan pengawasan kepada para pelaku usaha/kegiatan maupun masyarakat untuk tidak/mengurangi pembuangan sampah/limbah ke sungai, fasilitasi pengembangan kelompok masyarakat peduli sungai, pemberian percontohan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan

masyarakat. Upaya memperbaiki kualitas udara ambien dilaksanakan dengan penanaman pohon perindang di perkotaan, penyadaran publik melalui uji emisi kendaraan bermotor serta pembinaan kepada pelaku usaha yang potensial menimbulkan pencemaran udara dan potensi perusakan lapisan ozon.

2.3.1.12. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Salah satu agenda pembangunan penting di Kota Batu adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance). Dukungan kinerja pemerintahan terangkum dalam indikator-indikator urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan yang mendukungnya.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Informasi administrasi kependudukan memiliki nilai strategi bagi penyelenggara pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara terkordinasi dan berkesinambungan, akan menjamin stabilitas pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan, dan pemerintah menetapkan kebijakan sistem informasi administrasi kependudukan dan akta catatan sipil. Guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan,

Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil yang dicapai di tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.27. Data Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (KK, KTP, dan Akta Catatan Sipil)

Administrasi Kependudukan	Satuan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
KTP/e-KTP diterbitkan	Keping	116,102	118,513	157,308	160,539	162.650
KK diterbitkan	Lembar	57,468	58,636	59,987	62,497	65.153
Akta kelahiran	Lembar	4,229	4,047	4,853	5,100	5.657
Akta Perkawinan	Lembar	73	93	69	72	78
Akta Perceraian	Lembar	22	12	15	2	3
Akta Kematian	Lembar	22	37	250	67	88

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu, 2016

Dari data tersebut, menjelaskan bahwa setiap tahunnya pada pelayanan KTP/e-KTP dan KK diterbitkan mengalami fase naik. Sementara jenis pelayanan lainnya seperti pembuatan Akta Kelahiran, perkawinan, perceraian dan Kematian yang cenderung mengalami fase fluktuatif.

2.3.1.13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Desa secara empiris memiliki peran penting dan strategis dalam menunjang pembangunan. Ditinjau dari segi kewilayahan, desa merupakan wilayah pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat. Secara sosiologis desa berperan strategis sebagai unit sosial dan budaya yang menjadi wadah

berlangsungnya sosialisasi, internalisasi dan institusional nilai-nilai sosial dan budaya yang akan membangun mentalitas penduduk desa pada khususnya.

Keberhasilan pembangunan desa akan menjadi faktor kuat untuk mencegah meningkatnya urbanisasi yang pada gilirannya akan menimbulkan potensi munculnya berbagai masalah sosial. Namun pembangunan dan dinamika perkembangan desa dalam kenyataannya masih tersendat dan banyak kendala yang dihadapinya, meskipun sudah banyak kebijakan yang dibuat untuk memberdayakan masyarakat desa. Faktor lembaga, sosial, politik dan ekonomi masyarakat yang ada tampaknya belum kondusif, sehingga diperlukan upaya kongkret yang dilakukan pemerintah untuk memberdayakan desa.

Pemberdayaan masyarakat berkenaan dengan upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan, yang dalam pelaksanaannya menggunakan strategi “pembangunan yang berpusat pada manusia (people centre development)”. Pola implementasinya menempatkan masyarakat sebagai subyek atau pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan.

Dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat senantiasa melekat kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin. Menurunkan jumlah penduduk miskin bukanlah pekerjaan mudah karena masalah kemiskinan senantiasa berkenaan dengan rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya kualitas gizi dan kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, kerentanan menghadapi situasi sosial ekonomi, ketidakberdayaan menghadapi situasi sosial politik serta aspek terkait lainnya yang berkenaan dengan pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, setiap Pemerintah Daerah harus memiliki target penurunan jumlah penduduk miskin per tahun serta memiliki program - program pemberdayaan masyarakat miskin secara komprehensif agar dapat berkontribusi secara simultan terhadap pencapaian target penurunan jumlah penduduk miskin secara nasional.

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat (sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan) melalui upaya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, penguatan kelembagaan dan modal sosial masyarakat serta peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik.

Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat bisa berhasil karena dukungan dari berbagai faktor. Untuk melihat keberhasilan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat bisa dilihat dari capaian beberapa Indikator yang ada. Keberdayaan masyarakat salah satunya dapat dilihat dari Persentase cakupan pembinaan organisasi masyarakat yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K), SDM, Sarana prasarana, dan manajemen pelayanan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Pos pelayanan Terpadu (Posyandu) yang berprestasi.

Tingkat partisipasi dan keswadayaan masyarakat yang ada didalam kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPMMD), Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Teknologi Tepat Guna (TTG) juga bisa digunakan sebagai tolok ukur untuk melihat pembangunan keberdayaan masyarakat.

Selain itu berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dan desa antara lain adalah:

1. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan / kelurahan melalui pameran gelar TTG Tingkat Nasional, monitoring dan evaluasi PNPM-MP, pembinaan pelaksanaan SPBM/USRI, pembinaan pelaksanaan Gerdu Taskin/PPKM, pembinaan raskin, pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan.
2. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan melalui sosialisasi dan bantuan alat teknologi tepat guna.
3. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa kelurahan melalui pelaksanaan musyawarah pembangunan desa / kelurahan dan kecamatan, pelatihan kader pemberdayaan masyarakat, pemberian stimulan pembangunan desa, bulan bhakti gotong royong masyarakat, dan perlombaan desa/kelurahan.

2.3.1.14. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga

Berencana

Penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran terwujudnya Norma Keluarga Kecil yang Berkualitas dan Sejahtera.

Lingkup kewenangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diamanatkan oleh Undang-Undang 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah adalah meliputi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, pelaksanaan KIE pengendalian penduduk baik yang bersifat medis maupun kearifan lokal, distribusi peralatan dan perlengkapan kontrasepsi, pendayagunaan PKB/PLKB, serta pembinaan keluarga sejahtera.

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran. Pertumbuhan penduduk yang makin cepat, mendorong pertumbuhan aspek-aspek kehidupan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya.

Jumlah penduduk di Kota Batu berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu pada tahun 2016 tercatat sejumlah 214.969 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 108.473 jiwa dan perempuan sebanyak 106.496 jiwa dengan jumlah rumah tangga 62.497 KK. Jumlah penduduk ini meningkat dari tahun 2014 yang tercatat 211.298 jiwa. Angka ini meningkat sekitar 1,74 persen atau bertambah sebanyak 3.671 jiwa.

Pertumbuhan penduduk ini selain dikarenakan adanya pertumbuhan penduduk alami (fertilitas dan mortalitas), juga disebabkan adanya pertumbuhan penduduk migrasi, dimana

terdapat migrasi keluar dan migrasi masuk dari dan ke Kota Batu. Jumlah penduduk tersebut mendiami wilayah seluas 199,09 Km² sehingga rata-rata kepadatan penduduk pada tahun 2016 adalah 1.08 jiwa per Km².

Pada tahun 2016 secara keseluruhan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif di Kota Batu banyak menggunakan alat kontrasepsi IUD yaitu sebanyak 8.686 pasangan atau sekitar 81,50 persen lebih dari PUS yang aktif.

Alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan setelah IUD adalah Pil / tablet. Selama tahun 2016, penggunaan Pil / tablet mencapai 4.340 pasangan. Setelah Pil alat kontrasepsi yang banyak digunakan adalah kondom sebanyak 2.066 pasangan.

Tabel 2.28. Penduduk Kota Batu Berdasarkan Kepesertaan KB dan Pasangan Usia Subur Tahun 2012 – 2016

URAIAN	Satuan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
Peserta KB Aktif/Lestari	orang	16.502	16.854	14.907	15.092	30.496
IUD	orang	8.367	8.757	8.521	8.686	7.901
Pil	orang	5.596	5.577	4.280	4.340	3.898
Kondom	orang	2.539	2.520	2.106	2.066	1.975
Peserta KB Baru	orang	2.418	1.648	1.286	915	3.810
IUD	orang	581	611	762	570	846
Pil	orang	1.116	789	414	248	165
Kondom	orang	721	248	110	97	42
Pasangan Usia Subur (PUS)	Pasangan	30.988	40.588	39.199	40.501	40.186
Presentase KB dengan PUS	%	80,54	81,52	80,08	81,50	75,89
Peserta KB Mandiri	orang	17.326	17.664	17.235	18.146	-

URAIAN	Satuan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
Peserta KB Mandiri/Swasta	%	17,25	21,97	21,52	22,26	-

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KB, 2016.

Pasangan Usia Subur (PUS) di Kota Batu pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 3,32 persen dari 39.199 pasangan pada tahun 2014 menjadi 40.501 pasangan pada tahun 2016. Dari 40.501 pasangan tersebut yang tercatat sebagai peserta KB aktif hanya 15.092 pasangan. Pada tahun 2016 tercatat 915 pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif baru, angka ini jauh menurun dibandingkan dengan angka pada tahun 2014 yang mencapai 1.286 pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif baru. Dari pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif baru pada tahun 2016 tersebut yang menggunakan alat kontrasepsi IUD sebanyak 570 pasangan kemudian pil/tablet sebanyak 248 pasangan, dan kondom sebanyak 97 pasangan.

2.3.1.15. Urusan Perhubungan

Perhubungan sebagai salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang berkembang sangat dinamis, serta berperan di dalam mendukung, mendorong, dan menunjang segala aspek kehidupan baik dalam pembangunan

politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Pertumbuhan sektor transportasi akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara langsung sehingga transportasi mempunyai peranan yang penting dan strategis, baik secara makro maupun mikro. Keberhasilan sektor transportasi secara makro dapat terlihat dari sumbangan nilai tambahnya dalam pembentukan **Produk Domestik Bruto** (PDB), dampak ganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkannya terhadap pertumbuhan sektor-sektor lain dan kemampuannya meredam laju inflasi melalui kelancaran distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok tanah air. Oleh karenanya ketersediaan infrastruktur transportasi yang handal dan memadai merupakan hal yang sangat penting untuk diupayakan guna mewujudkan ketersediaan infrastruktur transportasi yang handal dan memadai.

Transportasi darat sebagai salah satu moda transportasi yang tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan dimasa depan, mempunyai karakteristik yang mampu menjangkau seluruh wilayah daratan dan memadukan moda transportasi lainnya, oleh karena itu perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah untuk menunjang, mendorong dan

menggerakkan pembangunan daerah demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dampak yang timbul adalah meningkatnya intensitas pergerakan manusia sebagai man power dan barang sebagai bahan produksi. Kelancaran mobilitas penumpang maupun barang sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana transportasi antara lain infrastruktur jalan yang di lengkapi dengan fasilitas keselamatan berlalu lintas.

Tabel 2.29. Indikator Perhubungan Tahun 2012-2016

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Angkutan Kota Dalam Provinsi						
	Jumlah Perusahaan	unit	1	1	1	2	1
	Jumlah Armada / Kendaraan	unit	79	79	79	112	130
2	Angkutan Sewa						
	Jumlah Perusahaan	unit	1	1	1	1	1
	Jumlah Armada / Kendaraan	unit	4	4	4	4	4
3	Angkutan Taksi						
	Jumlah Perusahaan	unit	-	-	1	1	1
	Jumlah Armada / Kendaraan	unit	-	-	15	30	30
4	Mobil Penumpang Umum / Mikrolet						
	Jumlah Armada / Kendaraan	unit	356	356	356	356	356
	Jumlah Arus Penumpang Umum	Orang	1,141,722	966,536	681,900	506,002	1.429.097

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
	Izin Trayek yang dikeluarkan		-	-	-	-	-
5	Parkir						
	Jumlah titik Lokasi Parkir	lokasi	110	112	119	116	116
	Kapasitas Parkir	Unit/m2	1/45 m2	1/45 m2	1/45 m2	1/45 m2	1/45 m2
	Uji KIR Kendaraan Bermotor	unit	3,230	3,422	3,556	3,766	3,952

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Batu 2018

2.3.1.16. Urusan Komunikasi Dan Informatika

Kewenangan urusan Komunikasi dan Informatika menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan Informasi dan komunikasi publik, serta sub urusan Aplikasi Informatika. Rincian kewenangan untuk sub urusan informasi dan komunikasi publik yaitu Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Sedangkan rincian kewenangan untuk sub urusan aplikasi informatika adalah Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pengelolaan e-goverment di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Ketersediaan dan keterbukaan Informasi menjadi syarat mutlak pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan keterbukaan Informasi tersebut masyarakat bisa dengan mudah mengakses kebutuhan akan informasi khususnya yang bersifat terbuka (*public*). Jaminan akan keterbukaan informasi semakin dikuatkan dengan adanya UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam UU tersebut jelas disebutkan bahwa semua orang mempunyai hak untuk mengakses dan mendapatkan informasi publik yang tidak dikecualikan. Untuk mengawal pelaksanaan UU tersebut maka pemerintah pusat sampai kabupaten/kota diharapkan dapat membentuk Komisi Informasi. Sedangkan untuk mengawal pelaksanaan UU tersebut maka di setiap PD ditugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dalam rangka mencapai target Standar Pelayanan Minimal bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten/kota, maka di setiap pemda harus melaksanakan kegiatan Diseminasi Informasi Nasional. Pelayanan komunikasi dan informasi antara lain melalui pelayanan pos (PT. Pos Indonesia) dan telepon (PT. Telkom, provider melalui mobile phone – dengan menara BTS). Selain itu Kota Batu juga mempunya LPSE yaitu unit kerja yang dibentuk diberbagai instansi dan pemerintah daerah untuk melayani Unit Pelayanan

Pengadaan (ULP) atau panitia/pokja ULP Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik.

2.3.1.17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Undang-Undang tersebut pelaksanaan koperasi menggunakan landasan azas kekeluargaan, dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya pencapaian tujuan negara dan bangsa Indonesia yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM, serta meningkatkan kemandirian UMKM. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai yaitu meningkatkan sumber daya manusia pengelola koperasi dan UMKM

yang kompeten dan berdaya saing; meningkatkan akuntabilitas dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM; dan meningkatkan sarana dan prasarana koperasi dan UMKM.

Tabel 2.30. Kondisi Koperasi di Kota Batu Per-Tahun 2016

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Total Koperasi	unit	174	173	178	178	188
2.	Aktif	unit	120	119	124	126	138
3.	Tidak Aktif	unit	54	54	54	52	52
4.	Anggota	orang	27.80 5	27.44 5	24.68 8	24.67 6	25.17 4
5.	Modal	Rp	146.8 60.90 1.550	127.8 07.21 9.758	113.7 95.29 2.765	235.2 11.51 7.038	236.6 89.13 9.008
6.	Karyawan	orang	572	580	575	644	733

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM tahun 2017

2.3.1.18. Urusan Penanaman Modal

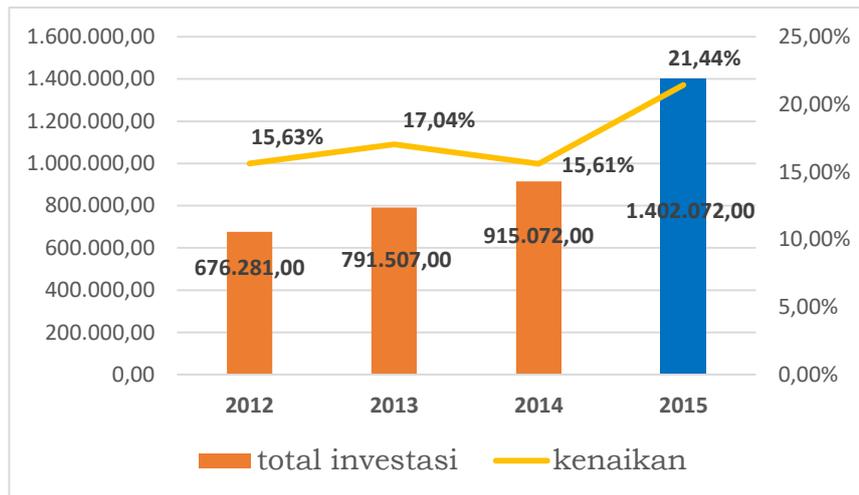
Urusan Penanaman Modal dilaksanakan dalam rangka memperhatikan tuntutan masyarakat akan perlunya pelayanan prima serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Melalui kebijakan daerah di bidang pelayanan perijinan terpadu yang memberikan kemudahan dalam mengurus perijinan didukung kondisi keamanan yang kondusif, infrastruktur, dan promosi investasi maka akan berdampak pada meningkatnya investor yang menanamkan modalnya di Kota Batu dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya serap tenaga kerja.

Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang penanaman modal memiliki potensi daerah yang beragam yang dapat menjadi peluang bagi penanaman modal terutama sektor pariwisata, konstruksi, pertanian organik, industri olahan makanan dan ekonomi kreatif pendukung sektor jasa dan pariwisata.

Guna mewujudkan iklim investasi yang kondusif Pemerintah Kota Batu memberikan jaminan kemudahan kepada para calon investor. Empat jaminan Kemudahan itu yaitu Kemudahan perizinan, Kemudahan penyediaan tanah atau lahan, Kemudahan ketersediaan energi listrik dan Kemudahan ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas dan penyelesaian masalah perburuhan secara demokratis. Jaminan lain yang diberikan yaitu iklim investasi Kota Batu yang lebih kompetitif dibandingkan dengan daerah lain, juga Sumber Daya Alam yang memadai, Sumber Daya Manusia yang cukup banyak dan suasana sosial politik yang relatif kondusif.

Laju pertumbuhan investasi daerah di Kota Batu pada tahun 2016 mencapai 21,44 persen naik dibanding tahun 2014 sebesar 15,61 persen dengan akumulasi realisasi investasi daerah sebesar Rp.1.402.072.000.000,- (angka diluar asset tanah dan bangunan).

Secara keseluruhan, capaian kinerja pertumbuhan investasi kota Batu tahun 2012-2016 rata-rata telah mencapai nilai varian target yang ditetapkan pada tahun yang berkenaan.



Gambar 2.6. Nilai dan Laju Investasi Daerah Tahun 2012-2016
 Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu, 2016

2.3.1.19. Urusan Pemuda dan Olah Raga

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Pemuda memegang peranan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional maupun Kota Batu.

Peranan pemuda sebagai aset untuk percepatan pembangunan, sangat tergantung pada kualitas sumber daya

pemuda. Generasi muda yang memiliki kualitas, dedikasi, kapabilitas dan kredibilitas merupakan faktor dominan bagi pembangunan di Kota Batu, sebaliknya kualitas yang rendah dan tidak memiliki kreatifitas, dan daya saing akan menjadi beban bagi pembangunan. Dengan dasar pemikiran tersebut maka diperlukan usaha-usaha dari berbagai pihak dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya generasi muda, termasuk di dalamnya kebijakan dan program pemerintah yang mengarah pada pemberdayaan generasi muda dan organisasi kepemudaan.

Kepeloporan di bidang kepemudaan adalah suatu karya nyata bagi unsur pemuda untuk mengatasi permasalahan kualitas sumber daya manusia, termasuk di dalamnya adalah pengembangan teknologi, metodologi, dan managerial yang bermanfaat bagi masyarakat. Kepeloporan pemuda dituntut untuk dapat melakukan terobosan-terobosan yang dapat memberikan kontribusi sebagai upaya mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pemuda itu sendiri dan negaranya.

Sementara itu, olahraga memiliki peran untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat persatuan dan kesatuan. Kota Batu dalam bidang olahraga mulai mengalami

peningkatan dalam pembinaan, pembangunan kelengkapan sarana prasarana, kemajuan prestasi dan penghargaan. Untuk itu revitalisasi kelembagaan/organisasi kepemudaan haruslah ditingkatkan untuk melaksanakan peran dan fungsinya dalam rangka mewujudkan Kepemudaan dan Keolahragaan yang Profesional dengan tujuan adalah untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan daya saing kepemudaan dan keolahragaan di tingkat nasional dan internasional.

Pemuda Kota Batu memiliki potensi dan peluang yang cukup besar, sekaligus kelemahan dan tantangan yang tidak ringan. Potensi dalam hal ini adalah jumlah yang cukup besar, pola pikir dan semangat yang tinggi. Kelemahannya adalah kondisi perkembangan psikologis pemuda yang belum stabil, masih pada tahap pencarian identitas diri dan lemahnya sandaran nilai serta norma. Tantangan yang muncul di kalangan pemuda adalah masa depan yang penuh kompetisi baik keterampilan, idealisme maupun nilai budaya. Sementara peluang yang dimiliki oleh pemuda Kota Batu adalah ruang gerak atau ekspresi idealisme yang terbuka, baik dalam konteks sistem nilai, sistem pendidikan, sistem ekonomi maupun sistem politik.

Selain itu, ada dua kecenderungan yang saling bertentangan yang menjadi tantangan kepemudaan yakni persaingan dan kerjasama. Untuk menang dalam persaingan, selain perlu efisiensi, juga butuh keunggulan kompetitif dari sumberdaya lokal. Salah satu faktor produksi yang penting dari sumberdaya lokal adalah SDM. Tanpa SDM yang baik yang bernilai tambah, sulit bagi suatu daerah memenangkan persaingan global sekalipun memiliki sumberdaya alam yang banyak. SDM yang baik akan dapat dihasilkan jika pola pembinaan generasi muda diciptakan melalui suasana sehat, dinamis, dan demokratis sehingga generasi muda bisa berkembang tanpa perlu direkayasa.

Pemerintah Kota Batu melakukan pengembangan olah raga, pengaktifan even olah raga di tingkat regional maupun nasional, meningkatkan sarana dan prasarana olah raga, pemberian bantuan untuk atlit yang berprestasi, Fasilitas gedung olah raga di Kota Batu seperti Gedung Ganesha dan Stadion Sepakbola Brantas memerlukan perbaikan (renovasi), dan gedung kesenian yaitu Galeri Seni (Pondok Seni), dimana setelah dilakukan renovasi Galeri Seni mulai dimanfaatkan oleh para seniman untuk berbagai kegiatan pameran yang meliputi inventarisasi dan pengkayaan obyek-obyek pariwisata baik yang seni lukis. Telah dilakukan pengembangan olah raga, pengaktifan even olah raga di tingkat regional maupun

nasional meningkatkan sarana dan prasarana olah raga, pemberian bantuan untuk atlit yang berprestasi, mengembangkan kebebasan berkreasi dalam seni budaya daerah, pengembangan seni budaya daerah sebagai daya tarik wisata, pengembangan sarana dan prasarana seni budaya, serta pengembangan event wisata budaya.

2.3.1.20. Urusan Statistik

Statistik, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik, adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Dalam statistik, kegiatan yang dilakukan adalah menyediakan, menyebarluaskan data, mengembangkan ilmu statistik dan upaya berkembangnya Sistim Statistik Nasional. Kegiatan Statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional, mengembangkan Sistim Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan dari kegiatan statistik adalah untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Guna mendukung kelancaran proses perencanaan pembangunan, kebutuhan data

yang valid, lengkap, akurat, dan mutakhir sangatlah penting. Namun, dalam pelaksanaannya, data yang ditunjukkan ke masyarakat masih belum akurat dan mutakhir. Kondisi ini dapat disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang pengumpulan, penyajian, penyediaan, dan pengolahan data.

Data yang dikumpulkan secara sistematis dan diolah sesuai dengan kaidah umum statistika akan memiliki nilai informasi yang memadai, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah akan lebih efektif dan tepat sasaran karena didukung data yang lengkap dan akurat. Di sinilah peran statistik menjadi sangat vital. Jika data yang dikumpulkan tidak akurat dan serampangan, serta diolah tanpa mengindahkan kaidah-kaidah statistika, maka kebijakan yang dirumuskan tidak efektif, bahkan bisa kontraproduktif.

Urusan Statistik di Kota Batu berkaitan dengan pengelolaan data analisis penanggulangan kemiskinan. Analisis penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat (sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan) melalui upaya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, penguatan kelembagaan dan modal sosial masyarakat serta peningkatan keswadayaan

masyarakat luas guna membantu masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik.

Analisis penanggulangan kemiskinan diharapkan memiliki kontribusi signifikan bagi upaya menurunkan jumlah masyarakat miskin. Menurunkan jumlah penduduk miskin bukanlah pekerjaan mudah karena masalah kemiskinan senantiasa berkenaan dengan rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya kualitas gizi dan kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, kerentanan menghadapi situasi sosial ekonomi, ketidakberdayaan menghadapi situasi sosial politik serta aspek terkait lainnya yang berkenaan dengan pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, setiap Pemerintah Daerah harus memiliki target penurunan jumlah penduduk miskin per tahun serta memiliki program - program pemberdayaan masyarakat miskin secara komprehensif agar dapat berkontribusi secara simultan terhadap pencapaian target penurunan jumlah penduduk miskin secara nasional.

**2.3.1.21. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian**

otonomi daerah terbuka peluang untuk mempersempit kesenjangan pembangunan tersebut dengan menarik pusat-pusat perekonomian ke daerah dan mendekatkan pelayanan publik pada masyarakat. Gairah perekonomian yang meningkat dan pelayanan yang semakin baik di daerah akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan berusaha.

Otonomi daerah diagendakan bukan hanya dalam rangka mempertahankan keutuhan bangsa di dalam keberagaman dan hanya sekedar penyerahan wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah, tetapi juga mencakup agenda penyertaan masyarakat di dalam proses pemerintahan itu sendiri.

Komitmen dari reformasi birokrasi telah menjadi kewajiban pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Reformasi birokrasi sebagai tuntutan dinamika masyarakat dengan menitikberatkan pada area perubahan yang antara lain adalah :

- a. Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) ;

- b. Sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance;
- c. Regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif;
- d. SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera;
- e. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
- f. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- g. Pelayanan prima yang sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
- h. Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

Selain birokrasi yang baik, maka perlu didukung oleh masyarakat yang sadar hukum. Kesadaran hukum masyarakat yang dinamis dan sangat tergantung kepada bagaimana penegakan hukum itu dilakukan membutuhkan suatu proses yang cukup panjang agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Komitmen publik untuk melakukan berbagai upaya pengawasan dan peningkatan kualitas pelaksanaan hukum membutuhkan upaya-upaya peningkatan di berbagai faktor yang mendukung.

Untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, pengawasan menjadi agenda penting seperti sinergi pengawasan internal, efektivitas pengawasan eksternal, pengawasan masyarakat/sosial, pengawasan legislatif dan juga pengawasan melekat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap Pemerintah Daerah bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan teknis. Di samping pengawasan tersebut pengawasan oleh masyarakat (kontrol sosial) diperlukan dalam mewujudkan peran serta masyarakat guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Walikota adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Batu dan Pemerintahan Desa di Kota Batu berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pengawasan dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing, yang dalam hal ini oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yaitu Inspektorat Kota Batu.

2.3.1.22. Urusan Kebudayaan

Kota Batu mempunyai potensi cukup besar di bidang kebudayaan. Hal ini ditunjukkan dengan beragamnya seni dan budaya yang dimiliki, disamping adanya peninggalan benda cagar

budaya yang bernilai sejarah yang tinggi. Kebudayaan merupakan satu kesatuan di dalam pengembangan kesenian di Kota Batu, yang memberikan warna tersendiri dengan adanya berbagai tradisi upacara adat/merti deso serta kreativitas seniman dan seniwati.

Kinerja indikator sasaran Urusan Kebudayaan tercermin dari terealisasinya indikator kinerja urusan kebudayaan adalah sebagai berikut:

2.3.1.23. Urusan Perpustakaan

Pembangunan di bidang perpustakaan memiliki fungsi strategis dalam menjembatani kebutuhan informasi masyarakat perlu diarahkan untuk membangun masyarakat membaca, masyarakat belajar sebagai garis pengembangan budaya keilmuan, berbudaya ilmiah dan kritis menuju masyarakat yang terinformasi/well-informed, kritis, inovatif, produktif melalui pengembangan budaya baca, pelestarian hasil budaya intelektual, pengembangan dan pembinaan perpustakaan sebagai infrastruktur dan aksesibilitas layanan informasi iptek. Sebagai upaya akselerasi agenda pembangunan untuk mendukung upaya proses reformasi, perbaikan kesejahteraan rakyat dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, perpustakaan sesuai tugas pokok dan fungsinya harus

mengarahkan sektor program kepada dua bidang utama pembangunan yaitu pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan.

Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan sumber daya manusia perlu adanya suatu media, salah satu media yang bisa dipergunakan adalah perpustakaan, perpustakaan merupakan salah satu pusat informasi, pengetahuan, penelitian, rekreasi dan pelestarian budaya. Perpustakaan bisa juga disebut sebagai pusat penyebaran ilmu pengetahuan karena mempunyai peranan penting sebagai wahana mencerdaskan bangsa guna tercapainya masyarakat yang terdidik dan berwawasan luas.

Guna tercapainya tujuan tersebut perlu adanya kebijakan di bidang perpustakaan melalui penyelenggaraan perpustakaan, pengembangan jaringan perpustakaan, pengembangan SDM, pembinaan teknis perpustakaan, pengembangan jabatan fungsional perpustakaan, dan pelestarian koleksi daerah/nasional serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perpustakaan.

2.3.1.24. Urusan Kearsipan

Arsip mempunyai nilai dan arti penting karena merupakan bahan bukti resmi mengenai penyelenggaraan administrasi

pemerintahan dan kehidupan kebangsaan bangsa Indonesia. Dalam usaha menyelamatkan bahan bukti pertanggungjawaban nasional serta untuk mewujudkan tertib pengelolaan arsip Khususnya di instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan lembaga-lembaga swasta, maka kantor Perpustakaan & Arsip daerah Kota Batu telah melakukan berbagai upaya agar- arsip arsip inaktif yang ada di berbagai SKPD dapat terawat dan terpelihara dengan sebaik-baiknya.

Dari waktu ke waktu Volume arsip yang tercipta dari berbagai SKPD akan terus mengalami penambahan, dengan penambahan volume arsip ini akan mengakibatkan berbagai permasalahan apabila tidak dikelola, secara baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku atau kaidah-kaidah kearsipan, antara lain jatuhnya rahasia informasi arsip kepada yang tidak berhak, inefisiensi dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan sehari-hari, serta mempersulit kita dalam membuat perencanaan atau pengawasan.

Berpijak dari kenyataan itu, maka pengelolaan arsip tidak dapat dilepaskan dari setiap komponen yang ada di dalam organisasi, khususnya organisasi pemerintah. Adapun komponen yang sangat menentukan dalam keberhasilan pengelolaan arsip ada beberapa faktor antara lain "Sumber Daya Manusia, sarana dan

prasarana yang memadai, tempat penyimpanan yang nyaman atau representatif, serta dukungan dari pejabat yang lebih tinggi”.

Berkenaan dengan dua bidang tersebut, maka Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Batu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah merintis pelaksanaan berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan minat budaya baca masyarakat dan mendukung tertib pengelolaan arsip guna menyelamatkan bahan bukti pertanggungjawaban nasional sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dewasa ini.

Perkembangan jumlah arsip, baik terhadap jumlah arsip yang terkumpul di depo arsip, jumlah Perangkat Daerah (PD) yang menyetorkan arsip maupun jumlah PD yang menerapkan arsip sebagai berikut:

- 1) Jumlah arsip yang terkumpul di depo arsip = 497 bok arsip
- 2) Jumlah PD yang menyetorkan arsip = 14 PD
- 3) Jumlah pengelolaan arsip in aktif = 5200 berkas
- 4) JRA (jadwal Retensi Arsip) berupa lampiran Jadwal Retensi Arsip Keuangan yang sudah ditandatangani oleh Kepala ANRI
- 5) Jumlah PD yang menerapkan arsip = 18 PD
- 6) Jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola arsip = 1 kegiatan yaitu Bimbingan Teknis Kearsipan bagi Pengelola Arsip Desa/Kelurahan

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.3.2.1. Urusan Pertanian

Penyelenggaraan urusan pertanian ditujukan untuk mewujudkan ketersediaan pangan dan pengembangan usaha pertanian dan perkebunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat serta terwujudnya kelestarian lingkungan atau ekosistem.

Peran sektor pertanian dalam struktur perekonomian Kota Batu sangatlah signifikan. Kontribusi sektor pertanian pada PDRB batuKota Batu berdasarkan catatan tiga tahun terakhir menempati posisi ketiga setelah sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa.

Tabel 2.31. Data Perkembangan Pertanian Organik di Kota Batu Tahun 2012-2016

URAIAN	2012	2013	2014	2016
Jumlah Petani (orang)	29,487	29,487	28,210	28,240
Jumlah Kelompok tani	211	211	208	224
Jumlah Gapoktan	24	24	24	24
Luas lahan Pertanian (ha)	6,034.62	6,033.72	5,805.73	5,787.73
Jenis tanaman yang dikelola secara organik	12	12	13	21
Luas lahan Pertanian Organik(ha)	40	60	80	87.5
Jumlah petani organik	131	205	312	337

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, 2016

Jumlah kawasan organik tahun 2016 mengalami penambahan sebanyak 1 kawasan dibanding tahun sebelumnya. Penambahan

satu kawasan tersebut berada di kelurahan Dadaprejo, kecamatan Junrejo. Kawasan tersebut memiliki komoditas unggulan organik tersendiri yaitu jeruk yang salah satu lahannya telah bersertifikasi organik seluas 1.500 m². Kepemilikannya atas nama Mulyono anggota kelompok tani Sri Sedono III. Selain itu komoditas unggulan lainnya adalah sayuran seperti brongkol, brokoli, jagung manis, bawang merah, dan bawang prei.

Jenis tanaman yang dikelola secara organik pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 61,5% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini tidak lepas dari gencarnya Dinas Pertanian dan Kehutanan dalam mengawal pengembangan pertanian organik kota Batu melalui keberlanjutan bantuan saprodi organik dimana didalamnya juga dialokasikan bantuan benih dan bibit tanaman yang menjadi kebutuhan petani kawasan organik.

Luas kawasan organik pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 9,4% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini berbanding lurus dengan penambahan jumlah paket pengembangan kawasan organik sebanyak 1 paket dimana luas kawasan organik yang baru yang berada di Kelurahan Dadaprejo seluas 7,5 ha

Jumlah petani yang menerapkan sistem pertanian organik mengalami peningkatan sebesar 8% dibanding tahun sebelumnya. Hal tersebut tidak lepas dari upaya Dinas Pertanian dan Kehutanan dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat integral dan menyeluruh kaitannya dalam rangka merubah pola pikir petani dari pertanian non organik menjadi pertanian organik. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain berupa penyediaan benih dan bibit tanaman, saprodi organik, intensifikasi pekarangan organik, penyediaan sarana prasarana pertanian, dan fasilitasi pendampingan kawasan organik.

Angka konsumsi ikan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 2,17 % dibanding tahun sebelumnya. Hal ini erat kaitannya dengan tingginya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu. Banyaknya wisatawan menyebabkan kebutuhan akan ikan konsumsi di rumah-rumah maka dan hotel/penginapan menjadi meningkat. Selain itu hal ini tidak terlepas dari gencarnya upaya Dinas Pertanian dalam mensosialisasikan kepada masyarakat untuk makan ikan melalui kegiatan Gemar Ikan

Produksi perikanan mengalami peningkatan sebesar 5,4 % dibanding tahun sebelumnya. Hal ini salah satunya tidak terlepas

dari upaya Dinas Pertanian dan Kehutanan untuk meningkatkan produksi perikanan melalui bantuan benih ikan, bantuan sarana budidaya, penyediaan prasarana kolam, dan pelatihan/bimtek guna peningkatan kemampuan petani ikan.

Jumlah kelompok tani/gapoktan yang dikukuhkan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 100% dibanding tahun 2014. Hal ini dikarenakan adanya peraturan pemerintah baru yang mewajibkan kelompok tani/gapoktan untuk berbadan hukum sebagai syarat menerima bantuan sosial/hibah dari pemerintah sehingga banyak kelompok tani/gapoktan yang antusias mengukuhkan lembaga taninya

Pada tahun 2016 produksi hasil hutan non kayu dalam hal ini getah pinus, mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut banyak pohon pinus yang memasuki usia produktif sehingga getah yang dihasilkan lebih banyak dibanding tahun sebelumnya.

Kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB mengalami penurunan sebesar 1,01% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2016 sektor yang berkembang pesat di Kota Batu adalah sektor pariwisata sehingga kontribusi sektor

perdagangan, hotel dan restoran terhadap total PDRB meningkat tajam dan memberikan sumbangan terbesar terhadap total PDRB. Namun secara parsial, nilai PDRB sektor pertanian dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Peningkatan ini tidak lepas dari upaya Dinas Pertanian dan Kehutanan yang secara intensif dan berkesinambungan untuk mengembangkan pertanian khususnya organik. Pengembangan pertanian khususnya organik ini tidak hanya difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana tapi juga pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kualitas SDM petani.

Luas lahan pertanian mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,31%. Hal ini dikarenakan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan.

Jumlah petani mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,11%. Hal ini salah satunya tidak lepas dari visi Kota Batu untuk menjadikan Kota Batu sebagai sentra pertanian organik sehingga program pembangunan diprioritaskan pada sektor pertanian dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagai leading sektornya.

Tabel. 2.32 Indikator Pertanian Tahun 2012-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Luas Panen Padi	Ha	1,157	863	741	734	679
2	Produksi Padi	Ton	7,405	5,523	4,607	4,862	4,481
3	Luas Panen Jagung	Ha	1,030	461	493	358	456
4	Produksi Jagung	Ton	4,120	6,809	6,038	7,714	12,704
5	Luas Panen Ubi Kayu	Ha	100	52	27	51	62
6	Produksi Ubi Kayu	Ton	1,700	1,667	864	869	1,370
7	Kentang	Kwintal	73,320	76,252	78,009	86,371	87,910
8	Wortel	Kwintal	100,381	82,732	85,303	65,519	66,465
9	Kobis/Kol	Kwintal	36,293	40,664	59,119	82,117	73,692
10	Bawang daun	Kwintal	55,163	36,073	47,095	39,231	40,059
11	Apel	Kwintal	748,076	838,915	708,438	671,207	748,076
12	Jeruk	Kwintal	88,515	101,250	132,205	132,231	88,515
13	Mawar	Potong	78,812,375	86,006,810	94,486,265	95,698,371	99,586,510
14	Krisan	Potong	23,501,288	24,387,520	34,737,240	32,978,293	35,849,150
15	Anthurium	Potong	1,386,331	517,324	643,925	526,871	413,030
16	Anggrek	Potong	686,779	813,336	1,032,163	1,426,664	
17	Daging	Ton	2,137	1,876	1,885	2,203	1,569
18	Susu	Ribu Liter	12,005	10,178	10,591	10,518	19,269
19	Telur	Ton	1,790	4,057	2,881	1,332	1,841

2.3.2.2. Urusan Kehutanan

Arah kebijakan pembangunan kehutanan antara lain adalah rehabilitasi Hutan dan Lahan dalam rangka peningkatan fungsi DAS, Konservasi Keanekaragaman Hayati, Pemanfaatan Hasil Hutan dan Industri kehutanan serta Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya dukung sumber daya hutan, pembangunan urusan kehutanan di Kota Batu dilaksanakan dengan memperhatikan dan berpedoman pada masterplan, Rencana Teknis Kehutanan (RTK), RPRHL dan Rencana Teknik Tahunan (RTN). Kegiatan tersebut dilaksanakan guna menurunkan tingkat potensi kekritisian lahan dan meningkatkan produktivitas luasan hutan rakyat.

Pembangunan urusan kehutanan baik dalam upaya penanganan lahan kritis dan pembangunan hutan rakyat dilaksanakan secara sinergi dan terkoordinasi dengan semua pihak yang terkait seperti Perum Perhutani, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan Balai Pengelolaan DAS Sungai Brantas.

Salah satu fungsi pencaanangan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah guna meningkatkan kualitas Hutan Kota melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam program penghijauan. Dukungan guna keberhasilan kegiatan ini dilakukan dengan pembelian tanaman dan sarana penunjang pengkayaan Hutan Wisata Kota. Upaya pelestarian alam juga dilakukan dengan membangun dam penahan di Desa Tulungrejo, Desa Junrejo dan Desa Tlekung untuk menahan laju sedimentasi di daerah aliran sungai. Keberhasilan hal-hal tersebut tidak lepas dari peran serta

masyarakat dalam melestarikan alam dan menjaga hutan kota dengan baik.

Tabel 2.33. Penanaman Pohon dan Penghijauan Tahun 2016

Nama Lokasi (Desa, Kecamatan)	Luas Lokasi (Ha)	Jumlah (Btg)	Jenis Tanaman
Ds. Sumberbrantas, Kec. Bumiaji	25.00	45,000	cemara angin
Ds. Tlekung, Kec. Junrejo	2.38	2,000	mahoni, trembesi, alpukat
Ds. Punten	4.00	1,700	mahoni, mangga, durian
Kel. Sisir, Kec. Batu	0.55	300	sirsat dan jambu biji
Kel. Songgokerto, Kec. Batu	0.30	200	Sengon dan sirsat
Kel. Temas, Kec. Batu	0.30	200	Sengon
	6.36	3,500	Sengon dan sirsat
	0.09	50	Sengon
	0.91	500	Sengon
Ds. Oro-oro Ombo, Kec. Batu	0.91	500	Sengon
Ds. Tlekung, Kec. Junrejo	1.50	1,000	Sengon
Kel. Dadaprejo, Kec. Junrejo	0.91	500	Sengon
Ds. Mojorejo Kec. Junrejo	0.18	100	Sengon
Ds. Pendem Kec. Junrejo	0.18	100	Sengon
Ds. Pendem Kec. Junrejo	0.91	500	Sengon
Ds. Sumbergondo Kec. Bumiaji	1.82	1,000	Jambu biji dan sirsat
Ds. Tlekung, Kec. Junrejo	1.82	1,000	sirsat dan jambu biji
Kel. Songgokerto, Kec. Batu	18.10	9,970	Sengon, sirsat, jambu biji, trembesi, dan mentega
Ds. Oro-oro Ombo, Kec. Batu	1.80	990	Mahoni, nangka, durian, dan mangga
Kel. Ngaglik, Kec. Batu	0.55	300	Mahoni
Ds. Tlekung, Kec. Junrejo	1.80	1,000	Nangka
Ds. Tulungrejo, Kec. Bumiaji	0.34	200	Durian dan mangga
Jumlah	70.70	70,610	

2.3.2.3. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Konservasi bahan galian pada hakekatnya adalah upaya perlindungan, perbaikan dan penggunaan bahan galian secara bijaksana yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial

yang tinggi dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan, serta menjamin kesinambungan pembangunan bagi masyarakat. Untuk mendukung penerapan kaidah konservasi berdasarkan paradigma, program dan strategi yang tepat, maka diperlukan penyusunan kebijakan konservasi bahan galian sebagai langkah antisipasi dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan umum. Kebijakan konservasi dalam hal ini meliputi hasil penyusunan konsep peraturan, pedoman teknis, kriteria di bidang konservasi bahan galian dan implementasinya dalam kegiatan usaha pertambangan. Kebijakan konservasi bahan galian dalam perspektif pengelolaan sumber daya mineral harus selaras dengan misi pembangunan sektor pertambangan di Indonesia. Dua hal penting yang harus menjadi perhatian utama adalah pemanfaatan sumber daya dan cadangan bahan galian secara optimal, berwawasan lingkungan dan memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat; dan pengelolaan sumber daya dan cadangan yang mendorong peningkatan investasi dalam negeri dan penanaman modal asing.

Pembangunan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan dengan menitikberatkan pada pengawasan usaha pertambangan dan air tanah, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat atas energi listrik. Pengawasan usaha pertambangan

dan air tanah meliputi pemberian rekomendasi dan pengawasan usaha-usaha pertambangan dan pemanfaatan air tanah yang apabila kemudian terjadi pelanggaran maka Pemerintah Kota Batu segera akan menerbitkan surat peringatan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan penegakan perda.

Pemenuhan kebutuhan masyarakat atas energi listrik dilaksanakan baik dengan membangun jaringan listrik baru yang terhubung dengan jaringan listrik PLN yang sudah ada maupun dengan pemanfaatan potensi energi lokal seperti energi surya atau mikro hidro yang setelah dilakukan survey mampu untuk mencukupi kebutuhan energi listrik setempat.

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Bina Marga Kota Batu menitikberatkan pada pengawasan usaha pertambangan dan air tanah, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat atas energi listrik. Pengawasan usaha pertambangan dan air tanah meliputi pemberian rekomendasi dan pengawasan usaha-usaha pertambangan dan pemanfaatan air tanah yang apabila kemudian terjadi pelanggaran maka Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Bina Marga Kota Batu Kota Batu segera akan menerbitkan surat peringatan untuk kemudian ditindaklanjuti oleh SKPD

penegak perda. Pemenuhan kebutuhan masyarakat atas energi listrik dilaksanakan baik dengan membangun jaringan listrik baru yang terhubung dengan jaringan listrik PLN yang sudah ada maupun dengan pemanfaatan potensi energi lokal seperti energi surya atau energy air (mikrohidro) yang setelah dilakukan survey mampu untuk mencukupi kebutuhan energi listrik setempat.

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Bina Marga Kota Batu menitikberatkan pada pengawasan usaha pertambangan dan air tanah, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat atas energ listrik. Pengawasan usaha pertambangan dan air tanah meliputi pemberian rekomendasi dan pengawasan usaha-usaha pertambangan dan pemanfaatan air tanah yang apabila kemudian terjadi pelanggaran maka Dinas PU Pengairan dan Bina Marga Kota Batu segera akan menerbitkan surat peringatan untuk kemudian ditindaklanjuti oleh SKPD penegak perda. Pemenuhan kebutuhan masyarakat atas energi listrik dilaksanakan baik dengan membangun jaringan listrik baru yang terhubung dengan jaringan listrik PLN yang sudah ada maupun dengan pemanfaatan potensi energi lokal seperti energi surya atau energy air (mikrohidro) yang setelah dilakukan survey mampu untuk mencukupi kebutuhan energi listrik setempat.

Produksi listrik di Kota Batu selama kurun waktu 2011-2013 terus mengalami kenaikan, 107.681 ribu KWh pada tahun 2011 menjadi 116.517 ribu KWh pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 sudah mencapai 127.510 ribu kWh. Dari jumlah listrik yang dihasilkan pada tahun 2013 sekitar 94 persen yang terjual dan disalurkan ke pelanggan sisanya sebesar 6 persen hilang dalam distribusi. Daya listrik di Kota Batu juga mengalami peningkatan, pada tahun 2012 daya listrik 72.500 ribu VA meningkat menjadi 84.469 ribu VA pada tahun 2013. Kenaikan juga terjadi pada jumlah pelanggan listrik, pada tahun 2012 PLN Kota Batu mempunyai pelanggan sebanyak 65.786 pelanggan, tahun 2013 menjadi 70.935 pelanggan yang dibagi menjadi enam golongan tarif. Dari keenam golongan tarif tersebut 92,7 persen golongan tarif rumah tangga, sisanya golongan tarif bisnis, sosial, pemerintah dan industri. Pelanggan rumah tangga juga paling banyak mengkonsumsi listrik yaitu sebesar 59,5 persen. Golongan bisnis mengkonsumsi listrik sebesar 25,3 persen, sedangkan sisanya 15,2 persen dikonsumsi golongan sosial, industri, dan pemerintah.

2.3.2.4. Urusan Pariwisata

Pembangunan Bidang Kepariwisataan dengan upaya membangun Citra dan image yang positif sekaligus menjadi pintu gerbang promosi/pemasaran terhadap jasa-jasa wisata/obyek-obyek wisata yang berkembang di masyarakat. Empat pilar utama dalam pengembangan kepariwisataan meliputi Industri Pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata untuk senantiasa diupayakan penanganan yang terpadu lintas sektor, sehingga dapat menggambarkan satu bentuk daya tarik yang sinergi dalam menarik wisata, tidak terkecuali budaya/seni tradisi yang masih sangat membutuhkan sentuhan dan dukungan prasarana lebih lanjut.

Pembangunan menuju kondisi masa depan disesuaikan dengan keunggulan yang dimiliki oleh Kota Batu, yaitu keunggulan pariwisata. Peningkatan status menjadi Kepariwisataan Internasional diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah, meningkatkan investasi, dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Di sisi lain, pengelolaan pariwisata yang lebih menarik diharapkan mampu mendukung pembangunan sektor pertanian organik dengan peningkatan jumlah wisatawan yang

berkunjung, karena wisatawan yang berkunjung dapat menjadi segmen pasar dari hasil produk pertanian organik; Serta dapat mengatasi (isu) kerusakan lingkungan, karena keunggulan (wisata) alam akan mendorong upaya pemeliharaan secara optimal.

Pemerintah Kota Batu berusaha terus memberikan dorongan kepada masyarakat dan pihak ketiga untuk mengembangkan destinasi pariwisata, sehingga diharapkan muncul banyak investor baru yang akan menyelenggarakan kegiatan pariwisata dari mulai pengelolaan destinasi pariwisata, pengelolaan tempat penginapan/hotel, pengelolaan angkutan, usaha rumah makan dan usaha wisata lain yang dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat sekitar objek wisata. Pemerintah daerah juga berkomitmen memberikan layanan pariwisata yang murah dan bersahabat bagi masyarakat.

Pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat tersebut diharapkan tidak membebani anggaran Pemerintah daerah dan meningkatkan investasi pada berbagai sektor pendukung wisata.

Kota Batu telah berkembang sebagai daerah tujuan wisata di tingkat regional Jawa Timur bahkan Indonesia yang aman dan nyaman merupakan pilihan untuk penyelenggaraan MICE (Meeting, Incentive, Conference dan Exhibition). Wisata MICE beberapa

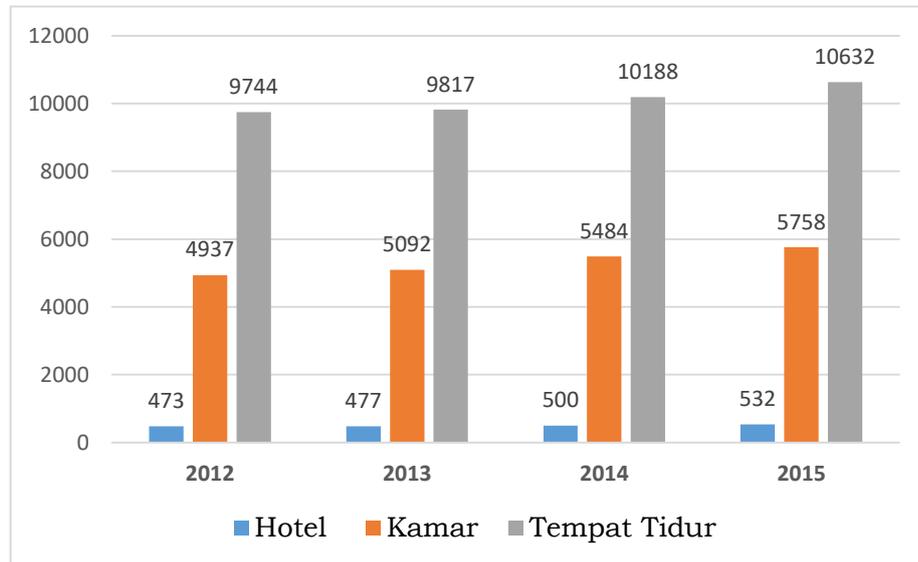
tahun terakhir mengalami perkembangan dan menjadi salah satu wisata yang memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian. Penyelenggaraan MICE pada tahun 2016 tercatat mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut salah satunya disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah pusat yang dikeluarkan dalam bentuk Surat Edaran Menpan RB Nomor 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Aparatur Negara.

Sementara itu, selama kurun waktu 2012-2016 jumlah wisatawan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2014 jumlah kunjungan wisatawan mencapai 3.834.021 orang meningkat pada tahun 2016 menjadi 3.961.021 orang. dari angka tersebut pengunjung obyek tempat wisata komersial mencapai 2,265,308 orang, sedangkan sisanya adalah pengunjung hotel, rumah makan, home stay dan obyek wisata lainnya termasuk desa wisata dan alun – alun Kota Batu.

Sebagai Kota tujuan wisata, kegiatan ekonomi di Kota Batu yang menunjang kepariwisataan salah satunya adalah jasa akomodasi. Jumlah hotel dan jasa akomodasi lainnya di Kota Batu pada tahun 2012 adalah 473 perusahaan, naik menjadi 500 pada tahun 2014 dan pada tahun 2016 menjadi 532 perusahaan. Dari

532 jasa akomodasi yang ada di Kota Batu 20 merupakan hotel berbintang, Kota Batu merupakan daerah di Jawa Timur yang jumlah hotel berbintangnya cukup banyak setelah Kota Surabaya.

Seiring meningkatnya jumlah hotel dan jasa akomodasi jumlah kamar dan tempat tidur yang tersedia juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 tersedia 5.484 kamar dengan 10.188 tempat tidur meningkat menjadi 5.758 kamar dengan 10.632 tempat tidur pada tahun 2016.



Gambar 2.7. Grafik Jumlah Hotel, Kamar dan Tempat Tidur Tahun 2012-2016

Sumber : BPS Kota Batu, 2016

2.3.2.5. URUSAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Pembangunan urusan perikanan diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana perikanan, peningkatan produksi perikanan budidaya dan tangkap, peningkatan pendapatan pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah serta konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan melalui berbagai macam program kegiatan seperti Pengembangan Budidaya Perikanan, Pengembangan Perikanan Tangkap, Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan, Optimalisasi Pengelolaan Pemasaran Produksi Perikanan,

Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar, dan Program Pengembangan Statistik Perikanan.

Pembangunan urusan perikanan dan peternakan diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana perikanan, peningkatan produksi perikanan budidaya, peningkatan pendapatan pembudidaya ikan, melalui berbagai macam program kegiatan seperti Pengembangan Budidaya Perikanan, Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan, Optimalisasi Pengelolaan Pemasaran Produksi Perikanan.

Peternakan sebagai bagian dari sektor pertanian juga mempunyai andil dalam kegiatan perekonomian di Kota Batu. Sebagai daerah penghasil susu, populasi ternak terutama sapi perah cukup besar. Ternak pada umumnya dapat di bedakan menjadi ternak besar, ternak kecil dan unggas. Populasi ternak besar dan kecil baik itu sapi potong, sapi perah atau kuda, juga kambing dan domba semua mengalami kenaikan. Bahkan ternak yang paling kecil yaitu kelinci juga mengalami kenaikan.

Kenaikan paling tinggi pada populasi ternak domba yaitu mencapai 20 persen lebih. Sedangkanyang paling kecil kenaikannya ternak sapi potong hanya sebesar 2,3 persen. Kenaikan populasi juga terjadi pada semua jenis unggas kecuali

ayam pedaging. Kenaikan populasi unggas paling tinggi pada jenis itik atau entok yaitu mencapai 93 persen. Sedangkan yang paling rendah kenaikannya adalah ayam petelor kenaikannya hanya mencapai 0,7 persen. Penurunan jumlah populasi ayam pedaging sebesar 13 persen.

Tabel 2.34. Produksi Hasil Ternak dan Unggas Tahun 2012-2017

Uraian	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Daging (ton)	2.137	1.876	1.885		2.203	
Susu (ribuan liter)	12.005	10.178	10.591		10.518	
Telur (ton)	1.790	4.057	2.881		1.332	

Sumber : BPS dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, 2016

Produksi daging pada tahun 2016 mengalami sedikit kenaikan produksi seiring dengan bertambahnya populasi ternak besar dan kecil. Kenaikan produksi daging hanya mencapai 0,4 persen. Sejalan dengan produksi daging, produksi susu juga mengalami kenaikan sebesar 4 persen pada tahun 2014, namun turun menjadi 10,518.000 liter pada tahun 2016. Produksi Telur juga mengalami penurunan produksi, dibandingkan tahun 2013 produksi telur tahun 2014 mengalami penurunan hamper 29 persen, dan turun lagi menjadi 1.332 ton pada tahun 2016.

Tabel 2.35. Perkembangan Produksi Perikanan dan Peternakan di Kota Batu

URAIAN	SAT	TAHUN			
		2012	2013	2014	2016
PERIKANAN					
1). Jumlah rumah tangga perikanan	KK	212	221	228	228
2). Kolam					

- Luas	Ha	2	2	2	3
- Jumlah produksi	Ton	52	55	54	57
3). Karamba					
- Luas	m3	410	201	110	110
- Jumlah produksi	Ton	2	3	2	2
PETERNAKAN					
a. Ternak sapi potong					
1). Jumlah populasi	Ekor	3,237	2,437	2,700	2,655
2). Jumlah pemotongan per tahun	Ekor	1,576	1,940	1,648	1,696
3). Laju pertumbuhan populasi per tahun	%	(3)	(25)	11	
4). Rata-rata kepemilikan	Ekor	3	3	3	3
b. Ternak sapi perah					
1). Jumlah populasi	Ekor	12,889	9,660	11,060	11,470
2). Jumlah produksi susu per tahun	Ribu ltr	12,005	10,178	10,592	10,518
3). Laju pertumbuhan populasi per tahun	%	0	(25)	14	4
4). Rata-rata kepemilikan	Ekor	5	5	5	5
5). Rata-rata produktivitas per ekor per hari	Lt/ek	11	11	11	12
c. Ternak kecil					
1). Jumlah populasi kambing	Ekor	4,915	5,560	5,946	7,650
2). Jumlah produksi	Ton/th	37	39	43	46
3). Jumlah populasi domba	Ekor	6,055	7,551	8,594	9,044
4). Jumlah produksi	Ton/th	28	39	34	41
d. Unggas					
1). Ayam buras					
- Jumlah populasi	Ekor	55,080	46,335	50,501	49,920
- Jumlah produksi	Ton	94	105	103	87
2). Ayam petelur					
- Jumlah populasi	Ekor	102,455	161,000	162,250	159,500
- Jumlah produksi daging	Ton	106	111	117	107
- Jumlah peternak	Peternak	22	24	25	25
- Laju pertumbuhan populasi per tahun	%	(26)	57	1	
- Rata-rata kepemilikan per peternak	Ekor/kk	4,657	6,708	6,490	6,380
3). Ayam pedaging					
- Jumlah populasi	Ekor	160,500	188,000	163,000	144,000
- Jumlah produksi	Ton	1,439	1,233	1,207	1,148
- Jumlah peternak	Peternak	18	18	18	25
- Rata-rata kepemilikan per peternak	Ekor/pet	8,917	10,444	9,056	5,760
4). Itik/Entog					
- Jumlah populasi	Ekor	6,264	13,286	25,759	28,635
- Jumlah peternak	Peternak	391	420	430	430
- Produksi	Ton/th	45	36	36	40
- Rata-rata kepemilikan per peternak	Ekor/kk	16	30	60	60
5)Produksi Unggas/Telur	Ton/th	1,790	4,057	2,701	1,322

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, 2016

Dalam pengembangan sektor perikanan di Kota Batu, juga dikembangkan program pembangunan demplot kolam ikan organik.

Membudidayakan ikan dengan pola organik. Mulai air hingga pakan harus benar-benar dari bahan kimia.

Pakan yang diberikan kepada ikan bukan produksi pabrik. Namun diproduksi sendiri dengan bahan yang terbebas dari unsur kimia. Begitu juga dengan air yang tidak diambilkan langsung dari saluran irigasi. Air diambil melalui sumur bor.

Dengan pola tersebut, proses budidaya dilakukan secara organik. Ikan yang yang dikembangkan disesuaikan dengan iklim yang ada di Kota Batu. Sehingga ikan akan lebih bisa bertahan hidup dengan cuaca yang dingin.

Selain itu lokasi percontohan, juga bisa dimanfaatkan untuk wisata idukasi. Pelajar bisa berkunjung dan melihat secara langsung proses budidaya ikan air tawar organik.

Tabel 2.36. Data Perikanan Tahun 2012-2016

Uraian	SAT	KONDISI TAHUN			
		2012	2013	2014	2016
1). Jumlah rumah tangga perikanan	KK	212.00	221.00	228.00	228.00
2). Kolam					
- Luas	Ha	2.20	2.16	2.16	3.10
- Jumlah produksi	Ton	52.19	54.67	54.15	57.30
3). Karamba					
- Luas	m3	410.00	200.75	110.00	110.00
- Jumlah produksi	Ton	1.96	2.82	1.92	1.80

Sumber : Dinas Pertanian Kota Batu 2018

2.3.2.6. URUSAN PERDAGANGAN

Kemudahan berusaha dan penurunan biaya logistik menjadi dua isu strategis. Keduanya menjadi penting diselesaikan karena menjadi faktor yang menentukan kekuatan perekonomian nasional dalam menghadapi persaingan global. Datangnya era globalisasi merupakan keniscayaan yang tak bisa dihindari bagi dunia perdagangan, era ini telah menelurkan sebuah sistem liberalisasi perdagangan, dimana setiap orang bisa melakukan transaksi tanpa batas waktu, tempat dan kondisi. Kondisi tersebut tentu saja tak hanya memberikan tantangan tetapi juga peluang. Karenanya, untuk menghadapi era baru ini tak hanya dibutuhkan semangat dan optimisme dalam menangkap peluang, tetapi juga butuh berbagai strategi dan kebijakan yang agar liberalisasi tersebut memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Adapun permasalahan utama yang perlu dicermati dalam kontek menghadapi persaiangan global tersebut, bagi dunia perdagangan adalah bagaimana meningkatkan daya saing berbagai produk dan komoditas dalam negeri di pasar domestik maupun internasional.

Perdagangan sebagai salah satu kekuatan pendorong pembangunan ekonomi daerah diharapkan dapat berperan dalam pengembangan iklim usaha yang kompetitif. Tujuannya adalah untuk membangun perilaku bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pelaku usaha. Iklim usaha yang sehat akan meningkatkan efisiensi alokasi dan penggunaan sumberdaya ekonomi di dalam negeri, sehingga dunia usaha akan mempunyai daya saing yang tinggi terutama dalam menghadapi pasar global.

Penyelenggaraan urusan perdagangan bertujuan untuk meningkatkan iklim usaha yang sehat, meningkatkan perlindungan konsumen, menjaga kelancaran peredaran barang kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kualitas pasar tradisional sebagai sarana perekonomian masyarakat.

Infrastruktur perdagangan di Kota Batu juga telah cukup tersedia dan cukup lengkap. Namun untuk mendukung visi Kota Batu sebagai sentra pertanian organik, maka diperlukan tambahan infrastruktur yang terkait dengan bidang ini.

Untuk mendukung jalannya roda perekonomian Kota Batu, infrastruktur perdagangan dipandang sangat penting seperti misalnya keberadaan perbankan, pasar, koperasi dan sejenisnya.

Ketersediaan bank sangat mendorong laju pertumbuhan ekonomi di segala bidang, khususnya dalam penyediaan modal dan lalu lintas uang antar daerah. Kepentingan lalu lintas uang di Kota Batu sangat mudah karena telah tersedia bank-bank pemerintah maupun bank swasta. Bank pemerintah yang terdapat di Kota Batu antara lain: Bank Rakyat Indonesia (BRI), BNI 46, Bank Mandiri dan Bank Jatim. Sedangkan bank swasta antara lain: Bank Central Asia (BCA) , LIPPO Bank, BTPN, UOB Bank, Bank Bukopin dan beberapa Bank Syariah. Serta BPR-BPR yang berkembang pesat beberapa tahun terakhir ini.

Sebagai tambahan, jenis usaha koperasi di Kota Batu sebagian besar berupa Koperasi serba Usaha yakni 82 unit dengan anggota sebanyak 25.353 orang, kemudian Koperasi Jasa dan sejenisnya sebanyak 52 unit dengan anggota 4.957 orang, dan berikutnya adalah Koperasi Konsumsi yang beranggotakan 470 orang.

Koperasi dan UMKM yang jumlahnya cukup memadai merupakan alat yang sangat bermanfaat dalam mengembangkan ekonomi di pedesaan, dengan terus memberdayakan subsistem lainnya agar berjalan dengan baik. Tujuan pertumbuhan ekonomi pedesaan yang berkesinambungan diharapkan akan menumbuhkan investasi di pedesaan, meningkatkan daya saing

antar daerah pedesaan serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah desa serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Koperasi aktif 30 unit, tidak aktif 45 unit, kop baru 4 unit sehingga total 133 unit. Sedangkan jumlah bank/LKM 28 unit Jumlah BPR/LKM, 12 di antaranya BPR, dan 3 koperasi.

2.3.2.7. URUSAN PERINDUSTRIAN

Pengembangan industri berkeunggulan kompetitif sangat penting untuk menghadapi persaingan ketat, baik di pasar dalam negeri maupun pasar ekspor dalam era globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia. Berkaitan dengan itu, maka perlu ditingkatkan jaminan mutu dan layanan produk dalam negeri melalui kemampuan penguasaan teknologi, efisiensi melalui peningkatan produktivitas, serta pengembangan jaringan usaha terkait guna mendukung proses ke arah spesialisasi kegiatan. Sementara itu, untuk mewujudkan struktur produksi dan distribusi yang kokoh dan berkelanjutan, maka pengembangan industri mencakup pengembangan seluruh mata rantai kegiatan produksi dan distribusi dari sektor penyedia bahan baku, pengolahan, hingga sektor jasa (primer, sekunder, dan tersier). Sehubungan itu, seluruh

basis produksi dan distribusi perlu ditata kembali secara terpadu dan dikembangkan secara sinergis dengan memanfaatkan secara optimal keunggulan komparatif. Dalam rangka mengkonsolidasikan pembangunan sektor primer, sekunder, dan tersier termasuk keseimbangan persebaran pembangunannya ditempuh pendekatan klaster industri. Melalui pendekatan ini diharapkan pola keterkaitan antar kegiatan, baik di sektor industri sendiri (keterkaitan horisontal) maupun antar sektor industri dengan seluruh jaringan produksi dan distribusi terkait (keterkaitan vertikal) akan dapat secara responsif menjawab tantangan persaingan global yang semakin ketat.

Pelaksanaan Urusan Perindustrian di Kota Batu diarahkan untuk meningkatkan peran Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam struktur industri. Adapun sasaran kebijakan adalah meningkatkan jumlah klaster-klaster industri. Pembangunan industri di Kota Batu memacu pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor pertanian dan sektor jasa. Pertumbuhan industri yang pesat merangsang sektor pertanian untuk menyediakan bahan baku bagi industri. Di sisi lain, sektor jasa yang turut berkembang antara lain adalah lembaga keuangan, lembaga pemasaran/periklanan, lembaga pelatihan ketrampilan dan rumah makan. Hal tersebut juga berdampak pada meluasnya kesempatan

kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan permintaan masyarakat (daya beli) sebagai ukuran tumbuhnya perekonomian.

Jumlah perusahaan industri besar sedang di Kota Batu pada tahun 2014 berjumlah 22 perusahaan. Industri besar sedang adalah perusahaan disektor industri yang mempunyai tenaga kerja lebih dari 20 orang. Dari 22 industri besar sedang yang ada di kota Batu 13 diantaranya merupakan industri makanan dan minuman.

Pada tahun 2014 jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri besar sedang sebanyak 1.073 orang. Dari 1.073 tenaga di sektor industri 32,17 persen tenaga kerja yang terserap bekerja dibagian produksi.

Produktivitas pekerja yang diukur berdasarkan rasio nilai tambah terhadap jumlah pekerja memperlihatkan kenaikan. Pada tahun 2012 setiap pekerja menghasilkan nilai tambah sebesar 70,85 juta. Angka ini turun menjadi 59,51 juta pada tahun 2013.

Pada tahun 2014 profil industri di Kota Batu cenderung masih didominasi oleh industri kecil. Dominasi tersebut dapat dilihat dari prosentase jumlah industri kecil yang mencapai lebih dari 95 persen.

Tabel 2.37. Statistik Industri Besar dan Sedang Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2016	2016
Jumlah Perusahaan	31	26	22	24	30
Jumlah Tenaga Kerja	1.283	1.073	1.073	1097	1116
Nilai Tambah (juta)	70.851,34	59.551,34	59.551,24	60.648,24	69249,34

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah Kota Batu, 2016

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Salah satu alat ukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah dengan pendapatan/pengeluaran yang diterimanya. Sesuai dengan hukum ekonomi, semakin besar pendapatan yang diterima maka akan diikuti dengan semakin besarnya pengeluaran yang dikeluarkan. Pengeluaran dalam hal ini dibedakan menjadi dua bagian yaitu pengeluaran makanan dan pengeluaran non makanan. Pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi dapat mencerminkan tingkat kemampuan ekonomi dan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga.

Data hasil Susenas 2014 dapat memberikan informasi kesejahteraan masyarakat Kota Batu dengan indikator pengeluaran per kapita per bulan. Secara relatif pengeluaran rata-rata penduduk Kota Batu lebih baik daripada kabupaten/kota lain di Jawa Timur.

Tidak ada penduduk yang pengeluaran per kapita per bulannya lebih rendah dari Rp 200.000,-. Persentase penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita kurang dari Rp 500.000,- per bulan semakin berkurang. Persentase pengeluaran untuk makanan pula semakin menurun.



Gambar 2.8. Persentase Penduduk Kota Batu menurut pengeluaran per kapita 2013-2014

Sumber : BPS Susenas 2013 - 2014

Pada data tersebut dapat menggambarkan bahwa masyarakat Kota Batu menuju ke kondisi masyarakat yang sejahtera. Hal ini ditunjukkan dengan semakin berkurangnya penduduk yang pengeluarannya < Rp. 500.000,- per kapita setiap bulannya, yaitu sekitar 29,78 persen ini lebih kecil daripada tahun 2013 (36,82 persen) dan semakin bertambahnya rumah tangga yang memiliki pengeluaran > Rp. 500.00,- per kapita setiap bulannya sebesar 70,22 persen (meningkat dari 63,18 persen di tahun 2013).



Gambar 2.9. Persentase Penduduk Kota Batu menurut pengeluaran per kapita 2013-2014

Sumber : BPS Susenas 2013 – 2014

Pergeseran persentase pengeluaran rumah tangga dari kelas pengeluaran yang Lebih rendah ke kelas pengeluaran yang lebih tinggi, mengandung dua kondisi, yaitu pertama, terjadi karena adanya peningkatan kesejahteraan rumah tangga atau kedua, karena adanya peningkatan harga berbagai kebutuhan rumah tangga.

Meningkatnya kesejahteraan penduduk biasanya juga ditandai dengan semakin berkurangnya proporsi pengeluaran untuk keperluan makanan yang selanjutnya bergeser pada pengeluaran untuk keperluan bukan makanan.

Selain itu meningkatnya kesejahteraan suatu masyarakat juga ditandai dengan meningkatnya pengeluaran bukan makanan dan berkurangnya pengeluaran untuk makanan. Pada tahun 2013 pengeluaran penduduk Kota Batu sudah berpindah ke arah memenuhi kebutuhan non makanan, yaitu mencapai 52,26 persen, sedangkan pengeluaran untuk makanan hanya mencapai 47,74 persen.



Gambar 2.10. Persentase pengeluaran rata-rata untuk makanan dan non makanan di Kota Batu 2014

Sumber : BPS Susenas 2014

2.4.2. Fokus Wilayah/Infrastruktur

Transportasi jalan sebagai salah satu moda transportasi yang tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan dimasa depan, mempunyai karakteristik

yang mampu menjangkau seluruh wilayah daratan dan memadukan moda transportasi lainnya, oleh karena itu perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah untuk menunjang, mendorong dan menggerakkan pembangunan daerah demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dampak yang timbul adalah meningkatnya intensitas pergerakan manusia sebagai man power dan barang sebagai bahan produksi. Kelancaran mobilitas penumpang maupun barang sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana transportasi antara lain infrastruktur jalan yang di lengkapi dengan fasilitas keselamatan berlalu lintas.

Tabel 2.38. Kondisi sarana transportasi di Kota Batu Tahun 2012-2015

Uraian	Satuan	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
Angkutan Kota Dalam Provinsi					
Jumlah Perusahaan	unit	1	1	1	2
Jumlah Batu Berdasarkan Kepesertaan KB dan Pasangan Usia Subur Tahun 2012 – 2016 Armada/Kendaraan	unit	79	79	79	112
Angkutan Sewa					
Jumlah Perusahaan	unit	1	1	1	1

Uraian	Satuan	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
Jumlah Armada/Kendaraan	unit	4	4	4	4
Angkutan Taksi					
Jumlah Perusahaan	unit	-	-	1	1
Jumlah Armada/Kendaraan	unit	-	-	15	30
Mobil Penumpang Umum/Mikrolet					
Jumlah Armada/Kendaraan	unit	356	356	356	356
Jumlah Arus Penumpang Umum	Orang	1,141,722	966,536	681,900	506,002
Izin Trayek yang Dikeluarkan		-	-	-	-
Parkir					
Jumlah titik Lokasi Parkir	lokasi	110	112	119	116
Kapasitas Parkir	Unit /m ²	1/45 m ²	1/45 m ²	1/45 m ²	1/45 m ²
UJI KIR Kendaraan Bermotor	unit	3,230	3,422	3,556	3,766

Sumber : Dinas Perhubungan

Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, prasarana dan sarana dasar permukiman merupakan modal penting masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonominya. Pengembangan prasarana irigasi ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan dan penyediaan air untuk kepentingan persawahan.

Berdasarkan jenis permukaannya, di Kota Batu terdapat sepanjang 379 km jalan aspal, sepanjang 8,75 km jalan beton, dan sepanjang 14,74 km jalan tanah, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.39. Jalan Berdasarkan Jenis Permukaannya Tahun 2012- 2015

No.	Uraian	Satuan	Tahun			
			2012	2013	2014	2015
1	Jalan Aspal	km	186.02	239.43	348.46	379.00
2	Jalan Batu/kerikil	km	71.27	62.8	30.2	-
3	Jalan Beton	km	0.15	-	6.29	8.75
4	Jalan tanah	km	85.2	70	17.54	14.74
5	Jalan paving	km	20.5	20.5	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan Bina Marga

Pada tahun 2015, dari 441,99 km jalan di Kota Batu, berdasarkan Kondisi Fisiknya, di Kota Batu terdapat sepanjang 338,50 km jalan dalam kondisi mantap, sepanjang 299 km jalan baik, dan sepanjang 80 km jalan rusak serta sepanjang 24,49 km jalan rusak berat, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.40. Jalan Berdasarkan Kondisi Fisiknya Tahun 2012-2015

Uraian	Satuan	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
Jalan Provinsi	km	39.50	39.50	39.50	39.50
Mantap	km	29.50	32.90	33.00	37.00
Baik	km	29.50	32.90	33.00	37.00
Sedang	km				
Tidak Mantap	km				
Rusak Ringan	km	7.50	5.60	6.50	2.50
Rusak Berat	km	2.50	1.00		
Jalan Kota	km	362.99	392.73	402.49	402.49
Mantap	km	186.02	239.43	247.92	299.00

Uraian	Satuan	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
Baik	km	186.02	239.43	247.92	299.00
Sedang	km				
Tidak Mantap	km				
Rusak Ringan	km	105.80	96.42	100.54	80.00
Rusak Berat	km	71.17	56.88	54.03	23.49

Sumber : Dinas PU Pengairan Bina Marga

Jembatan dalam kondisi baik mencapai target 100,00%. Pada tahun 2015, prasarana jembatan di Kota Batu sejumlah 312 buah, berdasarkan jenis konstruksinya terdapat 44 buah jembatan komposit, 3 buah jembatan busur, 246 buah jembatan beton, 13 buah jembatan plat dan 5 buah jembatan rangka baja, serta 1 buah jembatan gantung. Rasio jaringan irigasi di Kota Batu pada tahun 2015 mencapai 0,017% dan luas irigasi dalam kondisi baik mencapai 22.219,41 m²/ha.

Tabel 2.41. Capaian Indikator Cakupan Irigasi Tahun 2012- 2015

No.	Uraian	Satuan	Tahun			
			2012	2013	2014	2015
1	Prosentase Luasan Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi	%	47,32	-	59	62
2	Rasio Jaringan irigasi	%	21,1	38,11	45,82	51,42
3	Luas irigasi dalam kondisi baik	ha	-	-	995,46	1.079,16

Sumber : Dinas PU Pengairan Bina Marga, 2016

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Salah satu kondisi yang mendukung terhadap pencapaian kinerja peningkatan investasi di daerah adalah kemudahan dalam mengurus perijinan usaha. Strategi Pemerintah Kota Batu dalam meningkatkan daya saing daerah adalah dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan mempermudah pelayanan perizinan dan meningkatkan obyek dan daya tarik wisata.

Terdapat 20 jenis perijinan yang dilayani oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Modal Terpadu antara lain: 1) Ijin Mendirikan Bangunan; 2) Ijin Gangguan; 3) Ijin Reklame; 4) SIUP; 5) TDP; 6) TDG; 7) TDI; 8) Ijin Usaha Industri; 9) Ijin Usaha Toko Modern; 10) Ijin Pemanfaatan Kekayaan Daerah; 11) Ijin Bidang Kesehatan; 12) Ijin Usaha Pariwisata; 13) Ijin Penangkapan Ikan; 14) Ijin Usaha Perikanan; 15) Ijin Usaha Angkutan; 16) Ijin Trayek; 17) Ijin Usaha Peternakan Rakyat dan Toko Obat Hewan; 18) Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian; 19) Ijin Usaha Jasa Konstruksi; dan 20) Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Mesin).

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah. Diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat lebih mendorong pemerintahan daerah untuk terus berupaya mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan daerah adalah: 1) Pendapatan Pajak Hotel; 2) Pendapatan Pajak Restoran; 3) Pendapatan Pajak Hiburan; 4) Pendapatan Pajak Reklame; 5) Pendapatan Pajak Penerangan Jalan; 6) Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 7) Pendapatan Pajak Parkir; 8) Pendapatan Pajak Air Tanah; 9) Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet; 10) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 11) Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Adapun retribusi daerah di Kota Batu terdiri dari 20 jenis retribusi yang dapat dikategorisasikan menjadi 3 jenis retribusi daerah, meliputi: 1) Pendapatan Retribusi Jasa Umum; 2) Pendapatan Retribusi Jasa Usaha; dan 3) Pendapatan Retribusi Perijinan Tertentu.

Peningkatan daya tarik wisata ditandai dengan meningkatnya arus wisatawan yang berkunjung ke Batu tahun 2015, yaitu meningkat menjadi 3.961.240 orang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Angka tersebut sudah melebihi target yaitu sejumlah 2.600.000 orang. Lama tinggal rata-rata wisatawan pada tahun 2015 adalah 2,63 hari, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan mempengaruhi perkembangan industri pariwisata dan kesejahteraan masyarakat. Kemudahan pelayanan perizinan membuka peluang investasi di Kota Batu.



BAB 3

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap perumusan. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan menjadi salah satu poin penting dalam pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), karena pada poin inilah dapat terlihat kemampuan suatu daerah dalam pembiayaan pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, disusun

dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan *riil* di masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 tahun 2011, bahwa APBD meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-

lain Pendapatan yang sah, Aspek Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dan Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Perkembangan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kota Batu tahun 2013 sampai tahun 2017 dapat dilihat pada table berikut Tabel berikut :

Tabel 3.1.
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2013 s/d Tahun 2017
Kota Batu

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuh an(%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN	585.302.322.932,31	703.680.192.404,63	725.754.996.854,34	803.450.046.047,54	849.443.705.762,26	9,95
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	59.544.940.727,80	80.493.920.959,63	104.233.584.925,34	109.533.498.033,54	149.423.863.144,26	26,54
1.1.1.	Pajak daerah	44.853.946.415,32	62.807.445.882,00	83.692.699.934,00	88.757.389.919,00	113.854.910.066,00	26,90
1.1.2.	Retribusi daerah	4.718.663.733,00	4.480.985.852,10	5.209.867.148,00	5.855.560.775,00	4.899.198.825,00	1,82
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	2.027.452.696,34	2.189.729.441,01	2.177.429.333,26	2.152.462.133,00	2.360.797.996,69	3,99
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	7.944.877.883,14	11.015.759.784,52	13.153.588.510,08	12.768.085.206,54	28.308.956.256,57	44,21
1.2.	Dana Perimbangan	446.587.901.437,00	501.994.753.265,00	503.746.629.211,00	624.840.719.033,00	589.620.610.974,00	7,79
1.2.1	Dana bagi hasil pajak dan non pajak	48.793.825.437,00	59.265.138.265,00	49.212.551.211,00	51.317.087.281,00	43.445.796.142,00	(1,64)
1.2.2.	Dana alokasi umum	374.362.261.000,00	412.378.255.000,00	413.219.693.000,00	480.460.016.000,00	474.779.517.000,00	6,36
1.2.3.	Dana alokasi khusus	23.431.815.000,00	30.351.360.000,00	41.314.385.000,00	93.063.615.752,00	71.395.297.832,00	14,12
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	79.169.480.767,51	121.191.518.180,00	117.774.782.718,00	69.075.828.981,00	95.024.446.897,00	11,62
1.3.1	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dan non pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)	8.641.127.259,00	62.263.403.557,00	53.169.725.718,00	66.842.910.981,00	76.002.880.897,00	8,27

1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	40.011.513.000,00	55.665.432.000,00	62.659.864.000,00		11.311.566.000,00	12,92
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	23.043.006.024,00	2.611.403.623,00	1.945.193.000,00	1.580.120.000,00	210.000.000,00	(22,14)
2	BELANJA	568.468.908.109,01	632.737.653.584,00	819.751.076.487,00	819.686.549.125,98	728.120.377.965,85	8,09
1.3.	Belanja Tidak Langsung	301.948.079.993,50	331.095.124.288,00	356.420.925.443,00	429.922.874.412,00	343.695.406.698,00	4,47
1.3.1	Belanja Pegawai	238.935.073.676,99	255.022.291.235,00	263.497.115.227,00	291.522.578.649,00	239.212.234.303,00	0,69
1.3.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.4	Belanja Hibah	37.689.967.511,51	41.211.354.600,00	54.519.247.496,00	90.188.121.331,00	56.296.817.400,00	17,37
1.3.5	Belanja Bantuan Sosial	8.016.903.305,00	14.454.462.453,00	15.157.874.146,00	7.905.270.639,00	4.800.419.104,00	(0,49)
	Belanja Bagi Hasil	16.718.600.000,00			8.156.890.439,00	8.263.597.905,00	0,33
	Belanja Bantuan Keuangan	456.035.500,00	20.407.016.000,00	22.456.151.759,00	31.023.137.854,00	34.300.773.986,00	14,69
	Belanja Tidak Terduga	131.500.000,00		790.536.815,00	1.126.875.500,00	821.564.000,00	3,86
	Belanja Langsung	266.520.828.115,51	301.642.529.296,00	463.330.151.044,00	389.763.674.713,98	264.486.203.552,00	4,69
	Belanja Pegawai	22.306.828.750,00	26.876.841.375,00	30.019.139.864,00	38.500.385.972,00	36.387.281.426,00	13,74
	Belanja Barang dan Jasa	88.371.418.665,51	138.138.802.387,00	151.428.709.133,00	176.894.580.414,98	134.885.349.013,00	14,75
	Belanja Modal	155.842.580.700,00	136.626.885.534,00	281.882.302.047,00	174.368.708.327,00	93.213.573.113,00	2,33
3	Pembiayaan	98.178.280.857,07	114.545.766.880,37	185.488.305.700,90	88.492.226.068,24	69.255.722.989,80	1,14
	Penerimaan Pembiayaan	99.155.725.898,07	114.971.695.680,37	185.488.305.700,90	91.492.226.068,24	72.255.722.989,80	1,40
	Pengeluaran Pembiayaan	977.445.041,00	425.928.800,00		3.000.000.000,00	4.040.000.000,00	(18,81)

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang diterima melalui rekening kas umum daerah, menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah di bagi kedalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan data selama tahun 2013-2017 perkembangan pendapatan daerah pemerintah Kota Batu cukup baik dan mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, total pendapatan daerah Kota Batu sebesar Rp 585 Milyar lebih. Angka tersebut terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017 menjadi Rp 849 Milyar lebih dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar 9,95%. Ini menunjukkan bahwa perekonomian di Kota Batu dalam lima tahun terakhir terus mengalami kemajuan. Kemajuan tersebut direpresentasikan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yaitu pada tahun 2016 sebesar 6,61% atau di atas rata-rata Jawa Timur sebesar 5,5%.

Komponen utama dari pendapatan daerah adalah Pendapatan asli Daerah, berdasarkan tabel 3.1. dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) nilainya mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2009 nilai PAD Kota Batu masih sekitar Rp 59 Milyar lebih, nilai per tahun terus meningkat dengan kenaikan rata-rata 26,54% pertahun, dan tahun 2017 nilai PAD menjadi Rp 149 Milyar lebih. Perkembangan PAD yang signifikan ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah telah berkembang dengan cukup baik dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan pemerintah daerah.

Pada sisi dana perimbangan, nilainya juga mengalami peningkatan. Tahun 2013 masih sebesar Rp 446 Milyar lebih, pada tahun 2017 nilai meningkat menjadi Rp 589 Milyar lebih dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar 7,79%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan transfer dana yang cukup besar untuk Kota Batu. Maka dengan peningkatan ini, perekonomian Kota Batu dapat tumbuh dengan baik, dan dapat mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan oleh pejabat pemerintah di Kota Batu juga telah berjalan cukup baik.

Sedangkan pada komponen pendapatan lain yang sah, nilainya fluktuatif dibandingkan komponen pendapatan daerah yang lain. Tahun 2013 nilainya Rp 79 milyar lebih, mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi hingga Rp 117 milyar lebih, akan tetapi tahun 2017 menjadi Rp 95 milyar lebih.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu tahun 2013-2017, masih didominasi oleh Pajak Daerah, dimana Pajak Daerah pada tahun 2013 sebesar Rp. 44 Milyar lebih, pada tahun 2017 meningkat tajam hampir tiga kali lipat sebesar Rp. 113 Milyar lebih. PAD terbesar selanjutnya adalah Retribusi Daerah yang mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2013 Rp. 4,7 Milyar, pada tahun 2016 sebesar 5,8 Milyar, namun pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 4,9 Milyar. Berikutnya adalah Lain-lain PAD yang sah dan Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan pada tahun 2013 sebesar 2 Milyar lebih, dimana terdapat sedikit peningkatan menjadi 2,3 Milyar pada tahun 2017. Meningkatnya Pajak Daerah tidak terlepas dari peralihan pengelolaan PBB P2 dan BPHTB yang sebelumnya dikelola oleh Kantor Pajak Pratama Kementerian Keuangan dan pada tahun 2013 dialihkan kepada pemerintah daerah, selain itu meningkatnya jumlah wisatawan di Kota

Batu turut meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

B. Belanja Daerah

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. APBD Pemerintah Kota Batu selama kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami perkembangan yang terus meningkat. Pada tahun 2013 kekuatan belanja

daerah Kota Batu sebesar Rp 568 Milyar lebih dan tahun 2017 meningkat menjadi sebesar Rp 728 Milyar lebih dengan peningkatan rata-rata per tahun sebesar 8,09%.

Berdasarkan tabel 3.1. di atas, dapat diketahui bahwa realisasi belanja tidak langsung selama periode 2013-2017, setiap tahunnya mengalami kenaikan dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar 4,47%. Belanja langsung selama periode 2013-2017, setiap tahunnya juga mengalami kenaikan dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar 4,69%. Apabila dibandingkan antara target dan realisasi anggaran belanja daerah selama periode 2013-2017, dapat diketahui bahwa realisasi belanja daerah setiap tahunnya belum mencapai 100%, hal ini antara lain dikarenakan pedoman pelaksanaan dana alokasi khusus datanginya sering terlambat sehingga mempengaruhi capaian realisasi penyerapan, efisiensi pelaksanaan kegiatan (sisa lelang), dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dibatasi oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009. Maka daerah sangat berhati-hati dalam penggunaannya sehingga

berdampak pada realisasi penyerapan anggaran. Dari tahun ketahun realisasinya meningkat secara fluktuatif dan menurun cukup tajam pada tahun 2017.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya. Pada tabel diatas diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, dan besarnya SiLPA selama lima tahun perkembangannya fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 10,06%. Hal ini mengindikasikan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran di Kota Batu perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius. Pada pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal, hal ini untuk memperkuat kepemilikan saham Pemerintah Kota Batu di Bank Jatim dan meningkatkan kemampuan operasional perusahaan daerah.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca Pemerintah Daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci. Perkembangan Neraca Pemerintah Kota Batu tahun 2013-2017 dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 3.2.
RATA-RATA PERTUMBUHAN NERACA DAERAH
KOTA BATU
TAHUN 2013 SAMPAI 2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan
1.	ASET						
1.1.	ASET LANCAR						
1.1.1.	Kas	115.012.060.680,37	185.488.305.700,90	91.701.786.778,24	73.326.315.304,33	138.570.748.215,48	0,20
1.1.3.	Piutang	54.382.690.632,66	69.463.351.918,00	34.016.064.521,91	37.435.676.162,36	44.107.381.684,41	0,01
1.1.6.	Persediaan	4.125.357.903,69	3.428.705.709,33	3.901.719.963,62	5.327.430.097,99	5.586.933.937,09	0,10
	JUMLAH ASET LANCAR	173.520.109.216,72	258.380.363.328,23	129.619.571.263,77	116.089.421.564,68	188.265.063.836,98	0,13
1.3.	ASET TETAP						
1.3.1.	Tanah	192.866.708.701,00	203.701.596.680,00	210.138.666.680,00	552.810.090.125,00	533.274.119.946,00	0,42
1.3.2.	Peralatan dan mesin	179.255.992.518,08	203.948.084.585,08	200.185.518.042,78	279.140.403.200,58	315.181.028.363,58	0,16
1.3.3.	Gedung dan bangunan	242.377.972.348,56	256.429.660.810,56	503.864.079.934,20	466.193.176.660,56	498.876.501.409,56	0,25
1.3.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	282.037.746.280,08	327.384.864.865,08	393.572.361.536,00	491.109.599.326,38	543.897.882.548,38	0,18
1.3.5.	Aset tetap lainnya	32.299.766.416,25	40.122.785.565,25	32.423.201.667,25	33.761.503.980,25	32.233.973.595,25	0,01
1.3.5.	Konstruksi dalam pengerjaan	42.160.582.691,84	69.606.575.071,84	5.923.490.381,84	45.478.404.069,84	23.440.286.150,84	1,48

1.3.6.	Akumulasi Penyusutan			(329.540.822.806,74)	(407.460.631.802,01)	(464.079.688.124,89)	0,19
	JUMLAH ASET TETAP	970.998.768.955,81	1.101.193.567.577,81	1.016.566.495.435,33	1.461.032.545.560,60	1.482.824.103.888,72	0,13
1.5	ASET LAINNYA						
1.5.1.	Tagihan penjualan angsuran						
1.5.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah		31.050.000,00	31.050.000,00	378.433.000,00	363.171.000,00	3,72
1.5.3.	Kemitraan dengan pihak kedua						
1.5.4.	Aset tak berwujud	2.042.095.206,00	2.622.020.127,00	3.367.029.127,00	3.762.710.027,00	13.628.876.471,00	0,83
1.5.5.	Aset lain-lain	25.085.672.937,21	32.539.517.592,21	50.883.941.532,15	49.087.850.632,21	38.172.294.434,22	0,15
	JUMLAH ASET LAIN-LAINNYA	27.127.768.143,21	35.192.587.719,21	52.881.676.159,15	51.573.924.279,21	(5.559.337.501,86)	0,08
	JUMLAH ASET DAERAH	1.192.702.794.835,48	1.413.897.311.758,25	1.219.806.981.072,25	1.651.456.464.690,50	1.744.494.745.415,06	0,11
2.	KEWAJIBAN						
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga						
2.1.2.	Uang muka dari kas daerah						
2.1.3.	Pendapatan diterima dimuka		6.833.752.540,00	24.250.000,00	132.583.333,33	80.666.666,66	1,03
3.	EKUITAS DANA						

3.1.	EKUITAS DANA LANCAR						
3.1.1.	SILPA	115.011.695.680,37	185.488.305.700,90	91.492.226.068,00	72.255.722.989,80	254.930.280.717,26	0,61
3.1.2.	Cadangan piutang	54.382.690.632,66	69.463.351.918,00				0,28
3.1.3.	Cadangan persediaan	4.125.357.903,69	3.428.705.709,33				- 0,17
3.1.4.	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek		(7.612.265.165)				
3.1.5.	Pendapatan ditangguhkan						
3.2.	EKUITAS DANA INVESTASI						
3.2.2.	Diinvestasikan dalam aset tetap	970.998.768.955,81	1.101.193.567.577,81				- 0,43
3.2.3.	Diinvestasikan dalam aset lainnya	27.127.768.143,21	35.192.587.719,21				- 0,35
3.2.4.	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang						
3.3.	EKUITAS DANA CADANGAN						
3.3.1	Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan						

3.3.2	JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN						
	JUMLAH EKUITAS DANA	1.192.702.794.835,48	1.406.285.046.593,25	1.201.856.118.110,27	1.650.520.690.885,16	1.734.552.660.159,41	0,11
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.192.702.794.835,48	1.413.897.311.758,25	1.219.806.981.072,27	1.651.456.464.690,50	1.744.494.745.415,07	0,11

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya.

Pada tahun 2017, Kota Batu memiliki aset senilai Rp. 1.7 triliun, dengan tingkat pertumbuhan 0.11 persen per tahun. Jumlah aset terbesar adalah berupa aset tetap, yang pada tahun 2017 mencapai Rp.1.5 triliun dan rata-rata

tumbuh 0.13 persen per tahun. Aset tetap ini meliputi 88.2 persen dari seluruh aset pemerintah Kota Batu.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batu pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 80 juta. Dari tahun 2013 hingga 2017, jumlah kewajiban relatif fluktuatif, yaitu terendah tahun 2015 dan tertinggi tahun 2014. Karena itu nilai pertumbuhan tidak merefleksikan kecenderungannya.

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (1) Ekuitas Dana Lancar, (2) Ekuitas Dana Investasi, dan (3) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan asset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas

dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai ekuitas dana Kota Batu Tahun 2017 mencapai Rp. 1,7 triliun, dan mengalami pertumbuhan dari 2013-2017 dengan rata-rata 0.11 persen

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2013-2017

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah

daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung (*pro-poor*), pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) dan perluasan lapangan kerja (*pro-job*). Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur tertuang pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Perbandingan Belanja Pegawai dengan Total Belanja Kota Batu

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase (%)
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100
1	Tahun anggaran 2015	293.516.255.091,00	819.751.076.487,00	35,81
2	Tahun anggaran 2016	330.022.964.621,00	822.686.549.125,98	40,12
3	Tahun anggaran 2017	328.832.288.151,49	611.181.610.250,00	53,80

Berdasarkan Tabel 3.3. dapat disimpulkan bahwa selama periode tahun 2015-2017, total belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur pada tahun 2015 sebesar 293 Milyar meningkat pada tahun 2017 sebesar 328 Milyar. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan alokasi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur relatif cukup lebih besar, hal ini dalam rangka optimalisasi fungsi-fungsi pemerintah yaitu sebagai fasilitator pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik.

Namun prosentase perbandingan belanja pegawai dengan total belanja Kota Batu menunjukkan peningkatan dari awal tahun 2015 sebesar 35,81% meningkat menjadi sebesar 53,80%. Hal ini menunjukkan jumlah belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur meningkat yang berarti alokasi belanja langsung semakin berkurang yang merupakan anggaran terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Semakin sedikit anggaran belanja langsung akan berdampak terhadap minimnya program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

3.1.3. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);

pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Pembiayaan daerah, digunakan untuk menutup adanya defisit anggaran. Perkembangan defisit anggaran pemerintah Kota Batu dalam kurun tahun 2013-2017 dapat digambarkan pada Tabel berikut.

Tabel 3.4.
Defisit Riil Anggaran
Kota Batu

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	Realisasi Pendapatan Daerah	585.302.322.932,31	703.680.192.404,63	725.754.996.854,34	803.450.046.047,54	849.443.705.762,26
	Dikurangi realisasi :					
2	Belanja Daerah	568.468.908.109,01	632.737.653.584,00	819.751.076.487,00	819.686.549.125,98	728.120.377.965,85
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	977.445.041,00	425.928.800,00	-	3.000.000.000,00	4.040.000.000,00
A.	Defisit/Surplus riil	15.855.969.782,30	70.516.610.020,63	(6.146.851.200,27)	(11.833.193.550,33)	117.283.327.796,41

Berdasarkan tabel defisit riil anggaran di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 memperoleh surplus anggaran sebesar 15 Milyar lebih, demikian pula pada tahun 2014 terjadi peningkatan surplus anggaran sebesar 70 Milyar lebih. Namun pada tahun 2015 terjadi defisit riil anggaran sebesar 6 Milyar dan pada tahun 2016 defisit riil mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 11 Milyar lebih.

Pada tahun berikutnya 2017 anggaran pemerintah Kota Batu memperoleh surplus anggaran sebesar 117 Milyar. Besarnya surplus anggaran pada tahun 2017 menandakan rendahnya penyerapan anggaran. Rendahnya penyerapan anggaran belanja daerah mencerminkan kinerja anggaran yang tidak optimal. Anggaran pendapatan daerah harusnya diserap secara optimal oleh pemerintah daerah, dengan demikian diharapkan dapat membantu perputaran perekonomian masyarakat. Berputarnya perekonomian daerah pada tahap berikutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 3.5.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kota Batu

No	Uraian	2015	2016	2017
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	91.492.226.068,24	72.255.722.989,80	138.570.748.215,48
2	Pencairan dana cadangan	-	-	-

No	Uraian	2015	2016	2017
		Rp.	Rp.	Rp.
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-

Dari tabel 3.5. tersebut, terlihat bahwa terdapat defisit *riil* anggaran pada tahun 2015 sebesar 6 Milyar dan tahun 2016 sebesar 11 Milyar lebih, sedangkan tahun 2013, 2014, dan 2017 mengalami surplus. Untuk menutupi defisit anggaran tersebut dilakukan optimalisasi pembiayaan melalui realisasi penerimaan pembiayaan yaitu sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya sebagaimana tabel 3.6.

Tabel 3.6.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kota Batu

No.	Uraian	2015		2016		2017	
		Rp.	% dari SILPA	Rp.	% dari SILPA	Rp.	% dari SILPA
	Jumlah SILPA	91.492.226.068,24		72.255.722.989,80		138.570.748.215,48	
1	Pelampauan penerimaan PAD	6.306.766.836,09	6,89	-8.217.833.226,67	- 11,37	3.558.291.937,57	2,57
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	(4.097.756.193,00)	-4,48	(15.980.557.008,67)	- 22,12	(14.106.094.253,00)	- 10,18
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah		0,00		0,00		0,00
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya		0,00		0,00		0,00
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan		0,00		0,00		0,00
7	Kegiatan lanjutan		0,00		0,00		0,00

Dari tabel 3.6. di atas terlihat bahwa selama 3 tahun terakhir (2015-2017), sebagai tahun rujukan yang dijadikan bahan laporan keuangan pemerintah daerah, adanya kecenderungan peningkatan SiLPA pada setiap tahunnya. Berdasarkan ketentuan pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber terjadinya SiLPA berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Di masa mendatang diharapkan SiLPA harus semakin menurun, karena dengan semakin menurunnya SiLPA merupakan salah satu indikasi semakin sinergisnya antara perencanaan dengan penganggaran. Selain itu semakin besar dana yang dikeluarkan untuk pembangunan maka akan memiliki *multiplier effect* yang besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Batu.

3.2. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk

mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat, prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu kerangka pendanaan dialokasikan untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas. Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Secara keseluruhan proyeksi anggaran pendapatan belanja daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2022 disajikan pada tabel 3.7. berikut

Tabel 3.7.
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2018 s/d Tahun 2022
Kota Batu

NO	URAIAN	PERTUMBUHAN (%)	PROYEKSI				
			2018	2019	2020	2021	2022
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	PENDAPATAN	9,95	933.946.497.505,03	1.026.855.640.091,16	1.129.007.398.607,80	1.241.321.229.922,84	1.364.808.058.616,11
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	26,54	189.087.440.038,90	239.279.451.274,44	302.794.600.161,79	383.169.425.534,92	484.879.217.087,47
1.1.1	Pajak daerah	26,90	144.484.010.332,08	183.352.911.433,84	232.678.273.907,26	295.273.081.431,26	374.707.062.906,36
1.1.2	Retribusi daerah	1,82	4.988.489.703,93	5.079.407.963,46	5.171.983.263,57	5.266.245.804,84	5.362.226.338,26
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	3,99	2.455.079.848,21	2.553.126.980,59	2.655.089.765,72	2.761.124.580,82	2.871.394.048,22
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	44,21	40.824.706.942,16	58.873.830.663,62	84.902.702.226,85	122.439.269.946,73	176.571.233.092,60
1.2.	Dana Perimbangan	7,79	635.548.704.348,95	685.054.335.078,94	738.416.172.984,25	795.934.594.679,81	857.933.374.411,11
1.2.1	Dana bagi hasil pajak dan non pajak	-1,64	42.732.866.778,52	42.031.636.320,86	41.341.912.794,32	40.663.507.374,44	39.996.234.335,31
1.2.2	Dana alokasi umum	6,36	504.986.061.749,69	537.114.415.071,67	571.286.846.766,04	607.633.405.713,63	646.292.414.798,68
1.2.3	Dana alokasi khusus	14,12	81.478.120.170,52	92.984.892.116,34	106.116.711.379,59	121.103.075.754,83	138.205.893.931,43
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dan non pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	11,78	92.812.421.755,27	103.743.363.984,53	115.961.693.136,35	129.619.030.640,40	144.884.855.073,67

	***)						
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	12,92217	29.757.939.096,74	33.603.309.337,55	37.945.584.698,06	42.848.976.081,91	48.385.991.832,19
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	-40,07	607.304.374,85	363.941.783,81	218.100.885,63	130.702.212,36	78.326.450,93
2	Belanja	8,09	787.039.327.773,81	850.725.954.399,41	919.566.054.641,66	993.976.643.684,50	1.074.408.481.264,91
2.1.	Belanja Tidak Langsung	4,47	359.048.138.535,43	375.086.670.561,86	391.841.637.188,43	409.345.041.252,77	427.630.315.146,05
2.1.1	Belanja Pegawai	0,69	240.855.729.096,11	242.510.515.431,82	244.176.670.888,07	245.854.273.575,79	247.543.402.142,58
2.1.2	Belanja Bunga	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	17,37	66.075.681.523,52	77.553.152.921,16	91.024.282.903,13	106.835.373.752,64	125.392.881.117,39
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-0,49	4.776.937.905,79	4.753.571.565,62	4.730.319.521,64	4.707.181.214,78	4.684.156.088,71
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	0,327047	8.290.623.755,08	8.317.737.992,39	8.344.940.906,01	8.372.232.785,95	8.399.613.923,16
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	14,69	39.339.240.781,97	45.117.811.800,21	51.745.201.513,20	59.346.093.545,01	68.063.486.392,16
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3,862994	853.300.965,78	886.263.928,55	920.500.248,51	956.059.115,36	992.991.619,00
2.2.	Belanja Langsung	4,69	276.890.982.929,16	289.877.564.114,25	303.473.234.440,09	317.706.561.054,28	332.607.450.944,29
2.2.1	Belanja Pegawai	13,74	41.385.328.872,73	47.069.893.072,04	53.535.271.898,58	60.888.715.699,18	69.252.206.405,51
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,75	154.782.873.693,40	177.615.568.807,83	203.816.414.117,10	233.882.260.110,30	268.383.249.853,85
2.2.3	Belanja Modal	2,33	95.381.170.022,86	97.599.172.428,46	99.868.752.463,81	102.191.109.519,79	104.567.470.878,03
3	Pembiayaan	0,86	68.859.097.125,19	69.454.598.500,95	70.055.249.840,96	70.661.095.682,69	71.272.180.948,81
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	1,41	73.328.653.089,19	74.362.991.562,73	75.411.919.913,94	76.475.643.940,56	77.554.372.343,23
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	-7,252535	3.746.997.591,96	3.475.245.285,68	3.223.201.910,13	2.989.438.068,23	2.772.628.030,44

A. Kebijakan Pendapatan

Dari Tabel 3.7. di atas diproyeksikan bahwa kapasitas kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Batu untuk 5 Tahun ke depan hingga berakhirnya masa berlaku RPJMD 2017-2022, Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan meningkat rata-rata 9,95% per tahun, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,46–7,59% per tahun, inflasi rata-rata 4–6% per tahun. Dengan meningkatnya perekonomian yang diindikasikan dengan pertumbuhan ekonomi, maka potensi obyek pajak dan retribusi akan meningkat.

Untuk mencapai pendapatan daerah sebagaimana yang diproyeksikan pada Tabel 3.7. kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada :

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Penghasil, Kabupaten dan Kota, serta POLRI.
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
5. Meningkatkan peran dan fungsi BUMD, UPT dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
6. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.
7. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
8. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan revisi dari UU No. 34 Tahun 2000, jenis pendapatan asli daerah terdapat beberapa perubahan, yaitu: jenis pajak daerah meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak

Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, PBB dan BPHTB. Sedangkan untuk Retribusi Daerah telah ditentukan secara jelas jenis retribusi yang dapat dipungut. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan.

Pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan, khususnya dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, kebijakan diarahkan pada optimalisasi dan revitalisasi sumber – sumber obyek pajak dan peningkatan pengelolaan sumberdaya alam dengan mengindahkan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2017-2022 sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Batu Tahun 2017-2022 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Batu yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam 3 Kelompok Prioritas, yaitu Prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berikut ini beberapa poin penting terkait dengan kebijakan pembiayaan daerah:

1. Kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.
2. SiLPA tahun 2018-2023 diproyeksikan tumbuh rata-rata per tahun sebesar 10,06% dengan tahun dasar 2017, namun demikian tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 6% dari total APBD.
3. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai

salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.

4. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
5. Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, akan mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran

pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaannya meliputi : Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD, dan Dana Bergulir (Kredit Program).

3.2.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Secara keseluruhan kerangka pendanaan daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.8.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kota Batu

NO	URAIAN	PERTUMBUHAN (%)	PROYEKSI				
			2018	2019	2020	2021	2022
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan	9,95	1.026.855.640.091,16	1.129.007.398.607,80	1.241.321.229.922,84	1.364.808.058.616,11	1.500.579.376.201,66
2	Pencairan dana cadangan (sesuai perda)	0	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	10,06	167.853.568.613,85	184.739.637.616,40	203.324.445.160,61	223.778.884.343,76	246.291.040.108,75
	Total Penerimaan		1.194.709.208.705,00	1.313.747.036.224,20	1.444.645.675.083,44	1.588.586.942.959,88	1.746.870.416.310,41
	Dikurangi						
4	Belanja Tidak Langsung		375.086.670.561,86	391.841.637.188,43	409.345.041.252,77	427.630.315.146,05	446.732.384.670,54
5	Pengeluaran Pembiayaan		3.475.245.285,68	3.223.201.910,13	2.989.438.068,23	2.772.628.030,44	2.571.542.216,20
	Kapasitas riil kemampuan keuangan		816.147.292.857,46	918.682.197.125,64	1.032.311.195.762,44	1.158.183.999.783,39	1.297.566.489.423,67

Tabel 3.9.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kota Batu

NO	URAIAN					
		2018	2019	2020	2021	2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	816.147.292.857,46	918.682.197.125,64	1.032.311.195.762,44	1.158.183.999.783,39	1.297.566.489.423,67
	Prioritas I (45%)	367.266.281.785,86	413.406.988.706,54	464.540.038.093,10	521.182.799.902,53	583.904.920.240,65
	Prioritas II (35%)	285.651.552.500,11	321.538.768.993,98	361.308.918.516,86	405.364.399.924,19	454.148.271.298,28
	Prioritas III (20%)	163.229.458.571,49	183.736.439.425,13	206.462.239.152,49	231.636.799.956,68	259.513.297.884,73

Berdasarkan tabel 3.9. di atas, rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah berupa total penerimaan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program sesuai urutan prioritas. Prioritas program dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II, dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Prioritas I (utama) merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen). Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja

yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat OPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan, bersifat mendukung program prioritas utama. Disamping itu Program prioritas II berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi OPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan masing-masing OPD.

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.



BAB 4

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menguraikan isu-isu strategis pembangunan Kota Batu untuk periode 2017-2022 yang dibentuk berdasarkan pemetaan dari permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan Kota Batu. Pembentukan isu-isu strategis di Kota Batu ini dilakukan berdasarkan komponen terhadap analisis hasil pembangunan periode sebelumnya; telaah terhadap dokumen RPJPD Kota Batu 2005-2025; telaah terhadap dokumen RPJMN 2015-2019; telaah terhadap Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019; telaah terhadap isu internasional; telaah terhadap Platform Kepala Daerah Terpilih; telaah terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); analisis yang berasal dari dunia akademik, usaha/bisnis, sosial budaya, dan berbagai sumber serta dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan harapan (*gap expectation*) antara perencanaan yang disusun dengan kinerja pembangunan yang dicapai saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya muncul dari kekuatan (*strength*) yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan (*weakness*) yang belum teratasi, peluang (*opportunity*) yang belum dimaksimalkan, serta ancaman (*threat*) yang belum diantisipasi.

Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal. Oleh karena itu, dalam menentukan permasalahan pembangunan yang ada di Kota Batu dilakukan melalui penelaahan terhadap kinerja pemerintah yang belum tercapai pada periode sebelumnya yang disesuaikan menurut bidang dan urusan yang dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu berdasarkan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar serta urusan pilihan.

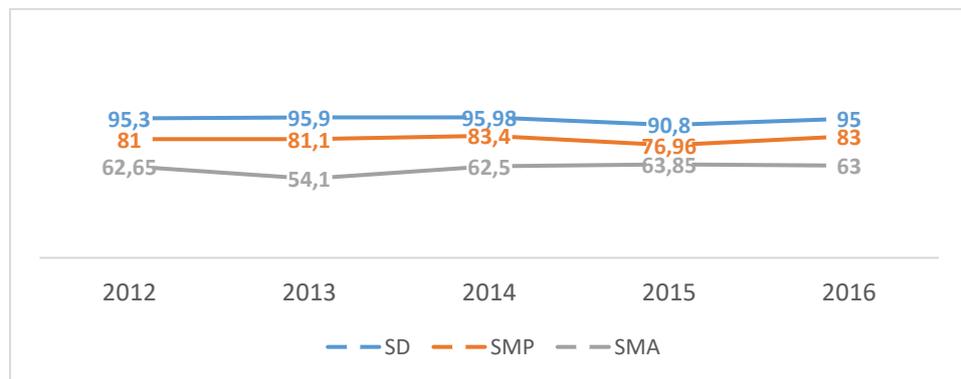
4.1.1 Permasalahan terkait penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

a) Layanan Urusan Wajib Dasar

Permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan urusan wajib dasar di Kota Batu yang menjadi prioritas adalah:

1) Pendidikan

Pendidikan merupakan prasyarat utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing global. Penyelenggaraan pendidikan menjadi perhatian semua pemangku kepentingan baik pemerintahan daerah, dunia usaha dan masyarakat. Permasalahan pendidikan Kota Batu adalah rendahnya angka partisipasi sekolah khususnya di tingkat SMA sederajat dan kurangnya minat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.



Gambar 4.1. Angka Partisipasi Murni di Kota Batu
Sumber : Bappelitbangda Kota Batu, 2017

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa masih rendahnya minat masyarakat Kota Batu dalam mengemban pendidikan khususnya pada tingkat SMA sederajat. Kurangnya pendidikan akan menyebabkan masyarakat tidak produktif dan tidak memiliki kecakapan. Dimana kecakapan seseorang sangat dibutuhkan untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Pemerintah Kota Batu perlu menjalankan perannya sebagai aktor dalam pembangunan manusia sehingga masyarakatnya dapat menjalankan pendidikan tidak hanya sekolah menengah akantetapi hingga pendidikan tertinggi.

Tabel 4.2. Persentase Penduduk Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2016

Pendidikan tinggi yang ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan
Tidak punya ijazah SD	9,08	13,25
SD/MI/SDLB/Paket A	47,58	42,97
SMP/MTs/SMPLB/Paket B	10,22	11,42
SMA/SMK/MA/SMLB/Paket C	24,63	24,95
D1/D2/D3	1,97	2,31
D4/S1	5,77	4,79
S2/S3	0,75	0,30

Sumber : BPS : Kota Batu dalam Angka 2017

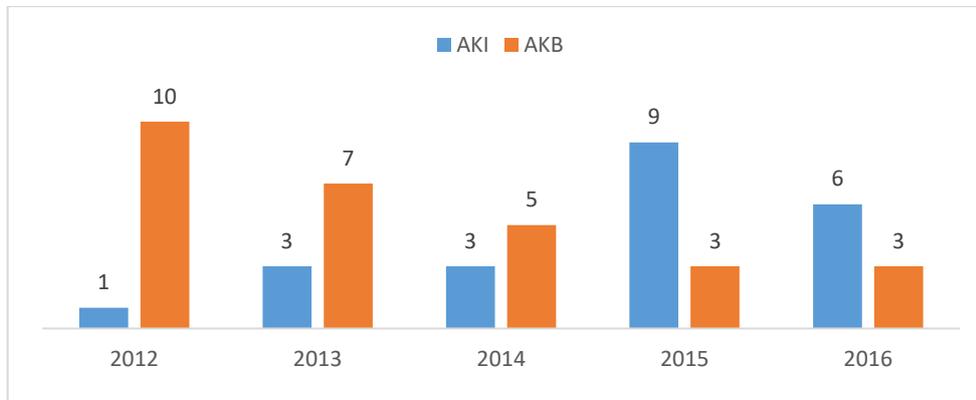
Permasalahan pembangunan sumber daya manusia di Kota Batu tidak hanya tentang kurangnya angka partisipasi. Akan tetapi tantangan yang dihadapi pemerintah Kota Batu adalah minimnya kualitas sumber daya manusia. Hal ini dapat dilihat bahwa penduduk yang hanya memiliki

kualifikasi lulusan perguruan tinggi sangat sedikit. Untuk pendidikan D1/D2/D3 hanya sebesar 24,79 persen yang diantaranya 1,97 persen laki-laki dan 2,31 persen perempuan. Lulusan D4/S1 sebesar 2,14 persen sedangkan lulusan S2/S3 lebih minim yakni hanya sebesar 0,53 persen.

Pendidikan lanjutan setelah menengah pertama sangat penting sebagai kualifikasi sumber daya manusia. Maka dengan demikian, pemerintah harus mengarahkan perannya dalam meningkatkan kualitas SDM agar mencapai pendidikan tertinggi. Begitu juga peningkatan partisipasi pendidikan non formal, dimana pendidikan non formal seperti pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus, paud dan lain sebagainya dapat membantu meningkatkan kualitas penduduk Kota Batu dengan meningkatkan konsentrasi penduduk berdasarkan minat dan bakat yang akan diarahkan kepada karir di masa yang akan datang. Serta perlunya peningkatan terhadap partisipasi masyarakat karena pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat masih mendapat perhatian yang sangat minim dari masyarakat Kota Batu.

2) Kesehatan

Pembangunan kesehatan secara umum berfokus pada penyelenggaraan urusan kesehatan Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Sehat selain sebagai salah satu hak dasar manusia, juga merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Menjadi sehat akan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia seperti halnya pendidikan. Dalam mendukung kesehatan, hal yang paling utama tujuannya adalah menghindari kematian.

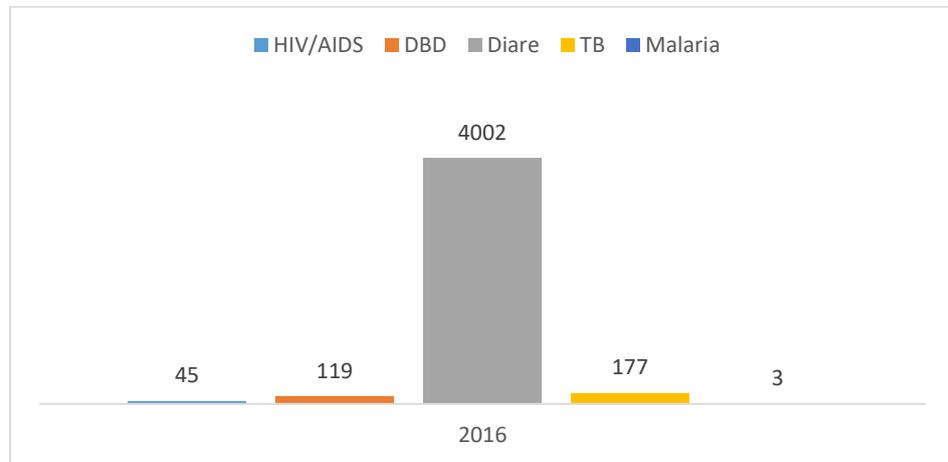


Gambar 4.2. Angka Kematian Ibu dan Bayi Kota Batu
Sumber : RKPD Kota Batu 2018

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Batu mengalami kenaikan dari tahun 2012, dari 1 kasus menjadi 3 kasus di tahun 2013 dan 2014. Kemudian naik begitu tinggi hingga mencapai 9 kasus di tahun 2015 dan setelah itu turun menjadi 6 kasus pada tahun 2016. Penyebab terbesar

kematian Ibu hamil dari 9 kematian ibu pada tahun 2015 diantaranya disebabkan karena keracunan kehamilan, pendarahan, dan sisanya karena penyakit penyerta lainnya. Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Batu terus mengalami penurunan sejak tahun 2012. Mulai dari 10 kasus turun menjadi 7 kasus di tahun 2013, kemudian 5 kasus di tahun 2014, dan berikutnya menjadi 3 kasus baik di tahun 2015 maupun 2016. Penyebab terbesar kematian bayi adalah BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah), disusul kasus Akfisia (sesak napas), dan Pneumonia.

Meskipun terjadi penurunan angka kematian baik terhadap ibu maupun bayi dalam beberapa tahun, peran pemerintah tetap harus ditingkatkan untuk selanjutnya tidak terjadi kematian. Selain itu, permasalahan pembangunan kesehatan masyarakat Kota Batu tidak hanya pada faktor pemicu kematian ibu dan bayi, akan tetapi permasalahan kasus berbagai macam penyakit yang menimpa masyarakat.



Gambar 4.3. Jumlah Kasus Penyakit di Kota Batu 2016
Sumber : BPS: Kota Batu dalam Angka 2017

Penyakit HIV dan TB merupakan penyakit yang menular dan beresiko tinggi dalam kematian. Masih tingginya jumlah penyakit tersebut di Kota Batu menjadi tantangan pemerintah. Oleh karena itu, perlu penanganan yang serius untuk meminimalisir terjadinya penyakit baik HIV maupun TB.

Permasalahan lainnya adalah terkait kondisi pelayanan kesehatan. Di Kota Batu masih kurang dan terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di Puskesmas dan Jaringannya; belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan; keterbatasan tempat pelayanan karena terbatasnya lahan; keterbatasan SDM terutama tenaga epidemiolog, penyuluh kesehatan masyarakat, nutrisi dan sanitarian; masih kurangnya

kualitas dan kuantitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan puskesmas pembantu serta kurang maksimalnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. Yakni dengan target yang ditentukan pada tahun 2016 sebanyak 60, hanya terealisasi sebanyak 5 yaitu sebesar 8,33%. Hal ini perlu ditingkatkan demi tercapainya kualitas kesehatan terhadap masyarakat miskin.

3) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Tempat tinggal atau perumahan adalah salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap masyarakat seperti halnya kebutuhan makanan, pakaian dan lainnya. Tempat tinggal berfungsi sebagai tempat berlindung dan istirahat setiap hari dalam menjalankan kehidupan sehingga harus dipastikan lingkungan tempat tinggal dalam keadaan baik dan sehat. Salah satu faktor penentu perumahan dan kawasan yang baik dan sehat adalah tersedianya aliran air bersih, aliran listrik dan juga sanitasi. Keadaan perumahan di Kota Batu adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Keadaan Pemukiman Kota Batu

Indikator	satuan	2015	2016	2017
Rumah tangga pengguna air bersih	%	99,81	99,9	73
Rumah tangga	%	100	100	100

pengguna listrik

Rumah tangga ber-sanitasi	%	93,82	94,69	74,12
---------------------------	---	-------	-------	-------

Sumber: Bappelitbangda Kota Batu, 2017

Rumah tangga dengan sumber penerangan listrik di Kota Batu sudah baik, akan tetapi permasalahannya terdapat pada aliran air bersih pada rumah tangga dan yang memiliki sanitasi masih belum secara keseluruhan. Selain itu terdapat pula rumah tinggal yang tidak layak huni di Kota Batu. Pada tahun 2012 rumah tinggal tidak layak huni sebanyak 1494 unit, menurun pada tahun 2013 menjadi 1387 unit, tahun 2014 sebanyak 1332 unit dan tahun 2015 sebanyak 908 unit. Meskipun tiap tahunnya terjadi penurunan, namun jumlah rumah yang tidak layak huni masih tergolong tinggi sehingga harus menjadi perhatian pemerintah untuk memperbaiki kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat Batu agar terhindar dari tempat yang tidak sehat. Lebih lanjut, beberapa permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam mewujudkan perumahan dan pemukiman yang sehat adalah:

- a. Tingkat kebutuhan sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman yang cukup tinggi tidak sebanding sedangkan kemampuan pemerintah mengalokasikan anggaran yang terbatas;

- b. Perencanaan urusan perumahan dan permukiman masih lemah karena belum adanya dokumen kebijakan strategi tentang penataan ruang perumahan dan permukiman sebagai pengendali pembangunan perumahan dan permukiman (Dokumen RP3KP);
- c. Belum lengkapnya infrastruktur dasar permukiman sehingga belum tercapainya lingkungan yang sehat.

4) Pekerjaan Umum dan Penataan ruang

Pembangunan infrastruktur berupa jalan sangat penting dalam rangka meningkatkan mobilisasi penduduk dan barang serta meningkatkan perekonomian masyarakat di suatu wilayah. Jalan merupakan salah satu infrastruktur transportasi yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian selain untuk memudahkan mobilitas penduduk dari suatu daerah menuju daerah lainnya.

Tabel 4.4 Jalan Berdasarkan Kondisi Fisiknya di Kota Batu (km)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Mantap</i>	239.43	247.92	299.00	347.52	128.14
<i>Baik</i>	239.43	247.92	299.00	347.52	24.02
<i>Rusak Ringan</i>	96.42	100.54	80.00	54,97	106.3
<i>Rusak Berat</i>	56.88	54.03	23.49		50.69

Sumber: RKPD Kota Batu 2018

Permasalahan di Kota Batu berdasarkan kondisi fisik dari jalan yang ada yaitu masih adanya kondisi yang rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat dari tahun 2013 hingga 2017. Yakni rusak ringan sepanjang 105.80 km, 96.42 km, 100.54 km, 80.00 km, 54,97 km dan 106.3 di setiap tahun 2013-2017. Sedangkan panjang jalan yang rusak berat di setiap tahunnya adalah 71.17 km, 56.88 km, 54.03 km dan 23.49 km di tahun 2012-2015 sedangkan ditahun 2017 kondisi yang rusak berat sepanjang 50.69 km.

Selain daripada infrastruktur jalan, yang menjadi permasalahan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Batu adalah terkait rasio jaringan irigasi. Persentase luasan daerah irigasi yang terlayani air irigasi tercatat pada tahun 2015 masih sebesar 62%, untuk rasio jaringan irigasi sebesar 51,42 persen dan terakhir adalah luas irigasi dalam kondisi baik seluas 1,079.16 ha. Melihat bahwa sebagian besar wilayah Kota Batu di kelilingi dan dominan oleh wilayah pertanian, oleh karenanya dalam menunjang keberhasilan tiap desa-desa yang ada di Kota Batu pemerintah harus memerhatikan aliran irigasi dengan kondisi yang baik agar dapat dirasakan dan diterima oleh

semua lapisan masyarakat khususnya bagi penduduk miskin.

5) Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat

Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat merupakan kondisi yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan Kota Batu yang aman, nyaman dan berdaya saing. Citra Batu sebagai kota wisata seharusnya sejalan dengan kondisi ketenteraman, ketertiban dan keamanan masyarakatnya dengan meminimalisir tingkat kriminalitas di Kota Batu.

Tabel 4.5. Jenis Kriminalitas Kota Batu Tahun 2016

Jenis Tindak Pidana	Lapor	Selesai
Penganiyaan Berat	2	1
Perjudian	16	16
Pemalsuan	10	8
Pencurian dengan kekerasan	2	1
Pencurian kendaraan bermotor	26	8
Pencurian dengan pemerasan	2	2
Pencurian biasa	59	28
Pencurian kayu	3	3
Penggelapan	5	4
Pengeroyokan	10	7
Penipuan	39	26
Pengrusakan	1	1
Penadahan	2	2
Narkoba	39	39
Lain-lain	39	23
Jumlah	225	169

Sumber: BPS Kota Batu, 2017

Permasalahan pembangunan yang mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat Kota Batu adalah masih tingginya angka kriminalitas yang terjadi. Sebanyak

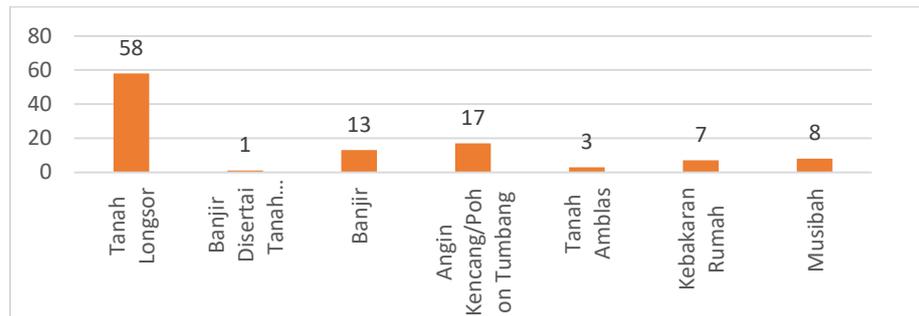
225 kasus kriminalitas dapat merusak kenyamanan dan ketentraman lingkungan Kota Batu. Dan dapat dilihat bahwa dari 225 kasus kriminalitas, hanya sebanyak 169 kasus yang terselesaikan. Hal ini menjelaskan bahwa perlu peningkatan tindakan perlindungan oleh pemerintah setempat.

Selain daripada kriminalitas yang berupa tindak pidana tersebut, berdasarkan laporan LKPJ AMJ Kota Batu tahun 2017, terdapat tantangan yang berkaitan dengan berkembangnya aliran atau paham yang menyimpang dari ajaran agama serta cenderung mengarah kekerasan (radikalisme). Oleh karena itu, dibutuhkan peran tokoh agama untuk membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini. Terlebih hal ini bertujuan untuk mewujudkan Batu sebagai kota aman dengan visi Kota Batu sebagai Agrowisata Internasional.

Rasa aman menurut Maslow merupakan kebutuhan dasar manusia yang ke-dua setelah kebutuhan fisiologisnya terpenuhi. Adanya perasaan aman akan menjamin berlangsungnya kehidupan seseorang. Dan apabila adanya perasaan takut serta merasa adanya ancaman akan menyebabkan hidupnya terganggu, tidak bebas, maupun terhambat. Jika rasa aman hilang dari seluruh masyarakat,

maka kestabilan sosial di dalam masyarakat akan terganggu. Hal ini dapat berdampak pada munculnya masalah sosial lain di antara masyarakat seperti hilangnya rasa percaya antar sesama hingga terjadinya konflik sosial. BPS menyatakan bahwa tindak kejahatan yang dialami oleh salah satu masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat tersebut memiliki indeks modal sosial yang lebih rendah. Sebaliknya, seseorang yang mampu menjaga sikap toleransi dan kepedulian terhadap sesama cenderung akan terhindar dari tindak kejahatan. Oleh karena itu, penting untuk mengukur indeks modal sosial di Kota Batu untuk mewujudkan Kota Batu aman dan nyaman melalui pengentasan permasalahan tindak kriminalitas.

Selain masalah kriminalitas yang tinggi, Kota Batu juga memiliki masalah yang penting dalam kaitannya bencana. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam maupun non alam antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir kekeringan, angin topan, kebakaran, tanah longsor yang mengakibatkan kerugian materiil maupun non materiil.



Gambar 4.4. Jumlah bencana di Kota Batu tahun 2016
Sumber: LKPJ AMJ 2017

Kota Batu yang terletak di dataran tinggi juga menimbulkan beberapa potensi bencana yang harus segera ditindaklanjuti baik dari sisi pencegahan maupun penanganan pasca bencana. Berdasarkan grafik jumlah bencana, tanah longsor menjadi bencana yang paling banyak terjadi di Kota Batu. Dengan demikian, pemerintah perlu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat untuk mengantisipasi serta meminimalisir kerugian yang akan terjadi. Sedangkan perlu strategi penanganan masalah banjir, tanah amblas maupun kebakaran rumah untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kembali bencana tersebut.

b) Layanan Urusan Wajib Non Dasar

Permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan urusan wajib non dasar di Kota Batu yang menjadi prioritas adalah:

1) Tenaga kerja

Permasalahan ketenagakerjaan di Kota Batu terletak pada banyaknya penduduk yang tidak bekerja sehingga tingkat pengangguran terbuka tinggi. Seperti tabel di bawah ini:

Tabel 4.6 Penduduk Kota Batu Usia 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Kegiatan Tahun 2012-2016

Indikator	2012	2013	2014	2016
Penduduk Kota Batu berumur 15 tahun ke atas	143.150	142.902	145.14	153.794
Angkatan Kerja	101.733	103.743	106.777	105.496
Penduduk yang bekerja	98.261	101.339	104.177	100.97
Pengangguran Terbuka	3.472	2.404	2.600	4.526
TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)	70,9%	71,74%	70,38%	68,60%
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	3,41%	2,32%	2,18%	4,29%
TKK (Tingkat Kesempatan Kerja)	96.59%	97.68%	97.57%	95.71%

Sumber: RKPD Kota Batu 2018.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kota Batu pada tahun 2016 sebesar 95,71 persen, menurun dibanding tahun 2014 sebesar 97,57 persen. Artinya dari setiap 100 penduduk, yang merupakan angkatan kerja hanyalah sebanyak 95 penduduk. Angkatan kerja penduduk Kota Batu yang

terserap dalam kegiatan ekonomi (bekerja) pada tahun 2016 sebesar 105.496 atau sebanyak 95,71 persen. Hal ini mengalami penurunan dibanding tahun 2014 yaitu sebanyak 104.177 atau 97,56 persen terhadap jumlah angkatan kerja yang ada. Kemudian permasalahan yang penting adalah mengenai perkembangan pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Batu yang masih relatif tinggi. Tercatat bahwa penduduk usia 15 tahun ke atas yang mencari pekerjaan pada tahun 2016 sebanyak 4,29 persen sedangkan di tahun 2014 sebanyak 2,18 persen. Angka ini mengalami kenaikan 2,11 persen. Kenaikan tingkat pengangguran terbuka di Kota Batu ini terjadi karena beberapa faktor yakni:

- a. Daya saing tenaga kerja yang masih relatif lemah dan adanya kebijakan standarisasi penerimaan tenaga kerja yang dikeluarkan perusahaan belum disertai dengan peningkatan kualitas SDM daerah yang ada;
- b. Adanya kebijakan rasionalisasi karyawan perusahaan;
- c. Kecenderungan para lulusan sekolah maupun perguruan tinggi yang mulai berorientasi pada pekerjaan perkantoran daripada berwirausaha khususnya di sektor agraris, dan

- d. Penyampaian informasi ketersediaan lapangan pekerjaan belum sampai menyentuh wilayah perdesaan.

Penduduk merupakan sumber daya, pelaksana serta merupakan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, penduduk perlu diarahkan agar memiliki karakteristik yang menguntungkan bagi daerah dalam rangka pembangunan. Penduduk sebagai tenaga kerja diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pencari kerja sehingga menjadi masyarakat yang produktif yang mampu berdaya saing tinggi di dunia pasar kerja dan dunia usaha sebagai tenaga kerja yang handal. Selain itu, pengarahan penduduk sebagai tenaga kerja yang produktif di lakukan semata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan menekankan penurunan angka kemiskinan daerah. Oleh karena itu permasalahan lainnya yang dimiliki Kota Batu terhadap urusan ketenagakerjaan adalah:

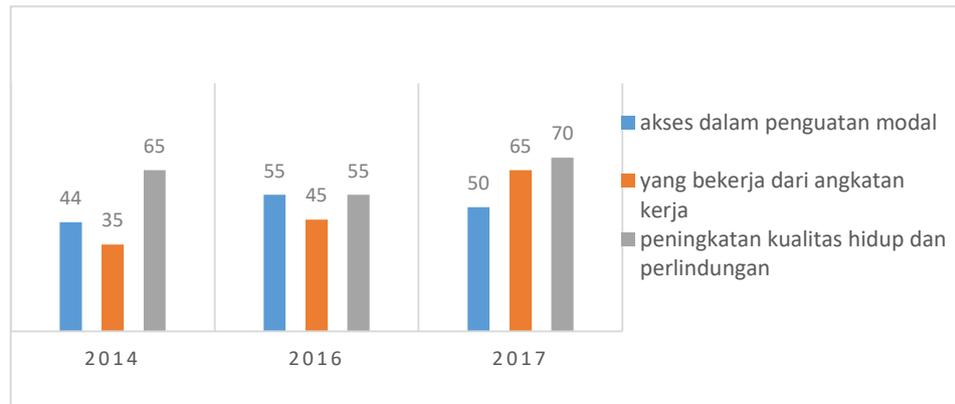
- a. Kurangnya atau rendahnya kualitas tenaga kerja dan terbatasnya sarana prasarana pelatihan untuk penduduk agar menjadi tenaga kerja produktif yang berdaya saing tinggi;

- b. Tingginya konflik ketenagakerjaan dalam penentuan UMK dan masih rendahnya perlindungan bagi setiap tenaga kerja yang ada.

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan menuntut adanya pengoptimalan penggunaan sumber daya yang tersedia, baik itu merupakan sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya sebagai pelaku perekonomian. Pembangunan baik nasional maupun internasional juga menuntut adanya kontribusi kesetaraan gender. Dengan tidak membeda-bedakan gender, pembangunan menjadi pintu gerbang untuk setiap perempuan dapat berkarya dan meraih cita-citanya.

Permasalahan yang dimiliki Kota Batu dalam menghadapi isu pembangunan global adalah masih rendahnya pemberdayaan perempuan. Dengan adanya kebebasan dan keadilan dalam gender, menuntut para perempuan harus dapat berkontribusi dalam kegiatan pembangunan. Akan tetapi di Kota batu masih rendahnya akses perempuan dan kelompok perempuan dalam penguatan modal serta rendahnya penduduk perempuan yang bekerja dari angkatan kerja.



Gambar 4.5. Persentase Realisasi Pemberdayaan Perempuan
Sumber : RKPD Kota Batu 2018

Pemberdayaan perempuan merupakan upaya perempuan-perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Urusan pemberdayaan perempuan diarahkan untuk upaya peningkatan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selain daripada pemberdayaan perempuan, kesetaraan dan keadilan gender juga merupakan upaya untuk

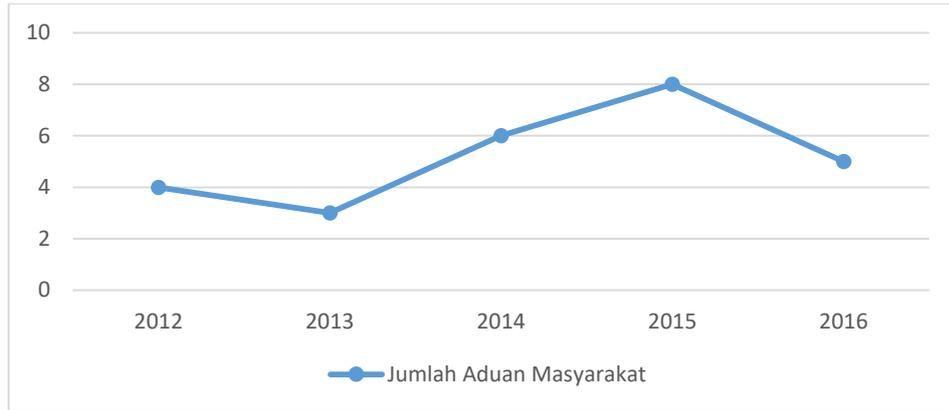
melindungi anak maupun perempuan dari kekerasan. Perlindungan anak dan perempuan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, keamanan dan kenyamanan kepada anak dan perempuan terhadap berbagai aksi kekerasan yang memungkinkan mereka hadapi. Permasalahan yang ada di Kota Batu yakni terjadinya kasus kekerasan dalam beberapa tahun terakhir. Seperti yang di lansir dari harianbhirawa.com (2015), bahwa di Kota Batu pada tahun 2013 terdapat 10 kasus kekerasan diantaranya yaitu 9 kasus pencabulan atau persetubuhan anak dan 1 kasus untuk KDRT. Kemudian pada tahun 2014 terjadi kekerasan sebanyak 17 kasus yang diantaranya 13 kasus pencabulan anak, 1 kasus KDRT, 2 kasus pengeroyokan dan 1 kasus penculikan anak. Pada tahun 2015 terjadi kekerasan sebanyak 10 kasus yang diantaranya 7 kasus pencabulan anak, 1 kasus KDRT, dan 2 kasus kekerasan terhadap anak. Selanjutnya dilansir melalui radarmalang.com (2017), diketahui bahwa pada tahun 2016 telah terjadi kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 8 kasus dan melalui pojokpitu.com (2017) menyatakan bahwa di tahun 2017 terjadi sebanyak 10 kasus kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan kasus-kasus yang telah terjadi di Kota Batu ini, menuntut peran pemerintah Kota Batu dalam melindungi dan memberikan keadilan gender yaitu perlindungan bagi kaum perempuan dan anak-anak agar terhindar dari kekerasan agar terwujudnya Kota Batu sebagai kota layak anak.

3) Lingkungan Hidup

Air, udara dan tanah/lahan merupakan sumberdaya yang diperlukan oleh manusia untuk melangsungkan kehidupan. Namun disisi lain ketiga sumberdaya ini cenderung terus mengalami pencemaran/kerusakan akibat dampak negatif dari aktifitas pembangunan yang dilakukan oleh manusia. Permasalahan pencemaran lingkungan dapat berdampak pada keberlanjutan pembangunan kota sehingga perlu diselesaikan secara komprehensif. Permasalahan utama urusan lingkungan hidup Kota Batu adalah tingginya pencemaran dan perusakan lingkungan, terutama pada media air sungai utama Kota Batu. Kualitas air terutama air sungai terpengaruh oleh aktifitas manusia diantaranya pembuangan limbah cair dan sampah ke sungai secara ilegal baik yang berasal dari rumah tangga maupun peternakan dan UMKM; Penggunaan pupuk kimia dan

pestisida yang tidak ramah lingkungan pada sektor pertanian masih tinggi. Serta konversi lahan pertanian, perkebunan dan hutan menjadi daerah pemukiman, kawasan perdagangan dan pusat produksi barang dan jasa.



Gambar 4.6 Pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan / kerusakan Lingkungan Hidup

Sumber: RKPD Kota Batu, 2018

Intervensi pemerintah sangat diperlukan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang mungkin akan semakin parah. Selain peran pemerintah, partisipasi masyarakat dan dunia usaha juga diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan di Kota Batu. Secara spesifik, beberapa permasalahan pada urusan lingkungan hidup di Kota Batu adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya aturan hukum di Kota Batu mengenai pengelolaan lingkungan hidup;

- b. Lemahnya tindakan hukum terhadap pelanggaran di bidang lingkungan hidup;
- c. Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup masih rendah;
- d. Peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan aktifitas ekonomi mengakibatkan peningkatan tekanan terhadap lingkungan, khususnya sumber daya air dan lahan. Hal ini memicu peningkatan pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga tantangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ke depan akan semakin berat;
- e. Kesadaran dan partisipasi para pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengarusutamaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan masih belum optimal;
- f. Pengelolaan sampah yang masih konvensional;
- g. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur.

4) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kota Batu terdiri atas beberapa wilayah desa. Desa ini secara empiris memiliki peran penting dan strategis dalam menunjang pembangunan. Ditinjau dari segi kewilayahan,

desa merupakan wilayah pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat. Secara sosiologis desa berperan strategis sebagai unit sosial dan budaya yang menjadi wadah berlangsungnya sosialisasi, internalisasi dan instusional nilai-nilai sosial dan budaya yang akan membangun mentalitas penduduk desa.

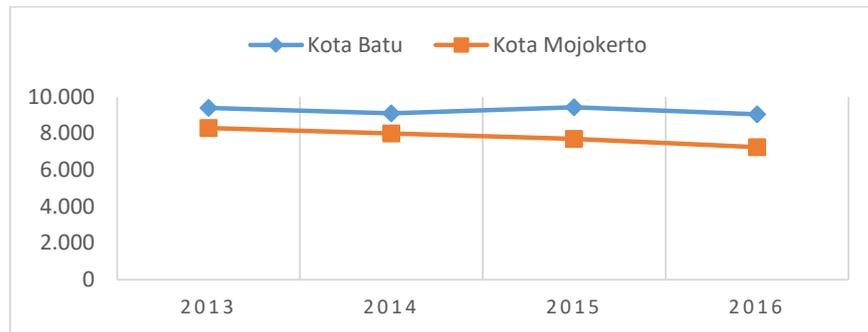
Selain itu, wilayah strategis Kota Batu terdapat di desa karena sebagian besar wilayah Kota Batu merupakan kawasan pertanian dimana sektor pertanian ini merupakan kearifan lokal Kota Batu dengan produksinya yang menyumbang PDRB terbesar ke-dua. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan desa akan menjadi faktor kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Batu. Namun pembangunan dan dinamika perkembangan desa dalam kenyataannya masih memiliki beberapa permasalahan yang membuat belum tercapainya peran desa sebagai penunjang pembangunan Kota Batu. Permasalahan tersebut seperti:

- a. SDM pembangunan di pedesaan belum sepenuhnya memahami pendekatan pemberdayaan;
- b. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan belum optimal;

- c. Kelembagaan masyarakat di desa belum berperan secara maksimal;
- d. Pembangunan di pedesaan belum sepenuhnya menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Lembaga ekonomi di pedesaan relatif masih lemah;
- f. Pemanfaatan sumber daya alam pedesaan belum ramah lingkungan;
- g. Adanya ketergantungan masyarakat padabantuan pemerintah.

Keadaan strategis ini menuntut adanya pemberdayaan terhadap masyarakat yang berkenaan dengan upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan melalui upaya penanggulangan kemiskinan karena kemiskinan merupakan permasalahan kesejahteraan di Kota Batu.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Batu harus berangkat dari pengentasan kemiskinan. Karena kemiskinan masih menjadi permasalahan serius yang belum terpecahkan oleh pemerintah daerah selama beberapa tahun. Perkembangan kemiskinan Kota Batu bersifat fluktuatif, yaitu terjadinya penurunan dan kenaikan tiap tahunnya.



Gambar 4.7. Jumlah penduduk miskin di Kota Batu
Sumber : LKPJ AMJ Kota Batu 2017; BPS, 2016

Meskipun di tahun 2016 angka kemiskinan Kota Batu mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi penurunan tidak signifikan. Jumlah penduduk miskin di Kota Batu masih tinggi dibanding dengan kota lainnya seperti Mojokerto. Tahun 2013 hingga 2016 masing-masing sebanyak 9.340 jiwa, 9.100 jiwa, 9.430 jiwa dan 9.050 jiwa. Sedangkan Kota Mojokerto masing-masing sebanyak 8.300 jiwa, 8.000 jiwa, 7.700 jiwa dan 7.240 jiwa. Sehingga Kota Batu harus memprioritaskan program untuk penanggulangan kemiskinan yang efektif agar dapat menurunkan jumlah penduduk miskin.

Kemiskinan dapat menghambat pembangunan daerah dan juga dapat berdampak terhadap ketentraman lingkungan. Kemiskinan dapat mengurangi rasa aman dan nyaman masyarakat apabila penduduk miskin berada dilingkungan yang tidak miskin. Kemiskinan juga dapat menimbulkan masalah kriminalitas, dimana seseorang yang

miskin akan berpeluang melakukan kejahatan seperti pencurian, pencopetan, atau bahkan pembunuhan. Oleh karena itu masalah kemiskinan di Kota Batu harus ditindaklanjuti secara serius dan sistematis. Dalam menanggulangi kemiskinan ini, pemerintah Kota Batu membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan terutama tokoh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh perdagangan dan usaha perkonomian untuk memberikan dukungan lapangan kerja.

5) Perhubungan

Kota Batu memiliki beberapa permasalahan dalam tata kelola perhubungan yaitu seperti timbulnya permasalahan yang kompleks dan sistematis di bidang transportasi akibat bertambahnya populasi penduduk dan semakin cepatnya perpindahan serta pergerakan barang dan jasa. Kemudian sirkulasi arus persimpangan sering terjadi masalah karena *traffic light* yang tidak efektif, dan masih kurangnya kegiatan perhubungan dalam menangani masalah keselamatan transportasi karena berdasarkan laporan polres batu bahwa selama beberapa tahun telah banyak terjadinya kecelakaan lalu lintas Kota Batu yang menyebabkan korban luka ringan, luka berat dan bahkan korban meninggal.

**Tabel 4.7 Banyaknya Kecelakaan dan Korban
Lalu Lintas di Kota Batu**

Tahun	Jumlah Keelakaan	Meninggal	Luka Berat	Luka Ringan
2011	165	23	0	234
2012	132	23	0	218
2013	183	55	0	236
2014	117	36	82	119
2015	175	32	80	175
2016	160	33	22	198

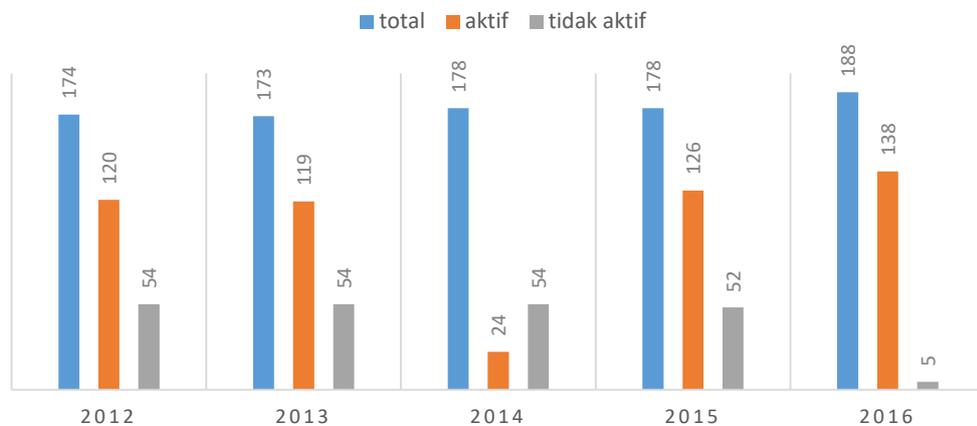
Sumber: Kota Batu dalam angka 2017

6) Komunikasi dan Informatika

Permasalahan bentang geografis Kota Batu yang luas dan tingkat heterogenitas masyarakatnya mengakibatkan adanya kesenjangan (*digital device*) dalam bidang komunikasi dan informatika antara masyarakat yang tinggal di Kota dan Pedesaan, karena media massa tidak menjangkau sampai pelosok desa (terpencil) khususnya wilayah miskin/blank spot teknologi informasi komunikasi (TIK). Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang belum paham akan pemanfaatan TIK atau biasa disebut gagap teknologi (gaptek) karena masih belum adanya persepsi yang sama terhadap masalah pengelolaan dan arti penting komunikasi dan informatika serta masih terbatasnya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang tersedia.

7) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Sektor UMKM menjadi salah satu sektor yang menyumbang PDRB yang tinggi Kota Batu, akan tetapi permasalahan terdapat pada daya saing UMKM yang lemah karena sebagian besar merupakan skala mikro yakni 84%. Skala mikro ini tercatat masih banyak dibidang koperasi yang tidak aktif, dan sebagian besar bergerak di bidang usaha simpan pinjam.



Gambar 4.8. Jumlah Koperasi di Kota Batu
Sumber : LKPJ AMJ Kota Batu 2017

Jumlah koperasi yang tidak aktif dari tahun 2012 hingga tahun 2016 tidak menurun secara signifikan. Maka dengan demikian daya saing UMKM skala mikro perlu menjadi perhatian. Berikut permasalahan UMKM Kota Batu yang lebih spesifik:

1. Masyarakat masih kurang bersemangat dalam berkoperasi sehingga masih sangat kecil pertumbuhan koperasi;
 2. Belum optimalnya kemitraan usaha antara pengusaha, baik mikro, kecil, menengah, besar maupun koperasi;
 3. Rendahnya daya saing koperasi dan UMKM;
 4. Rendahnya akses Koperasi dan UKM terhadap sumber-sumber pembiayaan atau permodalan;
 5. Kurangnya penguasaan teknologi informasi dan teknologi tepat guna untuk menunjang produktifitas UMKM;
 6. Legalitas dan standarisasi produknya belum mampu menembus pasar modern dan retail nasional
 7. Kurangnya kemampuan untuk bekerjasama dalam merebut peluang pasar;
 8. Belum optimalnya promosi, pemasaran dan saluran distribusi;
 9. Kurangnya kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM.
- 8) **Kepemudaan dan Olahraga**
- Pemuda di Kota Batu memiliki potensi maupun peluang yang cukup besar karena jumlahnya yang banyak dengan pola pikir dan semangat yang tinggi. Kendati demikian, kelemahan yang terdapat adalah kondisi perkembangan

psikologis pemuda yang belum stabil sehingga memiliki tingkat sandaran nilai dan norma yang rendah. Tantangan yang muncul di kalangan pemuda adalah masa depan yang penuh kompetisi baik keterampilan, idealisme maupun nilai budaya. Sementara peluang yang dimiliki pemuda Kota batu adalah ruang gerak atau ekspresi idealisme yang terbuka. Selain itu, kecenderungan yang saling bertentangan yang menjadikan hal ini suatu tantangan adalah persaingan dan kerjasama. Tanpa SDM yang unggul dan kompetitif, sulit bagi suatu daerah dalam memenangkan persaingan global. Sehingga perlu adanya peran pemerintah dalam memfasilitasi kebutuhan pemuda untuk meningkatkan kecakapannya agar dapat berdaya saing. Permasalahan yang terdapat di Kota Batu terkait urusan kepemudaan ini adalah:

- a. Pembinaan OKP belum optimal dan
- b. Kurangnya sarana serta prasarana Olahraga untuk pelatihan atlet.

c) Layanan Urusan Pilihan

1) Pertanian

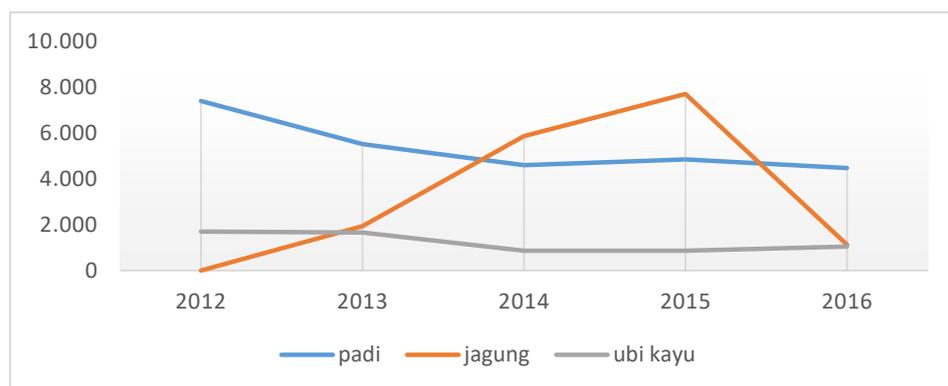
Sektor pertanian berkontribusi terhadap PDRB sangat signifikan, dimana menempati posisi ke-dua setelah sektor

perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa. Selaras dengan kebijakan Pemerintah Kota Batu yang menjadikan Kota Batu sebagai sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional sehingga sektor pertanian diarahkan ke pertanian organik. Produksi pertanian sebagai berikut:

Tabel 4.8 Produksi Tanaman Pangan Utama

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Padi					
Luas Panen(ha)	1157	863	741	718	675
Produksi (ton)	7.405	5.523	4.607	4.862	4.481
Jagung					
Luas Panen(ha)	1.030	497	488	358	224
Produksi (ton)	4.12	1.938	5.878	7.714	1.140
Ubi Kayu					
Luas Panen(ha)	100	52	27	51	62
Produksi (ton)	1.700	1.667	864	869	1.056

Sumber: LKPJ 2017



Gambar 4.9. Produksi Tanaman Pangan Utama Kota Batu
Sumber : LKPJ AMJ Kota Batu 2017

Salah satu potensi Kota Batu sebagai Kota Agropolitan adalah beragamnya tanaman hortikultura baik itu buah-

buahan (apel-jeruk), sayuran maupun tanaman hias. Berikut hasil produksi tanaman hortikultura di Kota Batu

Tabel 4.9 Produksi Tanaman Hortikultura Kota Batu

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Tanaman Sayuran (KW)					
Kentang	73.320	76.252	78.009	86.371	87.910
Wortel	100.381	82.732	86.591	65.519	66.465
Kubis/K ol	36.293	40.664	59.119	102.748	73.692
Daun bawang	49.958	36.002	47.095	39.231	40.059
Tanaman Buah-buahan (KW)					
Apel	590.004	838.915	708.438	671.207	748.076
Jeruk	324.418	154.897	132.205	132.231	88.515

Sumber: LKPJ 2017

Berdasarkan ke dua tabel tersebut dapat dilihat bahwa dalam beberapa tahun Kota Batu mengalami penurunan baik itu pada luas lahan pertanian maupun penurunan terhadap hasil produksi pertanian kecuali untuk tanaman pangan jagung. Oleh karena itu,

Permasalahan yang dihadapi Kota Batu adalah sebagai berikut:

- a. Hambatan utama adalah bahwa pengembangan kawasan organik belum dapat dilaksanakan di sleuruh luasan lahan pertanian di masing-masing desa di kawasan organik di wilayah Kota Batu;

- b. *Light Trap* yang dibagikan kepada kelompok tani sebagian besar belum terpasang;
- c. Pengadaan barang dan jasa sering terlambat tidak sesuai dengan musim tanam petani;
- d. Varietas legal yang dikeluarkan oleh BALITHI (Balai Penelitian Tanaman Hias) tidak seluruhnya sesuai keinginan petani dan diterima pasar;
- e. Para petani belum terbiasa dengan sistem bertani secara organik;
- f. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas penyuluh pertanian organik;
- g. Belum optimalnya penyuluhan yang diberikan kepada pihak terkait tentang pertanian organik yang berwawasan kesehatan dan dapat diikuti karena tidak tersedia anggaran yang cukup;
- h. Belum optimalnya produksi dan produktivitas lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan;
- i. Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian produktif;
- j. Masih rendahnya daya saing produk pertanian;
- k. Belum optimalnya peran kelembagaan petani dan penyuluh petani;
- l. Rendahnya kemampuan petani dalam mengakses teknologi, informasi, pasar dan permodalan;

- m. Rendahnya kandungan bahan organik tanah;
- n. Terbatasnya ketersediaan pakan dan teknologi;
- o. Jatuhnya harga gabah pada saat panen;
- p. Peningkatan kebutuhan dan konsumsi pangan yang beragam, seimbang dan aman.

2) Pariwisata

Sebagai Kota wisata, pariwisata di Kota Batu menjadi penyumbang terbesar ke-tiga setelah sektor perdagangan dan pertanian terhadap PDRB. Oleh karena itu tujuannya pembangunan di bidang kepariwisataan adalah untuk menciptakan citra dan *image* Kota Batu menjadi kota wisata yang menarik kunjungan baik domestik maupun internasional sehingga berdampak pada meningkatnya pertumbuhan perekonomian Kota Batu. Selama beberapa tahun kontribusi pariwisata terhadap PDRB atau perekonomian daerah dapat dilihat salah satunya melalui jumlah kunjungan dan juga yang berdampak kepada jumlah wisatawan yang menginap di Hotel.

Tabel 4.10 Jumlah Tamu Hotel dan Kunjungan Wisata**Kota Batu**

	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Tamu Hotel	1.143.023	1.165.104	1.197.923	1.274.163	1.415.324
Angka Kunjungan Wisata	2.547.855	3.292.298	3.834.021	3.961.021	3.954.687

Sumber: LKPJ AMJ Kota Batu 2017

Jumlah tamu hotel di Kota Batu stagnan dan tidak mengalami peningkatan yang signifikan, begitu juga dengan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Batu mulai dari tahun 2013 hingga 2016 hanya dalam angka 3 juta jiwa dan belum melampaui 4 juta. Bahkan pada tahun 2016 jumlah wisatawan di Kota Batu mengalami penurunan sebanyak 6.334 orang. Permasalahan yang dihadapi Kota Batu dalam pengembangan wisatawan adalah:

- a. Belum optimalnya citra industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata;
- b. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pariwisata yang kompeten dan profesional;
- c. Perlunya dukungan kerjasama bidang pariwisata yang sinergis antar daerah dalam provinsi dan luas provinsi untuk peningkatan perekonomian daerah;

- d. *City Branding* Kota Batu sebagai Kota Kepariwisataaan belum gencar dipromosikan secara internasional;
- e. *Event-event* pariwisata berskala internasional membutuhkan dana yang cukup banyak sedangkan APBD Kota Batu sangat terbatas;
- f. Selalu terjadinya kemacetan lalu lintas ketika hari libur dan musim liburan yang disebabkan karena jumlah jalan utama kurang dan jalan alternatif yang kelas jalannya belum memenuhi kelayakan;
- g. Kurangnya penyelenggaraan pembinaan terhadap masyarakat untuk siap menjadi manusia pariwisata;
- h. Kurangnya kemampuan SDM aparatur dalam mempersuasi masyarakat terkait sikap masyarakat terhadap perkembangan pariwisata;
- i. Kemampuan kelompok sadar wisata masyarakat belum optimal dan memerlukan dukungan untuk pengembangannya menuju taraf internasional;
- j. Fasilitas infrastruktur masih terbatas dan belum sepenuhnya memenuhi standar internasional.

4.2. Isu-Isu Strategis

4.2.1. Dinamika Internasional

a. Sustainable Development Goals (SDG's)

Isu internasional yang menjadi telah sukses menjadi perhatian seluruh dunia dideklarasikan sebagai Millenium Development Goal's (MDG's) pada pertemuan KTT Millenium di New York tahun 2000. Sebanyak 189 negara di dunia berkumpul untuk mendiskusikan keberlanjutan kehidupan di masa mendatang. Latar belakang yang mereka temukan saat itu masih banyaknya keadaan yang mengerikan, masyarakat kelaparan sekitar 800 juta orang di dunia, daerah kekeringan, negara yang berperang, banyak malapetaka hingga tingginya angka kemiskinan dimana hampir separuh penduduk dunia hidup dengan pendapatan kurang dari 2 dolar, derajat kesehatan yang masih rendah yaitu hampir 11 juta anak meninggal sebelum mencapai usia balita dalam setahun.

Berdasarkan hal tersebut, MDG's dengan 8 tujuan menggambarkan untuk kehidupan yang lebih baik selama 15 tahun kedepan salah satunya lebih utama dalam menurunkan kemiskinan dan kelaparan. Akan

tetapi hingga tahun 2015, tujuan ini dirasa belum mencapai target yang diinginkan. Masalah kelaparan menurun setengah dan masalah kemiskinan ekstrim turun hampir setengah. Telah banyak anak-anak yang bersekolah and hanya beberapa yang mati.

Maka deklarasi ini dilanjutkan dengan Sustainable Development Goals (SDG's). SDG's ini bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan pada tahun 2030 dan masih banyak lagi tujuannya, yaitu:

1. Tidak ada kemiskinan
2. Tidak ada kelaparan
3. Kesehatan dan kesejahteraan
4. Pendidikan yang berkualitas
5. Kesetaraan gender
6. Akses air bersih dan sanitasi layak
7. Energy yang terjangkau dna bersih
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
9. Industri, inovasi dan infrastruktur
10. Pengurangan kesenjangan
11. Kota dan komunitas yang berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab
13. Aksi terhadap iklim
14. Kehidupan bawah laut

15. Kehidupan di darat
 16. Institusi peradilan yang kuat dan kedamaian
 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan
- b. Masyarakat Ekonomi ASEAN (*Asean Economic Community*)

Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Bali pada Oktober 2003 yang dihadiri oleh para pemimpin negara-negara ASEAN menghasilkan keputusan bahwa pentingnya mengintegrasikan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Tujuan utama dibentuknya MEA adalah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi bagi seluruh warga masyarakat ASEAN. Fokus-fokus diadakannya MEA ini yaitu:

- Menciptakan pasar tunggal yang mencakup negara-negara ASEAN sekaligus pusat produksi yang berkaitan dengan elemen produk aktivitas ekonomi bebas seperti tenaga kerja yang terampil, bebas bea untuk aliran barang dan jasa dari kawasan regional ASEAN, serta keluar masuknya investasi dan aliran modal untuk negara-negara tersebut.
- Menjadikan ASEAN sebagai kawasan berdaya saing ekonomi tinggi yang ditandai dengan penguatan peraturan dalam kompetisi ekonomi seperti

perlindungan konsumen, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), perpajakan, kelancaran aktivitas *e-Commerce*, dan pengembangan infrastruktur.

- Meratakan pemberdayaan ekonomi kawasan ASEAN dengan sasaran utama revitalisasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), terutama bagi negara Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam (CMLV). Sebagaimana diketahui bersama negara CMLV telah lama dan berulang kali didera dengan beragam masalah politik, sosial, dan kebudayaan yang berpengaruh terhadap keamanan negara tersebut. Dengan demikian, sebagaimana terangkum dalam *ASEAN Vision 2020* serta *Pakta ASEAN Concord II*, MEA dibuat dengan maksud untuk pemeratakan ekonomi hingga ke seluruh penjuru kawasan.
- Mengintegrasikan ekonomi kawasan dengan ekonomi global dengan tujuan dasar untuk meningkatkan peran serta ASEAN dalam percaturan kebijakan global. Semua dilakukan dengan proses pendekatan yang koheren antara ekonomi regional dan global. Hal ini tentu adalah salah satu sisi positif sebab nantinya masukan negara-negara ASEAN dianggap penting.

Bagi Indonesia, hal ini merupakan suatu tantangan yang tidak hanya bersifat internal dalam negeri, tetapi merupakan persaingan dengan sesama negara ASEAN bahkan luar ASEAN seperti China dan India. Maka diperlukan kesiapan yang matang dalam menghadapi persaingan tersebut. Sehingga dalam menghadapinya, beberapa langkah yang disusun pemerintah adalah:

- 1) Penguatan daya saing ekonomi
- 2) Program Aku Cinta Indonesia sebagai salah satu gerakan “*Nation Branding*”
- 3) Penguatan sektor UMKM
- 4) Perbaikan infrastruktur
- 5) Peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan
- 6) Reformasi kelembagaan dan pemerintahan.

4.2.2. Dinamika Nasional

Pada bagian ini akan dibahas mengenai isu-isu yang ada di tingkat nasional, antara lain:

a. RPJM Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 memiliki visi pembangunan nasional yaitu **“TERWUJUDNYA**

INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”. Visi pembangunan nasional ini diwujudkan melalui misi pembangunan yang telah ditetapkan, yakni:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdasarkan visi nasional, melalui misi-misi yang ditetapkan maka melahirkan tiga (3) dimensi pembangunan nasional, yakni:

1. Dimensi pembangunan manusia yang terdiri atas:
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan

- c. Perumahan, dan
 - d. Mental/Karakter
2. Dimensi pembangunan sektor unggulan yang terdiri atas:
- a. Kedaulatan pangan
 - b. Kedaulatan energi & ketenagalistrikan
 - c. Kemaritiman dan kelautan, dan
 - d. Pariwisata dan industri.
3. Dimensi pemerataan & kewilayahan terdiri atas:
- a. Antarkelompok pendapatan
 - b. Antarwilayah desa, pinggiran, luar jawa. Dan kawasan timur.

Berlandaskan visi misi sehingga menciptakan dimensi-dimensi pembangunan, maka dalam pelaksanaan pembangunan nasional melalui RPJMN tahun 2015-2019 memiliki agenda prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

b. Isu-Isu Nasional

1) Ancaman Terhadap Wibawa Negara

a) Stabilitas Politik dan Keamanan

Menjaga stabilitas sosial dan politik merupakan kegiatan memelihara kebhinekaan Indonesia agar tetap menjadi faktor yang menginspirasi, memperkaya dan menguatkan Indonesia dalam emncapai visi pembangunan nasional. Konsolidasi demokrasi diharapkan dapat menguatkan lembaga-lembaga demokrasi yang mampu memelihara keanekaragaman menjadi berkah yang besar untuk Indonesia, bukan

menjadi hambatan yang menjauhkan Indonesia dari cita-citanya.

Kemudian, kesadaran kolektif masyarakat akan bahaya terorisme bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting untuk ditingkatkan. Begitu juga dengan kesiapsiagaan lembaga-lembaga pemerintah maupun masyarakat dalam menghadapi terorisme. Ancaman terorisme yang bersifat laten, tidak berpola dan berpotensi mengganggu keamanan negara serta stabilitas sosial dan politik yang dapat menghambat proses pembangunan nasional.

b) Reformasi Birokrasi

Kualitas tata kelola pemerintahan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing nasional. Isu nasional ini terkait dengan meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Salah satunya masalah yang sangat tampak dan dapat menimbulkan banyak kerugian yaitu korupsi.

Pemberantasan korupsi masih merupakan tantangan serius bagi pembangunan di Indonesia. Korupsi sangat menghambat efektivitas mobilisasi dan alokasi sumber daya pembangunan bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. Tantangan pertama yaitu bagaimana mengefektifkan penegakan hukum. Maka dengan itu perlu perbaikan kualitas dan integritas aparat penegak hukum dan menyempurnakan regulasi serta peraturan perundang-undangan. Hal ini juga dapat disebut sebagai reformasi birokrasi.

2) Kelemahan Sendi Perekonomian

a) Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan perkapita Indonesia telah mencapai USD 3.500 pada tahun 2013. Hal ini telah sukses menempatkan Indonesia pada lapis bawah negara-negara berpenghasilan menengah. Maka saat ini dan untuk masa yang akan datang, Indonesia diharapkan mampu terus berkembang meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai batas-batas negara berpenghasilan tinggi. Oleh karena itu, Indonesia dituntut tumbuh rata-rata 6 sampai 8 persen pertahun.

Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, beberapa masalah yang dapat menghambat adalah kurangnya ketersediaan infrastruktur yang mendukung; kemajuan sektor industri pengolahan masih berjalan lambat, padahal hal ini merupakan salah satu motor penggerak untuk perekonomian yang lebih maju; adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih sehingga terjadi kontradiksi dan menjadi penghambat kemajuan; kurangnya sumber daya manusia dalam hal penerapan dan penguasaan teknologi, menyebabkan beberapa produksi menjadi mahal karena memerlukan bantuan negara lain untuk mengolahnya; dan masalah terakhir adalah keterbatasan pembiayaan dalam pembangunan.

b) Percepatan Pemerataan dan Keadilan

Hasil-hasil dari pembangunan selama ini telah banyak menggambarkan ketimpangan yang besar sehingga tampak bahwa kemiskinan masih tinggi dan rentan. Kenyataan bahwa selama beberapa tahun ini, kemiskinan menurun secara lambat dan angka penyerapan tenaga kerja yang belum dapat mengakomodir seluruh rakyat. Oleh karena itu, tiga

kelompok rumah tangga yang diperkirakan berada pada 40 persen penduduk berpendapatan dibawah adalah angkatan kerja yang bekerja tidak penuh, termasuk didalamnya yang bekerja sebagai nelayan, petani berlahan sempit, sektor informal perkotaan dan buruh perkotaan; usaha mikro termasuk yang bekerja sebagai pekerja keluarga; dan penduduk miskin yang tidak memiliki aset maupun pekerja.

Sehingga hal ini merupakan salah satu yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi. Maka dalam rangka menghlangkan kesenjangan pembangunan perlu beberapa hal yang diperhatikan: 1) menciptakan pertumbuhan inklusif, yaotu memaksimalkan potensi ekonomi dan menyertakan sebanyak-banyaknya angkataran kerja khususnya orang miskin; 2) memperbesar investasi pada kerja untuk memperluas kesempatan bekerja bagi seluruh masyarakat; 3) memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro; 4) menjamin perlindungan sosial bagi pekerja informal; 5) meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat yang kurang mampu; 6) memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor

pertanian; 7) menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi.

3) Intoleransi dan Krisis Kepribadian Bangsa

a) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pembangunan nasional. Sebab manusia adalah roda penggerak perekonomian. Oleh karena itu, perlu adanya kualitas terhadap wawasan dan keterampilan agar dapat berdaya saing. Tantangan dalam membangun kualitas SDM adalah :

1. Pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif;
2. Pembangunan pendidikan dengan mempercepat peningkatan taraf pendidikan agar memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan pendidikan tanpa adanya kesenjangan;
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif dan juga pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya bahasa, adat, tradisi dan nilai kearifan lokal;

4. Meningkatkan kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan;
5. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya.

4.2.3. Dinamika Regional (Provinsi)

a. RPJMD Provinsi Jawa Timur

Visi RPJMD Provinsi Jawa Timur periode 2014-2019 adalah **“JAWA TIMUR LEBIH SEJAHTERA, BERKEADILAN, MANDIRI, BERDAYA SAING, DAN BERAKHLAK”**. Dalam mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan beberapa misi yakni:

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi.
3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang.
4. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
5. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmonisasi sosial.

Adapun berdasarkan penelaah RPJMD Provinsi Jawa Timur, yang menjadi urgensi pembangunan dalam kawasan Kota Batu yang adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
2. Peningkatan kualitas peran kepemudaan dan prestasi olahraga.
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
4. Peningkatan aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan UMKM dan Koperasi.
5. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan).
6. Peningkatan nilai tambah hasil dan daya saing produk pertanian dengan tetap melakukan perlindungan produk lokal.
7. Peningkatan kontribusi sektor industri.
8. Peningkatan kontribusi pariwisata dengan menambah kunjungan wisata baik internasional maupun nasional.
9. Pengembangan kualitas dan pelestarian warisan seni budaya lokal.

10. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dari segi regulasi, keamanan stabilitas sosial, penyediaan infrastruktur serta kesiapan sumber daya manusia.
11. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi.
12. Pengembangan informasi dan teknologi tepat guna.
13. Peningkatan efektivitas kelembagaan pemerintah dengan peningkatan kapasitas SDM dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai serta memberi ruang bagi masyarakat untuk pengawasan pelaksanaan pemerintahan.
14. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta terhadap kuantitas dan kualitas informasi publik secara efektif dan efisien.
15. Peningkatan fasilitas layanan keagamaan dan komunikasi antar umat beragama.
16. Menciptakan situasi dan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tentram, nyaman dan tertib.
17. Peningkatan aktivitas yang mendorong rasa kebanggaan kebangsaan (nasionalisme), dan sikap saling menghormati antar sesama.

18. Pengembangan dan pemanfaatan kearifan lokal untuk pemberdayaan masyarakat agar meningkatkan kualitas budaya dan tradisi lokal.

b. Isu/Kondisi Jawa Timur

1. Daya Saing Koperasi dan UMKM

Keberadaan UMKM di Jawa Timur memiliki nilai penting dan peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi Jawa Timur, karena selain sebagai katup pengaman sekaligus juga sebagai penggerak perekonomian daerah dalam rangka mendukung upaya penciptaan lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin. Hal ini direpresentasikan dengan kontribusi nilai tambah UKM Jawa Timur ADHB terhadap total PDRB menunjukkan perkembangan yang cukup baik, yaitu pada tahun 2009-2012 meningkat dari 53,49% (2009) menjadi 54,39% (2012). Disisi lain perkembangan Koperasi di Jawa Timur tahun 2012 juga menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2009, total koperasi menjadi 29.159 unit atau meningkat 50,54% jika dibandingkan dengan 2009 sebesar 19.369 unit.

Isu strategis yang mengemuka pada urusan Koperasi dan UMKM dalam 5 tahun kedepan adalah peningkatan skala usaha UMKM yang meliputi (a) Peningkatan produktivitas UMKM terkait dengan kualitas SDM, akses ke pembiayaan dan layanan keuangan lainnya); (b) Peningkatan inovasi dan standarisasi; (c) penguatan kelembagaan usaha UMKM (kemitraan) dan (d) perluasan pemasaran. Sedangkan terkait dengan pemberdayaan koperasi, peningkatan tata kelola usaha koperasi menjadi isu yang strategis yaitu peningkatan kontribusi anggota dalam memajukan usaha koperasi dan penataan tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi.

2. Pengangguran

Pengangguran di Jawa Timur menyimpan masalah ketenagakerjaan yang cukup serius seperti upah kerja yang rendah, jaminan/perlindungan sosial tenaga kerja, dan skil atau keahlian tenaga kerja yang masih rendah. Sekitar 42,5 persen dari seluruh tenaga kerja Jawa Timur terserap di sektor pertanian, namun sektor ini memiliki produktivitas paling rendah dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. Untuk mengurangi kemiskinan di Jawa Timur, pemerintah provinsi butuh strategi untuk menarik pekerja ke sektor

yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Strategi juga dibutuhkan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian, serta mempromosikan usaha non-tani seperti industri pedesaan skala kecil.

3. Lingkungan Hidup

Seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, proyeksi emisi GRK Jawa Timur pada Tahun 2020 adalah sebesar 121 juta ton CO₂ eq. Berdasarkan upaya adaptasi dan mitigasi sebagaimana dimuat dalam RAD GRK Jawa Timur, maka diperkirakan akan dapat menurunkan emisi GRK Jawa Timur sebesar 28,9% atau menjadi sebesar 108 juta ton CO₂ eq.

Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, di dalam dan luar kawasan hutan serta kawasan pesisir dan laut, disebabkan aktivitas manusia dan dampak perubahan iklim. Dampak yang dirasakan adalah hilang atau tidak berfungsinya sumber mata air, kekeringan di musim kemarau dan longsor/banjir di musim hujan. Sumber mata air DAS Brantas seluruhnya semula berjumlah 1.577 sumber mata air. Berdasarkan hasil identifikasi di Malang Raya dan Kota Batu, dari 703 sumber mata air, yang berfungsi 344 sumber mata air. Adapun yang

memiliki debit 5 liter/detik hanya 13 sumber mata air saja (diolah dari berbagai sumber, Tahun 2012). Selanjutnya kualitas air sungai dimaksud, telah mengalami pencemaran dari limbah domestic dan limbah industry.

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air Sungai Brantas, telah tercapai penurunan beban pencemaran sesuai target RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014. Namun kualitas air dimaksud belum memenuhi Baku Mutu Lingkungan (BML) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

4. Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jawa Timur secara umum sudah merupakan daerah yang mampu mewujudkan sebagai provinsi yang berdaulat pangan dengan luas sawah sebesar 1.017549,73 hektar. Akan tetapi, masih belum mampu menentukan sepenuhnya kebijakan dan strategi produksi, distribusi dan konsumsi pangan yang sehat, dan sesuai sumber daya dan budaya dengan metode yang ramah lingkungan, berkeadilan dan berkelanjutan dengan memberikan perhatian khusus kepada mayoritas petani dan nelayan kecil penghasil

pangan, pedangan kecil dan rakyat miskin rawan pangan.

Beberapa spesifik permasalahannya adalah:

- a) Masih tingginya penduduk miskin yang tinggal di pedesaan pada tahun 2013;
- b) Fenomena perubahan iklim global berdampak pada capaian produksi dan produktivitas pertanian;
- c) Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian serta terjadinya degradasi sumber daya alam;
- d) Belum optimalnya peran kelembagaan petani;
- e) Lemahnya akses petani terhadap permodalan, dan terbatasnya ketersediaan sarana prasarana produksi pertanian;
- f) Fluktuasi harga produk pertanian akibat ketersediaan bahan pangan tidak kontinyu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai distribusi produk pertanian.

5. Indeks Pembangunan Manusia

Kondisi IPM di Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perbaikan yang cukup baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa persoalan yang sekiranya perlu diperhatikan agar IPM mengalami peningkatan yang lebih baik. Sebagai contoh, pada

komponen angka harapan hidup, ini masih perlu ditingkatkan mengingat kondisi kesehatan di masyarakat masih cukup rendah. Dari data BPS dapat dilihat bahwa masih sekitar setengah dari jumlah penduduk yang menggunakan tempat pembuangan tinja dengan septik tank. Artinya, banyak penduduk yang belum benar-benar memperhatikan kesehatan. Masalah ini jika tidakdiperhatikan secara serius maka akan berdampak pada penurunan angka harapan hidup yang akhirnya berdampak pada nilai IPM.

6. Penanggulangan Bencana

Provinsi Jawa Timur, seperti halnya daerah lain di Indonesia, merupakan wilayah yang rawan bencana; baik yang berupa bencana alam maupun bencana sosial. Beberapa permasalahan menyangkut hal tersebut adalah:

- a) Penanganan di masalah bencana yang rutin terjadi di wilayah-wilayah tertentu, banjir bandang, gunung api, tsunami dan gempa bumi, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, kebakaran;
- b) Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan cara-cara menghadapinya;

- c) Keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensii kebencanaan dalam upaya penanggulangan bencana;
- d) Keterbatasan sarana prasarana sebagai pendukung kegiatan dan pelaksanaan program penanggulangan bencana;
- e) Pola pembangunan yang masih mengabaikan resiko bencana dan belum menjadikan masalah bencana ke dalam prioritas pembangunan.

Tabel 4.11

Telaah RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur

Uraian	Dinamika Nasional (RPJMN 2015-2019)	Dinamika Regional (RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019)
Visi	Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak
Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 2. Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum; 3. Politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; 4. Kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; 5. Bangsa berdaya saing; 6. Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; 7. Masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan; 2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi; 3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang; 4. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik; 5. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmonisasi sosial.
Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran Makro: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan manusia dan masyarakat b. Ekonomi Makro 2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat: <ol style="list-style-type: none"> a. Kependudukan dan keluarga berencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja, dan penyerapan tenaga kerja. 2. Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis. 3. Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas. 4. Meningkatnya kuantitas, dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD). 5. Meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan. 6. Meningkatnya kualitas peran pemuda, dan prestasi olahraga.

	<ul style="list-style-type: none"> b. Pendidikan c. Kesehatan d. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan e. Perlindungan anak f. Pembangunan masyarakat <p>3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kedaulatan pangan b. Kedaulatan energi c. Maritim dan kelautan d. Pariwisata dan industri manufaktur e. Ketahanan air, infrastruktur dasar, dan konektivitas <p>4. Sasaran Dimensi Pemerataan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi b. Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu <p>5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemerataan oembangunan antar wilayah <p>6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Politik dan Demokrasi b. Penegakan Hukum c. Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi d. Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah e. Pertahanan dan Keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> 7. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan, termasuk tenaga medis dan non-medis secara merata. 8. Menurunnya angka kematian bayi, dan angka kematian ibu melahirkan. 9. Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimum. 10. Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan. 11. Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana (KB), dan pelayanan kesehatan reproduksi. 12. Menurunnya persentase penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan. 13. Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). 14. Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan. 15. Meningkatnya volume usaha UMKM dan kualitas kelembagaan Koperasi. 16. Meningkatnya jumlah wirausaha baru (WUB). 17. Meningkatnya volume usaha ekonomi kaum perempuan. 18. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan). 19. Meningkatnya nilai tambah hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan). 20. Meningkatnya akses petani dan nelayan terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran dan permodalan sehingga memiliki daya saing tinggi. 21. Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat (food availability). 22. Meningkatnya penyerapan pangan (food utilization). 23. Meningkatnya akses pangan (food acces). 24. Meningkatnya volume ekspor dalam dan luar negeri. 25. Meningkatnya kontribusi sektor industri. 26. Meningkatnya kunjungan wisata. 27. Meningkatnya kualitas seni dan budaya lokal. 28. Meningkatnya jumlah izin prinsip dan realisasi PMA, PMDN, dan investasi daerah. 29. Meningkatnya kinerja pelayanan, dan pembangunan prasarana transportasi jalan, serta terwujudnya keselamatan, efisiensi dan
--	---	---

		<p>efektivitas pelayanan angkutan darat, laut dan udara.</p> <ol style="list-style-type: none"> 30. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum, dan sanitasi. 31. Meningkatnya pengelolaan sumber daya air melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air, dan penyediaan data serta informasi sumber daya air. 32. Meningkatnya infrastruktur dan ketersediaan energi. 33. Meningkatnya luas hutan dan/ atau lahan kritis yang direhabilitasi. 34. Meningkatnya sumber daya air terkonservasi. 35. Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup terutama sumberdaya air, DAS, dan wilayah pesisir serta laut. 36. Menurunnya emisi GRK. 37. Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang. 38. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. 39. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah. 40. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan. 41. Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya. 42. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. 43. Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal, serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas. 44. Mewujudkan sistem penanggulangan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. 45. Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan. 46. Meningkatnya komunikasi antar-umat beragama. 47. Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tentram, nyaman, dan tertib.
--	--	---

		<p>48. Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmonisasi sosial.</p> <p>49. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan HAM.</p> <p>50. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat menjunjung supermasi hukum, dan penghormatan terhadap HAM.</p>
<p>Strategi</p>	<p>6. Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 yaitu:</p> <p>a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.</p> <p>b. Upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan.</p> <p>c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.</p> <p>7. Tiga Dimensi Pembangunan:</p> <p>a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat</p> <p>b. Dimensi pembangunan sektor unggulan dan prioritas</p> <p>c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan</p> <p>8. Kondisi sosial, politik, hukum dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas. Kondisi perlu tersebut antara lain:</p> <p>a. Kepastian dan penegakan hukum;</p> <p>b. Keamanan dan ketertiban;</p> <p>c. Politik dan demokrasi; dan</p> <p>d. Tatakelola dan reformasi birokrasi.</p> <p>9. Quickwins (hasil pembangunan yang dapat</p>	<p>1. Memperluas kesempatan dan penyediaan lapangan kerja di pedesaan dan perkotaan.</p> <p>2. Meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kompetensi, serta keterampilan tenaga kerja.</p> <p>3. Meningkatkan penempatan penduduk potensial di daerah transmigrasi.</p> <p>4. Meningkatkan pengembangan kapasitas para santri pondok pesantren dalam bidang usaha produktif.</p> <p>5. Meningkatkan perlindungan, pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang akan dan sedang bekerja di luar negeri.</p> <p>6. Meningkatkan iklim investasi dan ketenagakerjaan yang kondusif.</p> <p>7. Meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan terjangkau.</p> <p>8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sekolah Menengah Kejuruan.</p> <p>9. Meningkatkan aksesibilitas, dan kualitas PAUD.</p> <p>10. Meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan.</p> <p>11. Meningkatkan minat baca masyarakat.</p> <p>12. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas.</p> <p>13. Meningkatkan perlindungan bagi masa depan generasi muda.</p> <p>14. Meningkatkan prestasi olahraga di berbagai event.</p> <p>15. Meningkatkan akses pelayanan bagi masyarakat desa, dan wilayah kepulauan.</p> <p>16. Meningkatkan sarana dan prasarana RSUD, puskesmas dan jaringannya sesuai dengan standar kesehatan.</p> <p>17. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan tenaga medis dan non-medis, serta perbekalan obat-obatan.</p> <p>18. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak, dan balita.</p> <p>19. Meningkatkan standar kualitas pelayanan RSUD, puskesmas dan</p>

	<p>segera dilihat hasilnya).</p>	<p>jaringannya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 20. Meningkatkan kesehatan masyarakat berbasis keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif. 21. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan kesehatan melalui mekanisme Jamkesta (Jaminan Kesehatan Semesta) yang komprehensif dan terpadu. 22. Meningkatkan layanan kesehatan bagi penduduk miskin. 23. Meningkatkan layanan KB, dan kesehatan reproduksi secara komprehensif dan berkelanjutan. 24. Meningkatkan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan lintas dan antar sektor dengan lokasi dan sasaran tertentu (lokus-fokus) 25. Meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil untuk menurunkan tingkat kemiskinan. 26. Meningkatkan kualitas manajemen kelompok usaha bersama (Kube). 27. Mengoptimalkan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM). 28. Meningkatkan akses dan fasilitas infrastruktur bagi penduduk miskin. 29. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi PMKS. 30. Meningkatkan kualitas keadilan dan kesetaraan gender di segala sektor pembangunan. 31. Memperluas akses permodalan bagi UMKM melalui lembaga keuangan bank maupun non-perbankan. 32. Meningkatkan peran UMKM dan koperasi dalam aktivitas ekonomi. 33. Meningkatkan inkubasi kewirausahaan bagi calon wirausaha baru. 34. Meningkatkan kualitas ekonomi produktif berbasis gender dalam pemenuhan hak-hak dasar untuk menanggulangi feminisasi kemiskinan. 35. Meningkatkan kualitas intensifikasi pertanian (tanaman bahan makanan, perkebunan, perikanan, dan peternakan). 36. Meningkatkan pengendalian alih fungsi lahan pertanian. 37. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir. 38. Meningkatkan pengembangan aneka usaha di kawasan hutan, dan usaha hutan rakyat. 39. Meningkatkan usaha penanganan pasca-panen, dan pengolahan hasil
--	----------------------------------	---

		<p>pertanian (tanaman bahan makanan, perkebunan, perikanan, dan peternakan).</p> <ol style="list-style-type: none"> 40. Meningkatkan kualitas proses dan produk pertanian tanaman bahan makanan, perkebunan, perikanan, dan peternakan yang terstandarisasi. 41. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan petani dan nelayan secara berkelanjutan dan terpadu. 42. Meningkatkan stok pangan masyarakat. 43. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan. 44. Meningkatkan penanganan keamanan pangan. 45. Meningkatkan kelancaran distribusi pangan. 46. Menjaga stabilitas harga pangan. 47. Memperkuat dan memperluas pasar dalam dan luar negeri. 48. Meningkatkan kerjasama ekonomi lokal, regional dan internasional. 49. Meningkatkan daya saing Produk berbasis keunggulan lokal. 50. Meningkatkan pengembangan sektor industri. 51. Mengembangkan bahan baku substitusi impor. 52. Meningkatkan sektor pariwisata secara integratif, dan berdaya saing global. 53. Meningkatkan pengembangan kualitas, dan pelestarian warisan seni budaya lokal 54. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif. 55. Meningkatkan kapasitas SDM dan infrastruktur pendukung investasi. 56. Meningkatkan promosi investasi secara terpadu. 57. Meningkatkan konektivitas ekonomi melalui ketersediaan sarana dan prasarana konektivitas ekonomi yang memadai dan handal. 58. Meningkatkan kinerja pelayanan angkutan darat, laut, dan udara yang efisien dan efektif. 59. Meningkatkan kinerja penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi. 60. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 61. Meningkatkan konservasi sumber daya air secara berkelanjutan. 62. Mengendalikan daya rusak air, serta pendayagunaan sumber daya air
--	--	--

		<p>untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 63. Meningkatkan infrastruktur dan ketersediaan energy dan ketenagalistrikan. 64. Meningkatkan pengelolaan pertambangan / SD Mineral dan Migas. 65. Meningkatkan pengelolaan air tanah. 66. Meningkatkan penelitian dan pengembangan SD geologi lingkungan dan bencana geologi. 67. Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan informasi dan komunikasi. 68. Meningkatkan pengendalian, perluasan, dan rehabilitasi hutan. 69. Meningkatkan uaya konservasi sumber daya air, dan peningkatan fungsi jaringan irigasi. 70. Meningkatkan partisipasi aktif seluruh stakeholder dalam upaya menjaga sumber daya air, sungai, pesisir dan laut. 71. Melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. 72. Mengembangkan kawasan strategis dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan wilayah. 73. Meningkatkan peran rencana tata ruang sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang provinsi. 74. Perumusan peraturan/ kebijakan sebagai dasar pemanfaatan ruang di Jawa Timur. 75. Peningkatan ketataan Rencana Tata Ruang di Provinsi Jawa Timur. 76. Meningkatkan efektivitas kelembagaan pemerintahan melalui peningkatan kapasitas SDM, dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai, serta memberi ruang bagi masyarakat untuk pengawasan pelaksanaan pemerintahan. 77. Meningkatkan manajemen Aparatur Sipil Negara secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik secara profesional. 78. Meningkatkan penerapan prinsip tata kelola yang baik secara konsisten. 79. Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi publik secara efisien dan efektif. 80. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian secara terpadu antar dan lintas SKPD. 81. Meningkatkan kapasitas SDM legislatif sesuai dengan fungsinya.
--	--	---

		<p>82. Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.</p> <p>83. Meningkatkan pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi, dan handal.</p> <p>84. Meningkatkan kualitas dokumen statistik yang akurat dan valid.</p> <p>85. Menguatkan tata kelola kelembagaan pemerintahan, koordinasi lintas sektor dan wilayah dalam penanggulangan bencana (pra, tanggap, pasca bencana).</p> <p>86. Menguatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.</p> <p>87. Penyediaan alokasi pendanaan pada saat status darurat bencana (siaga, tanggap, transisi).</p> <p>88. Meningkatkan fasilitas layanan keagamaan melalui bantuan dan koordinasi antara pemangku kepentingan dan pemerintah.</p> <p>89. Meningkatkan kerukunan antar-umat beragama melalui berbagai forum dialog sosial maupun ekonomi.</p> <p>90. Memelihara kewaspadaan nasional untuk menangkal upaya pemecahbelahan bangsa (disintegrasi bangsa melalui gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban).</p> <p>91. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan komunitas.</p> <p>92. Meningkatkan aktivitas yang mendorong rasa kebangsaan (nasionalisme), dan sikap saling menghormati antar-sesama melalui pengembangan wawasan kebangsaan yang berkesinambungan.</p> <p>93. Meningkatkan kualitas, dan pelestarian warisan budaya, serta tradisi lokal.</p> <p>94. Meningkatkan sosialisasi mengenai hukum dan HAM.</p> <p>95. Meningkatkan kegiatan forum masyarakat dalam bidang hukum dan HAM.</p> <p>96. Meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat/LSM dalam bidang hukum dan HAM.</p>
--	--	---

4.2.4. Telaah RPJMD Daerah Lain dan Kerjasama Antar Daerah

**Tabel 4.12
Telaah Dokumen Perencanaan Daerah Sekitar**

No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait
1	Kota Malang	Proses Penyusunan	
2	Kabupaten Mojokerto	2016-2021	<p>Kebijakan umum RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan Kota Batu, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kesalehan sosial dan kerukunan antar umat beragama; 2. Pengembangan daya tarik wisata religi untuk mendukung perekonomian daerah; 3. Peningkatan pembangunan ekonomi; 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur; 5. Pengentasan kemiskinan; 6. Penanganan pengurangan angka pengangguran perbaikan iklim ketenagakerjaan dan memacu kewirausahaan; 7. Peningkatan hasil produksi pertanian; 8. Peningkatan produksi hasil peternakan; 9. Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam untuk penguatan basis agrobisnis; 10. Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata; 11. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan; 12. Peningkatan ketrampilan dan kecakapan hidup penduduk usia kerja; 13. Pengurangan angka

			<p>pengangguran, perbaikan iklim ketenagakerjaan dan memacu kewirausahaan;</p> <p>14. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;</p> <p>15. Peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan publik;</p> <p>16. Peningkatan dan pemeliharaan mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan serta prasarana dan sarana bidang medis;</p> <p>17. Pengembangan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja yang memadai, yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan, dan pekerja;</p> <p>18. Peningkatan kualitas kehidupan politik;</p> <p>19. Peningkatan kualitas penegakan hukum;</p> <p>20. Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang berbasis kinerja;</p> <p>21. Peningkatan pengelolaan kawasan cagar alam;</p> <p>22. Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.</p>
3	Kabupaten Pasuruan	Proses Penyusunan	
4	Kabupaten Malang	2016-2021	<p>Kebijakan umum RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan Kota Batu, adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Pengentasan Kemiskinan dengan melalui:</p> <p>a) Pembukaan lapangan pekerjaan berbasis industri masyarakat (UMKM);</p> <p>b) Pengentasan kemiskinan melalui koperasi;</p>

			<ul style="list-style-type: none"> c) Peningkatan perekonomian guna mengentaskan kemiskinan pembukaan sentra industri kreatif; d) Pengentasan kemiskinan melalui fasilitasi kegiatan kerja padat karya; e) Pengentasan kemiskinan melalui kegiatan pengembangan keterampilan kepada penduduk miskin. <p>2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan lingkungan hidup guna kesejahteraan masyarakat; b. Pengawasan kualitas lingkungan hidup; c. Perbaikan kualitas lingkungan hidup; d. Pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada lingkungan hidup; <p>3. Pengembangan industri wisata melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan <i>branding</i> destinasi wisata Kabupaten Malang; b. Memaksimalkan potensi wisata berbasis lingkungan hidup (Ekowisata); c. Pengembangan wisata berbasis budaya dan kearifan lokal; d. Meningkatkan sarana edukasi dalam industri wisata (Agropolitan, Minapolitan); e. Pengembangan wisata Agroindustri.
--	--	--	--

Sumber: RPJMD Kabupaten Mojokerto 2016-2021, RPJMD Kabupaten Pasuruan, 2016-2021, RPJMD Kabupaten Malang 2016-2021

Kota Batu berbatasan di sebelah Utara dengan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto dan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. Akan tetapi sampai saat ini belum adanya referensi mengenai kerjasama antara Kota Batu dengan Kabupaten Mojokerto.

Pada tahun 2016, Kota Batu melakukan kerjasama dengan Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan. Dimana pada saat itu akan dilakukannya pembangunan infrastruktur jalan tembus untuk akses menuju objek wisata di Kota Batu dan Kabupaten Malang. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kemacetan arus lalu lintas dari Surabaya menuju ke Kota Batu. Pembangunan infrastruktur jalan lingkar atau jalan tembus untuk akses ke pariwisata yang ada di Kabupaten Malang dan Kota Batu, akan melewati Kabupaten Pasuruan. Oleh karenanya dalam hal ini kerjasama juga dilakukan dengan Kabupaten Pasuruan.

Kemudian Kota Batu merupakan bagian dari kawasan konsep Sinergitas Malang Raya yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Dimana ketiga Kabupaten/Kota tersebut melakukan kerjasama untuk maju bersama dalam pembangunan yang lebih baik. Kerjasama ketiga daerah ini yang sudah lama terjalin adalah terkait bidang pengelolaan sumber air. Kota Malang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih yang sehat dan berkualitas dan mengalir secara terus menerus selama 24 jam. Sedangkan Kota Batu dan Kabupaten Malang memiliki potensi sumber air sehingga karena hal ini perlu adanya kerjasama antar ke tiga daerah ini.

Selanjutnya pada bulan Agustus 2018, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko memiliki komitmen kuat sehingga menandatangani perjanjian kerjasama bersama Pemerintah Kota Malang dan Kabupaten Malang untuk maju terus bersama membangun segala infrastruktur yang lebih baik. Pembangunan infrastruktur yang lebih baik tersebut mulai dari

infrastruktur pendidikan, kesehatan, fasilitas maupun sarana prasarana yang tujuannya untuk bersama-sama mensejahterakan masyarakat Malang Raya.

Kerjasama infrastruktur di bidang pendidikan karena sebagian anak-anak dari Kota Batu dan Kabupaten Malang bersekolah di Kota Malang. Begitu juga dengan pelayanan kesehatan. Bahwa rumah sakit yang ada di Kota Malang juga dimanfaatkan warga Kabupaten Malang dan Kota Batu.

Kemudian Kabupaten Malang memiliki sumber daya alam yang melimpah, Kota Batu memiliki potensi pariwisata, sedangkan Kota Malang memiliki potensi sumber daya manusia dan sekaligus terkenal sebagai kota pendidikan sehingga berpotensi mendatangkan masyarakat dari luar kota. Dengan potensi alam dan pariwisata yang dimiliki Kabupaten Malang dan Kota Batu akan berimbas kepada Kota Malang yang memiliki banyak penduduk pendatang. Arus lalu lintas di Kota Malang dan Kabupaten Malang menjadi tambah padat pada akhir pekan. Sehingga diperlukan kerjasama pembangunan infrastruktur jalan berupa membangun jalan tol tengah kota atau membangun jalan lingkar. Karena wilayah Kabupaten Malang masih luas untuk dibangun jalan lingkar.

Begitu juga dengan kerjasama pelayanan administrasi dikepolisian. Warga kecamatan Kasembong, Ngantang dan Pujon yang merupakan bagian dari Kabupaten Malang dapat mengurus izin SIM, STNK ke Polres Batu dan kedepannya juga diharapkan dapat mencetak E-KTP, kartu keluarga di Pemkot Batu. Karena ketiga daerah ini dulunya adalah satu keluarga yaitu wilayah Malang sehingga kerjasama diperlukan untuk

kesejahteraan bersama. Dengan demikian, maka dalam dokumen RPJMD Kota Batu periode 2017-2022 harus memperhatikan kebijakan-kebijakan pembangunan antar daerah tersebut.

4.2.5. Dinamika Lokal

a. Telaah Kebijakan RPJPD Kota Batu Berjalan

Recana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Batu merupakan bagian yang penting dalam pembuatan dari RPJM Kota Batu. Karena mengandung tahapan-tahapan RPJM. RPJM tahun 2016-2020 merupakan tahapan ketiga pelaksanaan pembangunan dari RPJD Kota Batu. Dalam RPJP terdapat beberapa skala prioritas tiap tahapan-tahapannya yang ditetapkan. Penetapan skala prioritas tiap tahapannya bermaksud untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terdapat pada Kota Batu tanpa mengabaikan permasalahan yang lainnya.

Visi RPJPD Kota Batu tahun 2005-2025 adalah **“Terwujudnya Kota Batu sebagai Sentra Pariwisata Berbasis Pertanian yang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani”**. Adapun misinya adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kearifan Lokal
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

4. Mewujudkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat
5. Mewujudkan Pengembangan Kota Batu sebagai Sentra Pariwisata Berbasis Pertanian Berwawasan Lingkungan

RPJPD 2005-2025 Kota Batu pada 2016-2020 merupakan RPJM tahap ke tiga (3) yang tetap berkesinambungan dengan pembangunan sebelumnya. RPJMD ke tiga Kota Batu ini mengarahkan kepada (a) penguatan dan pendayagunaan kapasitas prasarana dan sarana; (b) pengarahan terhadap sumber daya manusia dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan Kota Batu; (c) akselerasi usaha ekonomi unggulan; (d) serta meningkatkan daya saing keunggulan Kota Batu.

Sejalan dengan uraian tersebut maka dalam kurun waktu 5 tahun, berdasarkan masing-masing pencapaian dari misi yang ditetapkan, arah pembangunan untuk pendidikan dalam rangka mewujudkan pengamalan nilai keagamaan dan kearifan lokal, pendidikan dilaksanakan dengan mengimplementasikan dan aktualisasi pemahaman dan pengamatan agama dalam kehidupan serta memantapkan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai wadah kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antar umat beragama. Sedangkan pada arah kebudayaan dilakukan dengan mengembangkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokas masyarakat Batu yang dapat dijadikan faktor penyeimbang terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, pendidikan diarahkan pada penyelesaian Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun, sebagaimana telah dicanangkan pada periode sebelumnya, melalui: (a) peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah melalui rehabilitasi dan penambahan ruang kelas dan (b) peningkatan bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Selain itu, pada periode ini Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) juga merupakan sasaran prioritas, dengan target meningkatnya daya tampung pada lembaga-lembaga PAUD baik yang bersifat formal maupun nonformal. Bidang kesehatan dilakukan dengan (a) memperkuat peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular; (b) pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular; (c) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; (d) peningkatan pelayanan kesehatan terutama ibu dan anak; (e) serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

Fokus dan arah pembangunan manusia untuk tenaga kerja yaitu: (a) peningkatan kompetensi dan daya saing melalui peningkatan sarana prasarana dan memperluas kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan; (b) pemantapan pelaksanaan hubungan industrial untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas, dan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Untuk bidang Kepemudaan dan Olahraga melalui (a) penyiapan kemandirian kepemudaan dalam hal kemampuan untuk mensejahterakan dirinya, tanpa banyak tergantung pada pihak lain; (b) perwujudan Kota Batu sebagai daerah yang mampu berprestasi, baik sebagai penyelenggara maupun sebagai pencetak atlet berprestasi pada event keolahragaan regional; dan (c) mencanangkan budaya gerak pada semua lapisan masyarakat untuk meningkatkan budaya keolahragaan masyarakat dan keolahragaan tradisonal. Pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan kepada (a) peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan (b) peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak dan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan.

Pembangunan sumber daya melalui keluarga berencana dan keluarga sejahtera diarahkan dengan pemantapan keluarga berencana sebagai pembentuk keluarga kecil dan mulai dirintis fungsi keluarga berencana sebagai pembentuk keluarga sejahtera; melalui kependudukan dan catatan sipil dan transmigrasi diarahkan dengan peningkatan pemberdayaan keluarga berkualitas, pemantapan sistem administrasi kependudukan dan peningkatan persebaran penduduk sesuai dengan potensinya serta

penyelenggaraan program transmigrasi; melalui pemberdayaan masyarakat dan sosial diarahkan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dan peningkatan penggalan potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan terakhir melalui ketahanan pangan diarahkan dengan upaya-upaya untuk menjamin ketersediaan bahan pangan, melalui pembangunan jaringan koordinasi dengan instansi-instansi yang relevan dengan penyediaan pasokan pangan.

Pembangunan bidang pemerintahan pada tahap ketiga RPJMD Kota Batu ini diarahkan untuk lebih memantapkan kembali tata kelola pemerintahan yang baik melalui (a) perencanaan pembangunan dan statistik yaitu peningkatan kesesuaian perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan dalam kerangka penganggaran jangka menengah yang didukung oleh basis data yang lengkap, akurat dan *realtime*; (b) komunikasi dan informasi fokus pada penguasaan teknologi informatika (IT) untuk membentuk masyarakat di seluruh wilayah yang berbasis ilmu pengetahuan (*Knowledge-based society*); (c) pemerintahan umum, perpustakaan, kearsipan, statistik, kependudukan, dan catatan sipil, yaitu dengan pemantapan profesionalitas aparatur yang didukung oleh penataan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan, pemantapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik, pengembangan budaya

organisasi yang berorientasi pelayan serta peningkatan harmonisasi hubungan antartingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam pembangunan desa diarahkan pada pengembangan kapasitas desa dalam rangka penguatan daya saing. Penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel difokuskan pada bidang perijinan dan perbaikan iklim investasi.

Pembangunan dalam bidang politik pada tahap ketiga RPJMD Kota Batu diarahkan dengan: (a) perwujudan demokrasi pada proses politik, pemantapan semangat kebangsaan, membangun kemandirian partai politik, dan pemantapan peran masyarakat madani (*civil society*); (b) penguatan penerapan produk hukum untuk memantapkan pelaksanaan otonomi dan penyelenggaraan pemerintahan, memantapkan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM); meminimalkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, mengoptimalkan potensi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum serta peningkatan pelayanan keamanan dan perlindungan masyarakat dari berbagai gangguan.

Pembangunan Kota Batu sebagai Sentra Pariwisata yang berbasis Pertanian Berwawasan Lingkungan pada tahap ketiga yang berdasarkan tahapan kelanjutan dari sebelumnya difokuskan pada : (a) pembangunan pariwisata melalui penguatan citra industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata, promosi

pariwisata daerah dan pemantapan *city branding* Batu sebagai Kota Wisata di tingkat nasional, dan pariwisata yang kompeten serta profesional; (b) pembangunan pertanian dan kehutanan melalui (1) pemantapan mutu melalui pengembangan teknologi pertanian hulu sampai dengan hilir; (2) pengembangan kualitas produk dalam rangka peningkatan daya saing produk di pasar lokal dan regional dan ketahanan pangan; (3) pemantapan sarana dan prasarana pertanian dan perdesaan; (4) pemanfaatan hutan lestari untuk diverifikasi usaha, dan mendukung produksi pangan; (5) penguatan agrobisnis berbasis keunggulan komparatif menuju agrobisnis keunggulan kompetitif; (6) penguatan akses pasar dengan menjaga kelangsungan mekanisme pasar yang sehat serta lebih mengutamakan perlindungan usaha masyarakat lemah; (7) penguasaan akses informasi pasar sampai wilayah kecamatan; (8) penguasaan, penelitian, pengembangan dan pemanfaatan teknologi meliputi aspek bioteknologi, teknologi *ekofarming*, teknologi pasca panen, dan teknologi produk; (9) peningkatan dan pemantapan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya; dan (10) pemantapan sarana dan prasarana penyuluh serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM penyuluh.

Pembangunan bidang perikanan melalui: (a) penumbuhan dan pengawasan perikanan komersial; (b) pengembangan usaha sarana produksi; (c) pengembangan jejaring usaha; (d) pengembangan usaha pengolahan hasil; (e) pengembangan usaha

berbahan baku dari produk yang tidak dimanfaatkan langsung; (f) penguatan pasar untuk industri hilir; (g) pengembangan usaha permodalan; serta (h) pengembangan usaha informasi pemasaran. Pembangunan bidang perdagangan melalui (a) perluasan kawasan perdagangan ekspor; (b) penataan distribusi barang; (c) pemberdayaan produk dalam negeri serta (d) pengembangan pasar daerah. pembangunan perindustrian difokuskan pada (a) penciptaan lingkungan usaha yang nyaman dan kondusif; (b) pengembangan kemampuan inovasi; (c) peningkatan kemampuan sumber daya industri dan (d) pengembangan industri kecil yang tangguh.

Pembangunan bidang koperasi dan usaha kecil menengah difokuskan kepada peningkatan kualitas serta khandalan untuk memposisikan KUMKM yang mempunyai daya tawar usaha dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Pembangunan bidang pekerjaan umum, perumahan dan penataan ruang difokuskan dengan melakukan: (a) percepatan pembangunan infrastruktur wilayah; (b) lebih meningkatkan kemampuan kelembagaan pengelola serta tetap meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan swasta; (c) ketersediaan infrastruktur wilayah diupayakan terdistribusi secara merata pada seluruh wilayah dalam mendukung terwujudnya kemandirian masyarakat Kota Batu yang produktif dan memiliki daya saing. Pembangunan bidang perhubungan lebih kepada mempertahankan kemantapan jaringan jalan, peningkatan dan

pembangunan jaringan jalan dan jembatan, serta pemeliharaan dan peningkatan pembangunan sarana prasarana transportasi yang terintegrasi antara dan intermoda.

Pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral/alam lebih difokuskan kepada : (a) peningkatan pemanfaatan energi bio dan energi terbarukan lainnya yang ramah lingkungan; (b) rehabilitasi dan pemulihan daya dukung serta pengelolaan SDA terbarukan; (c) pemanfaatan SDA terbarukan secara optimal dan lestari. Sedangkan dalam pembangunan pada bidang lingkungan hidup lebih difokuskan pada : (a) pemantapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang semakin efektif berbasis teknologi ramah lingkungan dengan cara menjaga konsistensi upaya penegakan hukum dalam pengendalian kualitas lingkungan, meningkatkan efektifitas upaya konservasi dan pemulihan kualitas dan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup khususnya untuk kondisi kawasan lindung, daerah aliran sungai dan air bawah tanah; (b) pemantapan peran aktif dan kemitraan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, serta berkembangnya penerapan pendidikan lingkungan untuk semua kalangan baik secara formal maupun non formal.

b. Telaahan Kebijakan RTRW Kota Batu

Penelaahan terhadap isu strategis RTRW bertujuan untuk mewujudkan keselarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang telah disusun. sebelum menelaah struktur dan pola ruang tersebut, maka perlu ditelaah tujuan, kebijakan dan strategis penataan ruang Kota Batu. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Walikota Batu, Penataan ruang Kota Batu bertujuan untuk mewujudkan ruang Kota Batu yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sebagai kota yang berbasis agropolitan dan kota pariwisata unggulan di Jawa Timur serta Kota Batu sebagai wilayah penopang hulu Sungai Brantas.

Tabel 4.13

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kota Batu

Kebijakan	Strategi
Kebijakan pengembangan pola ruang	Strategi pengembangan pola ruang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Pelestarian kawasan lindung untuk memperkuat peran Kota Batu sebagai penopang hulu Sungai Brantas dan keberlanjutan lingkungan Kota Batu sebagai wilayah pegunungan yang asri, aman dan nyaman. b. Pengendalian kegiatan budidaya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. c. Pengembangan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana d. Peningkatan fungsi kawasan untuk

	<p>pertahanan dan keamanan negara.</p>
<p>Kebijakan pelestarian kawasan lindung untuk memperkuat peran Kota Batu sebagai penopang hulu Sungai Brantas dan keberlanjutan lingkungan Kota Batu</p>	<p>Strategi Pelestarian kawasan lindung untuk memperkuat peran Kota Batu sebagai penopang hulu Sungai Brantas dan keberlanjutan lingkungan Kota Batu sebagai wilayah pegunungan yang asri, aman dan nyaman meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kerjasama daerah sekitar Kota Batu dan DAS Brantas untuk penyelamatan ekosistem sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku; b. Melestarikan daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan sumberdaya air; c. Mencegah dilakukannya kegiatan budidaya di sempadan mata air yang dapat mengganggu kualitas air, kondisi fisik dan mengurangi kuantitas debit air; d. Membatasi kegiatan di kawasan perlindungan setempat sepanjang sungai hanya untuk kepentingan pariwisata yang tidak merubah fungsi lindung; e. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah; f. Menata kembali kawasan lindung yang telah rusak atau pemanfaatannya menyimpang dari fungsi perlindungan; g. Mengelola kawasan lindung secara terpadu;

	<ul style="list-style-type: none"> h. Melakaukan konservasi tanah dan air pada kawasan lindung; i. Mengelola sumberdaya hutan yang ada secara lebih baik melalui kegiatan penanaman kembali hutan yang gundul dan menjaga hutan dari pembalakan lia j. Menyelamatkan keutuhan potensi keanekaragaman hayati, baik potensi fisik wilayahnya (habitatnya), potensi sumberdaya kehidupan serta keanekaragaman sumber genetikanya. k. Meningkatkan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau hingga 30 % dari luas wilayah Kota dalam mengendalikan dan memelihara kualitas lingkungan l. Mengamankan benda cagar budaya dan sejarah dengan melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, dan situs purbakala.
<p>Kebijakan pengendalian kegiatan budidaya yang dapat menimbulkan kerusakan atau penurunan kualitas lingkungan dan mitigasi bencana kota</p>	<p>Strategi pengendalian kegiatan budidaya yang dapat menimbulkan kerusakan atau penurunan kualitas lingkungan dan mitigasi bencana kota meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengendalikan perkembangan pusat-pusat kegiatan agar tetap terjadi keseimbangan perkembangan antar wilayah; b. Pembangunan perkotaan harus didasarkan pada Daya Dukung Lingkungan (DDL) / Daya Tampung Lingkungan (DTL); c. Mengembangkan zona penyangga pada

	<p>kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan hutan indung;</p> <p>d. Mengendalikan pemanfaatan hutan produksi dengan memperhatikan pada luas kawasan, potensi hasil hutan; dan kesesuaian ekosistem;</p> <p>e. Mengembangkan wilayah-wilayah tanaman hortikultura sesuai dengan potensi/kesesuaian lahannya secara optimal;</p> <p>f. Mengendalikan perluasan pertanian pada kawasan rawan bencana dan kawasan yang seharusnya berfungsi lindung untuk memelihara kelestarian lingkungan; dan</p> <p>g. Mengendalikan kegiatan industri yang bukan agroindustri</p>
<p>Kebijakan Pengembangan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan dan sesuai dengan daya dukung lingkungan</p>	<p>Strategi Pengembangan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan dan sesuai dengan daya dukung lingkungan meliputi:</p> <p>a. Menata pemanfaatan ruang terbangun pada pusat kegiatan secara merata untuk mencegah kawasan permukiman padat;</p> <p>b. Melarang untuk membangun di kawasan yang memiliki potensi terjadi rawan bencana longsor dan bencana alam;</p> <p>c. Mengintensifikasi dan ekstensifikasi ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau melalui kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan, dan pengamanan ruang terbuka hijau</p> <p>d. Menata ruang untuk kegiatan perdagangan, perumahan, pertanian, dan</p>

	<p>pengembangan obyek wisata yang saling bersinergi;</p> <p>e. Mengembangkan lingkungan permukiman dengan kepadatan rendah di wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan agropolitan;</p> <p>f. Meremajakan dan merehabilitasi lingkungan perumahan yang menurun kualitasnya, dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan.</p>
<p>Kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara</p>	<p>Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, meliputi:</p> <p>a. Menetapkan kawasan strategis dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;</p> <p>b. Mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis dengan budi daya terbangun.</p> <p>c. Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/TNI</p>
<p>Kebijakan penguatan keseimbangan ekologis pada kawasan strategis lingkungan hidup</p>	<p>Strategi Penguatan keseimbangan ekologis pada kawasan strategis lingkungan hidup meliputi:</p> <p>a. Membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis lingkungan hidup yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya;</p> <p>b. Menetapkan kawasan strategis untuk kepentingan pendidikan dan penelitian berbasis lingkungan hidup;</p> <p>c. Meningkatkan keanekaragaman hayati</p>

	<p>kawasan lindung;</p> <p>d. Merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis.</p>
<p>Kebijakan peningkatan daya saing investasi dan kesempatan ekonomi kawasan strategis ekonomi</p>	<p>Strategi Peningkatan daya saing investasi dan kesempatan ekonomi kawasan strategis ekonomi meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan dan menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku secara merata; b. Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan; c. Pengembangan Kawasan Agropolitan dan kawasan ; d. pariwisata yang terpadu sebagai daya tarik dan obyek wisata; e. Pengembangan ruang untuk sektor informal; f. Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah; dan g. Memberikan insentif dan stimulan untuk mempercepat perwujudan kawasan strategis berupa peningkatan pelayanan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi.

Sumber: Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030

Selain kebijakan dan strategi penataan ruang sebagaimana

di uraikan di atas, RTRW Kota Batu juga memuat rencana program

yang meliputi program perwujudan struktur ruang, lokasi sampai instansi pelaksana. Berikut indikasi program rencana tata ruang wilayah Kota Batu 2010-2030. Mengingat kesamaan periodisasi RPJMD, maka indikasi program rencana tata ruang wilayah Kota Batu di fokuskan pada tahap II (2015-2020) dan tahap III (2021-2025). Yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 14

Indikasi program rencana tata ruang wilayah Kota Batu 2010-2030

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM II	PJM III	ANGGARAN BIAYA	SUMBER DANA	INTANSI PELAKSANA
A.	PERUWUJUDAN STRUKTUR RUANG						
I.	Perwujudan Pusat Kegiatan						
	1.1. Pengembangan pusat kegiatan perdagangan dan jasa komersial						
	a. Pembangunan Pasar Induk Kota Batu (Modern-Tradisional	Jl. Kartini, Kel. Temas			100.000.000.000	APBD & Swasta	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	b. Pembangunan pasar sentra Junrejo	Desa Junrejo			10.000.000.000	APBD	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	c. Pengembangan pusat perbelanjaan modern dan grosir	Jalan Kartini, Jalan Diponegoro, hingga Jalan Gajamada;				Swasta	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	d. Penyediaan ruang bagi kegiatan informal					APBD Swasta	Dinas tata ruang dan Cipta Karya
		- PKL Jalan Sudiro (Alun-Alun Kota Batu)			15.000.000.000	Swasta/Investor	Investor bekerja sama dengan PKL di alun-alun
		- PKL bunga Sidomulyo			250.000.000	APBD/Swasta	Dinas
		- PKL Buang di Beji			250.000.000	APBD/Swasta	
	e. Pasar agribisnis	Desa Giripurno			2.000.000.000	APBD dan Provinsi	Dinas tata ruang dan Cipta Karya
	f. Pengembangan pasar desa agropolitan	pasar tradisional di Desa Punten, Desa Tulungrejo, dan Desa Junrejo			30.000.000.000	APBD	Dinas tata ruang dan Cipta Karya
	1.2. Pengembangan kegiatan fasilitas pelayanan						

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM II	PJM III	ANGGARAN BIAYA	SUMBER DANA	INTANSI PELAKSANA
II.	Perwujudan Sistem Prasarana						
	2.1. Perwujudan sistem transportasi Jalan Raya						
	a. Pengembangan jaringan jalan umum						
	<ul style="list-style-type: none"> Penataan dan pengembangan jaringan Jalan Kolektor Primer di wilayah Kota Batu meliputi jalur Malang-Batu, Surabaya-Pasuruan-Batu, Batu-Kediri, Batu-Jombang dan Batu-Mojokerto 	ruas Karanglo – Batu, yakni Jalan Raya Karangploso, Jalan Raya Pendem, Jalan Raya Batu, Jalan Pattimura, Jalan Gajamada, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Turnojoyo, Jalan Songgoriti			5.000.000.000	APBD Propinsi	Dinas Pengairan dan Binamarga
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan jaringan jalan kolektor sekunder di wilayah Kota Batu 	1. ruas Dau - Pendem - Junrejo - Tlengkung - Oro-oro			20.000.000.000	APBD, APBD Provinsi & APBN	Dinas Pengairan dan Binamarga
		2. ruas Karangploso – Giripurno – Bumiaji – Sidomulyo; dan			12.000.000.000	APBD, APBD Provinsi & APBN	Dinas Pengairan dan Binamarga
		3. ruas Pacet - Sumber Brantas – Punten – Sidomulyo - Sisir			10.000.000.000	APBD, APBD Provinsi & APBN	Dinas Pengairan dan Binamarga
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Jalan lingkungan pendukung desa wisata 	semua jalan kelurahan dan desa yang terdapat di Wilayah Kota Batu			30.000.000.000	APBD	Dinas Pengairan dan Binamarga
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan jalan lokal primer di kawasan agropolitan 	Desa Tulungrejo, Desa Punten, Desa Sidomulyo, Desa Tlengkung, Desa Torongrejo, Desa Bumiaji dengan pusat kegiatan agrobisnis di Desa Giripurno			10.000.000.000	APBD dan Propinsi	Dinas Pengairan dan Binamarga

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM II	PJM III	ANGGARAN BIAYA	SUMBER DANA	INTANSI DEKSAKANA
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan jalan tembus antar Kecamatan/Desa merupakan jalan lokal sekunder 	Desa Temas – Desa Bumiaji			9.000.000.000	APBD	Dinas Pengairan dan Binamarga
	b. Pengembangan jalur wisata						
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ festival road/ jalur festival wisata 	Oro-oro Ombo – pesanggrahan – Alun-alun kota			3.000.000.000	APBD	Dinas Pengairan dan Binamarga
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ jalur wisata Pusat Kota, wilayah Kota Batu 	pusat wisata modern Desa Oro-oro Ombo (BNS, Jatimark, Agrokusuma) hingga wisata yang terdapat di alun- alun kota dalam menikmati bangunan tematik dan wisata kuliner - cangar (sumber brantas) -Tulungrejo – Bumiaji – pasar wisata/agribisnis Giripurno			2.500.000.000	APBD dan Swasta	Dinas Pengairan dan Binamarga
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan kereta gantung di Kota Batu 	Terminal wisata – BNS (panderman) – Jatim Park – Alun-alun – Songgoriti – Sidomulyo – Seleka –			2.000.000.000	APBD dan Swasta	Dinas Pengairan dan Binamarga
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pengembangan jalur mountain bike 	Bulukerto-Bumiaji			1.000.000.000	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pengairan dan Binamarga
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pengembangan cross road/off road ▪ pengembangan jalur outbond dan jalur pendakian gunung 	Desa Bumiaji, dan Desa Songgokerto Tulungrejo, pesanggrahan,			3.000.000.000	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pengairan dan Binamarga,

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM II	PJM III	ANGGARAN BIAYA	SUMBER DANA	INTANSI PELAKSANA
							Dinas Perikanan, Dinas Kahutanan
	c. Pengembangan jalur angkutan						
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan transportasi regional 	<ul style="list-style-type: none"> - Jalur batu – surabaya - Pengembangan Jalur ke bandar udara untuk pelayanan/akomodasi wisata 			700.000.000	APBD dan Propinsi dan nasional	Dinas Pengairan dan Binamarga
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan sistem angkutan umum meliputi angkutan umum dalam kota 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Batu – Oro-oro Ombo – Tlengkung - Junrejo – Landungsari; ▪ Batu – Bumiaji – Pandanrejo – Giripurno; ▪ Giripurno – Torongrejo – Beji – Mojorejo – Dadaprejo – Landungsari; ▪ Sumber Brantas – Tulungrejo – Punten – Sidomulyo – Bumiaji – Giripurno; ▪ Songgokerto – Sumberejo – Sidomulyo – Giripurno; dan ▪ Temas – Ngaglik – Sisir – Bumiaji - Giripurno 			300.000.000	APBD	Dinas Pengairan dan Binamarga

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM II	PJM III	ANGGARAN BIAYA	SUMBER DANA	INTANSI DELAKSANA
	d. Pengembangan sarana transportasi						
	▪ Pengembangan terminal	Terminal tipe B Giripurno			3.000.000.000	APBD dan Propinsi	Dinas Pengairan dan Binamarga
	▪ Terminal penumpang dan halte	Desa Tulungrejo, Desa Punten, Songgoriti, Desa Junrejo, Desa Oro- oro Ombo dan terminal wisata di Desa Temas			2.000.000.000	APBD	Dinas Pengairan dan Binamarga
	▪ Terminal Barang	jalan Dewi sartika di Sisir			3.000.000.000	APBD dan Propinsi	Dinas Pengairan dan Binamarga
	▪ terminal wisata	Desa Oro-oro ombo			1.000.000.000	APBD	Dinas Pengairan dan Binamarga
	▪ pengembangan jalur pejalan kaki (pedestrian ways) ✓ jalur pejalan kaki di jalur festival roads ✓ jalan kaki di pusat kegiatan	Desa Oro-oro Ombo kawasan alun-alun Kota Batu yakni Jalan Diponegoro, hingga Jalan Gajamada, Jalan Kartika			4.000.000.000	APBD	Dinas Pengairan dan Binamarga
	▪ pengembangan parkir	Desa Oro-oro Ombo kawasan alun-alun Kota Batu yakni Jalan Diponegoro, hingga Jalan Gajamada, Jalan Kartika			1.500.000.000	APBD	Dinas Pengairan dan Binamarga
	2.2. Perwujudan sistem jaringan Telekomunikasi						
	a. Pengembangan jaringan telepon	Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Batu				Ls Telkom dan swasta lainnya	
	b. Pengembangan tower bersama di Desa Oro-oro ombo dan Desa Tlengkung	Gunung Panderman Desa Oro-oro Ombo Desa Oro-oro Ombo dan Desa Tlengkungn dan kawasan Gunung Pucung				Ls swasta	

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM II	PJM III	ANGGARAN BIAYA	SUMBER DANA	INTANSI PELAKSANA
		Desa Tulungrejo.					
	c. Rencana pengembangan stasiun pemancar televisi d. Penambahan titik pelayanan akses internet untuk umum (<i>hot spot</i>)	Sekitar alun-alun, oro-oro ombo, songgoriti, sekitar stadion, kawasan perkantoran				Rs swasta	
	2.3. Perwujudan sistem prasarana Sumber Daya Air						
	a. pengembangan saluran irigasi dengan saluran primer dan sekunder	Sistem jaringan irigasi bersumber dari Sungai Brantas, Kali Ampo, Kali Sumpil			5.000.000.000	APBD	Dinas Pengairan dan Binamarga
	b. pengembangan dam pengendali banjir	Sungai Brantas dan anak-anak sungai Brantas yang terdiri dari Kali Braholo, Kali Ampo, Kali Sumpil, Kali Lanang, kali Mewek, dan kali Brugan			6.000.000.000	APBD	Dinas Pengairan dan Binamarga
	c. pengelolaan mata air	Sumber Metro, Sumber Prambanan, Torong Sisir, Gedang Klutuk Tenggulun, Genengan, Torongdadap, Watugudik, Torong Belok, Oro-oro ombo, Watu Gede, Torong dadap serta Torong Belok			3.000.000.000	APBD, Propinsi dan nasional	
	2.4. Perwujudan sistem jaringan air minum						
	a. pengembangan sistem gravitasi dalam penyedia air minum dengan memanfaatkan mata air	1. Mata air Darmi melayani Desa Oro-oro Ombo, Ngaglik dan Temas; 2. Mata Air Banyuning			2.500.000.000	PDAM	

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM II	PJM III	ANGGARAN BIAYA	SUMBER DANA	INTANSI DELAKSANA
		melayani Desa Beji, Ngaglik, Sisir dan Temas; 3. Mata air Gemulo melayani 3 desa Desa Sidomulyo, Desa Pandanrejo dan Desa Torongrejo serta melayani sebagian Desa Beji dan Desa Mojorejo; 4. Mata air Torong Belok melayani Desa 5. Sumber Cemoro Kandang melayani Panderman Hill; 6. Mata air Ngesong 1 dan 2 melayani Desa Sumberejo, Sabtean dan Jl.Panglima Sudirman; 7. Mata air Kasinan melayani Desa Pesanggrahan					
	b. Pemenuhan kebutuhan air baku untuk rumah tangga dilakukan dengan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).	Desa Tlengkung, Desa Junrejo, Desa Pendem, Desa Dadaprejo, Desa Giripurno, Desa Gunungsari, Desa Punten, Desa Bulukerto, Sumbergondo, Desa Tulungrejo dan Desa Sumber Brantas.			11.000.000.000	APBD dan Propinsi	Dinas Pengairan dan Binamarga

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM II	PJM III	ANGGARAN BIAYA	SUMBER DANA	INTANSI DELAKSANA
	2.5. Perwujudan Sistem jaringan Energi						
	a. Pengembangan energi mikrohidro	Torongrejo			350.000.000	APBD	
	2.6. Perwujudan sistem jaringan prasarana Perkotaan						
	a. Pengembangan jaringan penanganan persampahan						Dinas lingkungan hidup, Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang
	▪ Rencana operasional pengelolaan persampahan	Setiap desa dan kelurahan			1.500.000.000	APBD	Dinas lingkungan hidup, Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang
	▪ Pengembangan sistem TPS secara disposal	Setiap kecamatan			1.500.000.000	APBD	Dinas lingkungan hidup, Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang
	▪ pengembangan lokasi TPA	Desa Tlekung Kecamatan Junrejo dan di Desa Giripurno yakni di Sebrang Bendo			2.000.000.000	APBD	Dinas lingkungan hidup, Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang
	b. Optimalisasi tingkat penanganan limbah						
	▪ Penangan limbah secara terpusat dan sistem setempat	Pusat kota			3.000.000.000	APBD	Dinas lingkungan hidup, Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang
	▪ pengelolaan penanganan air limbah dari kegiatan industri, rumah sakit, hotel, restoran dan rumah tangga	Pusat kota			2.000.000.000	APBD dan APBD Provisis, Swasta	Dinas lingkungan hidup

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM II	PJM III	ANGGARAN BIAYA	SUMBER DANA	INTANSI PELAKSANA
	c. Sistem Pembuangan Air Hujan (Drainase)						
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan sistem pematusan 	kawasan pengembangan perumahan real estate, kawasan pengembangan pariwisata, kawasan pengembangan pusat pelayanan, jalan kolektor primer dan kolektor sekunder yang terdapat pada pusat-pusat kegiatan, serta pada Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu yang merupakan lokasi rawan banjir			3.000.000.000	APBD dan Investor	Dinas Pengairan dan Binamarga
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemeliharaan kelestarian sungai-sungai melalui kegiatan normalisasi sungai-sungai yang ada dan konservasi sempadan sungai. 	Sungai Brantas, Kali Ampo, Kali Sumpil			5.000.000.000	APBD, PJT	Dinas Pengairan dan Binamarga
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program penggalakan sumur resapan 	Seluruh wilayah			2.000.000.000	APBD dan Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang
	c. Pengembangan instalasi pengolahan air bersih siap minum beserta jaringan distribusi	Desa Oro-oro ombo – pesanggrahan, songgoriti dan kelurahan temas			3.000.000.000	APBD dan PDAM	Dinas Pengairan dan Binamarga
B.	PERUWUJUDAN POLA RUANG						
I.	Perwujudan kawasan lindung						
	1.1. Pelestarian Hutan lindung						
	a. Konservasi hutan lindung melalui perencanaan	Kecamatan Bumiaji, Kecamatan Batu,			2.000.000.000	APBD dan propinsi ,	Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM II	PJM III	ANGGARAN BIAYA	SUMBER DANA	INTANSI PELAKSANA
	rehabilitasi lahan kritis yang mengalami alih fungsi	Kecamatan Junrejo				Perhutani & Kehutanan	
	b. Reboisasi untuk kawasan hutan lindung	gunung Panderman, Pusung Punuk dan Bokong			1.000.000.000	APBD dan propinsi	Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan
	c. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan	Kecamatan Bumiaji, Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo			500.000.000	APBD dan propinsi	Dinas perikanan, Dinas kehutanan
	1.2. Pelestarian Kawasan resapan air						
	a. Pengelolaan wilayah resapan /catchment area agar tidak dijadikan lahan terbangun	Iereng G. Arjuno, G. Kembar, G. Pusungkutu, G. Welirang, G. Anjasmoro, G. Rawung, G. Preteng, G. Kerumbung, G. Banyak/Kitiran, G. Srandil, G. Panderman, G. Bokong dan G. Punuksapi			1.000.000.000	APBD dan propinsi	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pengairan dan Bina Marga
	b. Peningkatan pengawasan dan pemantauan terhadap aktifitas budidaya di lahan konservasi sempadan sungai, dan mata air				500.000.000	APBD dan propinsi	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pengairan dan Bina Marga
	1.3. Pelestarian Kawasan perlindungan setempat						
	a. Konservasi Sempadan sungai						
	▪ Pelestarian sepanjang sungai/ sempadan sungai Sungai				500.000.000	APBD dan propinsi	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pengairan dan Bina Marga
	▪ Pelestarian konservasi sempadan sungai dan hulu sungai Brantas				500.000.000	APBD dan propinsi	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pengairan dan Bina Marga

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM II	PJM III	ANGGARAN BIAYA	SUMBER DANA	INTANSI PELAKSANA
	<ul style="list-style-type: none"> Mempertahankan kelestarian kawasan sempadan sungai 				500.000.000	APBD dan propinsi	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pengairan dan Bina Marga
	<ul style="list-style-type: none"> Menciptakan kawasan rekreatif dengan memanfaatkan sempadan sungai 				500.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pengairan dan Bina Marga
	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan , pemantauan dan pengendalian kawasan budidaya di sekitar aliran sungai 				500.000.000	APBD dan propinsi	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pengairan dan Bina Marga
	<ul style="list-style-type: none"> Penghijauan sempadan sungai 				2.000.000.000	APBD dan propinsi	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pengairan dan Bina Marga
	b. Pengembangan Ruang terbuka hijau kota						
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan jalur hijau di sepanjang jaringan jalan yang berfungsi sebagai RTH kota 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pusat ruang publik dalam bentuk Plaza dan stadion olahraga Pengembangan hutan kota Pengembangan RTH sebagai taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai 			4.000.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan taman kota /Alun-Alun Kota Batu 	Kelurahan temas			45.000.000.000	APBD	Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya dan Tata

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM II	PJM III	ANGGARAN BIAYA	SUMBER DANA	INTANSI DEKASANA
							Ruang
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengendalian pemanfaatan di kawasan ruang terbuka hijau 	Seluruh wilayah			750.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	c. Penanganan sekitar mata air						
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rehabilitasi hutan sekitar mata air 	111 (seratus sebelas) mata air dan tersebar di Kecamatan Batu, Bumiaji, dan Junrejo.			1.000.000.000	APBD dan propinsi	Dinas perikanan, Dinas kehutanan
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki fisik sekitar mata air 				1.000.000.000	APBD dan propinsi	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pengairan dan Binamarga
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemanfaatan sumber air untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan air bersih 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ mata air Darmi ▪ mata Air Banyuning ▪ Mata air Gemulo ▪ Gemulo I ▪ Gemulo II ▪ Gemulo III ▪ penangkapan air ▪ Mata air Torong ▪ Mata air Kasinan ▪ Mata air Ngesong 1 dan 2 ▪ Sumber Ngesong 1 ▪ Sumber Ngesong 2 ▪ Sumber Cemoro Kandang 			10.000.000.000	APBD, PDAM dan propinsi	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pengairan dan Binamarga, PDAM
	1.4. pelestarian alam dan cagar budaya						

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM II	PJM III	ANGGARAN BIAYA	SUMBER DANA	INTANSI DELAKSANA
	a. Konservasi Taman hutan raya	<ul style="list-style-type: none"> pelestarian KPH Malang (Ex hutan lindung) Pelestarian Balai KSDA Jatim II (Ex cagar alam) 			2.000.000.000	Perhutani dan Kehutanan	Badan Pengelola TAHURA
	b. Konservasi cagar budaya						
	<ul style="list-style-type: none"> rehabilitasi kerusakan 	candi candi Supo songgoriti sebagai benda cagar budaya Kota Batu			500.000.000	APBD	Dinas perikanan, Dinas kahutanan
	<ul style="list-style-type: none"> Konservasi bangunan bersejarah di kota dan tempat wisata 	Pusat kota, songgoriti, selekta			500.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas kebudayaan dan pariwisata, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
	c. Pengembangan Kawasan Taman Wisata Alam						
	<ul style="list-style-type: none"> Perancangan ulang Arboretum. 	Desa Sumber Brantas			2.500.000.000	Perum Jasa Tirta	Dinas lingkungan Hidup, Dinas perikanan, Dinas kehutanan , dinas kebudayaan dan pariwisata
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan elemen-elemen pendukung (jalan setapak, air bersih, fasilitas mushola, perkemahan, rumah peristirahatan, areal 	TAHURA R. Soeryo yang berada di lingkungan obyek wisata Sumber air			1.500.000.000	Tahuran, APBD propinsi	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM II	PJM III	ANGGARAN BIAYA	SUMBER DANA	INTANSI DELAKSANA
	parkir, dll)	panas Cangar					
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pengembangan arboretrum dengan menciptakan kawasan rekreasi menarik dan sarat dengan muatan ilmiah yang menonjolkan elemen-elemen pendidikan dan penelitian, terutama pendidikan lingkungan dan pelestarian air. 	Desa Sumber Brantas			1.000.000.000	Perum Jasa Tirta	Dinas perikanan, Dinas kehutanan, Dinas lingkungan hidup, Bappeda
	1.5. Rawan Bencana Alam						
	a. Identifikasi terhadap kawasan rawan bencana erosi dan banjir	seluruh wilayah			400.000.000	APBD	Dinas perikanan, Dinas kehutanan, Dinas lingkungan hidup, dinas pertanian
	b. Penetapan kawasan rawan banjir di area sempadan sungai	Desa Beji, Desa Mojorejo dan Desa Junrejo			300.000.000	APBD dan Propinsi	Dinas Binamarga dan pengairan, Dinas lingkungan hidup
	c. Penetapan kawasan rawan bencana (erosi).	Seluruh wilayah			250.000.000	APBD	Dinas lingkungan hidup
	d. Pencegahan daerah rawan erosi	Seluruh wilayah lereng gunung			2.000.000.000	APBD	Dinas perikanan, Dinas kehutanan, Dinas lingkungan hidup, dinas pertanian
	e. Pemantauan daerah rawan erosi terhadap pengembangan ruang terbangun	Seluruh wilayah lereng gunung			250.000.000	APBD	Dinas perikanan, Dinas kehutanan,

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM II	PJM III	ANGGARAN BIAYA	SUMBER DANA	INTANSI PELAKSANA
							Dinas lingkungan hidup, dinas pertanian
	f. Penghijauan lahan gundul pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan longsor	Seluruh wilayah lereng gunung			3.000.000.000	APBD dan Propinsi, Perhutani, Kehutanan	Dinas perikanan, Dinas kehutanan, Dinas lingkungan hidup, dinas pertanian
	g. pemantapan fungsi kawasan sebagai kawasan hutan lindung, dan kawasan perlindungan terbatas	Seluruh wilayah lereng gunung			500.000.000	APBD dan Propinsi, Perhutani, Kehutanan	Dinas perikanan, Dinas kehutanan, Dinas lingkungan hidup, dinas pertanian
	h. perencanaan penanganan mitigasi bencana akibat tanah amblas	Kecamatan Batu			300.000.000	APBD	Dinas lingkungan hidup
	i. Penyiapan jalur evakuasi bencana	Seluruh wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana			450.000.000	APBD	Dinas Binamarga dan pengairan, cipta karya dan tata ruang
	j. Pembangunan ruang evakuasi bencana	alun-alun Kota Batu, Stadion Brantas, maupun Gedung olahraga			600.000.000	APBD	Dinas lingkungan hidup, kesbanglinmas, ciptakarya dan tata ruang
II.	Perwujudan Kawasan Budidaya						
	2.1. Pengembangan kawasan hutan produksi						

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM II	PJM III	ANGGARAN BIAYA	SUMBER DANA	INTANSI DELAKSANA
	a. Pemantauan dan pengendalian hasil hutan dalam menjaga kelestarian hutan Produksi	Gunung Wirang, Gunung Kembar, Gunung Tunggangan, Gunung Gede, Gunung Jeruk, Gunung Kerumbung, Gunung Pratang, Gunung Punuksapi, Gunung Bokong, Gunung Panderman, dan sempadan sungai di Desa Beji, Desa Mojorejo dan Desa Junrejo			300.000.000	Perhutani	
	b. pengolahan hasil hutan produksi secara berkelanjutan	Desa Sumber Brantas, Desa Tulungrejo, Desa Sumbergondo, Desa Bulukerto, Desa Bumiaji, Desa Giripurno, Desa Bumiaji, Desa Songgokerto, dan Desa Oro-oro Ombo			300.000.000	Perhutani	
	c. pengembangan agroforestry dan ecotourism	Desa Oro-oro Ombo, Desa Tlengkung, Desa Pesanggrahan dan Desa Songgokerto			300.000.000	Perhutani dan APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup
	2.2. Pengembangan kawasan peruntukan pertanian						

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM II	PJM III	ANGGARAN BIAYA	SUMBER DANA	INTANSI PELAKSANA
	a. pengembangan komoditas hortikultura	Desa Tulungrejo, Desa Gunungsari, Desa Punten dan Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji, serta Desa Oro-oro Ombo dan Desa Pesanggrahan, serta Desa Songgokerto di Kecamatan Batu, serta Desa Junrejo Kecamatan Junrejo			1.000.000.000	APBD	Dinas Pertanian dan Kehutanan
	b. Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan					APBD	Dinas Pertanian dan Kehutanan
	c. Pengembangan Sentra tanaman hias	Desa Sidomulyo Kecamatan Batu, dan Desa Punten, Desa			2.000.000.000	APBD dan swasta	Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil & Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	d. Pengembangan perkebunan apel memusat	Kecamatan Bumiaji dan terdapat di Tlengkung Kecamatan Junrejo			1.500.000.000	APBD dan swasta	Dinas Pertanian dan Kehutanan
	e. Pengembangan perkebunan jeruk	Tlengkung dan Oro-oro Ombo			1.500.000.000	APBD dan swasta	Dinas Pertanian dan Kehutanan
	f. Pengembangan Perkebunan alpukat	Tlengkung dan Desa Torongrejo			1.500.000.000	APBD dan swasta	Dinas Pertanian dan Kehutanan
	g. pengadaan pusat penelitian;	Bumiaji dan Tlekung			1.000.000.000	APBD	Dinas Pertanian dan Kehutanan
	h. Identifikasi dan pemeliharaan tanaman pangan	Pendem			500.000.000	APBD	Dinas Pertanian dan Kehutanan
	i. Budidaya kegiatan peternakan sapi perah	Desa Oro-oro Ombo, dan Desa Pesanggrahan. Serta di Kecamatan Bumiaji Desa			1.000.000.000	swasta	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM II	PJM III	ANGGARAN BIAYA	SUMBER DANA	INTANSI PELAKSANA
		Gunungsari					kehutanan, Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil & Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	j. Pembangunan Kandang Sapi Kolektif	Dusun Toyomerto, Ds. Pesanggrahan			3.500.000.000		
	k. Pengembangan industri pengolahan susu ternak	Desa Oro-oro Ombo, dan Desa Pesanggrahan, Kecamatan Bumiaji Desa Gunungsari			1.000.000.000	swasta	
	l. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran	Desa Sumberejo dan Desa Sidomulyo Kecamatan Batu			1.000.000.000	swasta	Dinas Perikanan dan Dinas Kehutanan
	2.3. Pengembangan industri non polutif						
	a. Pengembangan Industri rumah tangga dan kerajinan b. Identifikasi sentra lokasi industri kecil-menengah dan homestay c. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri	Kecamatan Bumiaji dan industri kerajinan yang terdapat di Junrejo dan Dadaprejo			1.000.000.000	APBD	Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil & Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Cipta Karya dan Tata Ruang
	d. Pengembangan Industri pengolahan hasil pertanian	Giripurno			1.000.000.000	APBD	Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil & Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM II	PJM III	ANGGARAN BIAYA	SUMBER DANA	INTANSI DELAKSANA
	e. Pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan pada kawasan agropolitan	Desa Tulungrejo, Desa Punten dan Desa Bumiaji			1.000.000.000	APBD dan swasta	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan
	f. Pengembangan industri kerajinan kayu dan marmer yang dikembangkan	Desa Dadaprejo dan Mojorejo Kecamatan Junrejo			1.000.000.000	APBD dan swasta	Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil & Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	2.4. Pengembangan wisata alam, wisata minat khusus dan wisata budaya						
	a. Pengembangan lokasi obyek wisata kota	Oro-oro Ombo			100.000.000.000	APBD dan swasta	Pariwisata dan Kebudayaan, Cipta Karya dan Tata Ruang
	b. Peningkatan prasarana wisata berupa penginapan dan akomodasi				20.000.000.000	swasta	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Cipta Karya dan Tata Ruang
	c. Wisata <i>living with people</i>	Bumiaji			3.000.000.000	APBD dan swasta	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	d. Wisata adventure	Bumiaji dan gunung banyak			2.000.000.000	APBD dan swasta	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	e. Pengembangan botanical garden, Great nature of batu, Ecotourism, Agrotourism, memorial resort, sportuorism	Tulungrejo dan Sumber Brantas			6.000.000.000	APBD dan swasta	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	f. Kegiatan wisata paralayang	Gunung Banyak			1.000.000.000	APBD dan swasta	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	2.5. Pengembangan agropolitan pada wilayah bagian utara						

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM II	PJM III	ANGGARAN BIAYA	SUMBER DANA	INTANSI DELAKSANA
C.	PERUWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS						
I.	Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi						
	1.1. Pengembang kawasan stratgis unggulan pariwisata						
	a. Perencanaan Desa Wisata terintegrasi dengan pengembangan kawasan agropolitan				300.000.000	APBD	Bappeda
	b. Pengembangan garden stay dengan tema kegiatan wisata living with flowers farmers				1.000.000.000	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pertanian, Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang
	c. Pengembangan Wisata adventure dan alam	<ul style="list-style-type: none"> ▪ paralayang dan sirkuit off roads di Gunung Banyak ▪ Kegiatan Camping Ground di obyek wisata Pemandian air Panas Cangar ▪ Rencana kereta gantung dan resort serta cottages 			25.000.000.000	APBD dan Swasta	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	d. Program promosi wisata				800.000.000	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	e. Pengembangan wisata belanja melalui pembangunan pusat belanja dan kawasan wisata kuliner dan pasar wisata				2.000.000.000	APBD dan Swasta	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	f. Pengembangan miniatur dunia	Desa oro – oro ombo			2.000.000.000	Swasta	

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM II	PJM III	ANGGARAN BIAYA	SUMBER DANA	INTANSI PELAKSANA
	g. Program pengembangan sarana dan prasarana penunjang kawasan wisata: tempat parkir wisata, rest area, pengembangan akomodasi wisata	pasar wisata dan pasar seni yang terdapat di Desa Oro-oro Ombo dan Songgokerto			5.000.000.000	APBD dan Swasta	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	h. Pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku dan penyedia wisata				400.000.000	APBD	Bappeda
	i. Pembangunan res area	Desa Beji, Desa Oro-Oro Ombo			2.000.000.000	APBD	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	1.2. Pengembang kawasan stratgis unggulan pertanian						
	a. Peningkatan kawasan produksi pertanian holtikultura, kawasan perkebunan dan tanaman hias	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan Sentra holtikultura Desa Tulungrejo, Gunungsari, ▪ Pengembangan perkebunan apel memusat di Kecamatan Bumiaji dan sebagian terdapat di Tlengkung Kecamatan Junrejo; ▪ Pengembangan perkebunan jeruk memusat di Tlengkung dan Oro-oro Ombo ▪ Pengembangan Perkebunan alpukat terdapat di Tlengkung dan Desa Torongrejo ▪ pengadaan pusat penelitian; ▪ Penyediaan industri pengolahan hasil produksi ▪ Penyediaan sarana 			10.000.000.000	APBD dan Swasta	Dinas Pertanian dan Kehutanan

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM II	PJM III	ANGGARAN BIAYA	SUMBER DANA	INTANSI DELAKSANA
		prasarana penunjang ▪ Pengembangan Sentra tanaman hias di Desa Sidomulyo Kecamatan Batu, dan Desa Punten, Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji					
	b. Pengembangan fasilitas pendukung pertanian	Pembangunan balai penelitian			1.000.000.000	APBD	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	c. Program peningkatan akses kawasan	Seluruh wilayah			4.000.000.000	APBD dan Swasta	Dinas Pengairan dan Bina Marga
	d. Pemberdayaan masyarakat berbasis agribisnis dan agrowisata	BWK III			500.000.000	APBD	Bappeda dan Dinas pertanian
II.	Pemanfaatan kawasan strategis Lingkungan						
	e. pelestarian kawasan TAHURA f. konservasi mata air g. pengembangan kawasan arboretrum	BWK III			2.500.000.000	Propinsi	
	h. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan lindung	BWK III			500.000.000	Propinsi	

Sumber: Dokumen RTRW 2010-2030 Kota Batu

c. Telaahan KLHS

Pemerintah Indonesia saat ini tengah memulai mengembangkan aplikasi KLHS dengan mempertimbangkan kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, serta mempertimbangkan karakter kebijakan, rencana dan program pembangunan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis memposisikan KLHS sangat penting. Hal ini beralasan karena KLHS menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan (KLHS) telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari.

Sedangkan pedoman lebih teknis penyusunan merujuk pada regulasi setingkat peraturan menteri sebagai panduan instrumen teknis pelaksanaan KLHS yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga tengah mengupayakan di tiap Pemerintah Daerah wajib memiliki dokumen KLHS yang diharapkan bisa diturunkan hingga terbitnya Peraturan Daerah yang berpihak pada perlindungan dan pelestarian lingkungan.

Pemerintah Kota Batu sebagai salah satu pemerintah daerah di Indonesia yang berkepentingan agar daerah juga tidak

terlepas dari resiko kerusakan lingkungan baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun akibat dampak pembangunan dan perekonomian. Oleh karenanya, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di pemerintah Kota Batu lebih menitikberatkan pada penguatan rumusan kebijakan rencana dan program yang diarahkan pada perlindungan dan pelestarian lingkungan yang menjadi prioritas tertentu. Hal ini dimaksudkan dalam rangka mendukung visi Kota Batu menjadi “ Desa Berdaya Kota Berjaya Terwujudnya Kota Batu Sebagai Sentra Agro Wisata International Yang Berkrakter, Berdaya Saing dan Sejahtera”.

Berikut ini disajikan rumusan rekomendasi KLHS dalam Penyusunan RPJMD:

Instrumen Perumusan Rekomendasi KLHS dalam Penyusunan RPJMD

No	Program	Alternatif KRP	Muatan Rekomendasi	Rekomendasi	Terakomodir pada Misi RPJMD
1	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	1) Pembuatan jalan sesuai standar yang berlaku dan dilengkapi pembuatan sistem resapan air yang baik 2) Jembatan memiliki standar kelayakan jangka panjang	Perbaiki muatan rencana	1) Identifikasi kajian luas dan area potensi jalan dan jembatan 2) Pengembangan jalan dan jembatan berdasarkan standar kelayakan sebagai rekomendasi studi lebih lanjut bagi aspek-aspek tertentu untuk mendukung operasionalisasi implementasi kebijakan, rencana, dan/atau program lebih lanjut. 3) Pengembangan jalan dan jembatan mengikuti regulasi yang berlaku	4
2	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan sistem drainase ramah lingkungan (eko-drainase) dan gorong-gorong sesuai standar	Perbaiki materi program	1) Identifikasi kajian area pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong, sebagai penggunaan muatan KLHS untuk kebijakan, rencana, dan/atau program lain yang berkaitan.	4

No	Program	Alternatif KRP	Muatan Rekomendasi	Rekomendasi	Terakomodir pada Misi RPJMD
				2) Penyusunan regulasi mengenai standar pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, yang didukung studi lebih lanjut bagi aspek-aspek tertentu untuk mendukung operasionalisasi implementasi kebijakan, rencana, dan/atau program lebih lanjut.	
3	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya.	<p>1) Pengendalian dan konservasi terhadap sungai, danau, dan sumber daya air lainnya</p> <p>2) Peningkatan pengelolaan dan konservasi sungai terhadap aliran air yang sering dijadikan pembuangan limbah industry dan sampah domestic.</p>	Perbaiki rumusan kebijakan	<p>1) Identifikasi kajian luasan perlindungan dan konservasi sumber daya alam, sebagai rekomendasi penggunaan muatan KLHS untuk kebijakan, rencana, dan/atau program lain yang berkaitan.</p> <p>2) Penyusunan regulasi mengenai pengendalian eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran</p> <p>3) Pengembangan</p>	3, 4

No	Program	Alternatif KRP	Muatan Rekomendasi	Rekomendasi	Terakomodir pada Misi RPJMD
				<p>pengelolaan pemanfaatan energi alternatif, sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan dan upaya perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan, rencana, dan/atau program.</p>	
4	Program Perencanaan Tata Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan ruang terbuka hijau pada jalan maupun kawasan terbangun 2) Kegiatan pembangunan disertai dengan kegiatan AMDAL 3) Pengendalian pembangunan permukiman dengan regulasi yang diperketat 4) Penggunaan konstruksi soft yang ramah lingkungan 	Perbaikan muatan rencana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Identifikasi kajian perencanaan tata kota sebagai pertimbangan rekomendasi aspek-aspek dalam AMDAL atau dokumen lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang akan dibangun/dilaksanakan sebagai tindak lanjut implementasi kebijakan, rencana, dan/atau program. 2) Penyusunan regulasi mengenai perencanaan tata kota yang mempertimbangkan juga tata kelola 	4

No	Program	Alternatif KRP	Muatan Rekomendasi	Rekomendasi	Terakomodir pada Misi RPJMD
				lingkungan hidup	
5	Program Pengembangan Perumahan	<p>1) Pengendalian perubahan pemanfaatan lahan (khususnya alih fungsi lahan pertanian ke perumahan)</p> <p>2) Penyediaan sarana prasarana pemukiman baru (khususnya distribusi air bersih, sanitasi dan pembuangan sampah domestic)</p> <p>3) Pengendalian pembangunan perumahan baru melalui sistem perijinan untuk menanggulangi dibangunnya perumahan di daerah rawan bencana.</p>	Perbaiki materi program	<p>1) Identifikasi kajian luasan pemukiman padat penduduk</p> <p>2) Penyusunan regulasi mengenai pengendalian lingkungan disekitar wilayah pemukiman padat penduduk</p> <p>3) Pengembangan sarana dan prasana perumahan sehat bagi wilayah pemukiman padat penduduk</p> <p>4) Peningkatan kualitas dan kuantitas perumahan dan pemukiman</p> <p>5) Pembangunan perumahan yang ramah lingkungan berbasis teknologi (pembuangan sanitasi, lampu penerangan tenaga surya, pengelolaan sampah rumah tangga).</p>	4
6	Program Pengembangan Kinerja	1) Peningkatan standar pengujian limbah	Perbaiki rumusan	1) Identifikasi kajian potensi area tangkapan	4

No	Program	Alternatif KRP	Muatan Rekomendasi	Rekomendasi	Terakomodir pada Misi RPJMD
	Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	industri 2) Sosialisasi pengelolaan limbah oleh industri maupun masyarakat umum	kebijakan	air 2) Penyusunan regulasi mengenai upaya perlindungan kawasan potensi sumber daya air 3) Penyusunan regulasi mengenai sistem air limbah 4) Pengawasan dan perlindungan kualitas ketersediaan air minum 5) Mencapai akses sumber daya air yang aman dan terjangkau; 6) Mencapai akses sanitasi yang bersih dan baik 7) Pemeliharaan wilayah penghasil sumber air pegunungan 8) Manajemen sumber daya air melalui kerjasama antar daerah 9) Revitalisasi infrastruktur PDAM 10) Penambahan akses sanitasi air bersih dari PDAM.	
7	Program	1) Pengembangan	Perbaikan	1) Identifikasi kajian	3, 4

No	Program	Alternatif KRP	Muatan Rekomendasi	Rekomendasi	Terakomodir pada Misi RPJMD
	Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	regulasi terkait pembangunan 2) Penerapan kegiatan AMDAL dalam setiap tahap pengembangan 3) Pengendalian dan pengawasan terhadap daerah strategis	muatan rencana	potensi daerah 2) Penyusunan regulasi mengenai pengawasan dan pengendalian wilayah	
8	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	1) Pengembangan infrastruktur pedesaan yang ramah lingkungan 2) Program agrowisata menjadi ciri pembangunan di pedesaan	Perbaiki rumusan kebijakan	1) Identifikasi kajian potensi daerah 2) Identifikasi kajian pengembangan agrowisata 3) Regulasi pengendalian dan pengawasan pembangunan infrastruktur pedesaan	4
9	Program Pengendalian Banjir	1) Pengembangan infratrstruktur pencegahan banjir di daerah aliran sungai dan pemukiman rawan banjir 2) Pengembangan sistem sanitasi dan drainase di pemukiman padat penduduk dan industri secara	Perbaiki materi program	1) Identifikasi kania luasan area rawan banjir 2) Penyusunan regulasi mengenai pengendalian dan pencegahan bagi area rawan banjir 3) Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan di area rawan banjir 4) Peningkatan pengetahuan dan	1

No	Program	Alternatif KRP	Muatan Rekomendasi	Rekomendasi	Terakomodir pada Misi RPJMD
		<p>menyeluruh dan terpadu</p> <p>3) Pemberdayaan masyarakat yang sadar dan mandiri dalam mengantisipasi resiko bahaya banjir</p>		<p>pembinaan masyarakat perihal mencegah dan mengantisipasi banjir</p>	
10	<p>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)</p>	<p>1) Pengembangan teknologi tepat guna pertanian dan perkebunan dalam meningkatkan kualitas pangan.</p> <p>2) Penguatan mutu dan keamanan pangan dalam mengkokohkan Kota Batu sebagai Lumbung Pangan Jawa Timur.</p> <p>3) Pemberdayaan masyarakat untuk ikut andil dalam penguatan pangan daerah melalui upaya pertanian dan perkebunan kecil mandiri</p>	<p>Perbaiki materi program</p>	<p>1) Sosialisasi, fasilitasi, dan pemberian insentif pada kegiatan urban farming</p> <p>2) Memperkuat kerjasama dengan daerah sekitarnya</p> <p>3) Manajemen yang berkualitas untuk penggunaan lahan lahan yang telah ditetapkan sebagai area LP2B</p> <p>4) Membuat pemanfaatan tanaman pangan keluarga</p>	<p>2,3</p>
11	<p>Program</p>	<p>1) Pembinaan dan</p>	<p>Perbaiki</p>	<p>1) Identifikasi kajian area</p>	<p>4</p>

No	Program	Alternatif KRP	Muatan Rekomendasi	Rekomendasi	Terakomodir pada Misi RPJMD
	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	sosialisai kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dan menjaga lingkungan 2) Peningkatan pengelolaan kinerja persampahan dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan 3) Pengelolaan sampah daur ulang menjadi barang dengan nilai berbeda yang memiliki daya guna lain dan daya jual	muatan rencana	potensi sampah tinggi 2) Manajemen pengelolaan sampah dengan teknologi ramah lingkungan 3) Manajemen pengelolaan sampah menjadi barang dengan nilai manfaat berbeda	
12	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1) Pengembangan dan pengawasan regulasi mengenai pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang berisiko terhadap ekonomi, kesehatan dan lingkungan. 2) Pembinaan dan	Perbaiki rumusan kebijakan	1) Identifikasi kajian luasan dampak pencemaran di semua sektor 2) Penyusunan regulasi pengendalian dan pengawasan dampak pencemaran 3) Pengembangan pengelolaan limbah secara mandiri dan	

No	Program	Alternatif KRP	Muatan Rekomendasi	Rekomendasi	Terakomodir pada Misi RPJMD
		Pemberdayaan masyarakat dalam mengendalikan pencemaran dan		terpadu	
13	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan pengawasan terhadap potensipotensi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui 2) Peningkatan pengelolaan sumber daya alam berbasis teknologi ramah lingkungan 	Perbaiki rumusan kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Identifikasi kajian luasan lahan pengembangan konservasi sumber daya alam 2) Penyusunan regulasi mengenai pengendalian alih fungsi lahan 3) Pengembangan pengelolaan konservasi sumber daya alam berbasis teknologi ramah lingkungan 	3, 4
14	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelolaan cadangan sumber daya alam yang tepat dan ramah lingkungan 2) Pengelolaan cadangan sumber daya alam dengan mengikutsertakan peran masyarakat 3) Penggunaan sumber daya alam yang tepat 	Perbaiki rumusan kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Identifikasi kajian luasan area perlindungan dan konservasi sumber daya alam 2) Penyusunan regulasi mengenai pengendalian eksploitasi sumber daya alam 3) Pengembangan pengelolaan 	

No	Program	Alternatif KRP	Muatan Rekomendasi	Rekomendasi	Terakomodir pada Misi RPJMD
		dan berdaya guna		pemanfaatan energi alternatif	
15	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengawasan terhadap akses dan kualitas informasi terkait sumber daya alam dan lingkungan hidup 2) Penggunaan teknologi tepat dan efisien dalam mengelola informasi 3) Pengendalian terhadap kualitas data-data sumber daya alam dan lingkungan hidup 	Perbaiki muatan rencana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Identifikasi kajian kebutuhan informs sumber daya alam dan lingkungan hidup 2) Penyusunan regulasi mengenai pengendalian dan pengawasan terhadap kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan 3) Manajemen informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan teknologi yang efisien dan efektif 4) Memberikan fasilitas dan akses atas informasi 	3, 4
16	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelolaan dan pengawasan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan yang ramah lingkungan 2) Pengelolaan sistem 	Perbaiki rumusan kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Identifikasi kajian penyediaan bangunan dan fasilitas perhubungan 2) Identifikasi kajian luasan wilayah untuk pembangunan sarana 	4

No	Program	Alternatif KRP	Muatan Rekomendasi	Rekomendasi	Terakomodir pada Misi RPJMD
		<p>drainasi yang bersinergi dengan mekanisme sistem pembangunan sarana dan prasarana perhubungan</p> <p>3) Pembangunan fasilitas dan sarana perhubungan tidak mengancam tempat tinggal dan mata pencaharian masyarakat</p>		<p>dan fasilitas perhubungan</p> <p>3) Penyusunan regulasi mengenai pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan</p>	
17	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif	<p>1) Pengembangan usaha kecil berbasis green innovation</p> <p>2) Penyuluhan dan pembinaan usaha kecil berbasis green product</p> <p>3) Pengawasan dan pengelolaan limbah domestik</p>	Perbaiki muatan rencana	<p>1) Identifikasi kajian potensi sektor UKM</p> <p>2) Peningkatan iklim UKM melalui pendampingan intensif</p> <p>3) Pengembangan UKM yang berfokus pada green produk</p> <p>4) Penyusunan regulasi pengembangan UKM</p> <p>5) Pembinaan pelaku UKM dalam mengembangkan usaha berbasis green product</p> <p>6) Meningkatkan</p>	3

No	Program	Alternatif KRP	Muatan Rekomendasi	Rekomendasi	Terakomodir pada Misi RPJMD
				partisipasi angkatan kerjadan penyerapan tenaga kerja	
18	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1) Pengendalian dan pengawasan penggunaan sumber daya alam 2) Pengawasan dan pembinaan terkait pengelolaan limbah hasil usaha 3) Pengelolaan agrowisata dan agribisnis sebagai salah satu fokus keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah	Perbaiki rumusan kebijakan	1) Identifikasi kajian potensi pengembangan keunggulan UKM 2) Penyusunan regulasi mengenai pengawasan dan pengendalian kewirausahaan 3) Manajemen potensi agrowisata dan agribisnis sebagai keunggulan kompetitif UKM 4) Meningkatkan partisipasi angkatan kerjadan penyerapan tenaga kerja	3
19	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1) Pengelolaan dan pengawasan limbah hasil industri 2) Pengendalian dan pengawasan secara ketat terkait kebutuhan sumber daya alam bagi industri	Perbaiki rumusan kebijakan	1) Identifikasi kajian sektor UKM yang menyeluruh 2) Penyusunan regulasi mengenai pengendalian alih fungsi lahan dan sumber daya alam secara massif bagi UKM 3) Pengembangan sistem UKM yang terpadu dan	3

No	Program	Alternatif KRP	Muatan Rekomendasi	Rekomendasi	Terakomodir pada Misi RPJMD
		3) Penetapan pemanfaatan ruang pada klaster ekonomi serta kawasan yang ada disekitarnya, untuk menghindari terjadinya alih fungsi lahan yang tidak terkendali 4) Pengembangan industri ramah lingkungan dan berbasis agrobisnis		ramah lingkungan 4) Meningkatkan partisipasi angkatan kerjadan penyerapan tenaga kerja	
20	Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi	1) Pengelolaan promosi kerjasama investasi dengan memberdayakan masyarakat setempat 2) Pengembangan promosi dengan ide-ide kreatif yang ramah lingkungan 3) Pengendalian dan pengawasan syarat-syarat yang ramah lingkungan pada bentuk investasi baru 4) Peningkatan keahlian	Perbaiki rumusan kebijakan	1) Mengembangkan jaringan kerjasama dengan investor dan daerah sekitar 2) Identifikasi kajian luasan area pengembangan investasi 3) Penyusunan regulasi mengenai bentuk promosi dan kerjasama investasi 4) Memberikan pelatihan dan peningkatan keahlian sesuai dengan kriteria pengembangan	3

No	Program	Alternatif KRP	Muatan Rekomendasi	Rekomendasi	Terakomodir pada Misi RPJMD
		masyarakat agar sesuai kriteria dengan lahan pekerjaan		investasi 5) Pengembangan investasi berbasis alam	
21	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelolaan dan pengawasan regulasi yang diperketat agar memenuhi standar keamanan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat 2) Peningkatan realisasi investasi berbasis green development 3) Pengawasan dan pengendalian terhadap limbah yang dihasilkan 	Perbaiki muatan rencana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan jaringan kerja sama dengan investor, calon investor, dan daerah sekitar 2) Identifikasi kajian area investasi 3) Penyusunan regulasi terkait pengawasan dan pengendalian investasi terutama yang tidak ramah lingkungan 4) Memperketat penerapan kegiatan AMDAL dalam setiap penerapan investasi 5) Mengutamakan investasi berbasis green development dana lam 	3
22	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengendalian terhadap jumlah wisatawan yang masuk dengan menerapkan regulasi agar wisatawan ikut serta dalam melestarikan 	Perbaiki regulasi kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Identifikasi kajian pengembangan potensi pariwisata daerah 2) Penyusunan rencana pengembangan pariwisata berbasis alam 	3

No	Program	Alternatif KRP	Muatan Rekomendasi	Rekomendasi	Terakomodir pada Misi RPJMD
		lingkungan 2) Peningkatan tempat wisata alam dan tempat wisata yang berbasis lingkungan hidup 3) Mengembangkan potensi wisata local wisdom yang disinergikan dengan green development		3) Penyusunan regulasi terkait pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan 4) Mengikutsertakan masyarakat setempat dan budayanya sebagai ikon pariwisata 5) Menjalin kerjasama dengan investor asing dalam bidang pariwisata	
23	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1) Pengembangan dan peningkatan destinasi wisata alam 2) Pengelolaan wisata alam melalui pemberdayaan potensi sumber daya manusia masyarakat sekitar area wisata 3) Pengelolaan destinasi wisata melalui teknologi modern ramah lingkungan 4) Pengembangan sistem tata kota dan perhubungan yang optimal agar	Perbaiki materi program	1) Meningkatkan dan mengembangkan jaringan kerja sama dengan investor, calon investor, dan daerah sekitar terutama dengan investor asing 2) Identifikasi kajian area potensial pariwisata baru terutama pariwisata berbasis alam 3) Perencanaan manajemen pengelolaan destinasi wisata alam 4) Penyusunan regulasi mengenai alih fungsi	3

No	Program	Alternatif KRP	Muatan Rekomendasi	Rekomendasi	Terakomodir pada Misi RPJMD
		<p>meminimalisir masalah baru di bidang lain</p>		<p>lahan sekaligus pengendalian dan pengawasan destinasi pariwisata</p> <p>5) Melakukan kerja sama dengan antardinas yang terkait untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan dan berupaya mencegah terjadinya masalah</p> <p>6) Pelaksanaan pelatihan, peningkatan pendidikan dan keahlian bagi masyarakat</p> <p>7) Mengembangkan potensi local wisdom yang dipadukan dengan pola green development untuk pariwisata baru</p>	
24	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	<p>1) Pengendalian secara ketat alih fungsi lahan pertanian produktif untuk penggunaan selain untuk kegiatan pendukung pertanian.</p> <p>2) Pengembangan sistem</p>	Perbaiki muatan rencana	<p>1) Identifikasi kajian produksi pertanian dan perkebunan secara holistik</p> <p>2) Penyusunan regulasi tentnag perlindungan lahan pertanian</p>	3

No	Program	Alternatif KRP	Muatan Rekomendasi	Rekomendasi	Terakomodir pada Misi RPJMD
		<p>pertanian yang ramah lingkungan dan pertanian yang berkelanjutan (sustainable agriculture) Penggalakan sistem pertanian yang berbasis pada konservasi lahan.</p>		<p>3) Pengembangan sistem insentif untuk meningkatkan produksi pertanian dan mengandalikan alih fungsi lahan 4) Menjalin kerjasama dengan investor asing dalam bidang pertanian 5) Meningkatkan kapasitas produk unggulan daerah bidang agrikultur</p>	
25	Program Kerjasama Pembangunan	<p>1) Pengembangan sistem penataan wilayah yang tepat guna dan memperhatikan aspek lingkungan 2) Pelaksanaan kegiatan AMDAL di setiap kerjasama pembangunan 3) Pelaksanaan green development dan green technology dalam kerjasama</p>	Perbaiki muatan rencana	<p>1) Memperkuat jaringan kerjasama dengan daerah sekitar 2) Identifikasi kajian wilayah potensi pembangunan dan pemanfaatan lingkungan hidup strategis 3) Penyusunan regulasi terkait perubahan fungsi lahan</p>	4
26	Program Pengembangan	<p>1) Pengembangan manajemen teknologi</p>	Perbaiki materi	<p>1) Identifikasi kajian luasan area pertanian</p>	3

No	Program	Alternatif KRP	Muatan Rekomendasi	Rekomendasi	Terakomodir pada Misi RPJMD
	pertanian Organik	ramah lingkungan yang untuk sistem penanganan hama dan penyakit pada tanaman organik 2) Pembinaan dan pengawasan untuk petani organik meningkatkan pengetahuan pengelolaan pertanian organik 3) Mengembangkan manajemen pengelolaan paska panen terutama membuka potensi pasar baru	program	organik 2) Manajemen petani dan tanaman pra dan paska panen pertanian organik 3) Penyusunan regulasi mengenai pengembangan pertanian organik 4) Menjalin kerjasama dengan investor asing dalam bidang pertanian 5) Meningkatkan perdagangan hasil pertanian organik melalui promosi dan kerjasama antar daerah. 6) Meningkatkan perdagangan hasil pertanian organik	
27	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1) Pengendalian wilayah rawan bencana dengan sistem deteksi awal bencana 2) Pengemabnagan sistem hydrant di pemukiman padat penduduk dan industry secara	Perbaiki rumusan kebijakan	1) Identifikasi kajian luasan daerah rawan bencana 2) Penyusunan regulasi mengenai pembangunan bagi daerah rawan bencana 3) Pengembangan sarana dan prasarana	1, 4

No	Program	Alternatif KRP	Muatan Rekomendasi	Rekomendasi	Terakomodir pada Misi RPJMD
		<p>menyeluruh dan terpadu</p> <p>3) Pembangunan daerah tanggap bencana dengan tersedianya penampungan sementara dan logistik yang memperhatikan pada</p>		<p>penanggulangan daerah rawan bencana</p>	
28	<p>Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar</p>	<p>1) Pengembangan sistem penataan lahan yang tepat guna, berdaya guna, memperhatikan</p> <p>2) aspek lingkungan, dan berhasil guna bagi pembangunan berkelanjutan berbasis green development</p> <p>3) Pengendalian, pengawasan, dan pengembangan yang lebih ketat untuk sistem regulasi penetapan dan pembangunan kota menengah dan besar.</p> <p>4) Pengembangan sistem resapan air dan</p>	<p>Perbaiki materi program</p>	<p>1) Identifikasi kajian perencanaan wilayah perkotaan</p> <p>2) Penyusunan regulasi mengenai perencanaan wilayah kota kategori menengah dan besar</p> <p>3) Pengembangan mekanisme rencana dan pelaksanaan sistem resapan air dan limbah dengan teknologi ramah lingkungan</p>	4, 5

No	Program	Alternatif KRP	Muatan Rekomendasi	Rekomendasi	Terakomodir pada Misi RPJMD
		limbah melalui teknologi ramah lingkungan			
29	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengendalian dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan 2) Pembuatan regulasi yang ketat untuk pembangunan 3) Pengembangan daerah relokasi atau solusi pemukiman untuk masyarakat 4) Pemberdayaan potensi dan peran masyarakat dalam pembangunan 	Perbaiki muatan rencana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Identifikasi kajian wilayah luasan area potensi pembangunan 2) Penyusunan regulasi mengenai pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan 3) Melibatkan peran dan potensi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 4) Perencanaan area lahan hijau 	3, 5
30	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelolaan sumber daya alam melalui teknologi ramah lingkungan dan tepat guna 2) Pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan sumber daya alam terutama yang tidak dapat diperbaharui 	Perbaiki rumusan kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Identifikasi kajian kebutuhan prasarana wilayah dan sumber daya alam serta pemanfaatan lingkungan hidup strategis 2) Manajemen sistem teknologi pendukung prasarana 3) Penyusunan regulasi 	3, 4

No	Program	Alternatif KRP	Muatan Rekomendasi	Rekomendasi	Terakomodir pada Misi RPJMD
				pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	
31	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemantauan terhadap kualitas udara agar tetap berada pada batas kualitas nilai baku mutu udara ambien yang sehat 2) Pengendalian pencemaran udara dari kendaraan bermotor dan industri. 3) Pengembangan dan penerapan sistem insentif dan disinsentif untuk industry dan kendaraan bebas polusi 	Perbaiki muatan rencana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Identifikasi kualitas udara melalui sampel udara yang ada di pasar 2) Pengendalian kualitas udara melalui berdasarkan baku mutu 3) Peningkatan pengendalian melalui penerapan bentuk apresiasi terhadap indutsri dan kendaraan bebas polusi 	3
32	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya kerjasama dengan beberapa pihak untuk mengelola RTH 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang mengelola RTH 3) Mendorong adanya partisipasi masyarakat 	Perbaiki muatan rencana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Identifikasi kajian area potensi RTH 2) Manajemen pengelolaan RTH melalui peningkatan kualitas SDM 3) Manajemen pengelolaan partisipasi masyarakat dalam 	3

No	Program	Alternatif KRP	Muatan Rekomendasi	Rekomendasi	Terakomodir pada Misi RPJMD
		dalam mengelola RTH		pengelolaan RTH	

Sumber: Kajian KLHS RPJMD Kota Batu 2018

4.2.6. Isu-Isu Strategis Kota Batu

Isu strategis merupakan kondisi atau permasalahan daerah bersifat mendesak yang harus diperhatikan atau di utamakan dalam merancang pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Isu strategis ini disusun melalui permasalahan pembangunan yang ada di Kota Batu.

- a. Menjaga stabilitas kondisi sosial politik, kerukunan antar umat beragama, pelestarian budaya dan nilai kearifan lokal.

Menciptakan keadaan stabilitas sosial politik merupakan tindakan yang wajib dilaksanakan pemerintah dalam rangka pembangunan daerah dan sebagai wujud menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara yang terdapat dalam pembukaan yakni mensejahterakan rakyat. Dengan terjaganya stabilitas sosial politik, masyarakat dapat merasakan perlindungan yang diberikan pemerintah baik dalam aksi politik maupun sosial.

Tantangan yang dihadapi dalam menjaga stabilitas politik yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam

berbagai bahaya, baik bahaya terhadap terorisme maupun bahaya kriminalitas lainnya. Ancaman dari tindak terorisme maupun kriminalitas seperti pencurian, narkoba, perjudian, penipuan dan lain sebagainya telah berpotensi mengganggu keamanan lingkungan masyarakat setempat dan mengganggu stabilitas politik yang dapat menghambat pembangunan daerah Kota Batu.

Masalah lainnya yaitu terkait stabilitas sosial. Stabilitas sosial juga merupakan salah satu kondisi yang harus dijaga dan diperhatikan pemerintah dalam rangka pembangunan daerah. Stabilitas sosial mencakup nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat itu sendiri seperti menumbuhkan rasa percaya dan solidaritas sesama warga berlandaskan kebudayaan lokal dan toleransi. Sehingga akan menciptakan keadaan nyaman serta aman juga menciptakan kerukunan. Stabilitas sosial yang seperti ini akan turut memberikan dampak terhadap turunnya angka kriminalitas di dalam kelompok masyarakat. Karena dengan meningkatkan rasa toleransi dan gotong royong dengan pendekatan kebudayaan lokal akan melahirkan masyarakat yang rukun dan bahagia dengan memiliki rasa percaya satu dengan lainnya.

Peran pemerintah selanjutnya yaitu menjaga keamanan dan ketentraman warga dalam menjauhkan dari berbagai ancaman bencana, baik bencana alam maupun bencana kebakaran. Tingginya angka bencana alam dan kebakaran yang terjadi di Kota Batu dalam beberapa tahun terakhir menuntut kesiapsiagaan serta ketanggapan pemerintah dalam membenahi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar terhindar dari ancaman kerusakan lingkungan maupun kematian.

- b. Peningkatan kualitas daya saing SDM daerah, pengendalian kuantitas penduduk dan perluasan lapangan kerja.

Persoalan mendasar yang menjadi perhatian pemerintah adalah kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan kualitas daya saing daerah rendah. Kemiskinan juga menjadi penghambat pembangunan daerah. Oleh karena itu, dalam rangka penanggulangan kemiskinan maka perlu beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu *pertama*; kualitas sumber daya manusia menjadi tolak ukur yang penting dan

merupakan modal utama pembangunan. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan.

Pembangunan sektor pendidikan dapat dilakukan melalui peningkatan akses layanan seperti sarana dan prasarana pendidikan baik berupa pendidikan formal maupun nonformal. Peningkatan kualitas tenaga pendidik serta memberikan kebijakan khusus terhadap orang miskin sehingga keseluruhan masyarakat dapat menerima pendidikan secara merata. Sedangkan dalam pembangunan kualitas kesehatan dapat melalui kualitas kelembagaan dan tata kelola layanan kesehatan dan kualitas tenaga medis yang melayani setiap warga. Kemudian menyediakan akses untuk masyarakat dapat dengan mudah menjangkau layanan kesehatan serta memberikan perhatian khusus terhadap masyarakat miskin agar mendapatkan layanan kesehatan secara merata.

Kedua adalah pemberdayaan kepemudaan dan kesetaraan gender. Pendidikan lebih lanjut seperti perhatian khusus dalam membina pemuda-pemudi diperlukan dalam menunjang produktivitas sebagai tenaga kerja serta memperhatikan kesetaraan gender. Mengembangkan minat bakat kepemudaan dan

kesetaraan gender dapat meningkatkan potensi masyarakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

Ketiga adalah peran pemerintah yang diperlukan masyarakat dalam memperluas lapangan kerja untuk memfasilitasi masyarakat-masyarakat yang telah dibina sehingga menjadi produktif dan berdaya saing dalam mewujudkan pembangunan. Dalam rangka membantu mewujudkan peran ini, diperlukan keberpihakan pada usaha-usaha mikro kecil dan menengah untuk penyediaan modal kerja bagi pemuda yang telah dibina dan diberikan layanan untuk peningkatan kualitas daya saing sehingga mereka mampu menghasilkan pendapatan dan pada akhirnya menaikkan mereka dari garis kemiskinan.

- c. Peningkatan daya saing perekonomian daerah berwawasan lingkungan berbasis ciri khas dan potensi unggulan daerah.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah, salah satu yang perlu diperhatikan adalah peningkatan daya saing perekonomian daerah. Hal ini merupakan respon untuk mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah di Kota Batu yaitu dengan

membangun desa mandiri. Membangun desa mandiri berdasarkan wawasan lingkungan dan ciri khas potensi unggulan daerah. Namun terdapat beberapa yang perlu diperhatikan pemerintah dalam upaya peningkatan daya saing berdasarkan potensi unggulan daerah, yakni:

Pertama, meningkatkan kontribusi potensi unggulan daerah terhadap PDRB. Potensi unggulan daerah seperti UMKM, Pertanian, dan Pariwisata menjadi perhatian utama dalam meningkatkan perekonomian daerah. Meskipun ketiga sektor ini merupakan penyumbang pdrb yang terbesar dari sektor lainnya, akan tetapi perlu peran pemerintah yang lebih dalam meningkatkan usaha sektor unggulan. Memberikan akses yang nyaman dan fasilitas yang lengkap terhadap tempat-tempat wisata yang ada sehingga menaikkan jumlah kunjungan nasional maupun internasional. Kemudian memperhatikan produk-produk pertanian yang berkurang jumlah produksinya di tahun 2016 begitu juga untuk usaha yang mikro agar dapat lebih merata dan lebih aktif di seluruh wilayah Kota Batu serta meningkatnya produk yang dihasilkan.

Kedua, dalam mengembangkan perekonomian daerah melalui potensi unggulan Kota Batu, perlu adanya

pengawasan dan kepedulian terhadap dampak pencemaran lingkungan. Banyaknya pencemaran lingkungan yang terjadi di Kota Batu terjadi akibat pembangunan tempat hiburan maupun wisata, sehingga diperlukan evaluasi dan pengendalian untuk penanggulangan pencemaran seperti sumber air.

- d. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berorientasi pada konsep hijau.

Pembangunan daerah belum optimal apabila ketersediaan infrastruktur belum memadai. Infrastruktur menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Kualitas infrastruktur yang baik menjadi tolak ukur dalam penentu suatu daerah dinyatakan berhasil. Akan tetapi di Kota Batu masih terdapatnya kualitas infrastruktur yang rendah dan perlu peningkatan, yakni:

Pertama, Masih adanya jaringan jalan yang dalam kondisi kurang baik dan ketersediaan jaringan telekomunikasi informatika yang belum merata. Oleh karena itu perlu peningkatan kualitas serta kuantitas terhadap jaringan jalan dan jaringan telekomunikasi informatika.

Kedua, Perkembangan jaman menuju modernisasi menuntut daerah di Indonesia mencapai taraf internasional yang kompetitif. Oleh karena itu, Kota Batu perlu melakukan pembangunan infrastruktur inovasi teknologi. Dengan penggunaan dan pencapaian teknologi terkini, diharapkan dapat membangun desa-desa mandiri. oleh karena itu dibutuhkan sarana prasarana, kelembagaan, sumber daya manusia serta produk hukum yang mengatur tata laksana untuk mendukung pencapaian desa mandiri melalui inovasi teknologi.

Ketiga, dalam rangka mewujudkan kota maupun desa cerdas, perlu adanya peningkatan kualitas lingkungan dan pemukiman yang harus dilakukan dengan cara revitalisasi atau perbaikan lingkungan. Penataan lingkungan pemukiman guna menjunjang kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan sehat.

- e. Pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pemerintah harus meningkatkan pelayanan publik, yakni lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik. Oleh karena itu, dalam mendukung terwujudnya

kualitas pelayanan yang baik, pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi yang berfokus kepada kelembagaan dan aparatur dengan memegang prinsip *good governance*.

Peningkatan kelembagaan dan aparatur pemerintah dalam melayani, berpegang teguh pada prinsip *good governance* dapat menjadikan birokrat lebih akuntabel dan transparansi sehingga tercapainya kualitas dokumen perencanaan dan opini WTP dari kinerja aparatur. Kemudian perlu ketegasan terhadap produk hukum dan meningkatkan kapasitas aparatur dalam rangka mewujudkan kinerja birokrasi berbasis teknologi (*e-governance*).

4.2.7. Mapping Isu-Isu Strategis Kota Batu dalam Misi Pembangunan

Isu-isu strategis merupakan suatu tantangan yang timbul dari berbagai masalah yang ada untuk dipecahkan solusinya oleh pemerintah daerah melalui pembangunan. Dalam menjawab isu-isu strategis tersebut akan di sinkronkan dengan misi pembangunan. Sinkronisasi tersebut adalah seperti tabel di bawah ini:

Tabel 4.15
Mapping Isu-Isu Strategis Kota Batu dalam Misi Pembangunan
Jangka Menengah

No.	Isu Strategis	Misi RPJMD 2017-2022
1.	Menjaga stabilitas kondisi sosial politik, kerukunan antar umat beragama, pelestarian budaya dan nilai kearifan lokal.	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Berlandaskan Nilai Nilai Keagamaan dan Kearifan Budaya Lokal
2.	Peningkatan kualitas daya saing SDM daerah, pengendalian kuantitas penduduk dan perluasan lapangan kerja.	Meningkatkan Pembangunan Kualitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia
3.	Peningkatan daya saing perekonomian daerah berwawasan lingkungan berbasis ciri khas dan potensi unggulan daerah.	Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri Berbasis Agrowisata
4.	Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berorientasi pada konsep hijau.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Perdesaan Yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan
5.	Pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Profesional



BAB 5

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5. 1. Visi Pembangunan Daerah

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada pemilihan kepala daerah (PILKADA) sebagai suatu komitmen atau janji kepada masyarakat. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang daerah. Berbagai isu strategis di Kota Batu diantaranya seperti pengembangan potensi unggulan untuk meningkatkan daya saing daerah, dan penguatan karakter lokal menjadi isu strategis yang mendorong terciptanya visi Kepala Daerah. Maka Visi Kota Batu untuk periode RPJMD 2017-2022 adalah sebagai berikut:

**“Desa Berdaya Kota Berjaya Terwujudnya Kota Batu
Sebagai Sentra Agro Wisata Internasional Yang
Berkarakter, Berdaya Saing Dan Sejahtera”**

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan

daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Melalui visi pembangunan kota Batu selama lima tahun diharapkan seluruh *stakeholder* di Kota Batu secara bersama-sama mengoptimalkan kapasitasnya untuk terwujudnya Kota Batu sebagai sebagai sentra agro wisata internasional yang berkarakter, berdaya saing dan sejahtera.

Visi pembangunan yang tersebut memiliki makna yang mendalam dan tujuan yang besar, perumusan dan penjelasan terhadap visi Kota Batu diatas menghasilkan pilar-pilar visi yang dijelaskan pengertiannya sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 5.1
Perumusan Penjelasan Visi Kota Batu 2017-2022

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
DESA BERDAYA KOTA BERJAYA TERWUJUDNYA KOTA BATU SEBAGAI SENTRA AGRO WISATA INTERNASIONAL YANG BERKARAKTER, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA	Desa Berdaya Kota Berjaya	Kemandirian dan kemajuan Desa adalah pondasi yang kokoh untuk bangunan kemakmuran dan kesejahteraan Kota Batu, pembangunan Kota Batu diarahkan pada pemerataan pembangunan yang ada di desa-desa. Kota Batu memiliki 19 Desa dan 5 Kelurahan, setiap desa dan kelurahan memilki potensi unggulan yang berkontribusi besar terhadap berjayanya kota Batu. Oleh karena itu arah pembangunan Kota Batu selama lima tahun kedepan akan dikuatkan

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		<p>dan diberdayakan seluruh desa dan kelurahan yang pada muaranya akan menjadikan Kota Batu yang berjaya.</p>
	<p>Mewujudkan Kota Batu sebagai Sentra Agro Wisata Internasional</p>	<p>Secara geografis Kota Batu memiliki karakteristik kondisi geografis yang mendukung kepariwisataan dan pertanian. Berbagai wisata yang ada di Kota Batu terbentuk secara alami menjadi potensi unggulan Kota Batu. Kota Batu juga memiliki potensi sektor pertanian yang terdiri dari sayur mayur, tanaman hias, dan buah buahan yang dapat tumbuh dengan baik pada wilayah yang beriklim sejuk seperti di Kota Batu. Selama lima tahun mendatang pembangunan di Kota Batu akan diarahkan pada sinergitas pembangunan pariwisata dengan pembangunan pertanian yang berwawasan Lingkungan memiliki produk berstandar kualitas internasional.</p>
	<p>Mewujudkan Kota Batu sebagai Sentra Agro</p>	<p>Berbagai potensi sumberdaya alam yang melimpah di Kota Batu akan berkembang dan memiliki daya saing</p>

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Wisata Internasional yang Berkarakter		daerah yang tinggi jika dikembangkan sejalan dengan karakteristik keunggulan setiap desa. Pemerintah Kota Batu dalam lima tahun kedepan akan melakukan pembangunan berbasis sektor unggulan daerah dan tetap mempertahankan ciri khas budaya, sosial, dan pesona alam Kota Batu.
Mewujudkan Kota Batu sebagai Sentra Agro Wisata Internasional yang Berdaya Saing		Pembangunan Kota Batu dengan fokus utama pada potensi unggulan daerah pada muaranya akan mewujudkan Kota Batu memiliki daya saing yang unggul di Bidang Sumber Daya Manusia, Pertanian, Pariwisata, dan UMKM, keunggulan ini akan berdampak pada kemandirian dan kemajuan kota.
Mewujudkan Kota Batu sebagai Sentra Agro Wisata Internasional yang Sejahtera		Pembangunan Kota Batu selama lima tahun kedepan diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Kota Batu yang sejahtera. Kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya berdimensi material atau jasmani, tetapi juga spiritual atau rohani, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif, dalam tata kehidupan yang aman dan tenteram, rukun dan damai.

5. 2. Misi Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu tahun 2017-2022 berorientasi pada pembangunan sektor agro wisata yang berkarakter serta berdaya saing tingkat internasional sebagai upaya mewujudkan masyarakat Kota Batu yang sejahtera. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi dalam dokumen RPJMD yang dikembangkan telah memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi Kota Batu 2017-2022 disusun untuk memperjelas yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi periode 2017-2022. Sebagai upaya mewujudkan visi pembangunan

daerah Kota Batu, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Batu 2017-2022 sebagai berikut:

5.2.1 Misi 1: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Berlandaskan Nilai Nilai Keagamaan dan Kearifan Budaya Lokal.

Kehidupan masyarakat yang rukun, harmonis, dan berbudaya dengan berbasis pada kearifan budaya lokal menjadi pondasi dasar dan menjadi modal utama didalam melakukan pembangunan kota. Masyarakat yang rukun dan harmoni juga menjadi bagian dari wujud kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan dari sebuah pembangunan. Kebijakan-kebijakan strategis sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah didalam mewujudkan masyarakat yang rukun dan harmonis dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti meningkatkan modal sosial masyarakat, meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah serta pemerintah daerah juga senantiasa hadir didalam melindungi masyarakat dari berbagai ancaman bahaya seperti ancaman bencana alam dan ancaman bahaya kebakaran.

5.2.2 Meningkatkan Pembangunan Kualitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia

Sumberdaya Manusia adalah potensi utama sebuah kota, keberhasilan pembangunan kota dapat dilihat dari kapasitas sumberdaya manusianya yang baik dan berdaya saing. Pembangunan sumberdaya manusia juga merupakan dari investasi masa depan dimana penguatan kapasitas SDM yang dilakukan saat ini mampu memberikan kontribusi positif secara berkelanjutan pada pembangunan masa depan. Kebijakan-kebijakan strategis dalam pembangunan SDM yang utuh dapat dilakukan melalui berbagai aspek penting seperti meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan formal dan informal, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan perlindungan perempuan dan anak, meningkatkan pelayanan sosial masyarakat, serta meningkatkan partisipasi angkatan kerja, dan penyerapan tenaga kerja. Keberhasilan sebuah pembangunan SDM dapat dilihat dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM), meningkatnya indeks keadilan dan kesetaraan gender (IKKG), Minat Baca Masyarakat serta Tingkat Pengangguran Terbuka.

5.2.3 Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri Berbasis Agrowisata

Selain potensi SDM, Kota Batu juga memiliki sumberdaya alam yang melimpah. Secara geografis Kota Batu memiliki karakteristik kondisi geografis yang mendukung kepariwisataan dan pertanian. Berbagai wisata yang ada di Kota Batu terbentuk secara alami menjadi potensi unggulan Kota Batu. Kota Batu juga memiliki potensi sektor pertanian yang terdiri dari sayur mayur, tanaman hias, dan buah buahan yang dapat tumbuh dengan baik pada wilayah yang beriklim sejuk seperti di Kota Batu. Potensi alam yang melimpah dan berkarakteristik di Kota Batu harus dapat mewujudkan perekonomian daerah yang progresif, mandiri dan berwawasan lingkungan. Kebijakan-kebijakan strategis didalam mewujudkan daya saing perekonomian daerah dilakukan melalui peningkatkan pemberdayaan dan peran desa terhadap perekonomian, meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian, meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata, meningkatkan jumlah desa wisata yang terbangun dengan status maju, meningkatkan daya saing

koperasi, usaha mikro, industri kecil dan menengah, serta meningkatkan iklim investasi yang kondusif.

5.2.4 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Perdesaan Yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan

Keunggulan potensi sumberdaya alam di Kota Batu pada bidang pariwisata, pertanian, perdagangan, UMKM dan selainnya, tidaklah bernilai ekonomis tinggi serta berjalan dengan baik tanpa didukung oleh infrastruktur daerah yang berkualitas dan terintegrasi. Hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur menjadi sentra dalam pengembangan ekonomi suatu daerah. Dari dasar tersebut maka Kota Batu dalam 5 (lima) tahun kedepan akan meningkatkan pembangunan infrastrukturnya dengan pola yang terintegratif dengan pembangunan sektor-sektor unggulan ekonomi daerahnya, sehingga efisiensi dan efektivitas pembangunan akan terlaksana dengan baik. Kebijakan-kebijakan strategis sebagai upaya mencapai misi tersebut diantaranya melalui peningkatan pelayanan kepuasan infrastruktur, meningkatkan kepatuhan pembangunan sesuai dengan RTRW dan peningkatan indeks desa membangun.

5.2.5 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Profesional

Dalam rangka untuk mewujudkan pelayanan prima di Kota Batu, maka birokrasi harus menjalankan fungsinya sebagai pelayan bagi masyarakat Kota Batu. Pembangunan pemerintahan harus dilaksanakan secara bersih dan transparan serta mewujudkan dari prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah Kota Batu melakukan kebijakan-kebijakan strategis meliputi meningkatkan tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

5. 3. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi yang telah diuraikan diatas maka rumusan tujuan dan sasaran sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

5.3.1 Sebagai upaya dalam mencapai misi ke-1 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Berlandaskan Nilai Nilai Keagamaan dan Kearifan Budaya Lokal, maka ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

a) Tujuan

Meningkatkan derajat kualitas hidup sosial masyarakat guna mewujudkan Batu Kota Nyaman, dengan indikator Indeks Modal Sosial

b) Sasaran

1) Meningkatnya stabilitas kondisi sosial, ketertiban dan ketentraman wilayah, dengan indikator meliputi :

1. Persentase Penyelesaian potensi kerusuhan bermotif SARA;
2. Persentase Penyelesaian Potensi Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat;
3. Persentase penurunan jumlah PMKS, dan;
4. Tingkat Pengangguran Terbuka

2) Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah dengan indikator Persentase Seni Budaya Lokal Yang Lestari

5.3.2 Sebagai upaya dalam mencapai misi ke-2 Meningkatkan Pembangunan Kualitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia, maka ditetapkan tujuan sebagai berikut:

a) Tujuan

Meningkatkan penguatan kapasitas dan kualitas SDM guna mewujudkan Batu Kota Produktif, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia

b) Sasaran

Meningkatnya Derajat Kesejahteraan dan Kualitas SDM dengan indikator:

1. Indeks Pendidikan;
2. Persentase pemuda pelopor berprestasi;
3. Indeks Minat Baca Daerah;
4. Angka Usia Harapan Hidup
5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

5.3.3 Sebagai upaya didalam mencapai misi ke-3 Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri Berbasis Agrowisata, maka ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

a) Tujuan

Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah yang inklusif, berkualitas berbasis pada sector unggulan guna mewujudkan Batu Kota AgroWisata dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini

b) Sasaran

1) Meningkatnya aktivitas perekonomian sektor unggulan daerah yang inklusif berkelanjutan, dengan indikator:

1. Pertumbuhan PDRB kategori Jasa Akomodasi Pariwisata;
2. Pertumbuhan PDRB kategori Pertanian, dan Perikanan;
3. Pertumbuhan PDRB kategori Perdagangan dan Industri Pengolahan, dan;
4. Nilai Investasi

2) Meningkatnya kemandirian pangan daerah, dengan indikator Tingkat Kemandirian Pangan Daerah

5.3.4 Sebagai upaya dalam mencapai misi ke-4 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Perdesaan Yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan, maka ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

a) Tujuan

Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, merata dan berkelanjutan berbasis kemandirian desa dalam rangka mewujudkan Batu Kota Berkarakter dengan indikator Indeks

Pembangunan Infrastruktur, Indeks Desa Membangun dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

b) Sasaran

1) Meningkatnya penataan ruang dan infrastruktur kota yang terpadu, berkelanjutan dan berketahanan bencana, dengan indikator:

1. Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan
2. Indeks Kualitas Infrastruktur Irigasi
3. Persentase kesesuaian pembangunan wilayah yang sesuai dengan RTRW
4. Indeks Kualitas Permukiman
5. Tingkat Pelayanan Jalan
6. Indeks Resiko Bencana
7. Tingkat Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran

2) Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa, dengan indikator Presentase Desa Maju - Mandiri

3) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, dengan indikator

1. Indeks Kualitas Air

2. Indeks Kualitas Udara

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

5.3.5 mencapai misi ke-5 meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel berorientasi pada pelayanan publik yang professional, maka ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

a) Tujuan

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel guna mewujudkan Batu Kota Berintegritas, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi

b) Sasaran

1) Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan indikator:

1. Opini BPK;

2. Predikat/nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP);

3. Predikat/Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);

4. Indeks Profesionalitas ASN; dan

5. Kategori/Nilai Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator Skala Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintah meliputi:

1. Pelayanan Puskesmas – Dinas Kesehatan;
2. Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Pelayanan Pendidikan – Dinas Pendidikan
4. Pelayanan Perizinan – Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja;
5. Pelayanan Pajak dan Pendapatan Daerah – Badan Keuangan Daerah
6. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan – Kecamatan

Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Konsistensi penjabaran Visi dan Misi kedalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Wali Kota terpilih. Berangkat dari tuntutan

tersebut, maka dapat dijabarkan konsistensi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut kedalam matriks berikut ini:

Tabel 5.2
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Batu

VISI: DESA BERDAYA KOTA BERJAYA TERWUJUDNYA KOTA BATU SEBAGAI SENTRA AGRO WISATA INTERNASIONAL YANG BERKARAKTER, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA

MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Berlandaskan Nilai Nilai Keagamaan dan Kearifan Budaya Lokal

TAGLINE: BATU KOTA NYAMAN

URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN		KONDISI AWAL 2017	KONDISI AKHIR 2022
			DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN		
Meningkatkan derajat kualitas hidup sosial masyarakat guna mewujudkan Batu Kota Nyaman	1 Indeks Modal Sosial	Kategori Nilai Indeks	Modal Sosial diukur melalui survei dengan hasil skala likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tertentu tentang fenomena sosial meliputi kondisi kerukunan SARA, keamanan dan ketertiban wilayah, partisipasi dan kesetaraan sosial masyarakat pada suatu wilayah	kuisoneer survei	NA	TINGGI

SASARAN															
NO	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN		KONDISI AWAL 2017	TARGET TAHUNAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN		2018	2019	2020	2021	2022	STRATEGI	PROGRAM	OPD PENGAMPU	
01	Meningkatnya stabilitas kondisi sosial, ketertiban dan ketentraman wilayah	1	Persentase Penyelesaian potensi kerusuhan bermotif SARA	persen		(jumlah potensi konflik bermotif SARA yang teridentifikasi dan diselesaikan) / (jumlah potensi konflik bermotif SARA teridentifikasi) X 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama melalui berbagai forum dialog sosial maupun ekonomi	Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial	Kantor KesbangPol
													Meningkatkan fasilitas layanan keagamaan dan sosial masyarakat melalui bantuan dan koordinasi antara pemangku kepentingan dan pemerintah.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	
		2	Persentase Penyelesaian Potensi Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	persen		(Jumlah Potensi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat teridentifikasi dan diselesaikan)/(Jumlah Potensi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat teridentifikasi) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Menjaga Keamanan dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan	SatPol PP dan Linmas
													Peningkatan kesadaran hukum masyarakat		

		3	Persentase penurunan jumlah PMKS	persentase		Jumlah PMKS yang diturunkan dibagi total Jumlah PMKS X 100 persen	N/A	16 %	16%	16%	16%	16%	Peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata dengan mendekatkan jangkauan layanan kepada masyarakat dan keberdayaan partisipatoris	Program Perlindungan, Bantuan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
													Pemenuhan layanan Dasar masyarakat miskin	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	
		4	Tingkat Pengangguran Terbuka	persentase	Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja dibagi Jumlah penduduk angkatan kerja X 100%	(Jumlah Pengangguran) / (Jumlah Angkatan Kerja) x 100%	3,75%	2,25 %	2,15%	2,05%	1,95%	1,50%	Memperluas kesempatan dan penyediaan lapangan kerja di pedesaan & perkotaan.	Program Perluasan dan Penempatan Kerja	Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
													Meningkatkan kualitas, produktivitas kompetensi, ketrampilan kerja.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
02	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	5	Persentase Seni Budaya Lokal Yang Lestari	persen		(Jumlah benda situs, kawasan cagar budaya dan atau budaya lokal daerah yang dilestarikan)/(Jumlah benda situs , kawasan cagar budaya dan atau budaya lokal daerah) x 100%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	Meningkatkan perlindungan, pengembangan , pemanfaatan kebudayaan	Program Pengembangan Nilai dan Pengelolaan Keragaman Budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

MISI 2 : Meningkatkan Pembangunan Kualitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia

TAGLINE : BATU KOTA PRODUKTIF

TUJUAN

URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN		KONDISI AWAL 2017	KONDISI AKHIR 2022
			DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN		
Meningkatkan penguatan kapasitas dan kualitas SDM guna mewujudkan Batu Kota Produktif	Indeks Pembangunan Manusia	indeks angka	merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu usia hidup (longetivity), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent living)	$IPM = \sqrt[3]{X_{(1)} \times X_{(2)} \times X_{(3)}}$ Keterangan: X(1) = indeks harapan hidup X(2) = indeks pendidikan X(3) = indeks pengeluaran	73,57	76,5

SASARAN														
NO	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN		KONDISI AWAL 2017	TARGET TAHUNAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN		2018	2019	2020	2021	2022	STRATEGI	PROGRAM	OPD PENGAMPU
01	Meningkatnya Derajat Kesejahteraan dan Kualitas SDM	1 Indeks Pendidikan	poin angka		Indeks dari hasil kombinasi antara harapan lama sekolah (EYS) dan rata-rata lama sekolah (MYS)	0,67	0,68	0,69	0,70	0,71	0,72	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan

												Peningkatan kualitas pendidik dan sarana pendukung pendidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
												Peningkatan Manajemen dan layanan pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		
		2	Persentase pemuda pelopor berprestasi	persentase		Jumlah Pemuda pelopor/berprestasi dibagi Jumlah pemuda yang difasilitasi X 100%	N/A	75%	75%	75%	75%	75%	Peningkatan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga	Program Peningkatan Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga	
		3	Indeks Minat Baca Daerah	persen	Rasio Pemustaka Daerah dibandingkan dengan Jumlah penduduk	Pemustaka (pengunjung perpustakaan) / jumlah penduduk	36%	48%	55%	62%	69%	73%	Peningkatan kualitas literasi masyarakat melalui inisiasi budaya membaca gerakan kunjung perpustakaan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		4	Angka Usia Harapan Hidup	tahun	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Berdasarkan angka kematian menurut umur (Age Specific Death Rate /ASDR)	72,6 tahun	72,65 tahun	72,75 tahun	72,85 tahun	72,85 tahun	72,95 tahun	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
												Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Program Peningkatan Usia Harapan Hidup		

	5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	persentase	(IDG merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang- bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.	1/3 (Ipar + IDM + linc-dist) Ipar IDM linc-dis = Indeks Keterwakilan di parlemen = Indeks pengambilan keputusan = Indeks distribusi pendapatan	70,02%	73,66%	74,60%	75,75%	76,50%	77,75%	Memperkuat perlindungan Perempuan dan Anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB)
--	---	----------------------------------	------------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	---	---

MISI 3 : Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri Berbasis Agrowisata**TAGLINE : BATU KOTA AGROWISATA**

URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN		KONDISI AWAL 2017	KONDISI AKHIR 2022
			DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN		
Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah yang inklusif, berkualitas berbasis pada sektor unggulan guna mewujudkan Batu Kota AgroWisata	1 Laju Pertumbuhan PDRB	persen	Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). $G = (PDRB1 - PDRB0) / PDRB0 \times 100 \%$ G = Laju pertumbuhan ekonomi; PDRB1 = PDRB ADHK pada satu tahun; PDRB0 = PDRB ADHK pada tahun sebelumnya	6,61	6,85

2 Indeks Gini

indeks angka

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n P_i(F_i + F_{i-1})$$

dimana,
 GR : Koefisien Gini (Gini Ratio)
 Pi : frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i
 Fi : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i
 Fi-1 : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

0,36

0,29

SASARAN															
NO	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN		KONDISI AWAL 2017	TARGET TAHUNAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN		2018	2019	2020	2021	2022	STRATEGI	PROGRAM	OPD PENGAMPU	
01	Meningkatnya aktivitas perekonomian sektor unggulan daerah yang inklusif berkelanjutan	1	Pertumbuhan PDRB kategori Jasa Akomodasi Pariwisata	persen	Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan PDRB industri pariwisata (jasa, akomodasi dan makanan minuman)	((Jumlah PDRB kategori Jasa Akomodasi, Makanan dan Minuman tahun ke - n) - (Jumlah PDRB kategori Jasa Akomodasi, Makanan dan Minuman tahun ke n-1)) / (Jumlah PDRB kategori Jasa Akomodasi, Makanan dan Minuman tahun ke n-1) x 100%	12,10%	12,50%	11,50%	12,75%	13,00%	13,50%	Mengoptimalkan kinerja sektor Dominan dengan fokus ekonomi berkelanjutan	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataa n	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		2	Pertumbuhan PDRB kategori Pertanian, dan Perikanan	persen	Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian dan Perikanan	((Jumlah PDRB kategori Pertanian dan Perikanan tahun ke - n) - (Jumlah PDRB kategori Pertanian dan Perikanan tahun ke n-1)) / (Jumlah PDRB kategori Pertanian dan Perikanan tahun ke n-1) x 100%	6,56%	6,66%	6,76%	6,86%	6,96%	7,06%	Penumbuhan pusat pertumbuhan baru untuk pemerataan ekonomi wilayah melalui pengembangan Destinasi Desa Wisata yang terintegrasi dengan sektor pertanian dan UKM	Program Pengembangan Tanaman Pangan dan Perkebunan; Program Pengembangan Tanaman Hortikultura	Dinas Pertanian
													Meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan		
													Meningkatkan kualitas destinasi dan investasi pariwisata		

	3	Pertumbuhan PDRB kategori Perdagangan dan Industri Pengolahan	persen	Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan PDRB Sektor UKM dalam bidang perdagangan dan industri pengolahan	$\frac{(\text{Jumlah PDRB kategori Perdagangan dan Industri Pengolahan tahun ke } - n) - (\text{Jumlah PDRB kategori Perdagangan dan Industri Pengolahan tahun ke } - n - 1)}{(\text{Jumlah PDRB kategori Perdagangan dan Industri Pengolahan tahun ke } - n - 1)} \times 100\%$	12,30%	12,50%	12,75%	13%	13,25%	13,50 %	Mengembangkan sektor UMKM, Koperasi dan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan untuk mendukung sektor pariwisata	Program Pengembangan Usaha Mikro, Industri Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan
	4	Nilai Investasi Daerah	Trilyun Rupiah	Jumlah nilai investasi investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui oleh Perangkat Daerah yang menangan Penanaman Modal.	Total akumulatif Angka Realisasi Investasi Permodalan Asing (PMA) dan Permodalan Dalam Negeri (PMDN) pada tahun ke-n dibanding tahun dasar	3,68	3,75	4,25	4,75	5,25	5,75	Peningkatkan iklim investasi dan usaha yang kondusif.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja
													Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	

02	Meningkatnya kemandirian pangan daerah	5	Tingkat Kemandirian pangan daerah	persentase	tingkat kemandirian pangan diukur dari nilai Skor PPH Ketersediaan dan Skor PPH Konsumsi, dengan penjelasan <50 kurang; 50-75 = cukup; >75 baik	% KMP = (Nilai Skor PPH Ketersediaan + Skor PPH Konsumsi) dibagi 2 dikali 100 persen	81,19%	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %	Peningkatan ketersediaan dan penganekaragaman konsumsi pangan daerah	Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
														Program Konsumsi dan Keamanan Pangan	

MISI 4 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Perdesaan Yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan

TAGLINE : BATU KOTA BERKARAKTER

TUJUAN

PENJELASAN

URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	KONDISI AWAL 2017	KONDISI AKHIR 2022
Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, merata dan berkelanjutan berbasis kemandirian desa dalam rangka mewujudkan Batu Kota Berkarakter	1 Indeks Pembangunan Infrastruktur	indeks angka	indeks pembangunan infrastruktur adalah komposit dari hasil - hasil pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung daya saing perekonomian daerah dalam kondisi baik	Komposit dari (1) Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik, (2) Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik, (3) Indeks Kualitas Permukiman, dan (4) Persentase aspek penyebab kemacetan yang teratasi	66,37	74,79

2	Indeks Desa Membangun	Kategori Nilai Indeks	Survey based Kementerian Desa Dengan klasifikasi desa berindeks "tertinggal" (desa dengan indeks < 50), kemudian "berkembang" (desa dengan indeks >50 dan <75), dan "mandiri" (desa dengan indeks >75 yang dikombinasikan dengan variabel pemberdayaan desa berdasarkan potensi unggulan	Penilaian Indeks Desa Membangun oleh Kementerian Pedesaan	7 Desa Berkembang; 12 Desa Maju	5 Desa Mandiri Berdaya; 14 Desa Maju Berdaya
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks angka	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang bertujuan memberikan informasi tentang kondisi lingkungan hidup menggunakan kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan lahan sebagai indikator	IKLH = 30% IPA + 30% IPU + 40% ITL Keterangan: IPA : Indeks Pencemaran Air IPU : Indeks Pencemaran Udara ITL : Indeks Tutupan Lahan	72,68	72,96

SASARAN															
NO	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN		KONDISI AWAL 2017	TARGET TAHUNAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN		2018	2019	2020	2021	2022	STRATEGI	PROGRAM	OPD PENGAMPU	
01	Meningkatnya penataan ruang dan infrastruktur kota yang terpadu, berkelanjutan dan berketahanan bencana	1	Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	persentase	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan	Panjang jalan dan Jembatan kondisi mantap dan berkeselamatan / total Panjang jalan dan jembatan x 100%	54.22	56.95	61.06	65.97	70.98	78.4	Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan, dan jembatan dan irigasi	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2	Indeks Kualitas Infrastruktur Irigasi	Persentase	Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik fungsional	Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik fungsional di bagi total panjang saluran irigasi di kali 100 %	83.53	85.05	86.52	88.11	89.34	91.29			
		3	Persentase kesesuaian pembangunan wilayah yang sesuai dengan RTRW	persentase	kesesuaian atas rencana pemanfaatan ruang wilayah untuk pembangunan terhadap Perda RTRW	Realisasi RTW / Rencana Peruntukan sesuai RTRW x 100 %	55	60	65	75	85	90	Meningkatkan pengendalian ruang dan lingkungan.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
		4	Indeks Kualitas Pemukiman		Komposit dari Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak, Akses Air Minum Layak, Penanganan Area Genangan, ketersediaan bangunan gedung/negara dan Penanganan Rumah tidak Layak Huni.		80%	85%	85%	85%	85%	85%	Pemerataan pembangunan desa dan kelurahan melalui peningkatan kualitas infrastruktur dasar	Program Penataan Bangunan dan Permukiman	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

													Meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi layak bagi masyarakat		
	5	Tingkat Pelayanan Jalan (level Of Service)	Indeks	Tingkat pelayanan jalan atau LOS (Level of Service) adalah salah satu metode yang digunakan untuk menilai kinerja jalan yang menjadi indikator dari kemacetan. Suatu jalan dikategorikan mengalami kemacetan apabila hasil perhitungan LOS menghasilkan nilai mendekati 1	Level of Service (LOS) dapat diketahui dengan melakukan perhitungan perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas dasar jalan (V/C)	N/A	0,76	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	Meningkatkan konektivitas ekonomi dan daerah melalui ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal	Program pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan	Dinas Perhubungan
													Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Angkutan Darat	Program peningkatan pelayanan angkutan	
	6	Indeks Resiko Bencana	indeks angka	Indeks Resiko diperoleh dari Angka Ancaman dan kerentanan terjadinya bencana di bagi dengan dengan kapasitas kemampuan daerah dalam melakukan penanganan bencana	IRB = (Indeks Ancaman x Indeks Kerentanan)/Indeks Kapasitas	134	131	128	125	122	119	Meningkatkan mitigasi bencana.	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
													Program Kedaruratan dan Logistik Bencana		

														Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	
		7	Tingkat ketahanan dan keselamatan kebakaran	persentase	tingkat ketahanan dan keselamatan kebakaran diukur dari cakupan pelayanan kebakaran dan tingkat waktu tanggap pelayanan kebakaran dengan penjelasan <50 rendah; 50-75 = cukup; >75 tinggi	cakupan pelayanan kebakaran pada WMK + Tingkat Waktu Tanggap dibagi 2 dikali 100	N/A	85%	85%	85%	85%	85%		Program Penanganan Bahaya Kebakaran	Dinas Penanggulangan Kebakaran
														Program Penanganan Bahaya Kebakaran	
02	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	8	persentase Desa Maju - Mandiri	persentase	Kualitas pembangunan desa ditunjukkan dengan berkurangnya status desa berkembang menuju maju dan mandiri	Jumlah Desa Maju / Jumlah seluruh Desa dikali 100 persen	63,2%	68,42 %	73,68 %	78,95 %	78,95 %	78,95 %	Meningkatkan pemberdayaan dan kualitas pembangunan desa secara terintegrasi	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	DP3AP2KB
03	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	9	Indeks Kualitas Air Sungai	indeks angka		komposit penilaian kualitas air sungai	51	51,82	51,92	52,12	52,22	52,32	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lestari	Program Penuaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		10	Indeks Kualitas Udara	indeks angka		komposit penilaian kualitas udara	87,04	87,10	87,30	87,50	87,70	88,00		Program Pengendalian Pencemaran Dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup	
		11	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	indeks angka		komposit penilaian tutupan lahan	77,66	77,66	77,67	77,68	77,69	77,70		Program Pengelolaan Persampahan Dan Pengembangan Pertanian	

MISI 5 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik Yang Profesional

TAGLINE : BATU KOTA BERINTEGRITAS

URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN		KONDISI AWAL 2017	KONDISI AKHIR 2022
			DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN		
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel guna mewujudkan Batu Kota Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks angka	Komposit nilai evaluasi Reformasi Birokrasi dengan area Kelembagaan, Budaya Organisasi, Ketatalaksanaan, Regulasi Deregulasi Birokrasi, dan Sumber Daya Manusia	penilaian oleh KeMenpanRB	N/A	76,5 (Sangat Baik)

SASARAN														
NO	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN		KONDISI AWAL 2017	TARGET TAHUNAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN		2018	2019	2020	2021	2022	STRATEGI	PROGRAM	OPD PENGAMPU
01	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Opini BPK	Kategori Opini	Pernyataan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dan didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.	Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah(perencanaan , penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban) yang baik (transparansi, akuntabel, dan partisipatif)	Program Penatausahaan Keuangan Daerah; Program Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Pembangunan Daerah; Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Keuangan Daerah; Inspektorat
		2 Nilai SAKIP	Kategori Nilai	Evaluasi atas pelaksanaan SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, Capaian Kinerja	Penilaian SAKIP oleh KeMenpanRB	C	B	BB	A	A	A	Mengembangkan sistem dan prosedur pengawasan	Peningkatan kapasitas Aparatur pengawasan Internal Pemerintah	Bappeda; Inspektorat; Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)

		3	Nilai EKPPD	Kategori Nilai KPPD	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Batu oleh Kementerian Dalam Negeri	Penilaian KPPD oleh Kemendagri	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan inovatif	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD
		4	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Angka	Hasil pengukuran indeks komposit variabel : kinerja, kesesuaian syarat jabatan kompensasi, disiplin	$IdxPro = 0.25(1 - gaps) + 0.25(Kj) + 0.25(1 - \delta SI(inex)) + 0.25(1 - inDiscpl);$	N/A	76	77	79	80	81	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BKPDSM
		5	Nilai SPBE	Kategori Nilai SPBE	Untuk mengetahui tingkat layanan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Penilaian SPBE oleh KeMenPanRB	CUKUP	CUKUP	BAIK	BAIK	BAIK	SANGAT BAIK	Meningkatkan Pemanfaatan TIK dalam Penyelenggaraan Pemerintahan		Dinas Informasi dan Komunikasi
02	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	6	Skala Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintah	Angka	hasil survei kepuasan masyarakat terhadap unit-unit pelayanan publik pemerintah	Survei Independen terhadap kinerja unit unit pelayanan publik pada tahun ke -n	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	Meningkatkan kualitas pelayanan publik. (pelayanan EGOV dan Penumbuhan Inovasi Pemerintah Daerah)	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	OPD Pelayanan Publik (Dinas Kesehatan - Puskesmas; Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil; Badan Keuangan Daerah - Pendapatan; Dinas PMPSTP - Pelayanan Perizinan; Dinas Pendidikan; Kecamatan;



BAB 6

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*added value*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Oleh sebab itu selanjutnya akan dibahas secara terperinci strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan RPJMD Kota Batu Tahun 2017-2022.

6.1. Strategi

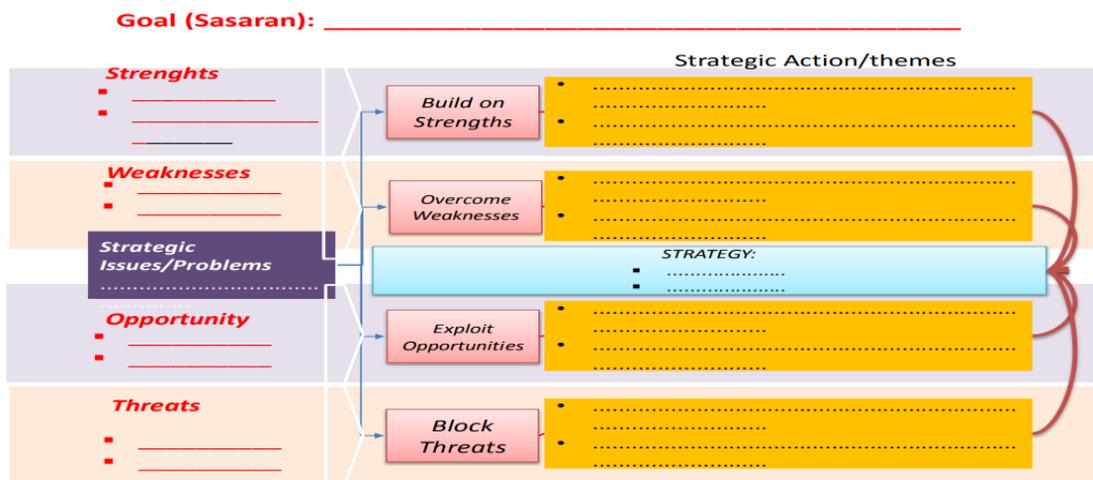
Strategi diharapkan mampu mengarahkan sasaran pembangunan menjadi lebih mudah untuk diimplementasikan dalam bentuk program pembangunan. Strategi juga memberikan gambaran pelaksanaan sasaran dengan pendekatan yang spesifik

sehingga mampu meningkatkan efektifitas implementasi program pembangunan. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Langkah yang dilalukan dalam merumuskan strategi sebagai berikut: 1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan; 2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih; dan 3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT, dengan langkah yang lebih rinci meliputi:

- a. Pertama, menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran, dengan dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, dan threats) dan mengkaitkan dengan permasalahan dan isu strategis. Setiap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman akan di ketahui alternatif-kebijakan, dari alternatif strategi di

rumuskan satu strategi utama untuk mencapai sasaran serta memecahkan masalah dan isu strategis, seperti pada Gambar 6.1. berikut:



Gambar 6.1
Formulasi Strategi
 Sumber: Permendagri Nomor 86 tahun 2017

- b. Kedua, menentukan strategi dari beberapa alternatif strategi. Pengujian dilakukan pada tingkat pembahasan tim. Penting untuk menekankan bahwa strategi harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama periode 5 (lima) tahun. Pemilihan strategi yang paling tepat diantara berbagai alternatif strategi yang dihasilkan dengan metode SWOT, *Focus Group Discussion (FGD)*, *Balance Score Card*, dan Pembobotan.

Secara umum strategi pembangunan Kota batu memiliki tiga esensi pokok, yaitu *enabling*, *empowering*, dan *protecting*. Enabling maksudnya menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan

potensi masyarakat untuk berkembang. Sedangkan *empowering*, bertujuan untuk memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, yakni dengan menampung berbagai masukan dan menyediakan prasarana dan sarana yang diperlukan. *Protecting*, artinya melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.

Selanjutnya dipaparkan secara rinci tujuan, sasaran dan strategi secara per- Misi dan Visi yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.1
Visi, Misi Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Batu
Untuk Misi Ke 1

VISI:		
DESA BERDAYA KOTA BERJAYA TERWUJUDNYA KOTA BATU SEBAGAI SENTRA AGRO WISATA INTERNASIONAL YANG BERKARAKTER, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1:		
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Berlandaskan Nilai Nilai Keagamaan dan Kearifan Budaya Lokal		
T.1. Meningkatkan derajat kualitas hidup sosial masyarakat guna mewujudkan Batu Kota Nyaman	SS.1. Meningkatnya stabilitas kondisi sosial, ketertiban dan ketentraman wilayah	ST.1. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama melalui berbagai forum dialog ST.2. Meningkatkan fasilitas layanan keagamaan dan sosial masyarakat melalui bantuan dan koordinasi antara pemangku kepentingan dan

		<p>pemerintah</p> <p>ST.3. Menjaga Keamanan dan Ketertiban Umum</p> <p>ST.4. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat</p> <p>ST.5. Peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata dengan mendekatkan jangkauan layanan kepada masyarakat dan keberdayaan partisipatoris</p>
	SS.2. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	ST.6. Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan kebudayaan

Misi 1: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Berlandaskan Nilai Nilai Keagamaan dan Kearifan Budaya Lokal

Tujuan: Meningkatkan derajat kualitas hidup sosial masyarakat guna mewujudkan Batu Kota Nyaman.

- a. Sasaran 1: Meningkatnya stabilitas kondisi sosial, ketertiban dan ketentraman wilayah

1. Strategi pertama adalah meningkatkan kerukunan antar umat beragama melalui berbagai forum dialog;
 2. Strategi kedua adalah meningkatkan fasilitas layanan keagamaan dan sosial masyarakat melalui bantuan dan koordinasi antara pemangku kepentingan dan pemerintah;
 3. Strategi ketiga adalah menjaga keamanan dan ketertiban umum;
 4. Strategi keempat adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
 5. Strategi kelima adalah peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata dengan mendekatkan jangkauan layanan kepada masyarakat dan keberdayaan partisipatoris; dan
- b. Sasaran 2: Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah
6. Strategi keenam adalah meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan kebudayaan.

Tabel 6. 2
Visi, Misi Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Batu
Untuk Misi Ke 2

VISI:		
DESA BERDAYA KOTA BERJAYA TERWUJUDNYA KOTA BATU SEBAGAI SENTRA AGRO WISATA INTERNASIONAL YANG BERKARAKTER, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 2:		
Meningkatkan Pembangunan Kualitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia		
<p>T.1. Meningkatkan penguatan kapasitas dan kualitas SDM guna mewujudkan Batu Kota Produktif</p>	<p>SS.1. Meningkatnya Derajat Kesejahteraan dan Kualitas SDM</p>	<p>ST.1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan</p> <p>ST.2. Peningkatan kualitas pendidik dan sarana pendukung pendidikan</p> <p>ST.3. Peningkatan Manajemen dan layanan pendidikan</p> <p>ST.4. Peningkatan kualitas literasi masyarakat melalui inisiasi budaya membaca gerakan kunjung perpustakaan</p> <p>ST.5. Peningkatan derajat kesehatan</p>

		<p>masyarakat</p> <p>ST.6. Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)</p> <p>ST.7. Peningkatan cakupan pelayanan Jaminan Kesehatan</p>
--	--	---

Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Kualitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia

Tujuan: Meningkatkan penguatan kapasitas dan kualitas SDM guna mewujudkan Batu Kota Produktif.

a. Sasaran 1: Meningkatnya Derajat Kesejahteraan dan Kualitas SDM

1. Strategi Pertama adalah Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan
2. Strategi kedua adalah peningkatan kualitas pendidik dan sarana pendukung pendidikan
3. Strategi ketiga adalah peningkatan Manajemen dan layanan pendidikan

4. Strategi keempat adalah peningkatan kualitas literasi masyarakat melalui inisiasi budaya membaca gerakan kunjung perpustakaan
5. Strategi kelima adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat
6. Strategi keenam adalah peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
7. Strategi ketujuh adalah peningkatan cakupan pelayanan Jaminan Kesehatan

Tabel 6. 3
Visi, Misi Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Batu
Untuk Misi Ke 3

VISI:		
DESA BERDAYA KOTA BERJAYA TERWUJUDNYA KOTA BATU SEBAGAI SENTRA AGRO WISATA INTERNASIONAL YANG BERKARAKTER, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 3 :		
Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri Berbasis Agrowisata		
T.1. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah yang inklusif, berkualitas berbasis pada sektor unggulan guna mewujudkan	SS.1. Meningkatnya aktivitas perekonomian sektor unggulan daerah yang inklusif berkelanjutan	ST.1. Menumbuhkan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokal ST.2. Mengoptimalkan kinerja sektor Dominan dengan fokus ekonomi berkelanjutan ST.3. Penumbuhan

<p>Batu Kota AgroWisata</p>		<p>pusat pertumbuhan baru untuk pemerataan ekonomi wilayah melalui pengembangan Destinasi Desa Wisata yang terintegrasi dengan sektor pertanian dan UKM</p> <p>ST.4. Meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan</p> <p>ST.5. Meningkatkan kualitas destinasi dan investasi pariwisata</p> <p>ST.6. Mengembangkan sektor UMKM, Koperasi dan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan untuk mendukung sektor pariwisata</p> <p>ST.7. Pemenuhan layanan Dasar masyarakat miskin</p> <p>ST.8. Peningkatkan iklim investasi dan usaha yang kondusif</p>
	<p>SS.2. Meningkatnya kemandirian pangan daerah</p>	<p>ST.9. Peningkatan stok ketersediaan dan penganeekaragaman konsumsi pangan</p>

		daerah
--	--	--------

Misi 3: Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri Berbasis Agrowisata

Tujuan: Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah yang inklusif, berkualitas berbasis pada sektor unggulan guna mewujudkan Batu Kota AgroWisata

- a. Sasaran 1: Meningkatnya aktivitas perekonomian sektor unggulan daerah yang inklusif berkelanjutan
 - 1. Strategi pertama adalah menumbuhkan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokal;
 - 2. Strategi kedua adalah mengoptimalkan kinerja sektor Dominan dengan fokus ekonomi berkelanjutan;
 - 3. Strategi ketiga adalah penumbuhan pusat pertumbuhan baru untuk pemerataan ekonomi wilayah melalui pengembangan Destinasi Desa Wisata yang terintegrasi dengan sektor pertanian dan UKM;
 - 4. Strategi keempat adalah meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan;
 - 5. Strategi kelima adalah meningkatkan kualitas destinasi dan investasi pariwisata;

6. Strategi keenam adalah mengembangkan sektor UMKM, Koperasi dan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan untuk mendukung sektor pariwisata;
7. Strategi ketujuh adalah pemenuhan layanan Dasar masyarakat miskin;
8. Strategi delapan adalah peningkatkan iklim investasi dan usaha yang kondusif dan

b. Sasaran 2: Meningkatnya kemandirian pangan daerah

9. Strategi kesembilan adalah peningkatan stok ketersediaan dan penganekaragaman konsumsi pangan daerah.

Tabel 6. 4
Visi, Misi Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Batu
Untuk Misi Ke 4

VISI:		
DESA BERDAYA KOTA BERJAYA TERWUJUDNYA KOTA BATU SEBAGAI SENTRA AGRO WISATA INTERNASIONAL YANG BERKARAKTER, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 4 :		
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Perdesaan Yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan		
T.1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, merata dan	SS.1. Meningkatnya penataan ruang dan infrastruktur kota yang terpadu,	ST.1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan, dan jembatan dan irigasi

berkelanjutan berbasis kemandirian desa dalam rangka mewujudkan Batu Kota Berkarakter	berkelanjutan dan berketahanan bencana	<p>ST.2. Meningkatkan pengendalian ruang dan lingkungan</p> <p>ST.3. Pemerataan pembangunan desa dan kelurahan melalui peningkatan kualitas infrastruktur dasar</p> <p>ST.4. Meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi layak bagi masyarakat</p> <p>ST.5. Meningkatkan konektivitas ekonomi dan daerah melalui ketersediaan saran dan prasarana transportasi yang memadai dan handal</p> <p>ST.6. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Angkutan Darat</p> <p>ST.7. Meningkatkan mitigasi bencana</p>
	SS.2. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	ST.9. Peningkatan kualitas pembangunan Desa
	SS.3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan	ST.10. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

	Hidup	yang lestari
--	-------	--------------

Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Perdesaan yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan

Tujuan: Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, merata dan berkelanjutan berbasis kemandirian desa dalam rangka mewujudkan Batu Kota Berkarakter.

Tujuan yang ingin dicapai yaitu terwujudnya pembangunan infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas, merata dan berkelanjutan berbasis kemandirian dan produktivitas desa/ kelurahan melalui pembangunan infrastruktur dari wilayah pinggiran guna memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial untuk mewujudkan batu kota berkarakter

- a. Sasaran 1: Meningkatnya penataan ruang dan infrastruktur kota yang terpadu, berkelanjutan dan berketahanan bencana
 - 1. Strategi pertama adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan, dan jembatan dan irigasi;
 - 2. Strategi kedua adalah meningkatkan pengendalian ruang dan lingkungan;
 - 3. Strategi ketiga adalah pemerataan pembangunan desa dan kelurahan melalui peningkatan kualitas infrastruktur dasar;

4. Strategi keempat adalah meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi layak bagi masyarakat;
 5. Strategi kelima adalah meningkatkan konektivitas ekonomi dan daerah melalui ketersediaan saran dan prasarana transportasi yang memadai dan handal;
 6. Strategi keenam adalah meningkatkan Kinerja Pengelolaan Angkutan Darat;
 7. Strategi ketujuh adalah meningkatkan mitigasi bencana
- b. Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa
8. Strategi delapan adalah peningkatan kualitas pembangunan Desa; dan
- c. Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Desa
9. Strategi kesembilan adalah Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lestari.

Tabel 6. 5
Visi, Misi Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Batu
Untuk Misi Ke 5

VISI:		
DESA BERDAYA KOTA BERJAYA TERWUJUDNYA KOTA BATU SEBAGAI SENTRA AGRO WISATA INTERNASIONAL YANG BERKARAKTER, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 5:		
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik Yang Profesional		

<p>T.1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel guna mewujudkan Batu Kota Berintegritas</p>	<p>SS.1. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah</p>	<p>ST.1. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah(perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban) yang baik (transparansi, akuntabel, dan partisipatif)</p> <p>ST.2. Mengembangkan sistem dan prosedur pengawasan</p> <p>ST.3. Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan inovatif</p> <p>ST.4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN</p> <p>ST.5. Meningkatkan Pemanfaatan TIK dalam Penyelenggaraan Pemerintahan</p>
	<p>SS.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</p>	<p>ST.6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. (pelayanan EGOV dan Penumbuhan Inovasi Pemerintah Daerah)</p>

Misi 2: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik Yang Profesional

Tujuan: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel guna mewujudkan Batu Kota Berintegritas.

Tujuan yang ingin dicapai yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang baik dan profesional yang didukung oleh mantapnya sistem kelembagaan dan aparatur yang berkualitas dan berkompeten berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan batu kota berintegritas

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

1. Strategi pertama adalah meningkatkan tata kelola keuangan daerah(perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban) yang baik (transparansi, akuntabel, dan partisipatif);
2. Strategi kedua adalah mengembangkan sistem dan prosedur pengawasan;
3. Strategi ketiga adalah membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan inovatif;

4. Strategi keempat adalah meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN;
5. Strategi kelima adalah meningkatkan pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan

Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

6. Strategi kelima adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. (pelayanan EGOV dan penumbuhan inovasi pemerintah daerah).

6.2. Arah Kebijakan

Sebagaimana disampaikan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD.

Penyusunan dokumen RPJPD arah kebijakan merupakan tahapan pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun yang di bagi kedalam empat tahapan lima tahunan. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan sebagai jalan untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meskipun penekanan program prioritas pada setiap tahapan berbeda, namun memiliki sinkronisasi dan konsistensi dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan RPJMD secara khusus dan sasaran perencanaan jangka panjang pada umumnya. Oleh karena itu, dalam menyusun arah kebijakan perlu adanya penyinergian antara berbagai dokumen perencanaan guna menyelaraskan berbagai program pembangunan antar periode maupun antar tingkatan administrasi pemerintahan.

Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Namun, dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada.

Tabel 6.6**Arah Kebijakan Pembangunan**

Arah Kebijakan				
2018	2019	2020	2021	2022
Mengembangkan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui optimalisasi pelayanan publik yang profesional	Akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan berbasis agrowisata internasional dalam upaya peningkatan sektor pariwisata, pertanian dan UMKM	Membangun Sumber Daya Manusia yang handal melalui jaminan akses layanan dasar dan pengembangan pendidikan formal dan nonformal yang berorientasi pada potensi daerah;	Penguatan modal sosial untuk kesadaran hukum, ketentraman dan ketertiban umum, dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan politik daerah;	Mengurangi kesenjangan yang berorientasi pada penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran terbuka serta peningkatan laju pertumbuhan ekonomi

6.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2018

Arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kota Batu periode 2017-2022 untuk tahun 2018 difokuskan pada pengembangan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui optimalisasi pelayanan publik yang professional. Maka ditetapkan beberapa sasaran dan strategi-strategi yaitu sebagai berikut:

a. Sasaran 1 (S1) yaitu meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan strategi:

7. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban) yang baik (transparansi, akuntabel, dan partisipatif);
8. Mengembangkan sistem dan prosedur pengawasan;
9. Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan inovatif;
10. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN;
11. Meningkatkan pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan.

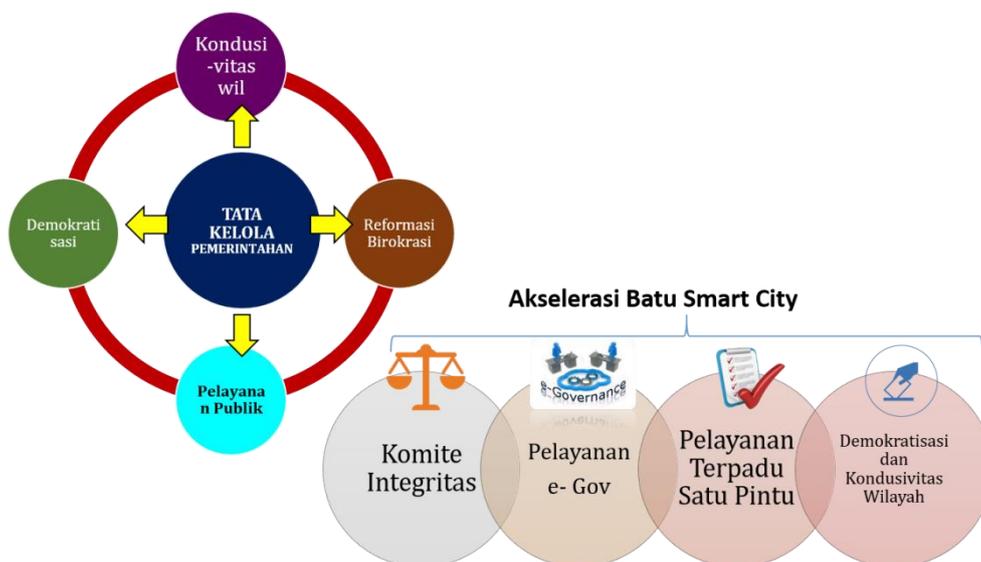
b. Sasaran 2 (S2) yaitu meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan strategi:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. (pelayanan EGOV dan penumbuhan inovasi pemerintah daerah).

Untuk mewujudkan sasaran-sasaran dan strategi-strategi pembangunan pengembangan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui optimalisasi pelayanan publik yang professional maka ditetapkan indikator pengukuran yang jelas dan aplikatif yaitu sebagai berikut:

1. Opini BPK;
2. Nilai SAKIP;
3. Nilai EKPPD;
4. Indeks Profesionalitas ASN;
5. Nilai SPBE; dan
6. Skala Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintah.

6.2.1.1. Desain Kebijakan Antar Sektor Dalam Aspek Pelayanan Publik



Gambar 6.2
Desain Tata Kelola Pemerintahan

Esensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah penyediaan layanan yang seluas-luasnya kepada masyarakat (*public*) untuk memenuhi kepentingan public (*public interest*) seperti kepentingan selaku masyarakat, pribadi, kelompok, partai (politik), jabatan dan sebagainya. Namun di era globalisasi saat ini, disadari atau tidak bahwa kepentingan public semakin kompleks sehingga Pemerintah Daerah dituntut untuk memberikan pelayanan public tersebut, secara maksimal. Selain itu, dituntut pula untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada public. Kondisi demikian berlaku disemua level Pemerintahan Pusat/ Daerah dan tak terkecuali di Kota Batu yang

senyatanya sebagai daerah yang melakukan akselerasi yang cukup tinggi disemua sektor di Propinsi Jawa Timur.

Dalam rangka menjawab kondisi demikian, maka RPJMD Kota Batu 5 (lima) tahun kedepan yakni periode 2017-2022 khususnya terkait aspek peningkatan pelayanan public maka ditetapkan dengan tujuan Indeks Reformasi Birokrasi sebagai termaktub dalam misi kelima RPJMD ini. Kendati untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan 2 (dua) sasaran yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintah dengan 5 (lima) indicator diantaranya Opini BPK, Predikat/nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), Nilai EKPPD, Rerata Indeks Profesional ASN dan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan public dengan 1 (satu) indicator yakni Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.

Dari tujuan, sasaran-sasaran serta indikator-indikator tersebut, diyakini mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan public di Kota Batu dimasa mendatang. Sehingga masyarakat Kota Batu dapat menikmati pelayanan yang sesuai dengan yang diharapkan dengan pelayanan yang diterimahnya.

Selain itu, Pemerintah Kota Batu dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi maka dituntut menyediakan pelayanan prima agar terciptanya good governance and clean governance.

Maka untuk mendukung hal demikian Kota Batu telah menjalankan penerapan Smart City namun baru terlaksana beberapa tahapan dalam smart city tersebut, sehingga dalam perencanaan RPJMD periode 2017-2022 ini akan dilakukan akselerasi penerapan konsep smart city di Kota Batu, sebagai Kota yang dapat mengelola berbagai sumber dayanya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya

6.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2019

Arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kota Batu periode 2017-2022 untuk tahun 2019 difokuskan pada Akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan berbasis agrowisata internasional dalam upaya peningkatan sektor pariwisata, pertanian dan UMKM. Maka ditetapkan beberapa sasaran dan strategi-strategi yaitu sebagai berikut:

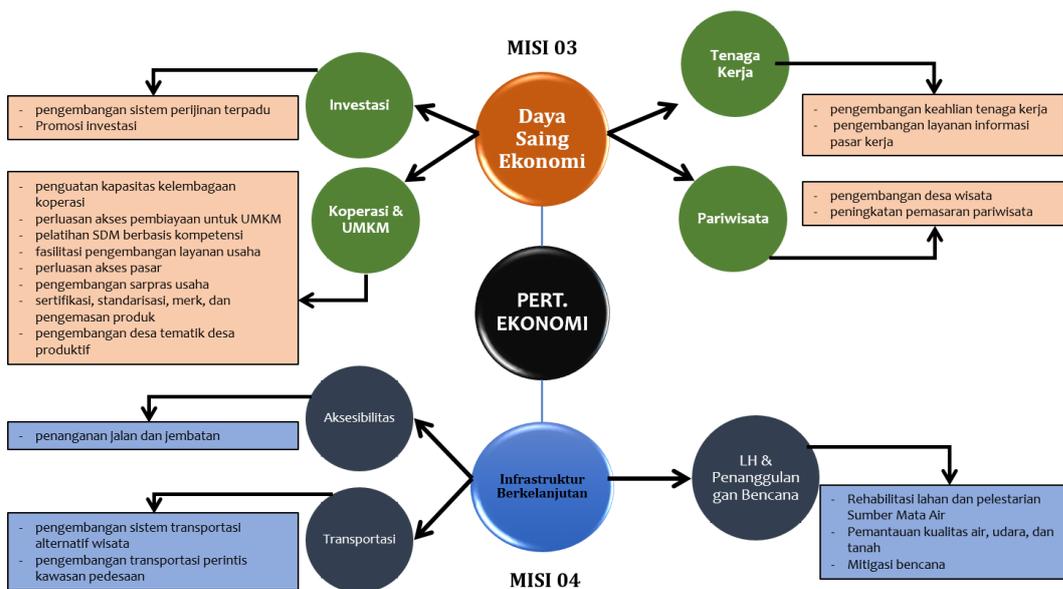
- a. Sasaran 1 (S1) adalah meningkatnya aktivitas perekonomian sektor unggulan daerah yang inklusif berkelanjutan dengan strategi:
 1. Menumbuhkan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokal;

2. Mengoptimalkan kinerja sektor Dominan dengan fokus ekonomi berkelanjutan;
 3. Penumbuhan pusat pertumbuhan baru untuk pemerataan ekonomi wilayah melalui pengembangan Destinasi Desa Wisata yang terintegrasi dengan sektor pertanian dan UKM;
 4. Meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan;
 5. Meningkatkan kualitas destinasi dan investasi pariwisata;
 6. Mengembangkan sektor UMKM, Koperasi dan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan untuk mendukung sektor pariwisata;
 7. Pemenuhan layanan Dasar masyarakat miskin; dan
 8. Peningkatkan iklim investasi dan usaha yang kondusif.
- b. Sasaran 2 (S2) adalah meningkatnya ketahanan pangan daerah dengan strategi:
1. Peningkatan stok ketersediaan dan penganekaragaman konsumsi pangan daerah.

Untuk mewujudkan sasaran-sasaran dan strategi-strategi akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan berbasis agrowisata internasional dalam upaya peningkatan sektor pariwisata, pertanian dan UMKM maka ditetapkan indikator pengukuran yang terukur dan aplikatif yaitu sebagai berikut:

- a. Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa akomodasi pariwisata terhadap total PDRB;
- b. Persentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian terhadap total PDRB;
- c. Persentase kontribusi PDRB Sektor UKM terhadap total PDRB;
- d. Nilai investasi daerah; dan
- e. Prosentase kemandirian pangan daerah.

6.2.2.1. Desain Kebijakan Antar Sektor Pada Aspek Peningkatan Daya Saing Daerah



Gambar 6.3
Desain Peningkatan Daya Saing Daerah

Salah satu aspek yang dapat meningkatkan kemandirian daerah antara lain dapat dicapai melalui peningkatan daya saing,

dimana daya saing tidak hanya berorientasi pada indikator perekonomian saja, melainkan lebih luas artinya meliputi seluruh upaya mengelola sumber daya yang dimiliki. Daya saing menunjukkan kemampuan suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain dalam menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pengembangan sektor unggulan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Peningkatan daya saing Kota Batu tahun 2017-2022 akan dilakukan melalui peningkatan daya saing ekonomi daerah, penguatan kelembagaan dan sistem, serta membangun infrastruktur berkelanjutan yang akan mengarah pada pertumbuhan ekonomi. Upaya peningkatan daya saing daerah tentu tidak bisa dicapai oleh peranan satu atau dua sektor saja, melainkan perlu ada kolaborasi berbagai pihak untuk dapat mencapainya. Penentuan faktor pembentuk yang dapat meningkatkan daya saing daerah menjadi langkah penting untuk memulainya. Oleh karena itu, sektor yang akan berperan penting dalam peningkatan daya saing ekonomi daerah dalam lima tahun kedepan diantaranya adalah sektor Investasi, Koperasi dan UMKM, Tenaga Kerja, Pariwisata, Infrastruktur, Transportasi dan Lingkungan Hidup serta Penggulangan Bencana Baerah. Setelah menemukan faktor pembentuk, maka strategi penguatan daya

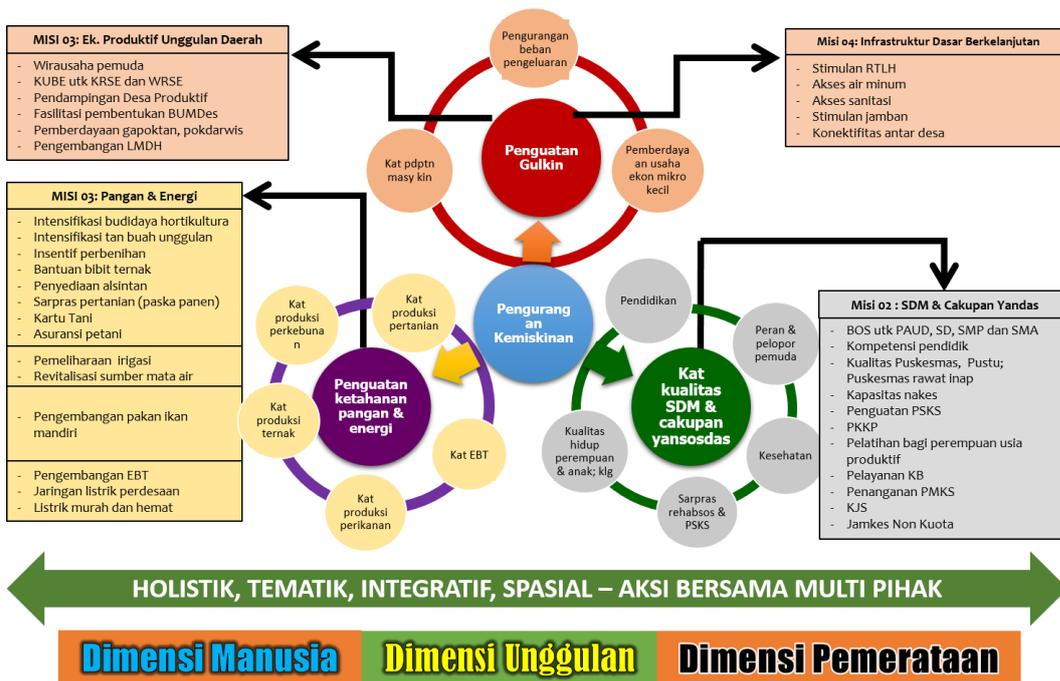
saing untuk menguraikan peranan masing-masing sektor pun dilakukan seperti yang terdapat pada gambar diatas.

Pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin dinamis menuntut setiap daerah melakukan upaya pembinaan, pengembangan dan inovasi kepada sektor terkait secara lebih terarah dan terpadu sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing daerah. Pembinaan, salah satunya dilakukan kepada tenaga kerja agar keahlian yang dimiliki juga sesuai dan dibutuhkan di pasar kerja dalam rangka meningkatkan daya serap tenaga kerja. Pengembangan, salah satunya pada sektor investasi dalam rangka memperbaiki sistem perizinan terpadu, sedangkan inovasi tentu perlu dilakukan untuk meningkatkan berbagai layanan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Ukuran keberhasilannya adalah meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, membaiknya iklim investasi, terbukanya lapangan kerja seluas-luasnya dan indikator kesejahteraan lainnya. di Akhir, indikator-indikator tersebut akan menunjukkan implikasi dari strategi daya saing daerah terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan daerah.

6.2.2.2. Desain Kebijakan Antar Sektor Dalam Aspek Pengentasan Kemiskinan, Kemiskinan di Kota Batu

Selain strategi yang berbasis per Sasaran, strategi yang diterapkan juga berbasis pendekatan penyelesaian suatu permasalahan yang lintas Perangkat Daerah dan Lintas urusan.

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:



Gambar 6.3
Desain Pengentasan Kemiskinan, Kemiskinan di Kota Batu

Kemiskinan menjadi masalah sosial yang terjadi di berbagai level pemerintahan baik pemerintah daerah kabupaten ataukota, pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah pusat. Di Kota Batu sendiri kemiskinan masih menjadi masalah yang belum dapat terselesaikan oleh pemerintah daerah selama beberapa

tahun. Perkembangan kemiskinan Kota Batu bersifat fluktuatif, yaitu terjadinya penurunan dan kenaikan tiap tahunnya. Meskipun di tahun 2016 angka kemiskinan Kota Batu mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi penurunan tidak signifikan. Jumlah penduduk miskin di Kota Batu masih tinggi dibanding dengan kota lainnya seperti Mojokerto.

Kemiskinan dapat menghambat pembangunan daerah dan juga dapat berdampak terhadap ketentraman lingkungan. Kemiskinan juga dapat menimbulkan masalah kriminalitas, dimana seseorang yang miskin akan berpeluang melakukan kejahatan seperti pencurian, pencopetan, atau bahkan pembunuhan. Oleh karena itu masalah kemiskinan di Kota Batu harus ditindaklanjuti secara serius dan sistematis. Dalam menanggulangi kemiskinan ini, pemerintah Kota Batu membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan terutama tokoh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh perdagangan dan usaha perkonomian. Aksi bersama multi pihak menjadi salah satu strategi pemerintah kota batu selama lima tahun kedepan didalam pengentasan kemiskinan di Kota Batu. Sasaran utama pengentasan kemiskinan yaitu menurunnya angka kemiskinan. Strategi yang dilakukan meliputi peningkatan kualitas SDM dan cakupa layanan sosial dasar, penguatan

penanggulangan kemiskinan, serta penguatan ketahanan pangan dan energi. Dalam hal peningkatan kualitas SDM dan cakupan pelayanan sosial dasar akan mengarah pada sektor pendidikan, peran dan pelopor pemuda, kesehatan, sarana prasarana rehabilitasi sosial dan PSKS, serta kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga. Gambaran umum kebijakan didalam peningkatan kualitas SDM dan cakupan pelayanan sosial dasar berada pada misi 2 seperti bantuan operasional sekolah mulai tingkat PAUD sampai SMA, meningkatkan kompetensi pendidik, peningkatan kualitas puskesmas, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, pelayanan KB, pelatihan bagi perempuan usia produktif, dan penanganan PMKS.

Strategi yang kedua yaitu penguatan penanggulangan kemiskinan yang mengarah pada peningkatan pendapatan masyarakat miskin, pengurangan beban pengeluaran, dan pemberdayaan usaha ekonomi mikro kecil. Gambaran umum kebijakannya berada pada misi 3 dan 4. Pada misi 3 fokus pada pengautan ekonomi, dan dimisi 4 fokus pada pemenuhan sarana prasarana penunjang. Pada misi 3 akan dikembangkan kebijakan wirausaha pemuda, kelompok usaha bersama, pendampingan desa produktif, pembentukan BUMDes serta pemberdayaan gapoktan dan pokdarwis. Pengembangan ekonomi tersebut akan didukung dengan peningkatan sarana prasarana penunjang

seperti akses air minum, akses sanitasi, konektivitas antar desa dan stimulan jamban. Adapun Strategi ke tiga yaitu penguatan ketahanan pangan dan energi mengarah pada peningkatan produksi pertanian, peningkatan produksi perkebunan, peningkatan produksi ternak, peningkatan produksi perikanan. Gambaran umum kebijakan yang akan dilakukan untuk penguatan ketahanan pangan dan energi terdapat pada misi 3 dimana akan dilakukan intensifikasi budidaya hortikultura, intensifikasi tanaman buah unggulan, insentif pembenihan, bantuan bibit ternak, penyediaan alat pertanian, sarana prasarana paska panen, kartu tani, asuransi petani, pemeliharaan irigasi, revitalisasi sumber mata air, pengembangan ikan mandiri, jaringan listrik perdesaan, serta listrik murah dan hemat.

6.2.3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2020

Dalam RPJMD Kota Batu periode 2017-2022 memuat Arah kebijakan pembangunan tahun 2020 difokuskan pada membangun sumber daya manusia yang handal melalui jaminan akses layanan dasar dan pengembangan pendidikan formal dan non-formal yang berorientasi pada potensi daerah. Maka ditetapkan beberapa sasaran dan strategi-strategi yaitu sebagai berikut:

a. Sasaran 1 (S1) yaitu meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat dengan strategi:

1. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan;
2. Peningkatan kualitas pendidik dan sarana pendukung pendidikan;
3. Peningkatan manajemen dan layanan pendidikan;
4. Peningkatan kualitas literasi masyarakat melalui inisiasi budaya membaca gerakan kunjung perpustakaan;
5. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
6. Peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS);
7. Peningkatan cakupan pelayanan jaminan kesehatan;

b. Sasaran 1 (S2) yaitu meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja dengan strategi:

8. Memperluas kesempatan dan penyediaan lapangan kerja di pedesaan & perkotaan; dan
9. Meningkatkan kualitas, produktivitas kompetensi, ketrampilan kerja.

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran dan strategi-strategi membangun sumber daya manusia yang handal melalui jaminan akses layanan dasar dan pengembangan pendidikan formal dan non-formal yang berorientasi pada potensi daerah. maka ditetapkan indikator pengukuran yang terukur dan aplikatif yaitu sebagai berikut:

- a. Indeks Pendidikan;
- b. Indeks Minat Baca Daerah;
- c. Angka Usia Harapan Hidup;
- d. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); dan
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka.

6.2.4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021

Arah kebijakan pembangunan tahun 2021 RPJMD Kota Batu periode 2017-2022 difokuskan pada penguatan modal sosial untuk kesadaran hukum, ketentraman dan ketertiban umum, dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan politik daerah. Maka ditetapkan beberapa sasaran dan strategi-strategi yaitu sebagai berikut:

- a. Sasaran 1 (S1) adalah Meningkatnya stabilitas kondisi sosial, ketertiban dan ketentraman wilayah dengan strategi:
 - 1. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama melalui berbagai forum dialog;
 - 2. Meningkatkan fasilitas layanan keagamaan dan sosial masyarakat melalui bantuan dan koordinasi antara pemangku kepentingan dan pemerintah;
 - 3. Menjaga keamanan dan ketertiban umum;
 - 4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat; dan

5. Peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata dengan mendekatkan jangkauan layanan kepada masyarakat dan keberdayaan partisipatoris.
- b. Sasaran 2 (S2) adalah Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah dengan strategi:
 1. Strategi keenam adalah meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan sasaran dan strategi penguatan modal sosial untuk kesadaran hukum, ketentraman dan ketertiban umum, dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan politik daerah. maka ditetapkan indikator pengukuran yang terukur dan aplikatif yaitu sebagai berikut:

- a. Persentase penanganan potensi kerusuhan bermotif SARA yang diselesaikan;
- b. Persentase penanganan potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diselesaikan;
- c. Persentase penurunan jumlah PMKS; dan
- d. Persentase pelestarian dan pengembangan budaya daerah

6.2.5. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022

Arah kebijakan pembangunan pada tahun 2022 dalam dokumen RPJMD Kota Batu periode 2017-2022 difokuskan mengurangi kesenjangan yang berorientasi pada penurunan angka

kemiskinan dan angka pengangguran terbuka serta peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Maka ditetapkan beberapa sasaran dan strategi yaitu sebagai berikut:

a. Sasaran 1 (S1) adalah Meningkatnya penataan ruang dan infrastruktur kota yang terpadu, berkelanjutan dan berketahanan bencana dengan strategi:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan, dan jembatan dan irigasi;
2. Meningkatkan pengendalian ruang dan lingkungan;
3. Pemerataan pembangunan desa dan kelurahan melalui peningkatan kualitas infrastruktur dasar;
4. Meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi layak bagi masyarakat;
5. Meningkatkan konektivitas ekonomi dan daerah melalui ketersediaan saran dan prasarana transportasi yang memadai dan handal;
6. Meningkatkan kinerja pengelolaan angkutan darat; dan
7. Meningkatkan mitigasi bencana.

b. Sasaran 2 (S2) adalah Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa dengan strategi:

1. Peningkatan kualitas pembangunan Desa; dan

c. Sasaran 3 (S3) adalah meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Desa dengan strategi:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lestari.

Dalam rangka mewujudkan sasaran dan strategi mengurangi kesenjangan yang berorientasi pada penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran terbuka serta peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. maka ditetapkan indikator pengukuran yang terukur dan aplikatif yaitu sebagai berikut:

- a. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur;
- b. Persentase kesesuaian pembangunan wilayah yang sesuai dengan RTRW;
- c. Indeks Resiko Bencana;
- d. persentase Desa Berkembang ; dan
- e. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

6.2.5.1. Desain Kebijakan Antar Sektor Dalam Aspek Kemandirian Desa



Gambar 6.4
Desain Kemandirian Desa di Kota Batu

Kebijakan pembangunan desa untuk mewujudkan kemandirian desa dilakukan melalui pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun, atau disebut IDM, dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan sebagaimana tertuang dalam Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 (RPJMN 2015 – 2019). Wilayah Desa adalah tempat di mana sebagian besar penduduk miskin tinggal. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan yang inklusif, di mana pengelolaan potensi ekonomi Desa dan Kawasan Perdesaan tidak hanya mampu menyertakan sebanyak-

banyaknya angkatan kerja lulusan SD/SMP, tetapi juga ramah keluarga miskin, mampu memperbaiki pemerataan dan mengurangi kesenjangan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah mengembangkan program unggulan berdasar tiga (3) pendekatan yang disebut sebagai pilar Desa Membangun Indonesia, yakni: (1) Jaring Komunitas Wiradesa; (2) Lumbung Ekonomi Desa; dan (3) Lingkar Budaya Desa. Melalui tiga (3) pilar tersebut diharapkan arah pengembangan program prioritas untuk menguatkan langkah bagi kemajuan dan kemandirian Desa, yang juga mampu dikembangkan sebagai daya lenting dalam peningkatan kesejahteraan kehidupan Desa.

- 1) Jaring Komunitas Wiradesa. Memperkuat kualitas manusia dengan memperbanyak kesempatan dan pilihan dalam upaya penduduk Desa menegakkan hak dan martabatnya, serta peningkatan memajukan kesejahteraan, mereka, baik sebagai individu, keluarga maupun kolektiva warga Desa. Jaring Komunitas Desa harus melakukan tindakan yang mampu mendorong ekspansi kapabilitas dengan memperkuat daya pada berbagai aspek kehidupan manusia warga Desa yang menjangkau aspek nilai dan moral, serta pengetahuan lokal Desa.

- 2) Lumbung Ekonomi Desa. Potensi sumber daya di Desa bisa dikonversi menjadi ekonomi yang di dalamnya melibatkan adanya modal, organisasi ekonomi, ada nilai tambah dan mensejahterakan secara ekonomi. Lumbung Ekonomi Desa bukan hanya soal dan untuk produksi, tapi dikapitasi memiliki nilai tambah melalui pendayagunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan. Pengembangan Lumbung Ekonomi Desa harus mampu menjawab masalah modal, jaringan dan memiliki informasi yang kuat dan oleh karenanya, organisasi ekonomi yang dikembangkan haruslah kompatibel dengan hal tersebut. Dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang Desa misalnya, BUMDes akan kuat jika dibangun dan dikelola orang-orang Desa yang teruji secara nilai dan moral, serta memiliki modal sosial yang kuat, mampu mengembangkan kreasi dan daya untuk menjangkau modal, jaringan dan informasi.
- 3) Lingkar Budaya Desa. Gerakan sosial pembangunan Desa tidaklah tergantung pada inisiasi orang perorang, tidak tergantung pada insentif, tapi lebih panggilan kultural. Berdasar Lingkar Budaya Desa, gerakan pembangunan Desa haruslah dilakukan karena kolektivisme, di dalamnya terdapat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran mau melakukan perubahan secara kolektif. Pembangunan Desa

hendaknya melampaui panggilan pribadi. Pembangunan Desa dimaknai sebagai kerja budaya dengan norma dan moral sebagai pondasinya, sebagai code of conduct, dan dengan begitu perilaku ekonomi dalam kehidupan Desa akan mampu menegakkan martabat dan mensejahterahkan.

IDM merupakan indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan budaya. Ketiga dimensi terdiri dari variabel, dan setiap variabel diturunkan menjadi indikator operasional. Dimensi ketahanan sosial meliputi modal sosial, kesehatan, pendidikan, dan permukiman. Dimensi ketahanan ekologi meliputi kualitas lingkungan, potensi rawan bencana dan tanggap bencana. Dimensi ketahanan ekonomi meliputi keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/logistik, akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah. Inovasi yang akan dilakukan menuju kemajuan desa di Kota Batu berdasarkan tiga pendekatan pilar desa membangun yaitu

- 1) Aspek Jaring Komunitas Wiradesa (Jamu Desa) dengan kegiatan prioritas:
 - a. Balai rakyat
 - b. Kesehatan berbasis komunitas
 - c. Perpustakaan/ desa online

d. Kewirausahaan

e. Desa inklusif.

2) Aspek Lumbung Ekonomi Desa (Bumi Desa) dengan kegiatan prioritas:

a. Desa wisata

b. Desa *agrotechnopark* dan industri berbasis organik

c. Sarana dan prasarana ekonomi

d. Kelompok perempuan wirausaha

e. Pengembangan BUMDesa.

3) Aspek Lingkak Budaya Desa (Karya Desa) dengan kegiatan prioritas:

a. Fasilitasi desa adat

b. Almanak desa

c. Fasilitasi budaya desa partisipatif

d. Lembaga Mediasi Desa.

6.2.5.2. Desain Kebijakan Antar Sektor Pada Aspek Pembangunan Perekonomian Daerah



Gambar 6.5
Desain Aspek Pembangunan Perekonomian Daerah di Kota Batu

Pembangunan ekonomi di definisikan oleh Arsyad (1999) sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Sedangkan Todaro menyatakan pembangunan sebagai suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan penghapusan dari kemiskinan mutlak.

Pembangunan ekonomi juga diartikan secara luas yaitu merupakan kenaikan produk domestik bruto (PDB) atau produk domestik netto (PNB) tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau pula apakah terdapat perubahan struktur ekonomi atau tidak. Sehingga berdasarkan definisi tersebut, yang dikatakan pembangunan perekonomian di suatu daerah adalah merupakan suatu cara atau proses pemerintah daerah menjadikan masyarakatnya sebagai sumber daya potensial dalam mengelola sumber daya alam maupun sumber daya lainnya untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Dengan proses demikian diharapkan pendapatan masyarakat per kapita maupaun nilai produk domestiknya terus bertumbuh.

Agar tujuan dari pembangunan perekonomian suatu daerah dapat terwujud, maka diperlukan beberapa strategi yang harus dilakukan. Arsyad (1999) mengelompokkan strategi pembangunan ekonomi daerah sebagai berikut:

1. Strategi pembangunan fisik atau lokalitas, yaitu strategi dengan membenahi fisik-fisik atau lokalitas daerah untuk kepentingan pembangunan industri dan perdagangan. Hal ini bertujuan agar terciptanya identitas daerah atau kota, memperbaiki basis pesona kualitas hidup

masyarakat dan memperbaiki dunia usaha daerah. Hal ini sejalan dengan misi RPJMD Kota Batu yang ke 4 yaitu pembangunan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan;

2. Strategi pengembangan dunia usaha, yaitu strategi penting karena dunia usaha merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah karena daya tarik, kreasi atau daya perekonomian daerah yang sehat. Hal ini sejalan dengan misi RPJMD Kota Batu yang ke 3, yakni daya saing perekonomian daerah yang progresif, mandiri dan berwawasan lingkungan berbasis pada potensi unggulan;
3. Strategi pengembangan sumber daya manusia, merupakan strategi dalam membentuk manusia yang berpotensi dan berdaya saing. Karena sumber daya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam proses pembangunan ekonomi. Tanpa adanya kualitas dari manusianya, maka pembangunan perekonomian daerah akan sulit terlaksana dan strategi pengembangan ekonomi masyarakat, yaitu strategi yang merupakan pembentukan kegiatan pengembangan suatu kelompok masyarakat atau memberdayakan masyarakat.

Tujuannya adalah untuk menciptakan manfaat sosial. Hal ini sejalan dengan misi RPJMD Kota Batu yang ke 2, yaitu pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial dan pemberdayaan perempuan.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah Kota Batu melalui daya saing ekonomi daerah inklusif, berkualitas berkelanjutan yang berbasis pada sektor unggulan. Sehingga beberapa hal yang menjadi strategi daerah Kota Batu untuk mewujudkan pembangunan tersebut adalah:

1. Pembangunan dunia usaha, investasi, UMKM, industri kreatif dan pariwisata. Karena dunia usaha atau perdagangan merupakan salah satu sektor unggulan yang menyumbang PDRB terbesar di Kota Batu. Akan tetapi permasalahan yang dihadapi saat ini yaitu industri kecil yang kurang berkembang, UMKM terkait koperasi yang masih banyak tidak aktif serta sektor pariwisata yang juga merupakan sektor unggulan masih belum memiliki city branding yang kuat akibat kurangnya promosi khususnya untuk jangkauan internasional.
2. Penguatan desa menuju desa maju, produktif dan mandiri. karena Kota Batu terdiri atas desa-desa dan memiliki karakteristik sebagai desa yang memiliki potensi-potensi.

Akan tetapi potensi yang dimiliki belum terakomodir secara baik akibat lemahnya kualitas sumber daya manusianya sehingga menyebabkan masih banyak penduduknya yang bergantung kepada pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyokong kegiatan produktif untuk menjadikan desa-desa lebih mandiri dan maju.

3. Peningkatan upaya intensifikasi pertanian dan peternakan yang berbasis agrobisnis dan agrowisata. Hal ini dilakukan karena Kota Batu terdiri atas berbagai pariwisata yang selain daripada wisata buatan, Kota Batu terkenal dengan potensi alam sebagai produksi pertanian dan perkebunan. Namun, permasalahannya adalah bahwa pertanian khususnya organik masih lemah baik pada sumber daya manusianya maupun fasilitas lainnya sebagai pendukung produktivitas daripada pertanian.
4. Pembangunan infrastruktur sebagai penunjang perekonomian dan konektivitas daerah berkonsep kota hijau. Daerah dengan perkembangan perekonomian yang pesat ditandai dengan pemerataan pembangunan khususnya infrastruktur sebagai fasilitas penting dalam pelayanan publik. Pembangunan infrastuktur ini berfungsi sebagai permudah kegiatan masyarakat yang nantinya juga berdampak pada kegiatan perekonomian masyarakatnya.

Salah satu masalah yang dihadapi Kota Batu adalah belum memiliki fasilitas penting seperti jaringan internet yang sangat penting bagi masyarakat khususnya masyarakat desa, dan berbagai infrastruktur lainnya yang berpengaruh pada jalannya ekonomi.

5. Penguatan kelembagaan dan pembiayaan perekonomian daerah. Hal ini berhubungan dengan membenahan kapasitas kelembagaan sebagai pengelola daerah dalam rangka membangun perekonomian daerah. Melakukan pembangunan daerah perlu didukung oleh sumberdaya yang optimal seperti akuntabilitas dari aktor yaitu pemerintah. Permasalahan yang dihadapi Kota Batu dalam rangka pembiayaan pembangunan ini yaitu kurangnya kompetensi yang aparatur yang ditandai dengan nilai saki yang masih dalam kategori yang belum baik.

2.6.5. Desain Kebijakan Antar Sektor Dalam Investasi Daerah



Gambar 6.5
Desain Investasi Daerah Kota Batu

Konsekuensi otonomi daerah di era globalisasi dewasa ini, memberikan berpengaruh strategis bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam daerahnya. Karena Pemerintah Daerah pun bebas melakukan kerjasama melalui skema investasi baik investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) yang tentunya dalam koridor peraturan yang berlaku. Selain itu, hubungan kerjasama tersebut didasari saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak, baik itu aktor Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan investor.

Karena esensi sistem desentralisasi memberikan peluang dan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mampu mandiri dan menetapkan kebijakan yang disesuaikan dengan karakteristik kondisi di masing-masing daerah.

Peranan Investasi menjadi faktor yang penentu bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Mankiw (2007) mengatakan bahwa pengeluaran untuk barang-barang investasi bertujuan meningkatkan standard hidup untuk tahun-tahun mendatang. Selain itu, investasi menjadi solutif bagi daerah dengan segala keterbatasan keuangan yang dimiliki daerah dalam penyediaan pembangunan pelayanan dan pemberdayaan bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraannya. Kondisi serupatentunya dialami oleh Pemerintah Kota Batu.

Jika kita lihat bahwa Laju pertumbuhan investasi daerah di Kota Batu pada tahun-tahun belakangan ini terjadi peningkatan signifikan namun belum diarahkan sepenuhnya pada sektor-sektor peningkatan produksi sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi daerah. oleh karena itu, maka investasi 5 tahun kedepan Pemerintah Kota Batu akan diarahkan pada sektor peningkatan produksi dan layanan. Kendati demikian maka penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan akan dapat di atasi semaksimal mungkin. Karena berdasarkan forecasting Kota Batu kedepan akan berada pada zona dengan:

1. Laju pertumbuhan penduduk diperkirakan sebesar 1,46 persen pada tahun 2017 menjadi 1,88 persen pada tahun 2022.
2. Laju pertumbuhan angkatan kerja diperkirakan sebesar 0,85 persen pada tahun 2022.
3. Elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan diperkirakan sebesar 0,17 per tahun. Artinya setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi akan mengurangi angka kemiskinan sebesar 0,0017 persen.
4. Elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap penciptaan kesempatan kerja diperkirakan sebesar 0,05 Artinya setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi akan menciptakan kesempatan kerja 0,0005 persen.

Dalam rangka menjawab kondisi demikian, maka pemerintah Kota Batu memiliki strategi yang konkrit yang dituangkan dalam RPJMD periode 2017-2022 . Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan Visi dan Misi Kota Batu periode 2017-2022 “Desa Berdaya Kota Berjaya Terwujudnya Kota Batu Sebagai Sentra Agro Wisata Internasional Yang Berkarakter, Berdaya Saing dan Sejahtera”. diantaranya akan melakukan:

1. Revitalisasi pasar induk. Dimana Pemerintah Kota Batu akan melakukan revitalisasi pasar induk sebagai pasar sentral bagi masyarakat Kota Batu. Pasar ini nantinya

menjadi wadah sentral hasil produk-produk UMKM Kota Batu dan khususnya hasil-hasil pertanian organic yang menjadi komoditas unggulan daerah Kota Batu. Pasar tersebut didesain secara modern yang disesuaikan dengan karakter Kota Batu dan tentu bisnisnya didesain secara terintegrasi.

2. Revitalisasi tanaman unggul daerah (apel). Kota Batu terkenal dengan obyek wisata artifisial dan obyek wisata alam seperti wisata petik apel. Namun sebagian besar kondisi kebun apel produksinya tidak maksimal lagi, oleh karenanya dibutuhkan revitalisasi kebun-kebun apel masyarakat agar produksinya kembali melimpah ruah.
3. Rencana pembangunan kereta gantung. Kota Batu yang dibranding sebagai kota wisata yang bertaraf international maka sudah barang tentu infrastruktur penunjang wisatanya harus memiliki standard international. Oleh karena itu, maka salah satu pembangunan infrastruktur yang harus diadakan adalah kereta gantung. Kereta gantung tersebut menjadi transportasi yang ideal karena memiliki keunikan serta daya tarik tersendiri bagi wisatawan dan tak kalah pentingnya menjadi penghubung antara obyek wisata satu dengan obyek wisata lainnya secara efektif dan efisien.

Kota Batu sangat menyadari betul sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa keterbatasan kekuatan financial daerah maka untuk merealisasikan semua program-program strategis Kota Batu tersebut maka Kota Batu membuka ruang-ruang investasi kepada investor dalam negeri maupun asing dengan tetap pada koridor aturan yang berlaku. Hal demikian dilakukan untuk meningkatkan daya saing daerah sehingga kesejahteraan Kota Batu akan meningkat dimasa mendatang

Tabel 6.3
Program Pembangunan Daerah Prioritas yang disertai Pagu Indikatif Kota Batu

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan / sasaran / impact / outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD			
			T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Berlandaskan Nilai Nilai Keagamaan dan Kearifan Budaya Lokal																
Meningkatkan derajat kualitas hidup sosial masyarakat guna mewujudkan Batu Kota Nyaman																
Program Pemantapan Pembauran Kebangsaan dan Kerukunan Umat Beragama (Kampung Guyub Rukun)	Persentase peningkatan kegiatan kerukunan umat beragam, antar suku dan etnis	N/A	-	-	30%	372.273.242	45%	409.500.566	60%	450.450.623	75%	495.495.685	75%	495.495.685	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
Program Kampung Peduli Lingkungan	Persentase masyarakat peduli lingkungan			235.495.000		235.495.000		235.495.000		235.495.000		235.495.000		1.177.475.000	Kecamatan	
Program Peningkatan Penegakan Perda (Satpol Sahabat Masyarakat)	Persentase penyelesaian pelanggaran perda		100%	610.900.000	100%	632.400.000	100%	786.550.000	100%	895.515.000	100%	548.546.500	100%	1.783.346.500	Satpol PP	
Meningkatnya kedudukan Kota Batu sebagai kota tangguh bencana	Indeks Resiko Bencana															
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (Dewi Gana (Desa Wisata Tangguh Bencana)	Persentase desa/ kelurahan tangguh yang terbentuk		29%	294.715.700	45.8%	1.010.000.000	62.5%	1.185.000.000	79%	1.355.000.000	100%	1.590.000.000	100%	5.084.715.700	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan / sasaran / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
			T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1. Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran yang memenuhi standar		90%	4.376.872.9 60	92%	4.876.520.400	95%	5.851.824.4 80	98%	7.022.189.37 6	100%	8.426.627.25 1	100%	8.426.627.251	Dinas Penanggulangan Bencana Kebakaran
	2. Jumlah SDM /relawan kebakaran yang terlatih (134 orang)														
Program Penanganan Bahaya Kebakaran	Persentase penanganan kejadian kebakaran		100%	5.478.456.7 50	100%	6.850.748.100	100%	8.220.897.7 20	100%	9.865.077.26 4	100%	11.838.092.7 17	100%	11.838.092.717	

Meningkatkan Pembangunan Kualitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia

Meningkatkan penguatan kapasitas dan kualitas SDM guna mewujudkan Batu Kota Produktif

Program Pendidikan Dasar (Gerakan 1000 Sarjana)	APK SD/MI, SMP/MTS	100%	100%	25.674.234.16 1	100%	54.039.269.832	100%	27.379.677.0 09	100%	27.419.318.993	100%	27.578.252.193	100%	27.578.252.193	Dinas Pendidikan
	APK Paud	84%	85%	1.486.812.666	86%	1.900.000.000	86%	2.437.000.00 0	87%	3.250.000.000	88%	3.195.000.000	88%	3.195.000.000	
	APM SD/MI/MTs	100%	100%	7.652.156.615	100%	5.996.783.490	100%	6.138.554.10 2	100%	6.293.801.745	100%	6.463.273.359	100%	6.463.273.359	
	Persentase Angka Kelulusan	100%	100%	1.425.643.725	100%	1.641.167.790	100%	1.899.401.24 8	100%	2.199.287.499	100%	2.549.185.080	100%	2.549.185.080	
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (TAHES Batu - Tourism Healty Service)	Persentase puskesmas yang terakreditasi paripurna	0%	0%	11.316.400.48 6	20%	12.580.283.158	0%	12.372.008.7 51	0%	12.961.755.634	40%	14.536.130.066	40%	14.536.130.066	Dinas Kesehatan
	Angka kontak peserta JKN di puskesmas	90%	90%		92%		95%		97%		98%		98%		
	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan terakreditasi	33%	33%		33%		50%		50%		67%		67%		
	Rasio tenaga medis persatuan penduduk	9,8	9,8		9,9		10		10,5		11		10,8		
	Rasio tenaga perawat persatuan penduduk	25,49	25,49		25,60		26		26,5		27		27		

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan / sasaran / impact / outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
			T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah peserta pelatihan yang lulus uji ketrampilan	0		125.000.000	20 orang	375.000.000	25 orang	425.000.000	30 orang	475.000.000	35 orang	525.000.000	110 orang	1.925.000.000	DPMPSTP
Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri Berbasis Agrowisata															
Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah yang inklusif, berkualitas berbasis pada sektor unggulan guna mewujudkan Batu Kota AgroWisata															
Program pengembangan destinasi pariwisata (Desa Wisata Maju)	Persentase pengembangan sarana prasarana daya tarik desa wisata maju		1.23%	540.000.000	16.05%	1.690.000.000	35.80%	2.000.000.000	70.37%	2.780.000.000	100%	2.420.000.000	100%	9.430.000.000	Dinas Pariwisata
Program Pengembangan pertanian organik	1Produktivitas Tanaman Pangan Organik; Produktivitas Tanaman; Perkebunan Organik; Perkebunan Organik; Produktivitas Tanaman; Hortikultura Organik; Jumlah produk pertanian yang lolos sertifikasi pertanian organik; Persentase lahan pertanian apel yang terevitalisasi.			5.520.000.000		5.780.000.000		6.285.000.000		6.690.000.000		7.095.000.000		31.370.000.000	Dinas Pertanian
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah wirausaha baru yang tumbuh	1316 WUB	1341 WUB	1.175.382.000	1366 WUB	3.310.180.000	1391 WUB	3.632.291.000	1416 WUB	1.776.952.000	1441 WUB	1.945.740.000	1441 WUB	11.816.905.000	Dinas Koperasi UM dan Perdagangan

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan / sasaran / impact / outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
			T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Jumlah usaha mikro yang produksinya meningkat	279 unit	329 unit		379 unit		429 unit		479 unit		529 unit		529 unit		
Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Presentase Rumah Tangga yang terpenuhi ketersediaan pangan	2.812 kk	7.12%	3.705.244.000	14.24%	4.277.000.000	21.36%	4.210.000.000	28.48%	4.138.000.000	35.60%	4.065.000.000	35.60%	20.395.244.000	Dinas Ketahanan Pangan
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi (Perizinan berbasis online)	Persentase pendaftaran perizinan yang terintegrasi dengan system informasi	100%	100%	623.809.500	100%	200.000.000	100%	125.000.000	100%	125.000.000	100%	125.000.000	100%	998.809.500	DPMPSTP
Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup (KLH)	Indeks IKLH														
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (1 desa 1 TPST & 1 desa 1 taman tematik 1 ruang publik 1 taman tematik)	Prosentase kualitas pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup		100%	1.398.868.800	100%	1.154.850.000	100%	1.503.260.000	100%	1.704.586.000	100%	1.937.944.600	100%	1.937.944.600	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Perdesaan Yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan															
Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, merata dan berkelanjutan berbasis kemandirian desa dalam rangka mewujudkan Batu Kota Berkarakter															

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan / sasaran / impact / outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
			T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (Bangun Pasar induk Batu & Bangun Gor Desa)	Presentase infrastruktur pemukiman dalam kondisi baik	80%	84%	10.214.000.000	86%	27.858.000.000	88%	120.442.000.000	90%	112.500.000.000	90%	114.750.000.000	90,0%	385.764.000.000	Dinas Perumahan
Peningkatan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dalam kondisi Layak			18.591.728.159		21.201.879.909		23.322.067.900		25.654.274.690		28.219.702.159		28.219.702.159	PUPR
Program Pembangunan BUMDesa Aktif (1 BUMDes 1 Unit Usaha)	% BUMDesa yang memiliki unit usaha		20%	380.000.000	50%	380.000.000	75%	425.000.000	90%	450.000.000	100%	475.000.000	100%	2.110.000.000	P3AP2&KB
Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan	Persentase ketersediaan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan	75%	80%	3.420.570.650	82%	8.185.483.500	84%	7.205.000.000	86%	6.210.000.000	88%	3.879.400.000	86%	3.879.400.000	Dinas Perhubungan
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga Miskin (GAKIN)	Jumlah GAKIN yang Terberdayakan	9080	1453	404.543.400	2906	424.770.570	4359	446.009.099	5812	468.309.553	7265	491.725.031	7265	2.235.357.653	Dinas Sosial
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik Yang Profesional															
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel guna mewujudkan Batu Kota Berintegritas															
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Desa yang akuntabilitas keuangannya baik	73%	80%	1.806.764.700	85%	1.987.441.170	90%	2.186.185.287	100%	2.404.803.816	100%	2.645.284.197	100%	3.432.852.930	INSPEKTORAT

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan / sasaran / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
			T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Persentase rekomendasi pemeriksaan yang ditindaklanjuti	87%	80%		85%		90%		100%		100%		100%		
	Persentase rekomendasi pemeriksaan yang ditindaklanjuti	1,04%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Program pertanggungjawaban APBD dan Pelaporan Keuangan Daerah	Presentase OPD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu dan sesuai prinsip kebijakan akuntansi	70%	80%	734.298.400	90%	803.051.600	95%	887.266.720	98%	881.695.900	98%	917.315.500	98%	917.315.500	BKD
Program Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	Nilai PAD dari sektor pajak	28%	7%	952.034.600	7%	1.047.237.900	8%	851.935.000	8%	912.348.500	10%	987.283.000	31%	987.283.000	
	Predikat/nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)														
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen penganggaran OPD yang berkualitas & Persentase LAKIP OPD yang berkualitas	34%	50%	129.314.800	75%	142.246.280	100%	156.470.908	100%	172.117.999	100%	189.329.799	100%	245.698.120	INSPEKTORAT
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase aparatur pengawas yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan		25 Aparatur	383.835.700	10%	422.219.270	10%	464.441.197	10%	510.885.317	10%	561.973.848	90%	729.287.830	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% usulan program stakeholder yg terakomodir dalam RPJMD dan RKPD	46 program dari 162 program	30%	2.696.309.700	35%	1.910.000.000	40%	2.200.000.000	45%	2.010.000.000	50%	2.485.000.000	50%	11.301.309.700	BAPPELITBANG DA

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan / sasaran / impact / outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
			T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	% keselarasan dokumen rencana perangkat daerah thdp dokumen rencana pembangunan daerah	46 program dari 162 program	30%	2.696.309.700	35%	1.910.000.000	40%	2.200.000.000	45%	2.010.000.000	50%	2.485.000.000	50%	11.301.309.700	
Program Penelitian dan Pengembangan	Jumlah hasil penelitian yang ditindaklanjuti dalam perencanaan	31	54%	2.074.943.000	63%	975.000.000	72%	975.000.000	81%	975.000.000	81%	975.000.000	81%	5.974.943.000	
Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase OPD yang melaporkan LAKIP OPD sesuai dengan Pedoman		100%	120.655.000	100%	120.655.000	100%	120.655.000	100%	120.655.000	100%	120.655.000	100%	603.275.000	Setda
	NILAI EKPPD														
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah	Jumlah arsip yang menjadi bahan informas daerah	9	3	222.800.000	9	555.000.000	17	627.000.000	25	638.000.000	34	622.000.000	34	2.664.800.000	Dinas Perustakaan
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	86%	95%	9.407.408.000	95%	9.407.408.000	95%	9.407.408.000	95%	9.407.408.000	95%	9.407.408.000	95%	47.037.040.000	Sekretariat Dewan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase aparatur perwakilan perangkat daerah yang mengikuti program		100%	120.655.000	100%	120.655.000	100%	120.655.000	100%	120.655.000	100%	120.655.000	100%	603.275.000	Setda Bagian Pemerintahan
	Rerata Indeks Profesional ASN														
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang telah memenuhi kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan			2.253.270.250		3.210.689.625		1.254.858.575		1.690.168.233		1.519.007.856		9.927.994.539	BKPSDM

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan / sasaran / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
			T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Persentase updating data PNS di Pemerintah Kota Batu														
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat														
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase OPD yang menerapkan indikator pelayanan berbasis SKM			763.000.000		763.000.000		763.000.000		763.000.000		763.000.000		3.815.000.000	Sekretariat Daerah
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP-el dan KK)	NA	90%	650.000.000	1	734.750.000	1	749.646.250	1	769.690.944	1	789.886.308	1	789.886.308	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	Persentase ketepatan waktu pelayanan akta perkawinan, pengesahan anak dan perceraian	NA	90%	243.475.600	91%	410.000.000	92%	475.500.000	93%	548.500.000	94%	432.198.000	94%	432.198.000	
	Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	NA	90%		91%		92%		93%		94%		94%		
															Kecamatan
	Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik														
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi (Batu Smart City)	Jumlah Fasilitas Umum yang terakses Jaringan internet	0	0	3.237.845.200	30	3.000.000.000	30	3.000.000.000	30	3.000.000.000	30	3.000.000.000	120 fasum	3.000.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi
	Jumlah OPD yang terintegrasi	0	6	8.910.134.500	5	5.560.134.500	3	4.060.134.500	3	3.060.134.500	3	3.060.134.500	20	3.060.134.500	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan / sasaran / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD		
			T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Optimalisasi Pemanfaatan dan Keamanan Persandian Daerah	Persentase komponen layanan persandian yang dilaksanakan	0	25%	267.651.000	25%	268.000.000	25%	265.000.000	25%	215.000.000	100%	267.651.000	100%	267.651.000	



BAB 7

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2018-2022
Kota Batu

NO	URAIAN	PERTUMBUHAN (%)	PROYEKSI				
			2018	2019	2020	2021	2022
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Kapasitas Riil Keuangan						
2.	Belanja	3,76	631.065.660.779,92	654.810.769.519,80	679.449.335.508,44	705.014.976.863,34	731.542.576.650,94
2.1.	Belanja Tidak Langsung	4,47	359.048.138.535,43	375.086.670.561,86	391.841.637.188,43	409.345.041.252,77	427.630.315.146,05
2.1.1.	Belanja Pegawai	0,69	240.855.729.096,11	242.510.515.431,82	244.176.670.888,07	245.854.273.575,79	247.543.402.142,58
2.1.2.	Belanja Bunga	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Belanja Subsidi	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Belanja Hibah	17,37	66.075.681.523,52	77.553.152.921,16	91.024.282.903,13	106.835.373.752,64	125.392.881.117,39
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	-0,49	4.776.937.905,79	4.753.571.565,62	4.730.319.521,64	4.707.181.214,78	4.684.156.088,71
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil	0,33	8.290.623.755,08	8.317.737.992,39	8.344.940.906,01	8.372.232.785,95	8.399.613.923,16
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan	14,69	39.339.240.781,97	45.117.811.800,21	51.745.201.513,20	59.346.093.545,01	68.063.486.392,16
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	3,84	853.300.965,78	886.263.928,55	920.500.248,51	956.059.115,36	992.991.619,00
2.2.	Belanja Langsung	4,69	276.890.982.929,16	289.877.564.114,25	303.473.234.440,09	317.706.561.054,28	332.607.450.944,29
2.2.1.	Belanja Pegawai	13,74	41.385.328.872,73	47.069.893.072,04	53.535.271.898,58	60.888.715.699,18	69.252.206.405,51
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14,75	154.782.873.693,40	177.615.568.807,83	203.816.414.117,10	233.882.260.110,30	268.383.249.853,85
2.2.3.	Belanja Modal	2,33	95.381.170.022,86	97.599.172.428,46	99.868.752.463,81	102.191.109.519,79	104.567.470.878,03

Adapun tabel program pembangunan perangkat daerah **terlampir**.

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja			
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	
Kesehatan																	
Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Rasio Puskesmas per satuan penduduk (idealnya 1 Puskesmas melayani 30.000 penduduk)		40.799	40.799	5.036.365.997	40.799	6.414.668.316	40.799	7.857.280.967	36.667	8.037.170.224	36.667	8.369.559.684	36.667	8.369.559.684	Dinas Kesehatan	
Program Peningkatan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan desa siaga aktif	persen	100%	100%	766.577.250	100%	874.740.000	100%	6.165.133.150	100%	1.061.500.000	100%	1.083.500.000	100%	1.083.500.000		
	Persentase Rumah tangga sehat	persen	56%	59%		62%		65%		68%		71%		71%			
	Persentase UKBM aktif	persen	97%	98%		99%		100%		100%		100%		100%			
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Prevalensi penyakit hipertensi	persen	37,10%	37,10%	1.037.252.200	37,10%	2.348.593.240	37,00%	2.934.632.000	36,90%	3.521.558.400	36,80%	4.057.571.000	36,80%	4.057.571.000		
	Prevalensi penyakit Diabetes Melitus	persen	6,90%	6,90%		6,90%		6,80%		6,70%		6,60%		6,60%			
	Prevalensi penduduk dengan gangguan jiwa berat	persen	0,17%	0,17%		0,17%		0,16%		0,15%		0,14%		0,14%			
	Prevalensi obesitas	persen	15,40%	15,40%		15,40%		15,30%		15,20%		15,10%		15,10%			
	Angka Notifikasi Kasus Tuberculosis	persen	67,16%	75,00%		78,00%		82,00%		85,00%		90%		90%		4.790.552.859	90%
	Success Rate Kasus Tuberculosis	persen	83,20%	84%		85%		86,0%		88%		90%		90%			90%
	Prevalensi HIV/ AIDS pada kelompok umur 15-49 tahun	persen	0,41%	0,41%		0,41%		0,41%		0,41%		0,41%		0,41%			0,41%
	Prevalensi kecacingan pada anak usia sekolah	persen	n/a	n/a		0,2%		0,2%		0,2%		0,1%		0,1%			0,1%
	Incidence rate DBD		9.31/100.000 penduduk	9.31/100.000 penduduk		9.31/100.000 penduduk		9.31/100.000 penduduk		9.31/100.000 penduduk		9.31/100.000 penduduk		9.31/100.000 penduduk			9.31/100.000 penduduk
	Prevalensi diare	persen	3%	3%		2,50%		2,20%		2%		2%		2%			2%
	Prevalensi hepatitis B	persen	n/a	0.1%		0.2%		0.3%		0.2%		0.2%		0.2%			0.2%
	Prevalensi hepatitis C	persen	n/a	0.004%		0.003%		0.0035%		0.002%		0.002%		0.002%			0.002%
	Prevalensi pneumonia pada balita	persen	1%	1%		1%		1%		0,5%		0,5%		0,5%			0,5%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja			
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	
Program pemberdayaan jasa konstruksi	Jumlah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi		0	0	0												
Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase pemakaman dengan sarana prasarana yang layak			10	2888												
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				100%	1.396.000.000												
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					535.000.000												
Program Peningkatan Disiplin Aparatur				80 Stel	30.000.000												
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				15 orang	75.000.000												
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				4 Laporan	10.000.000												
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum)																	
Program Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Persentase penyelesaian pelanggaran perda	persen	90%			100%	174.375.000	100%	333.040.340	100%	364.199.824	100%	398.473.606	100%	398.473.606		Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase penyelenggaraan kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal	persen	100%			100%	328.690.000	100%	786.550.000	100%	895.515.000	100%	548.546.500	100%	1.783.346.500		
Program Pemberdayaan Keamanan dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan terhadap gangguan masyarakat	persen	90%			100%	421.650.000	100%	2.216.835.000	100%	2.719.185.000	100%	2.981.985.000	100%	2.981.985.000		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17
Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persen	100%			100%	2.755.369.500	100%	2.42.333.660,00	100%	2.272.983.660	100%	2.308.183.660	100%	2.308.183.660	
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Persentase penyelenggaraan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	persen	100%	100%	610.900.000											
Program Peningkatan Penegakan Perda	Persentase penyelesaian pelanggaran perda	persen	90%	100%	278.966.000											
Program Pelayanan Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan terhadap gangguan masyarakat	persen	90%	100%	1.679.692.500											
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	persen	90%	100%	348.940.000											
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional yang tersedia	persen	n/a	100%	328.693.500											
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase jasa pelayanan administrasi perkantoran yang terpanuhi	persen	100%	100%	2.144.036.200											
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran)																
Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1. Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran yang memenuhi standar 2. Jumlah SDM /relawan kebakaran yang terlatih (134 orang)	Persen	n/a	90%	4.376.872.960	92%	978.776.770	95%	5.851.824.480	98%	7.022.189.376	100%	8.426.627.251	100%	8.426.627.251	Dinas Penggulangan Kebakaran
Program Penanganan Bahaya Kebakaran	Persentase penanganan kejadian kebakaran	Persen	100%	100%	5.478.456.750	100%	218.184.000	100%	8.220.897.720	100%	9.865.077.264	100%	11.838.092.717	100%	11.838.092.717	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17
Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persen	100%			100%	4.643.904.880	100%	4.643.904.880	100%	4.643.904.880	100%	4.643.904.880	100%	4.643.904.880	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tingkat kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	Persen	80%	100%	1.059.417.340											
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Sarana dan Prasarana aparatur yang berfungsi dan layak digunakan	Persen	70%	100%	4.492.081.000											
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pakaian kerja sebagai pendukung kinerja untuk aparatur dinas penanggulangan kebakaran	Persen	90%	100%	180.000.000											
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	Persen	90%	100%	408.265.000											
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	N/A	100%	15.000.000											
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Sub Urusan Bencana)																
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase desa/ kelurahan tangguh yang terbentuk	persen	20.8%	29%	294.715.700	45.8%	632.385.400	62.5%	1.185.000.000	79%	1.355.000.000	100%	1.590.000.000	100%	5.084.715.700	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Kedaruratan dan Logistik Bencana	Persentase kejadian bencana yang ditangani secara darurat dengan cepat, tepat, dan efektif	persen	100%	100%	2.284.236.000	100%	1.500.000.000	100%	3.290.000.000	100%	3.886.000.000	100%	4.500.000.000	100%	16.700.236.000	
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat pasca bencana	persen	100%	100%	234.915.000	100%	329.749.900	100%	575.000.000	100%	425.000.000	100%	2.084.915.000	100%	22.500.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP-el dan KK)	Persen	NA	90%	650.000.000	1	734.750.000	1	749.646.250	1	769.690.944	1	789.886.308	1	789.886.308	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	Persen	NA	90%	243.475.600	91%	410.000.000	92%	475.500.000	93%	548.500.000	94%	432.198.000	94%	432.198.000	
	Persentase ketepatan waktu pelayanan akta perkawinan, pengesahan anak dan perceraian	Persen	NA	90%		91%		92%		93%		94%		94%		
Program Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Data/Informasi Kependudukan	Persentase data registrasi kependudukan yang valid	Persen	NA	96%	188.000.000	97%	842.000.000	98%	790.000.000	99%	595.000.000	100%	595.000.000	100%	595.000.000	
Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persen														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persen	NA		1.678.476.420											
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persen	NA		479.298.200											
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persen	NA		7.712.000											
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persen	NA		20.900.000											
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persen	NA		15.000.000,00											
Perhubungan																
Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase kendaraan angkutan umum yang melayani masyarakat	Persen	NA	75%	2.829.680.040	80%	820.194.416	85%	1.253.377.507	90%	1.349.215.258	95%	1.457.636.783	95%	1.457.636.783	Dinas Perhubungan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17
Program Penataan Parkir dan Pengendalian Operasi	persentase pelanggaran perparkiran	Persen	NA	33%	-	17%	602.562.500	17%	360.000.000	17%	365.000.000	17%	370.000.000	17%	370.000.000	
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalulintas Jalan	Persentase ketersediaan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan	Persen	75%	80%	3.420.570.650	82%	2.774.168.964	84%	7.205.000.000	86%	6.210.000.000	88%	3.879.400.000	86%	3.879.400.000	
Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persen	100%			100%	2.756.430.920	100%	2.756.430.920	100%	2.756.430.920	100%	2.756.430.920	100%	2.756.430.920	
Program Peningkatan Kinerja Pelayanan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil survey kepuasan aparatur terhadap pelayanan kepada masyarakat	Persen	80%	80%	1.634.740.960											
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dan layak digunakan	Persen	80%	80%	397.138.000											
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	% jumlah aparatur yang menjadi disiplin	Persen		100%	112.008.000											
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% jumlah aparatur yang menjadi terampil	Persen	70%	75%	61.980.000											
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% jumlah aparatur produktif dibidang manajerial	Persen		100%	15.000.000											
Komunikasi dan Informatika																
Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	Persentase informasi yang disediakan melalui media resmi pemerintah	Persen		65%	274.000.000	70%	476.382.000	70%	476.382.000	70%	476.382.000	70%	476.382.000	70%	476.382.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Peningkatan Efektifitas Komunikasi Publik	Persentase pemberdayaan jejaring komunikasi publik	Persen				100%	238.370.800	100%	238.370.800	100%	238.370.800	100%	238.370.800	100%	238.370.800	
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Fasilitas Umum yang terakses Jaringan internet	fasum	0	0	3.237.845.200	30	3.950.697.600	30	3.000.000.000	30	3.000.000.000	30	3.000.000.000	120 fasum	3.000.000.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17
	Jumlah OPD yang terintegrasi	jumlah	0	6		5		3		3		3		20		
Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persen	100%			100%	1.431.100.500	100%	1.431.100.500	100%	1.431.100.500	100%	1.431.100.500	100%	1.431.100.500	
Program Pengelolaan dan Layanan Informasi	Jumlah informasi yang disediakan melalui media resmi pemerintah	jumlah	0	463	0											
Program pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase kelompok komunikasi yang berpartisipasi dalam deseminasi informasi	Persen	0	20%	2.566.685.870											
Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah peserta fasilitasi	Jumlah	100 peserta	39.572.700												
Program Kerjasama Informasi dengan media massa	Jumlah kerjasama informasi dengan media massa	Jumlah	4 kali	276.216.550												
Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	Persentase data sektoral yang terintegrasi pada data warehouse	Persen	0	10%	193.120.000											
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen		100%	1.069.381.934											
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% sarana layak digunakan	Persen		60%	151.329.600											
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai kompetensi	jumlah		5	24.625.000.00											
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah																
Program Pengembangan dan Peningkatan Koperasi	Persentase koperasi aktif	persen	70.83%	71.28%	517.742.000	71.57%	120.624.500	72%	626.467.000	72.55%	689.114.000	73.08%	758.026.000	73.08%	758.026.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah wirausaha baru yang tumbuh	WUB	1316 WUB	1341 WUB	1.110.081.000	1366 WUB	3.200.000.000	1391 WUB	3.543.202.000	1416 WUB	1.687.863.000	1441 WUB	1.856.651.000	1441 WUB	1.856.651.000	
	Jumlah usaha mikro yang produksinya meningkat	Unit	279 unit	329 unit		379 unit		429 unit		479 unit		529 unit		529 unit		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17
Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase Pembinaan Lingkungan Sosial bidang koperasi, umkm, industri dan perdagangan	Persen	100%			100%	720.517.500	100%	720.517.500	100%	720.517.500	100%	720.517.500	100%	720.517.500	
Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persen	100%			100%	2.052.545.500	100%	2.052.545.500	100%	2.052.545.500	100%	2.052.545.500	100%	2.052.545.500	
Program Penumbuhan Wirausaha Baru	Jumlah wirausaha baru yang tumbuh	WUB	1316 WUB	1341 WUB	65.301.000											
Program Pengembangan Usaha Koperasi	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	persen	114.8%	3.58%	274.956.000											
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai survei kepuasan aparatur internal organisasi	persen	N/A	75%	1.815.047.000											
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Nilai survei kepuasan aparatur internal organisasi	persen	N/A	75%	585.461.000											
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dinas	persen	N/A	80%	47.250.000											
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase kesesuaian kualifikasi dan kompetensi pegawai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen analisis jabatan maupun kebutuhan berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku	persen	N/A	60%	97.500.000											
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase program/kegiatan dinas yang selaras dengan perencanaan jangka menengah daerah	persen	100%	100%	55.250.000											
Penanaman Modal																
Program Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	Penambahan realisasi investasi	milyar	900 M	80 M	270.149.000	100 M	1.208.625.700	120 M	590.600.000	180 M	900.000.000	190 M	606.800.000	670 M	3.852.549.000	Dinas Penanaman Modal
Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	Persentase permohonan perizinan yang diterbitkan	Persen	80%	80%	577.693.000	82%	350.402.500	86%	648.000.000	88%	875.000.000	90%	792.200.000	90%	3.754.893.000	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
Program Pengembangan	Persentase pengaduan perijinan yang diselesaikan	Persen	0	0	0	100%	112.992.500	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	300.000.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja			
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	
Kinerja, Informasi dan Pelayanan Pengaduan																	
Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Capaian Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persen	100%			100%	1.708.885.100										
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor di Kota Batu	jumlah	69 Investor	10 Investor	1.044.342.800												
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase pendaftaran perizinan yang terintegrasi dengan system informasi	Persen	100%	100%	623.809.500												
Program Peningkatan Kapasitas Sumber	Persentase Pegawai yang telah mengikuti pelatihan	Persen	40%	100%	30.000.000												
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase laporan yang dapat diselesaikan tepat waktu	Persen	80%	80%	899.695.420												
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang layak digunakan	Persen	70%	75%	235.458.180												
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah pegawai yang taat pada aturan	jumlah	-	-	-												
Kepemudaan dan Olah Raga																	
Program Pembinaan Peran Serta Pemuda dan Olahraga	Persentase Pemuda Prestasi	Persen	NA			100%	1.350.799.960	100%	1.350.799.960	100%	1.350.799.960	100%	1.350.799.960	100%	1.350.799.960		Dinas Pendidikan
Statistik dan Persandian																	
Program Pengembangan Statistik dan Keamanan Persandian Daerah	Persentase komponen layanan persandian yang dilaksanakan	Persen	0	25%	267.651.000	25%	1.358.316.600	25%	265.000.000	25%	215.000.000	100%	267.651.000	100%	267.651.000		Dinas Komunikasi dan Informatika
Kebudayaan																	
Program Pembinaan dan Pengembangan Budaya	Persentase nilai tradisi budaya yang teraktualisasi (%)	Persen		100%	2.568.760.960	100%	2.512.715.700	100%	4.049.600.000	100%	4.176.500.000	100%	4.303.500.000	100%	4.303.500.000		Dinas Pariwisata
	Persentase Benda, Situs, dan kawasan budaya yang dilestarikan (%)	Persen		12.79%		36.05%		47.67%		59.30%		70.93%		70.93%			

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17
	Persentase kesenian yang teraktualisasi (%)	Persen		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Perpustakaan																
Program Peningkatan Budaya Baca dan Pelayanan Perpustakaan	Jumlah kunjungan perpustakaan	jumlah			497.931.300	125000	407.889.000	150000	720.000.000	175000	720.000.000	200000	720.000.000	200000	3.377.931.300	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah perpustakaan desa/ kelurahan yang terstandarisasi	Jumlah					531.768.150	6 desa/ kel		6 desa/ kel		6 desa/ kel		6 desa/ kel		
Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persen	100%			100%	1.755.765.500	100%	1.755.765.500	100%	1.755.765.500	100%	1.755.765.500	100%	1.755.765.500	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%	876.106.904											
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana				513.826.146											
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan				56.500.000											
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	jumlah pakaian yang tersedia															
Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan program yg dilaksanakan			6	0											
Kearsipan																
Program Peningkatan Efektifitas Tata Kelola Kearsipan	Jumlah OPD yang melaksanakan tata kelola Arsip yang Baku	jumlah	0	3	222.800.000	9	397.056.500	17	627.000.000	25	638.000.000	34	622.000.000	34	2.664.800.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Urusan Pilihan																
Pariwisata																
Program Pembinaan Pengembangan Produk dan Destinasi Pariwisata	Persentase pengembangan sarana prasarana penunjang daya tarik desa wisata maju (%)	Persen		1.23%	965.000.000	16.05%	1.493.706.048	35.80%	2.000.000.000	70.37%	2.780.000.000	100%	2.420.000.000	100%	2.420.000.000	Dinas Pariwisata
	Persentase usaha jasa yang tersertifikasi (%)	Persen	12.24%	16.33%		20.41%		25.51%		30.61%		35.71%		35.71%		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17
Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi (orang)	jumlah	411	60	260.475.000	60	602.380.600	60	1.700.000.000	60	850.000.000	60	1.900.000.000	711	1.920.457.000	
	Jumlah kelompok pengelola desa wisata maju (kelompok)	jumlah	24	1		1		1		1		1		29		
Program Promosi dan Pemasaran Pariwisata	Cakupan wilayah pemasaran wisatawan nusantara		1	3	807.925.000	3	2.995.166.222	3	2.995.166.222	3	2.995.166.222	4	2.995.166.222	17	2.995.166.222	
	Jumlah event tematik agenda tahunan (event)		3	3		4		5		6		7		28		
Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	cakupan Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persen	100%			100%	1.421.621.030	100%	1.421.621.030	100%	1.421.621.030	100%	1.421.621.030	100%	1.421.621.030	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja kepada aparatur internal dinas (%)	Persen	100%	100%	583.400.000											
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat fasilitas komputer yang layak (%)	Persen	100%	100%	61.711.000											
	Persentase aset penunjang kinerja aparatur yang layak (%)	Persen	100%	100%	221.264.000											
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur dinas yang mendapat sertifikat (orang)	Persen	0	5	40.500.000											
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan pelaporan dinas (%)	Persen	100%	100%	15.000.000											
Pertanian																
Program Pengembangan Tanaman Pangan dan Perkebunan	a. Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan				424.000.000		1.193.652.750		935.000.000		1.090.000.000		1.190.000.000		4.394.000.000	Dinas Pertanian
	- Padi		6,194	6,20		6,206		6,213		6,22		6,23		6,23		
	- Jagung		50	50,05		50,10		50,15		50,20		50,25		50,25		
	b. Jumlah Produktivitas Tanaman Perkebunan				470.000.000		705.000.000		740.000.000		775.000.000		810.000.000		3.500.000.000	
	- Kopi		2,710	2,737		2,764		2,792		2,820		2,848		2,848		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17
Program Pengembangan Tanaman Holtikultura	Jumlah Produktivitas Tanaman Holtikultura				7.210.000.000		4.755.092.170		8.500.000.000		9.000.000.000		9.500.000.000		42.210.000.000	
Program Pengembangan Prasarana, Sarana dan Pembiayaan Pertanian	Persentase poktan/gapoktan yang menerapkan teknologi pertanian	Persen	35,00%	40,00%	5.593.750.000	50,00%	2.880.439.056	60,00%	4.060.675.000	65,00%	3.661.099.000	67%	3.281.523.000	67%	20.782.722.000	
	Persentase lahan pertanian yang terfasilitasi jalan pertaniannya (JUT & JAPRO)	Persen	25,00%	33,00%		40,00%		45,00%		50,00%		60%				
	Persentase lahan pertanian yang terfasilitasi irigasi pertaniannya (JITUT & JIDES)	Persen	18,00%	23,00%		25,00%		28,00%		33,00%		35%				
	Persentase lahan pertanian yang dikonservasi	Persen	1,50%	1,60%		2,90%		4,10%		5,00%		5,80%				
	Persentase poktan yang terpenuhi kebutuhan pupuknya	Persen	17,12%	22,18%		29,33%		32,90%		36,47%		40,04%				
	Jumlah petani yang terpenuhi pembiayaan/investasi pertaniannya		N/A	500 orang		500 orang		500 orang		500 orang		2.500 orang				
Program Peningkatan Efektifitas Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang meningkat kelasnya		N/A	3 poktan	360.000.000	6 poktan	2.244.068.100	9 poktan	470.000.000	15 poktan	500.000.000	18 poktan	520.000.000	51 poktan	2.250.000.000	
	Jumlah penyuluh pertanian yang meningkat kualifikasinya		N/A	2 penyuluh		4 penyuluh		6 penyuluh		8 penyuluh		10 penyuluh		30 penyuluh		
Pembinaan Lingkungan Sosial																
Program Pengembangan Tanaman Pangan dan Perkebunan Organik	Produktivitas Tanaman Pangan dan perkebunan Organik				5.520.000.000		5.780.000.000		6.285.000.000		6.690.000.000		7.095.000.000		31.370.000.000	
Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase pembinaan sosial bidang pertanian	Persen				100%	1.047.565.800	100%	1.047.565.800	100%	1.047.565.800	100%	1.047.565.800	100%	1.047.565.800	
Program Pengembangan	Produktivitas Tanaman hortikultura Organik						4.160.139.370		4.160.139.370		4.160.139.370		4.160.139.370		4.160.139.370	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja			
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	
Tanaman Holtikultura Organik																	
Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persen	100%			100%	2.528.235.563	100%	2.528.235.563	100%	2.528.235.563	100%	2.528.235.563	100%	2.528.235.563		
Program Pengembangan Usaha Peternakan dan Perikanan Program Pengembangan Peternakan	Jumlah Populasi Hewan Ternak				1.780.000.000												
	Jumlah produk olahan produk peternakan yang terjual		N/A	2 produk													
	Penurunan prevalensi penyakit hewan menular strategis kota Batu	Persen	6%	4%													
	Produktivitas perikanan		25,44	27,57													
	Angka Konsumsi Ikan		17,028	17,28													
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	prosentase administrasi perkantoran yang terpenuhi	Persen	85%	85%	2.319.183.520											
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase sarana prasarana aparatur yang terlayani	Persen	11%	11%	221.608.535,00												
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	prosentase upaya peningkatan kualitas SDM aparatur yang terlayani	Persen	100%	100%	80.350.000												
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	prosentase upaya peningkatan kualitas sistem pelaporan kinerja pertanian yang terlayani	Persen	16%	32%	240.927.000												
Perdagangan																	
Program Pengembangan dan Pembinaan Usaha Perdagangan	Persentase pertumbuhan omzet pasar rakyat	persen	N/A	4.5%	1.350.000.000	4.52%	50.046.000	4.54%	5.972.938.000	4.56%	3.526.503.000	4.58%	3.583.396.000	4.58%	3.583.396.000		Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
Program Peningkatan Kinerja Pelayanan UPT Pasar	Persentase pedagang wajib retribusi lingkup kerja UPT Pasar yang tertib retribusi	persen	66 persen	68 persen	300.000.000	70 persen	322.500.000	72 persen	346.688.000	75 persen	372.690.000	80 persen	400.642.000	80 persen	400.642.000		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur					150.000.000											
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah					600.000.000											
Program Peningkatan Efektifitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Persentase kebijakan Peningkatan Efektifitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah yang disusun	Persen	100%			100%	1.358.613.570	100%	1.358.613.570	100%	1.358.613.570	100%	1.358.613.570	100%	1.358.613.570	Bagian Organisasi
Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Capaian Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persen	100%			100%	383.704.830	100%	383.704.830	100%	383.704.830	100%	383.704.830	100%	383.704.830	
Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah					50.000.000											
Program Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur					389.420.000											
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					341.425.000											
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					8.000.000											
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					40.000.000											
Program Pelayanan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pelayanan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	Persen				100%	873.555.400	100%	873.555.400	100%	873.555.400	100%	873.555.400	100%	873.555.400	Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai	Persentase Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai	Persen				100%	352.781.000	100%	352.781.000	100%	352.781.000	100%	352.781.000	100%	352.781.000	
Program Pemberantasan Cukai Ilegal	Persentase kebijakan Pemberantasan Cukai Ilegal yang disusun	Persen				100%	67.043.500	100%	67.043.500	100%	67.043.500	100%	67.043.500	100%	67.043.500	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17
Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persen				100%	473.329.900	100%	473.329.900	100%	473.329.900	100%	473.329.900	100%	473.329.900	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pengembangan Data/ Informasi				100.000.000											
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah				460.000.000											
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah				50.000.000											
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				110.000.000											
Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				670.000.000											
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				240.000.000											
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					414.859.000											
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					15.000.000											
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					80.000.000											
Program Pembinaan Kemasyarakatan																Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17
Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persen	100%			100%	8.768.516.581	100%	8.768.516.581	100%	8.768.516.581	100%	8.768.516.581	100%	8.768.516.581	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berjalan dengan baik			95%	14.282.832.100											
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase keberhasilan peningkatan disiplin aparatur yang terlaksana dengan baik			100%	2.630.145.000											
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase keberhasilan peningkatan disiplin aparatur yang terlaksana dengan baik			100%	213.810.000											
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase keberhasilan kegiatan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			95%	2.601.430.000											
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase kesesuaian rencana strategis dengan Rencana Kerja Sekretariat DPRD setiap Tahunnya			100%	15.000.000											
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase keberhasilan pengembangan wawasan kebangsaan			100%	22.975.000											
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Persen	100%			100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	Kecamatan Batu
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan	Persen	100%			100%	3.107.620.071	100%	3.107.620.071	100%	3.107.620.071	100%	3.107.620.071	100%	3.107.620.071	
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Persentase Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Persen	100%			100%	4.167.129.855	100%	4.167.129.855	100%	4.167.129.855	100%	4.167.129.855	100%	4.167.129.855	
Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persen	100%			100%	1.512.148.074	100%	1.512.148.074	100%	1.512.148.074	100%	1.512.148.074	100%	1.512.148.074	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	persen			164.600.000											
Program Pemeliharaan rutin berkala Peralatan/ Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase peralatan/ perlengkapan gedung yang terpeliharains	persen		100%	31.190.000											
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	persen		100%	17.998.100											
Perencanaan																
Program Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Daerah	% usulan program stakeholder yg terakomodir dalam RPJMD dan RKPD	persen	46 program dari 162 program	30%	2.696.309.700	35%	1.197.136.920	40%	2.200.000.000	45%	2.010.000.000	50%	2.485.000.000	50%	11.301.309.700	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	% keselarasan dokumen rencana perangkat daerah thdp dokumen rencana pembangunan daerah	persen	187 program dari 196 program	80%		85%		90%		95%		95%		50%		
Program Perencanaan Tata Ruang Wilayah	% keselarasan renstra dan renja terhadap arahan RTRW	persen	NA	70%	280.418.000	80%	50.000.000	90%	50.000.000	90%	50.000.000	95%	200.000.000	95%	630.418.000	
	Persentase hasil penelitian/ kajian yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan	persen	31 studi/kajian dari 90 studi/kajian	60%		70%		80%		90%		90%		90%		
Program Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan	Persentase hasil penelitian/ kajian yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan	Persen				63%	579.277.000	63%	579.277.000	63%	579.277.000	63%	579.277.000	63%	579.277.000	
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Wilayah	Persentase hasil penelitian/ kajian yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan	Persen				63%	506.007.600	63%	506.007.600	63%	506.007.600	63%	506.007.600	63%	506.007.600	
Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persen	100%			100%	1.261.764.979	100%	1.261.764.979	100%	1.261.764.979	100%	1.261.764.979	100%	1.261.764.979	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja			
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	
Program Pengembangan Data/ Informasi	% ketersediaan data/ informasi perencanaan	persen	785 data terisi dari 798 data tersedia	70%	493.909.500												
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	% aparatur yang berkemampuan dalam perencanaan pembangunan	persen	NA	80%	350.000.000												
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian program pelayanan administrasi perkantoran di Kantor Bappeda Kota Batu				712.017.360												
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur				355.360.000												
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase capaian program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kantor Bappeda Kota Batu		30 orang	30 orang	171.415.000												
Penelitian dan Pengembangan																	
Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti dalam perencanaan	Persen	31	54%	2.074.943.000	63%	799.037.000	72%	975.000.000	81%	975.000.000	81%	975.000.000	81%	5.974.943.000		
Keuangan																	
Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase potensi PAD yang dikembangkan	Persen				10%	1.553.267.200	10%	1.553.267.200	10%	1.553.267.200	10%	1.553.267.200	10%	1.553.267.200		Badan Keuangan Daerah
Program Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase pertumbuhan realisasi penerimaan PAD	Persen	28%			7%	589.512.806	7%	589.512.806	7%	589.512.806	7%	589.512.806	7%	589.512.806		
Program Pengendalian Kas dan Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase SKPD dengan realisasi belanja diatas 80%	Persen	68%	75%	461.240.750	80%	639.037.700	85%	558.026.000	90%	613.828.600	95%	665.210.600	95%	665.210.600		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja		
				T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17
Program Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Penetapan APBD	Persen	tepat waktu	tepat waktu	1.951.275.920	tepat waktu	1.722.831.277	tepat waktu	1.955.465.000	tepat waktu	2.002.011.000	tepat waktu	2.051.200.000	tepat waktu	2.051.200.000	
Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Persentase SKPD yang menyusun laporan pendapatan dan belanja dengan benar dan sesuai SAP	Persen	70%	80%	734.298.400	90%	744.608.700	95%	887.266.720	98%	881.695.900	98%	917.315.500	98%	917.315.500	
Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase SKPD yang menyusun neraca aset dengan benar dan tepat waktu	Persen	70%	80%	2.344.583.700	90%	1.505.383.300	95%	2.749.907.435	98%	3.024.898.179	98%	3.327.387.996	98%	3.327.387.996	
Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persen	100%			100%	13.803.111.535	100%	13.803.111.535	100%	13.803.111.535	100%	13.803.111.535	100%	13.803.111.535	
Program Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	Persentase pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah		28%	7%	952.034.600											
Program Pengembangan dan Pengelolaan Data Wajib Pajak Daerah	% data wajib pajak daerah yang tervalidasi		5%	10%	1.012.457.900											
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penerbitan SP2D dari SPM yang diajukan		99%	100%	6.834.374.370											
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase aset dalam kondisi baik		75%	75%	9.746.626.460											
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	% ASN yang menggunakan pakaian dinas sesuai ketentuan			100%	1.500.000.000											
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya		80%	83%	74.200.000											
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan																
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang telah memenuhi kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan				2.253.270.250		2.279.081.385		1.254.858.575		1.690.168.233		1.519.007.856		9.927.994.539	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM



BAB 8

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Ukuran kemajuan suatu daerah diukur dari indikator yang mampu menggambarkan pembangunan yang telah dilakukan di daerah tersebut. Kemampuan pengukuran kinerja tersebut diantaranya ditentukan oleh data dan informasi yang mengolah hasil-hasil atau kinerja pembangunan dengan hasil yang dicapai. Indikator kinerja tersebut juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota selama periode jabatan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembagnunan Kota Batu periode 2017-2022 yang telah direncanakan. Dalam hal ini, indikator kinerja Kota Batu ditetapkan sebagaimana telah disajikan dalam Bab V tentang Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kota Batu selama lima tahun kedepan sebagaimana ditunjukkan pada tabel 8.1.

Sementara itu, keberhasilan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah ditunjukkan dengan pencapaian indikator kinerja yang berbagai urusan yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang disajikan dalam tabel 8.2

Tabel 8.1.**Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Batu**

No	Indikator	Satuan	Kondisi awal (2017)	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Akhir (2022)
1.	Persentase Penyelesaian potensi kerusuhan bermotif SARA	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Penyelesaian Potensi Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase penurunan jumlah PMKS	persentase	N/A	16 %	16 %	16 %	16 %	16 %	16 %
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	persentase	3.75%	2.25 %	2.15%	2,05%	1.95%	1.5%	1.5%
5.	Persentase Seni Budaya Lokal Yang Lestari	persen	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
6.	Indeks Pendidikan	poin angka	0.67	0.68	0.69	0.7	0.71	0.72	0.72
7.	Persentase pemuda pelopor berprestasi	persentase	N/A	75%	75%	75%	75%	75%	75%
8.	Indeks Minat Baca Daerah	persen	36%	48%	55%	62%	69%	73%	73%
9.	Angka Usia Harapan Hidup	tahun	72,6 tahun	72,65 tahun	72,75 tahun	72,85 tahun	72,85 tahun	72,95 tahun	72,95 tahun

No	Indikator	Satuan	Kondisi awal (2017)	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Akhir (2022)
10.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	persentase	70.02	73.66	74.60	75.75	76.50	77,75	77,75
11.	Pertumbuhan PDRB kategori Jasa Akomodasi Pariwisata terhadap total PDRB (%)	persen	12.10%	12.50%	11.50%	12.75%	13.00%	13.50%	13.50%
12.	Pertumbuhan PDRB kategori Pertanian, dan Perikanan terhadap total PDRB	persen	6.56%	6.66%	6.76%	6.86%	6.96%	7.06%	7.06%
13.	Pertumbuhan PDRB kategori Perdagangan dan Industri Olahan terhadap total PDRB	Rupiah	12.30%	12.50%	12.75%	13%	13.25%	13.50%	13.50%
14.	Nilai Investasi Daerah	Trilyun Rupiah	3.68	3.75	4.25	4.75	5.25	5.75	5.75
15.	Tingkat Kemandirian pangan daerah	persentase	81.19%	>80%	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %
16.	Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	persentase	54.22	56.95	61.06	65.97	70.98	78.4	78.4
17.	Indeks Kualitas Infrastruktur Irigasi	Persentase	83.53	85.05	86.52	88.11	89.34	91.29	91.29

No	Indikator	Satuan	Kondisi awal (2017)	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Akhir (2022)
18.	Persentase kesesuaian pembangunan wilayah yang sesuai dengan RTRW	persentase	55	60	65	75	85	90	90
19.	Indeks Kualitas Pemukiman		80%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
20.	Tingkat Pelayanan Jalan (level Of Service)	Indeks	N/A	0.76	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
21.	Indeks Resiko Bencana	indeks angka	134	131	128	125	122	119	119
22.	Tingkat ketahanan dan keselamatan kebakaran	persentase	N/A	85%	85%	85%	85%	85%	85%
23.	persentase Desa Maju - Mandiri	persentase	63.2%	68.42%	73.68%	78.95%	78.95%	78.95%	78.95%
24.	Indeks Kualitas Air	indeks angka	51	51,82	51,92	52,12	52,22	52,32	52,32
25.	Indeks Kualitas Udara	indeks angka	87,04	87,1	87,3	87,5	87,7	88	88
26.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	indeks angka	77,66	77,66	77.67	77.68	77.69	77.7	77.7
27.	Opini BPK	Kategori Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
28.	Nilai SAKIP	Kategori Nilai	C	B	BB	A	A	A	A
29.	Nilai EKPPD	Kategori Nilai KPPD	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
30.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Angka	N/A	76	77	79	80	81	81

No	Indikator	Satuan	Kondisi awal (2017)	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Akhir (2022)
31.	Nilai SPBE	Kategori Nilai SPBE	CUKUP	CUKUP	BAIK	BAIK	BAIK	SANGA T BAIK	SANGAT BAIK
32.	Skala Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintah	Angka	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	SANGA T BAIK	SANGA T BAIK	SANGAT BAIK

Tabel 8.2.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Batu

Tahun 2017-2022

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urusan Wajib									
Terkait Pelayanan Dasar									
Pendidikan									
Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan
Angka Kelulusan Paket A/B/C	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Pelayanan Pendidikan	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Persentase pendidik yang mendapatkan ijazah minimal D-IV/S1 yang telah difasilitasi	persen	91%	92%	93%	94%	95%	100%	100%	
Cakupan Kesekretariatan Perangkat Daerah	persen			100%	100%	100%	100%	100%	
Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama	persen	100%	100%						
Meningkatnya kegiatan pelestarian budaya	persen	100%	100%						
meningkatnya budaya siswa	persen	80%	81%						

Angka APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	<i>persen</i>	84%	85%					
Jumlah Pemuda Prestasi Bidang keagamaan	<i>persen</i>		1000%					
Jumlah Pemuda Prestasi Bidang Kepemudaan/Kepe mimpinan	<i>persen</i>		10%					
Jumlah Pemuda berprestasi di bidang Kebangsaan	<i>persen</i>	100%	100%					
Jumlah Pemuda yang berprestasi di bidang Kewirausahaan	<i>orang</i>	60 Orang	60 Orang					
Jumlah Pemuda Yang berprestasi di bidang Pemberantasan Narkoba	<i>orang</i>	80 org	Sidak 27 lembaga, 27 petugas					
Jumlah Atlet yang Berprestasi Di tingkat Provinsi/Nasional dan regional	<i>orang</i>	6 org	10 org					
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	<i>persen</i>	100%	100%					
persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	<i>persen</i>	100%	100%					
presentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	<i>persen</i>	100%	100%					
persentase pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	<i>persen</i>	100%	100%					
Kesehatan								

Rasio Puskesmas per satuan penduduk (idealnya 1 Puskesmas melayani 30.000 penduduk)		40.799	40.799	40.799	40.799	36.667	36.667	36.667	Dinas Kesehatan
Cakupan desa siaga aktif	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Persentase Rumah tangga sehat	persen	56%	59%	62%	65%	68%	71%	71%	
Persentase UKBM aktif	persen	97%	98%	99%	100%	100%	100%	100%	
Prevalensi penyakit hipertensi	persen	37,10%	37,10%	37,10%	37,00%	36,90%	36,80%	36,80%	
Prevalensi penyakit Diabetes Melitus	persen	6,90%	6,90%	6,90%	6,80%	6,70%	6,60%	6,60%	
Prevalensi penduduk dengan gangguan jiwa berat	persen	0,17%	0,17%	0,17%	0,16%	0,15%	0,14%	0,14%	
Prevalensi obesitas	persen	15,40%	15,40%	15,40%	15,30%	15,20%	15,10%	15,10%	
Angka Notifikasi Kasus Tuberculosis	persen	67,16%	75,00%	78,00%	82,00%	85,00%	90%	90%	
Success Rate Kasus Tuberculosis	persen	83,20%	84%	85%	86,00%	88%	90%	90%	
Prevalensi HIV/AIDS pada kelompok umur 15-49 tahun	persen	0.41%	0.41%	0.41%	0.41%	0.41%	0.41%	0.41%	
Prevalensi kecacingan pada anak usia sekolah	persen	n/a	n/a	0,20%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	
Incidence rate DBD		9.31/100.000 penduduk							
Prevalensi diare	persen	3%	3%	2,50%	2,20%	2%	2%	2%	
Prevalensi hepatitis B	persen	n/a	0.1%	0.2%	0.3%	0.2%	0.2%	0.2%	
Prevalensi hepatitis C	persen	n/a	0.004%	0.003%	0.0035%	0.002%	0.002%	0.002%	
Prevalensi pneumonia pada balita	persen	1%	1%	1%	1%	0,50%	0,50%	0,50%	

Persentase Puskesmas terakreditasi paripurna	persen	0%	0%	20%	0%	0%	40%	40%
Angka kontak peserta JKN di Puskesmas	persen	90%	90%	92%	95%	97%	98%	98%
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan rujukan terakreditasi	persen	33%	33%	33%	50%	50%	67%	67%
Rasio tenaga medis per satuan penduduk	rasio	9,8	9,8	9,9	10	10,5	11	10,8
Rasio tenaga perawat per satuan penduduk	rasio	25,49	25,49	25,6	26	26,5	27	27
Rasio tenaga bidan per satuan penduduk	rasio	24,51	24,51	24,8	25	25,5	26	25,9
Persentase ketersediaan obat, alkes, obat tradisional dan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	persen	76%	76%	78%	80%	82%	85%	85%
Persentase ketersediaan obat dan vaksin	persen	85%	85%	90%	92%	95%	97%	97%
Persentase Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta menjalankan pelayanan kefarmasian sesuai standar	persen	9%	9%	45%	45%	55%	64%	64%
Cakupan Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persen	100%		100%	100%	100%	100%	100%
<i>Persentase Puskesmas dan jaringannya dalam kondisi gedung sesuai standar Permenkes 75/ 2014</i>	<i>persen</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>					

Persentase Puskesmas dengan alat kesehatan dan alat penunjang sesuai standar Permenkes 75/ 2014 tentang Puskesmas	<i>persen</i>	0%	0%					
Persentase Puskesmas dengan alat kesehatan terkalibrasi sesuai standar	<i>persen</i>	0%	0%					
Jumlah kematian ibu	<i>jumlah</i>	3	3					
Jumlah kematian bayi	<i>jumlah</i>	11	11					
Cakupan Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan	<i>persen</i>	90,95%	91%					
Cakupan pelayanan nifas	<i>persen</i>	89,40%	90%					
Prevalensi balita stunting	<i>persen</i>	35,10%	34,90%					
Prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk	<i>persen</i>	0,60%	0,59%					
Prevalensi balita gemuk	<i>persen</i>	1,50%	1,50%					
% Keluarga sadar gizi	<i>persen</i>	28,60%	29%					
Jumlah kasus kematian balita	<i>jumlah</i>	11	10					
Cakupan pelayanan balita dan APRAS paripurna	<i>persen</i>	68%	68%					
Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	<i>persen</i>	<i>n/a</i>	40%					
Prevalensi penyakit menular berbasis lingkungan	<i>persen</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>					
persentase KK dengan akses sanitasi dasar baik	<i>persen</i>	92%	92,50%					

Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (catering, depo air minum, restoran) yang memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi	<i>persen</i>	11%	12%						
persentase pelayanan administrasi perkantoran	<i>persen</i>	100%	100%						
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
Persentase Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air yang dibangun dan dipelihara	Persen			70%	70%	70%	70%	70%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Jumlah terpenuhinya kebutuhan alat - alat berat									
persentase Lahan atau Kawasan yang sesuai RTRW	<i>persen</i>	70%	3%	3%	3%	3%	3%	100%	
Persentase jumlah PJU/PJL kondisi baik	<i>persen</i>	42%	46%	51%	56%	62%	69%	69%	
Persentase pembinaan lingkungan sosial bidang pekerjaan umum	Persen			100%	100%	100%	100%	100%	
Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persen			100%	100%	100%	100%	100%	
Persentase peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dalam kondisi baik	<i>persen</i>								

Jumlah Peningkatan atau Penambahan jaringan irigasi dalam kondisi baik									
Nilai evaluasi AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			10						
Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	persen		100%						
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang disediakan			100%						
Persentase disiplin aparatur yang disediakan	persen	n/a	100%						
Persentase peningkatan kompetensi teknis Aparatur Sipil Negara (ASN)			100%						
Jumlah terpenuhinya kebutuhan alat - alat berat									
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	80,16%		80,76%	81,11%	81,45%	81,79%	81,79%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Presentase infrastruktur pemukiman dalam kondisi baik	Persen	80%		86%	88%	90%	90%	90,00%	
Cakupan Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persen	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
Cakupan ketersediaan rumah layak huni		80,16%	80,41%						

Presentase penduduk berakses air minum		82,00%	84,49%						
Presentase rumah tinggal bersanitasi		85,16%	86,96%						
persentase akses jalan lingkungan, saluran air limbah, sanitasi dan air bersih di lingkungan perkotaan			15%						
Presentase infrastruktur pemukiman dalam kondisi baik		80%	84%						
Jumlah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi		0	0						
Persentase pemakaman dengan sarana prasarana yang layak			10						
			100%						
			80 Stel						
			15 orang						
			4 Laporan						
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum)									
Persentase penyelesaian pelanggaran perda	persen	90%		100%	100%	100%	100%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja

Persentase penyelenggaraan kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal	persen	100%		100%	100%	100%	100%	100%
Persentase penanganan terhadap gangguan masyarakat	persen	90%		100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persen	100%		100%	100%	100%	100%	100%
<i>Persentase penyelenggaraan kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal</i>	<i>persen</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>					
<i>Persentase penyelesaian pelanggaran perda</i>	<i>persen</i>	<i>90%</i>	<i>100%</i>					
<i>Persentase penanganan terhadap gangguan masyarakat</i>	<i>persen</i>	<i>90%</i>	<i>100%</i>					
<i>Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</i>	<i>persen</i>	<i>90%</i>	<i>100%</i>					
<i>Persentase kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional yang tersedia</i>	<i>persen</i>	<i>n/a</i>	<i>100%</i>					
<i>Persentase jasa pelayanan administrasi perkantoran yang terpanuhi</i>	<i>persen</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>					
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran)								

1. Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran yang memenuhi standar	Persen	n/a	90%	92%	95%	98%	100%	100%	Dinas Penganggulangan Kebakaran
2. Jumlah SDM /relawan kebakaran yang terlatih (134 orang)									
Persentase penanganan kejadian kebakaran	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Cakupan Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persen	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
tingkat kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	Persen	80%	100%						
% Sarana dan Prasarana aparatur yang berfungsi dan layak digunakan	Persen	70%	100%						
Tersedianya pakaian kerja sebagai pendukung kinerja untuk aparatur dinas penanggulangan kebakaran	Persen	90%	100%						
Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	Persen	90%	100%						
Prosentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	N/A	100%						

Prosentase lembaga/organisasi masyarakat yang aktif di Kota Batu	Persen	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persen	100%		100%	100%	100%	100%	100%
<i>Persentase deteksi dini kejadian yang ditindaklanjuti</i>	Persen	100%	100%					
<i>Persentase kejadian konflik yang tertangani</i>	Persen	100%	100%					
<i>Persentase peningkatan kegiatan kerukunan umat beragam , antar suku dan etnis</i>	Persen	n/a	-					
<i>Persentase peningkatan kegiatan kerukunan umat beragam , antar suku dan etnis</i>	Persen	n/a	15%					
<i>% Masyarakat yang memahami pendidikan Politik</i>	Persen	n/a	100%					
<i>% Masyarakat yang memahami pendidikan Politik</i>	Persen	n/a	100%					
<i>Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran</i>	Persen	n/a	80%					
<i>Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak digunakan</i>	Persen	n/a	80%					
<i>Prosentase jumlah aparatur produktif sesuai bidang tugasnya</i>	Persen	n/a	10%					
Sosial								

Jumlah Gakin Yang Terberdayakan	Gakin	9080	1453	2906	4359	5812	7265	7265	Dinas Sosial
Prosentase PMKS yang direhabilitasi	Persen	3383	16%	32%	48%	64%	80%	80%	
Cakupan Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persen	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
<i>Prosentase GAKIN yang terberdayakan</i>	<i>Gakin</i>	<i>9080</i>	<i>16%</i>						
<i>prosentase administrasi perkantoran yang terpenuhi</i>	<i>Persen</i>		<i>16%</i>						
<i>prosentase sarana prasarana aparatur yang terlayani</i>	<i>Persen</i>		<i>16%</i>						
<i>prosentase SDM aparatur yang terlayani</i>	<i>orang</i>	<i>60 orang</i>	<i>60 orang</i>						
Urusan Wajib									
Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
Ketenagakerjaan									
Jumlah lulusan pelatihan yang memiliki sertifikasi keahlian	orang	30 orang	35 orang	35 orang	45 orang	50 orang	55 orang	225 orang	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Jumlah peserta pelatihan yang lulus uji ketrampilan	orang	0		20 orang	25 orang	30 orang	35 orang	110 orang	
Persentase penyelesaian kasus perselisihan pengusaha pekerja	Persen	60%	70%	75%	80%	85%	90%	90%	
<i>Persentase pencari kerja yang telah difasilitasi penempatannya</i>	<i>Persen</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>						

Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak									
% Penyelesaian Kasus Kekerasan yang terjadi	persen	100%		100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
Cakupan Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persen	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
% SOPD yang melakukan Penganggaran responsif gender	persen		30% SOPD	50% SOPD					
% Penyelesaian Kasus Kekerasan yang terjadi	persen	100%	100%	100%					
% Keterwakilan perempuan dalam jabatan	persen								
% pelayanan administrasi perkantoran									
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
Persentase desa yang diberdayakan oleh pemerintah desa	persen	100%		100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
% Infrastruktur desa	persen	NA	20%						
% BUMDesa yang memiliki unit usaha	persen	NA	20%						
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1. % Pertolongan Persalinan oleh tenaga ahli	Persen	NA							Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
2. % Angka Kelahiran Remaja	Persen	NA							

Persentase Jumlah Dokumen Pelaku Usaha yg terpantau	Persen	NA	100%		100%	100%	100%	100%
Prosentase kualitas pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Persen	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persen	NA		100%	100%	100%	100%	100%
<i>Meningkatkan upaya pelestarian dan perlindungan mata air</i>	Persen	NA	100%					
<i>Terwujudnya upaya pengendalian dampak perubahan iklim</i>	Persen	NA						
<i>Terwujudnya upaya pemulihan sumber - sumber air serta kelestarian fungsi daerah tangkapan air</i>	Persen	NA						
<i>Prosentase peningkatan rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam</i>	Persen	NA	100%					
<i>Prosentase kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</i>	Persen	NA	80%					
<i>Prosentase peningkatan pengendalian polusi</i>	Persen	NA	80%					
<i>Luas Taman/Taman yang dikelola</i>	Persen	NA	100%					

Prosentase Luas Taman/ Total Luas Kota x 100%	Persen	NA	100%						
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	NA	100%						
	Persen	NA	100%						
	Persen	NA	100%						
Pertanahan									
Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	NA		0,30%	0,30%	0,30%	0,20%	2,10%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Persentase luas lahan bersertifikat			1%						
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP-el dan KK)	Persen	NA	90%	1	1	1	1	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	Persen	NA	90%	91%	92%	93%	94%	94%	
Persentase ketepatan waktu pelayanan akta perkawinan, pengesahan anak dan perceraian	Persen	NA	90%	91%	92%	93%	94%	94%	
Persentase data registrasi kependudukan yang valid	Persen	NA	96%	97%	98%	99%	100%	100%	
Cakupan Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persen								
	Persen	NA							
	Persen	NA							
	Persen	NA							

	Persen	NA							
	Persen	NA							
Perhubungan									
Persentase kendaraan angkutan umum yang melayani masyarakat	Persen	NA	75%	80%	85%	90%	95%	95%	Dinas Perhubungan
persentase pelanggaran parkir	Persen	NA	33%	17%	17%	17%	17%	17%	
Persentase ketersediaan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan	Persen	75%	80%	82%	84%	86%	88%	86%	
Cakupan Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persen	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
Hasil survey kepuasan aparatur terhadap pelayanan kepada masyarakat	Persen	80%	80%						
% sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dan layak digunakan	Persen	80%	80%						
% jumlah aparatur yang menjadi disiplin	Persen		100%						
% jumlah aparatur yang menjadi terampil	Persen	70%	75%						
% jumlah aparatur produktif dibidang manajerial	Persen		100%						
Komunikasi dan Informatika									
Persentase informasi yang disediakan melalui media resmi pemerintah	Persen		65%	70%	70%	70%	70%	70%	Dinas Komunikasi dan Informatika

Persentase pemberdayaan jejaring komunikasi publik	Persen			100%	100%	100%	100%	100%	
Jumlah Fasilitas Umum yang terakses Jaringan internet	fasum	0	0	30	30	30	30	120 fasum	
Jumlah OPD yang terintegrasi	jumlah	0	6	5	3	3	3	20	
Cakupan Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persen	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
Jumlah informasi yang disediakan melalui media resmi pemerintah	jumlah	0	463						
Persentase kelompok komunikasi yang berpartisipasi dalam deseminasi informasi	Persen	0	20%						
Jumlah peserta fasilitasi	Jumlah		100 peserta						
Jumlah kerjasama informasi dengan media massa	Jumlah		4 kali						
Persentase data sektoral yang terintegrasi pada data warehouse	Persen	0	10%						
persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen		100%						
% sarana layak digunakan	Persen		60%						
Jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai kompetensi	jumlah		5						
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah									
Persentase koperasi aktif	persen	70.83%	71.28%	71.57%	72%	72.55%	73.08%	73.08%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
Jumlah wirausaha baru yang tumbuh	WUB	1316 WUB	1341 WUB	1366 WUB	1391 WUB	1416 WUB	1441 WUB	1441 WUB	

Jumlah usaha mikro yang produksinya meningkat	Unit	279 unit	329 unit	379 unit	429 unit	479 unit	529 unit	529 unit
Persentase Pembinaan Lingkungan Sosial bidang koperasi, umkm, industri dan perdagangan	Persen	100%		100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persen	100%		100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah wirausaha baru yang tumbuh	WUB	1316 WUB	1341 WUB					
Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	persen	114.8%	3.58%					
Nilai survei kepuasan aparatur internal organisasi	persen	N/A	75%					
Nilai survei kepuasan aparatur internal organisasi	persen	N/A	75%					
Tingkat kedisiplinan aparatur dinas	persen	N/A	80%					
Prosentase kesesuaian kualifikasi dan kompetensi pegawai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen analisis jabatan maupun kebutuhan berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku	persen	N/A	60%					

Statistik dan Persandian									
Persentase komponen layanan persandian yang dilaksanakan	Persen	0	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Kebudayaan									
Persentase nilai tradisi budaya yang teraktualisasi (%)	Persen		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pariwisata
Persentase Benda, Situs, dan kawasan budaya yang dilestarikan (%)	Persen		12.79%	36.05%	47.67%	59.30%	70.93%	70.93%	
Persentase kesenian yang teraktualisasi (%)	Persen		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Perpustakaan									
Jumlah kunjungan perpustakaan	jumlah			125000	150000	175000	200000	200000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah perpustakaan desa/ kelurahan yang terstandarisasi	Jumlah				6 desa/ kel	6 desa/ kel	6 desa/ kel	6 desa/ kel	
Cakupan Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persen	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%						
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana									
Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan									
jumlah pakaian yang tersedia									
Jumlah laporan program yg dilaksanakan			6						
Kearsipan									

Jumlah OPD yang melaksanakan tata kelola Arsip yang Baku	jumlah	0	3	9	17	25	34	34	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Urusan Pilihan									
Pariwisata									
Persentase pengembangan sarana prasarana penunjang daya tarik desa wisata maju (%)	Persen		1.23%	16.05%	35.80%	70.37%	100%	100%	Dinas Pariwisata
Persentase usaha jasa yang tersertifikasi (%)	Persen	12.24%	16.33%	20.41%	25.51%	30.61%	35.71%	35.71%	
Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi (orang)	jumlah	411	60	60	60	60	60	711	
Jumlah kelompok pengelola desa wisata maju (kelompok)	jumlah	24	1	1	1	1	1	29	
Cakupan wilayah pemasaran wisatawan nusantara		1	3	3	3	3	4	17	
Jumlah event tematik agenda tahunan (event)		3	3	4	5	6	7	28	
cakupan Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persen	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
<i>Persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja kepada aparatur internal dinas (%)</i>	<i>Persen</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>						
<i>Persentase pegawai yang mendapat fasilitas komputer yang layak (%)</i>	<i>Persen</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>						
<i>Persentase aset penunjang kinerja aparatur yang layak (%)</i>	<i>Persen</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>						

Jumlah kelompok tani yang meningkat kelasnya		N/A	3 poktan	6 poktan	9 poktan	15 poktan	18 poktan	51 poktan	
Jumlah penyuluh pertanian yang meningkat kualifikasinya		N/A	2 penyuluh	4 penyuluh	6 penyuluh	8 penyuluh	10 penyuluh	30 penyuluh	
Produktivitas Tanaman Pangan dan perkebunan Organik									
Persentase pembinaan sosial bidang pertanian	Persen			100%	100%	100%	100%	100%	
Produktivitas Tanaman hortikultura Organik									
Cakupan Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persen	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
Jumlah Populasi Hewan Ternak									
Jumlah produk olahan produk peternakan yang terjual		N/A	2 produk						
Penurunan prevalensi penyakit hewan menular strategis kota Batu	Persen	6%	4%						
Produktivitas perikanan		25,44	27,57						
Angka Konsumsi Ikan		17,028	17,28						
prosentase administrasi perkantoran yang terpenuhi	Persen	85%	85%						
prosentase sarana prasarana aparatur yang terlayani	Persen	11%	11%						

Program Pengembangan Data/ Informasi									
Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah									
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah									
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah									
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH									
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah									
									Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial
Cakupan Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persen	100%							

Cakupan Pelayanan Kehumasan	Persen	100%		100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Hubungan Masyarakat
Persentase Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai	Persen	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
Cakupan Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persen	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
Cakupan Pelayanan Kedinasan, Keprotokolan dan Kerumahtangaan KDH/WKDH	Persen	100%		100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Rumah Tangga
Cakupan Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persen	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
Persentase kegiatan peningkatan kapasitas DPRD yang terlaksana	Persen	86%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Sekretariat DPRD

<i>Terciptanya Kemitraan</i>								
<i>Pengembangan wawasan</i>								
<i>Kebangsaan</i>								
<i>Persentase Masyarakat Peduli Lingkungan</i>								
<i>Terpenuhinya Kebutuhan</i>								
<i>Pelayanan Administrasi</i>								
<i>Perkantoran</i>								
<i>Terwujudnya Peningkatan</i>								
<i>Sarana dan Prasarana Aparatur</i>								
<i>Dalam Menunjang Kinerja</i>								

Persentase Masyarakat Peduli Lingkungan									
Terpenuhinya Kebutuhan									
Pelayanan Administrasi									
Perkantoran									
Terwujudnya Peningkatan									
Sarana dan Prasarana Aparatur									
Dalam Menunjang Kinerja									
Aparatur									
Terwujudnya Peningkatan									
Disiplin Aparatur									
Terciptanya Peningkatan									
Sumberdaya Aparatur									
Pengawasan									
Persentase Desa yang akuntabilitas keuangannya baik	persen	73%	80%	85%	90%	100%	100%	100%	Inspektorat

Persentase rekomendasi pemeriksaan yang ditindaklanjuti	persen	87%	80%	85%	90%	100%	100%	100%
Persentase kasus pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	persen	1,04%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase LAKIP OPD yang berkualitas	persen	34%	50%	75%	100%	100%	100%	100%
Persentase Perlindungan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang dilakukan	Persen	100%		100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persen	100%		100%	100%	100%	100%	100%
<i>Persentase aparatur pengawas yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan</i>	<i>persen</i>		25 Aparatur					
<i>Persentase kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi</i>	<i>persen</i>	65%	100					
<i>Persentase sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi</i>	<i>persen</i>							
<i>Persentase peralatan/ perlengkapan gedung yang terpeliharains</i>	<i>persen</i>		100%					
<i>Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</i>	<i>persen</i>		100%					
Perencanaan								

% usulan program stakeholder yg terakomodir dalam RPJMD dan RKPD	persen	46 program dari 162 program	30%	35%	40%	45%	50%	50%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
% keselarasan dokumen rencana perangkat daerah thdp dokumen rencana pembangunan daerah	persen	187 program dari 196 program	80%	85%	90%	95%	95%	50%	
% keselarasan renstra dan renja terhadap arahan RTRW	persen	NA	70%	80%	90%	90%	95%	95%	
Persentase hasil penelitian/ kajian yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan	persen	31 studi/kajian dari 90 studi/kajian	60%	70%	80%	90%	90%	90%	
Persentase hasil penelitian/ kajian yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan	Persen			63%	63%	63%	63%	63%	
Persentase hasil penelitian/ kajian yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan	Persen			63%	63%	63%	63%	63%	
Cakupan Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persen	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
% ketersediaan data/ informasi perencanaan	persen	785 data terisi dari 798 data tersedia	70%						
% aparatur yang berkemampuan dalam perencanaan pembangunan	persen	NA	80%						

Persentase capaian program pelayanan administrasi perkantoran di Kantor Bappeda Kota Batu									
Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur									
Persentase capaian program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kantor Bappeda Kota Batu		30 orang	30 orang						
Penelitian dan Pengembangan									
Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti dalam perencanaan	Persen	31	54%	63%	72%	81%	81%	81%	
Keuangan									
Persentase potensi PAD yang dikembangkan	Persen			10%	10%	10%	10%	10%	Badan Keuangan Daerah
Persentase pertumbuhan realisasi penerimaan PAD	Persen	28%		7%	7%	7%	7%	7%	
Persentase SKPD dengan realisasi belanja diatas 80%	Persen	68%	75%	80%	85%	90%	95%	95%	
Penetapan APBD	Persen	tepat waktu							
Persentase SKPD yang menyusun laporan pendapatan dan belanja dengan benar dan sesuai SAP	Persen	70%	80%	90%	95%	98%	98%	98%	
Persentase SKPD yang menyusun neraca aset dengan benar dan tepat waktu	Persen	70%	80%	90%	95%	98%	98%	98%	

Cakupan Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persen	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
Persentase pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah		28%	7%						
% data wajib pajak daerah yang tervalidasi		5%	10%						
Persentase penerbitan SP2D dari SPM yang diajukan		99%	100%						
Persentase aset dalam kondisi baik		75%	75%						
% ASN yang menggunakan pakaian dinas sesuai ketentuan			100%						
Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya		80%	83%						
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan									
Persentase pegawai yang telah memenuhi kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan									Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Persentase updating data PNS di Pemerintah Kota Batu									
Persentase kesesuaian Penataan dan Pengembangan Karir Aparatur	Persen			60%	60%	60%	60%	60%	
Cakupan Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persen			100%	100%	100%	100%	100%	

<p>Persentase pegawai yang berkompeten dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya</p>									
<p>Persentase pegawai yang telah memenuhi kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan</p>									
<p>Persentase updating data PNS di Pemerintah Kota Batu</p>									
<p>Persentase pegawai yang berkompeten dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya</p>									



BAB 9

PENUTUP

RPJMD Kota Batu Tahun 2017-2022 merupakan dokumen strategis bagi pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen RPJMD merupakan dokumen yang menerjemahkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota dengan memadukan tahapan pembangunan jangka panjang daerah serta kebijakan pembangunan nasional maupun provinsi. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RPJMD.

RPJMD Tahun 2017-2022 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kota Batu serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2017-2022 dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kota Batu, Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan agar

mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan RPJMD Tahun 2017-2022;

2. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kota Batu, Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD Tahun 2017-2022 dengan sebaik-baiknya;
3. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kota Batu agar menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2017-2022;
4. Seluruh Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa harus mempedomani RPJMD Tahun 2017-2022;

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kota Batu Tahun 2017-2022, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, bertugas untuk melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Batu dalam implementasi RPJMD Tahun 2017-2022.



PEMERINTAH KOTA BATU



Dra. Hj. Dewanti Rumpoko, M.Si
Wali Kota Batu

H. Punjul Santoso, M.M.
Wakil Wali Kota Batu

**Desa Berdaya Kota Berjaya Terwujudnya Kota Batu
Sebagai Sentra Agro Wisata Internasional
Yang Berkarakter, Berdaya Saing dan Sejahtera**

**VISI RPJMD
2018-2022**

0341 - 511611
0341 - 594444

Komplek Perkantoran Terpadu Balai Kota Among Tani
Jalan Panglima Sudirman Nomor 507 Kota Batu

www.batukota.go.id
bappeliitbangda@batukota.go.id

